

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017





PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan tuntunan - Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2017 telah disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2017 disusun sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 sebagai laporan Walikota Dumai kepada DPRD Kota Dumai, menyangkut pelaksanaan tugas - tugas desentralisasi, pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kita merasakan bersama bahwa pembangunan Kota Dumai yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2017 terdapat kemajuan dan keberhasilan dalam rangka memenuhi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi kita terus berharap dan berdoa kepada Allah SWT, pelaksanaan program pembangunan selanjutnya pada masa tahun 2016 – 2021 semakin lebih baik dan lebih mensejahterahkan menuju masyarakat Dumai yang makmur dan madani.

Dumai, Maret 2018

WALIKOTA DUMAI

Drs. H. ZULKIFLI, AS, M. Si

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I **PENDAHULUAN** **I-1**
A. Dasar Hukum I-1
B. Gambaran Umum Daerah I-4
1. Kondisi Geografis I-4
a. Karekteristik Lokasi dan Wilayah I-4
b. Iklim dan Curah Hujan I-5
2. Gambaran Umum Demografis I-6
3. Potensi Unggulan Daerah I-7
4. Kondisi Ekonomi I-8
a. Perkembangan PDRB I-9
b. Pertumbuhan PDRB I-11
c. Pendapatan Perkapita I-13
d. Kemiskinan I-14
5. Perkembangan Investasi I-16
a. Industri I-16
b. Perdagangan I-17
6. Bidang Pendidikan I-19
a. Angka Melek Huruf I-19
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah I-19
c. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK I-20
d. Angka pendidikan yang ditamatkan I-21
e. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK I-22
7. Bidang Kesehatan I-23
a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran I-23
b. Angka Kematian Balita I-24
c. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup I-25
d. Angka Usia Harapan Hidup I-26
e. Presentase Balita Gizi Buruk I-27

BAB II **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2017** **II-1**
A. Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021 ..... II-1
B. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021 ..... II-1
C. Arah Kebijakan Pembangunan II-2
D. Prioritas Belanja Daerah II-8

BAB III	**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**	**III-1**
	A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-1
	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	III-2
	2. Target dan Realisasi Pendapatan	III-2
	3. Permasalahan dan Solusi	III-15
	B. Pengelolaan Belanja Daerah	III-16
	1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-16
	a. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	III-17
	b. Realisasi Belanja Menurut OPD Pemerintah Kota Dumai	III-18
BAB IV	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017**	**IV-1**
	A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**IV-2**
	1. Urusan Wajib Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IV-2
	2. Urusan Wajib Kesehatan.	
	a. Dinas Kesehatan	IV-20
	b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	IV-44
	3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-49
	4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-56
	5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	
	a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	IV-59
	b. Satuan Polisi Pamong Praja	IV-62
	c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV-68
	6. Urusan Wajib Sosial. Dinas Sosial	IV-70
	B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	**IV-76**
	7. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	IV-76
	8. Urusan Wajib Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IV-81
	9. Urusan Wajib Lingkungan Hidup. Kantor Lingkungan Hidup	IV-91
	10. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-94
	11. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana	IV-96
	12. Urusan Wajib Perhubungan Dinas Perhubungan	IV-99
	13. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	IV-104
	14. Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV-109
	15. Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olahraga. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	IV-112
	16. Urusan Wajib Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IV-116

C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan IV-120
17. Urusan Pilihan Pertanian.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian..... IV-120
18. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan
Dinas Perikanan..... V-128
19. Urusan Pilihan Perdagangan.
Perdagangan IV-133
D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang..... IV-136
17. Urusan Pemerintahan.
a. Sekretariat Daerah..... IV-136
b. Sekretariat DPRD IV-155
c. Kecamatan Dumai Timur IV-159
d. Kecamatan Dumai Selatan IV-163
e. Kecamatan Dumai Barat..... IV-178
f. Kecamatan Dumai Kota IV-169
g. Kecamatan Medang Kampai IV-183
h. Kecamatan Bukit Kapur IV-188
i. Kecamatan Sungai Sembilan IV-195
18. Urusan Pengawasan
Inspektorat..... IV-198
19. Urusan Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..... IV-202
20. Urusan Keuangan
a. Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah..... IV-211
b. Badan Pendapatan Daerah..... IV-219
21. Urusan Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan..... IV-224

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2017.. V-1
A. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura..... V-1
B. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.... V-2
C. Tugas Pembantuan Dari Badan Ketahanan Pangan..... V-2

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2017..... VI-1
A. Kerjasama Antar Daerah VI-1
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga VI-6
C. Kerjasama Dengan Luar Negeri VI-20
D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah VI-20
E. Pembinaan Batas Wilayah VI-24
F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana VI-33
G. Pengelolaan Kawasan Khusus VI-35
H. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum VI-35

BAB VII PENUTUP VII-1



BAB I. PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan suatu laporan atas penyelenggaraan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka LKPJ akhir tahun anggaran kepala daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ akhir tahun anggaran Kepala Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). LKPJ akhir tahun anggaran Kepala Daerah mencakup penyelenggaran urusan desentraliasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. LKPJ yang disampaikan oleh pemerintah kota Dumai pada saat ini adalah LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2017.

A. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Akhir Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2018;
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2017.
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 SeriB);

25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 6 Seri A).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

a. Karekteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau, terbentuk pada tanggal 20 April 1999 yang semula merupakan kota Administratif disinkronisasikan berdasarkan tata ruang Kota Dumai dengan luas wilayah 2.046,75 Km^2 dan wilayah perairan seluas 71.393 ha.

Pembentukan Kota Dumai ini ditetapkan dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50. Kota Dumai yang sebelumnya hanya 5 kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 telah terbagi menjadi 7 kecamatan, yaitu :

1) Kecamatan Dumai Timur
2) Kecamatan Dumai Barat
3) Kecamatan Bukit Kapur
4) Kecamatan Dumai Selatan
5) Kecamatan Dumai Kota
6) Kecamatan Sungai Sembilan
7) Kecamatan Medang Kampai

Secara geogafis, Kota Dumai berada pada koordinat 101° 0' 38" - 101° 43' 33" Bujur Timur, 01° 26' 50" - 02° 15' 40" Lintang Utara. Kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar 1.727,38 km^2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat dan Selat Malaka;
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; dan
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi

sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa - rawa atau tanah basah. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0 - 0,5 m dan ketinggian rata - rata berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Diwilayah Kota Dumai terdapat 15 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh kedaerah hulu sungai. Sungai Bulu Hala, Sungai Senepis, Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

b. Iklim dan Curah Hujan

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2016 berkisar antara 75-83%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2016 berkisar antara 21°C-36,8°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan terbanyak selama tahun 2016 terjadi pada bulan Mei sedangkan terkecil terjadi pada bulan Februari dengan nilai berturut-turut sebesar 358,3 mm^3 dan 59,3 mm^3. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 21 hari dan terkecil pada bulan Maret dan Agustus yaitu sebanyak 9 hari. Perkembangan banyaknya hari dan curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2010 sampai 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Tabel 1.1 . Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016

Bulan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
Januari	15	19	13	13	13	13	16
Februari	12	6	11	11	11	11	11
Maret	12	15	11	11	11	11	9
April	13	16	11	11	11	11	17
Mei	17	5	14	14	14	14	15
Juni	13	9	7	7	7	7	15
Juli	17	9	14	14	14	14	13
Agustus	13	8	18	18	18	18	9
September	tad	15	7	7	7	7	13
Oktober	tad	22	17	17	17	17	15
Nopember	tad	26	21	21	21	21	21
Desember	tad	14	24	24	24	24	20
	112	164	168	168	168	168	174

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

Tabel 1.2. Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016

Bulan	Curah Hujan (mm^3)						
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
Januari	144,0	182,3	130,0	130,0	200,0	200,0	121,6
Februari	58,0	29,3	132,0	132,0	150,0	150,0	59,3
Maret	329,0	45,0	198,0	198,0	201,0	201,0	94,0
April	207,0	403,4	261,0	261,0	226,0	226,0	194,2
Mei	330,0	23,3	157,0	157,0	190,0	190,0	358,3
Juni	331,0	77,4	49,0	49,0	160,0	160,0	64,6
Juli	425,0	162,1	203,0	203,0	160,0	160,0	122,4
Agustus	188,0	167,1	499,0	499,0	200,0	200,0	79,7
September	tad	356,3	153,0	153,0	257,0	257,0	171,7
Oktober	tad	260,8	121,0	121,0	290,0	290,0	82,3
Nopember	tad	311,3	313,0	313,0	299,0	299,0	318,0
Desember	tad	230,8	368,0	368,0	258,0	258,0	166,5
	2.012,0	2.249,1	2.584,0	2.584,0	2.591,0	2.591,0	1.832,6

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

Berdasarkan klasifikasi tipe curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson (1951) yang didasarkan atas keadaan banyaknya bulan basah (>100 mm/bulan) dan bulan kering (< 60 mm/bulan), tipe curah hujan di wilayah Dumai digolongkan kedalam tipe curah B (basah), yaitu memiliki 8 bulan basah dan 2 bulan kering. Kota Dumai mempunyai iklim tropis dengan kelembaban udara rata-rata 84,74 %, rata-rata suhu adalah 28^0C (suhu maksimum 34^0C dan suhu minimum $21,5^0$C), rata-rata bulanan penyinaran matahari 44,4 %. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau antara bulan Maret s/d Agustus dan musim hujan bulan September s/d Februari dengan suhu udara rata-rata $24^0 - 33^0$C (*Sumber: Draft RTRW Kota Dumai Tahun 2014-2034*).

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk paling banyak selama periode 2010-2016 terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata tertinggi selama periode 2010-2016 terjadi di Kecamatan Bukit Kapur yaitu sebesar 2,62%. Berikut ini laju pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata Kota Dumai selama tahun 2010 sampai dengan 2016.

Tabel 1. 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)							Pertumbuhan Penduduk tahunan rata-rata (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Bukit Kapur	38.051	40.133	42.082	45.933	42.399	43.403	44.447	2,62
Medang Kampai	10.199	10.611	10.983	11.235	11.240	11.470	11.701	2,32
Sungai Sembilan	27.465	28.767	29.920	32.065	30.475	31.158	31.860	2,50
Dumai Barat	35.785	37.423	38.871	38.068	39.688	40.572	41.479	2,49

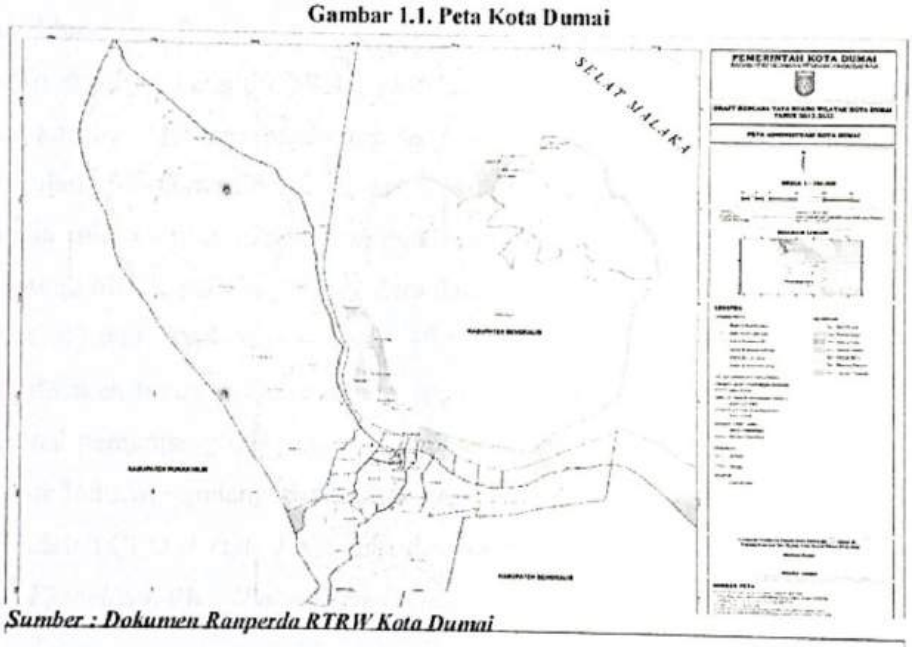
Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)							Pertumbuhan Penduduk tahunan rata-rata (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Dumai Timur	54.854	56.946	58.793	60.482	60.450	61.685	62.932	2,32
Dumai Kota	41.504	41.887	42.122	41.815	45.264	46.063	46.844	2,04
Dumai Selatan	45.945	47.209	48.752	50.429	50.593	51.616	52.645	2,29
Kota Dumai	**253.803**	**262.976**	**271.523**	**280.027**	**280.199**	**285.967**	**291.908**	**2,36**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai

3. Potensi Unggulan Daerah

Kota Dumai yang berhadapan langsung dengan Selat Rupat dan Selat Selat Malaka, berada pada jalur perhubungan laut terpadat sehingga Kota Dumai menjadi salah satu pelabuhan Samudra yang paling strategis dan potensial untuk kegiatan *eksport* dan *import*. Terletak di tengah - tengah intensitas jalur penghubung darat, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat serta penghubung untuk daerah Riau Daratan dan Kota Dumai sebagai penghubung laut yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia khususnya Malaka, Negeri Sembilan dan Singapura, maka Kota Dumai sangat layak menjadi Pusat Perdagangan. Dumai dicanangkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas *(Free Trade Zone)*.

Gambar 1.1. Peta Kota Dumai



Sumber : Dokumen Ranperda RTRW Kota Dumai

Sebagai sebuah kota yang berkembang pesat, Dumai telah dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik seperti sarana tranportasi (jalan raya, pelabuhan dan bandar udara), listrik, perbankkan, layanan telekomunikasi canggih (termasuk telepon seluler dan jaringan internet).

Kota Dumai dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 298.189 jiwa merupakan salah satu Kota Pelabuhan International paling strategis di Provinsi Riau. Sebagai pintu gerbang di pantai timur sumatera, pelabuhan Dumai berperan penting dalam melayani aktifitas *eksport - import* barang

dan penumpang domestik maupun manca negara seperti Malaka - Malaysia. Seiring dengan perkembangan globalisasi, kota Dumai menjadi pelabuhan tersibuk pintu gerbang utama Provinsi Riau. Dengan total area ± 1.000 ha, Kota Dumai mampu menarik investor dari segala belahan dunia dengan persimpangan selat Malaka.

Hal ini disebabkan oleh beberapa lokasi industri Kota Dumai yang kaya akan potensi seperti Kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri ini memiliki beberapa keunggulan sekaligus potensi penarik investasi diantaranya disisi pertanian, perkebunan, kelautan, budaya, pariwisata dan keamanan. Kesemuanya melibatkan masyarakat Dumai sebagai sumber daya yang mampu menaikkan nilai ekonomi Kota Dumai itu sendiri. Secara geografis Pelabuhan Dumai merupakan pelabuhan samudera, terletak pada koordinat 01o - 41' - 14" LU dan 101o - 27' - 42" BT, terlindungi oleh Pulau Rupat sehingga terbebas dari gelombang dan badai, kondisi pasang surut tertinggi ± 346 cm dan terendah ± 36 cm. Pelabuhan Dumai berada di Provinsi Riau - Indonesia, dibangun tahun 1957 dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah wilayah kerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.

Pelabuhan Dumai mempunyai peran yang penting sebagai pintu gerbang perekonomian nasional Indonesia khususnya Provinsi Riau dan Provinsi lainnya di sekitarnya. Hal ini didukung oleh lokasinya yang strategis berada di Selat Malaka dan memiliki potensi *hinterland* pertanian, perkebunan sawit yang luas, pertambangan minyak bumi dan industri. Pelabuhan Dumai memiliki alur pelayaran sepanjang 55 mil terdiri dari 22 mil melalui Selat Bengkalis dan 33 mil melalui Selat Rupat, kelebaran alur minimum 255 meter dan maksimum 1,7 km dengan kedalaman rata - rata 16 meter, dapat dikunjungi oleh kapal - kapal samudera dan antar pulau dengan ukuran maksimum LOA 255 m, 30.000 Grt, 47.000 DWT dengan draft 10,5 m. Pelabuhan Dumai memiliki area seluas 785.161 M_2, dimanfaatkan untuk fasilitas kepelabuhanan (dermaga, perkantoran, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang dll) juga mempunyai area yang disewakan. Umumnya area yang disewakan dibangun Industri, gudang dan tangki penimbunan CPO. Komoditi dominan melalui Pelabuhan Dumai adalah CPO *(Crude Palm Oil)* dan turunannya serta komoditi curah kering yaitu PKE *(Palm Kernel Ekspeller)*, PKS *(Palm Kernel Shell)* serta pupuk.

4. Kondisi Ekonomi

Pengukuran keberhasilan kinerja selama Tahun 2015 secara keseluruhan menggunakan indikator kinerja makro yang merupakan indikator kinerja yang merepresentasikan kinerja Pemerintah Kota Dumai sebagai hasil kontribusi implementasi program dan kegiatan Tahun 2015 dari seluruh unit kerja. Indikator kinerja makro yang digunakan adalah indikator kinerja makro ekonomi dan indikator kinerja makro sosial.

a. Perkembangan PDRB

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2010-2014, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, PDRB Kota Dumai dengan migas ADHK adalah sebesar 20 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHB adalah sebesar 23 triliun rupiah (tabel 1.2 dan tabel 1.3 Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai.

Tabel 1.4. PDRB Kota Dumai 2012-2016 Dasar Harga Konstan 2010

No	Kategori	PDRB ADHK 2010				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.131.619,70	1.119.969,8	1.138.071,4	1.139.967,3	1.152.198,89
B.	Pertambangan & Penggalian	86.416,20	86.479,50	87.258,60	87.421,2	83.885,46
C.	Industri Pengolahan	10.035.476,90	10.414.550,8	11.059.234,35	11.357.155,83	12.069.822,54
D.	Pengadaan Listrik dan Gas.	10.521,20	11.612,14	13.196,96	14.483,65	17.107,96
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	3.341,90	3.363,40	3.428,96	3.523,70	3.517,99
F.	Bangunan	2.117.406,70	2.181.412,10	2.081.314,46	2.119.777,32	2.184.087,17
G.	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasimobil Dan Sepeda Motor	3.652.938,20	3.735.616,9	3.771.270,34	3.776.043,56	3.887.613,26
H.	Transportasi Dan Pergudangan	503.239,10	537.461,38	590.801,20	602.752,39	632.138,13
I.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	123.319,20	134.378,76	146.744,72	150.191,31	154.066,50
J.	Informasi dan Komunikasi	170.547,10	206.134,11	229.294,86	245.697,40	255.850,29
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	397.959,40	471.332,9	285.154,19	265.536,84	265.883,62
L.	Real Estate	83.055,80	86.988,13	90.248,56	94.773,07	96.113,61
M, N	Jasa Perusahaan	831,70	883,50	958,60	1.032,15	1.069,38
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosialwajib	412.484,00	419.717,30	421.465,77	429.988,77	430.683,13
P.	Jasa Pendidikan	78.210,70	82.520,25	89.917,60	94.631,35	95.277,88
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26.531,20	28.650,41	29.384,74	32.305,65	32.586,29
R, S, T, U	Jasa Lainnya	75.946,70	84.596,52	94.630,5	102.020,06	106.501,69
PDRB		**18.242.262,3**	**19.605.667,85**	**20.132.375,72**	**20.516.493,52**	**21.468.403,79**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2017

Tabel 1.5. PDRB Kota Dumai 2012-2016 Dasar Harga Berlaku

No	Kategori	PDRB ADHB 2010				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.247.513,80	1.290.663,15	1.437.574,71	1.551.170,34	1.687.641,38
B.	Pertambangan & Penggalian	90.719,40	93.218,95	108.904,95	120.471,72	121.856,63
C.	Industri Pengolahan	9.345.365,10	10.909.915,76	12.499.495,37	13.521.271,09	15.058.108,05
D.	Pengadaan Listrik dan Gas.	7.674,20	7.555,57	11.694,09	18.026,24	24.522,43
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.520,40	3.454,51	3.653,86	4.044,55	4.293,05
F.	Bangunan	2.337.085,10	2.556.624,71	2.562.176,39	2.869.884,03	3.214.657,79
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.861.649,40	4.014.813,20	4.589.145,67	4.691.523,15	5.000.294,68
H.	Transportasi dan pergudangan	551.241,30	615.012,00	727.106,64	807.615,79	877.796,94
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	126.321,90	162.081,92	220.381,58	235.071,24	260.520,57
J.	Informasi dan komunikasi	173.009,50	198.535,24	234.989,02	270.710,40	294.246,73
K.	Jasa keuangan dan asuransi	462.454,80	578.397,53	366.129,13	355.025,11	365.887,32
L.	Real estate	92.715,10	100.011,55	113.119,61	127.215,13	134.709,46
M, N	Jasa perusahaan	965,10	1.070,51	1.233,74	1.419,08	1.554,95
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	453.573,60	474.552,02	494.473,40	524.615,72	541.616,22
P.	Jasa pendidikan	89.696,00	96.837,53	122.921,41	142.978,73	149.543,32
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	29.852,50	33.349,65	37.775,23	46.880,43	49.787,22
R, S, T, U	Jasa lainnya	83.006,20	95.672,32	117.702,05	142.498,86	158.356,28
PDRB		**18.406.420,8**	**21.231.766,16**	**23.628.466,85**	**25.430.569,61**	**27.945.396,02**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2017

Adapun Struktur ekonomi kota Dumai Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6. Kontribusi Sektoral PDRB 2012-2016

No	Sektor/Sub sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04
B.	Pertambangan & penggalian	0,48	0,44	0,46	0,48	0,44
C.	Industri pengolahan	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88
D.	Pengadaan listrik dan gas.	0,04	0,04	0,05	0,07	0,09
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Bangunan	12,33	12,04	10,84	11,29	11,50
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,91	2,90	3,08	3,18	3,14
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,67	0,76	0,85	0,92	0,93
J.	Informasi dan Komunikasi	0,91	0,94	0,99	1,06	1,05
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,44	2,72	1,55	1,40	1,31
L.	Real Estate	0,49	0,47	0,48	0,50	0,48
M, N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	2,24	2,08	2,07	2,07
P.	Jasa pendidikan	0,47	0,46	0,52	0,56	0,54
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,44	0,45	0,50	0,56	0,57
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2017

b. Pertumbuhan PDRB

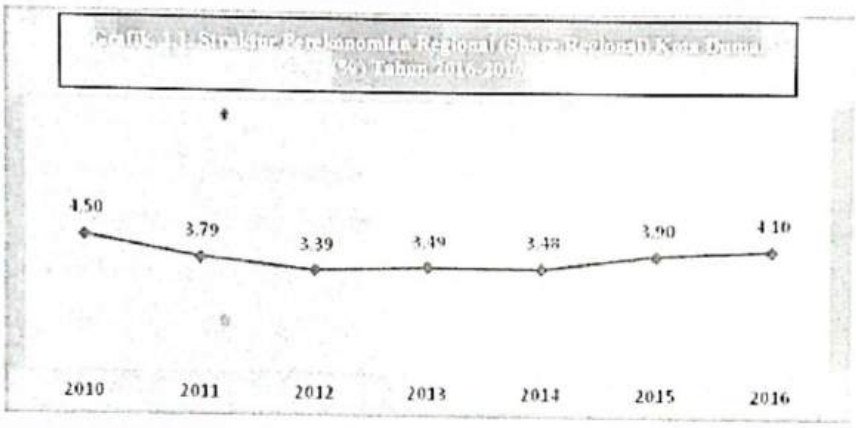
Besaran PDRB Kota Dumai terus meningkat dari tahun ke tahun, namun begitu pertumbuhan ekonomi Kota Dumai Selalu Befluktuasi selama lima tahun terakhir, tabel berikut menyajikan pertumbuhan ekonomi kota Dumai tahun 2012-2016 atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 1.7. Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010

No	Kategori	Pertumbuhan(%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	(0,06)	(1,03)	1,62	0,10	1,14
B.	Pertambangan & penggalian	1,01	0,07	0,90	0,19	(4,04)
C.	Industri pengolahan	2,70	3,78	6,19	2,69	6,28
D.	Pengadaan listrik dan gas.	6,69	10,37	13,65	9,75	18,12
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,87	0,64	1,95	2,76	(0,16)
F.	Bangunan	3,73	3,02	(4,59)	1,85	3,03
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	3,08	2,26	0,95	0,13	2,95

No	Kategori	Pertumbuhan(%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
H.	Transportasi dan pergudangan	10,94	6,80	9,92	2,02	4,88
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	14,20	8,97	9,20	2,35	2,58
J.	Informasi dan komunikasi	17,88	20,87	11,24	7,15	4,13
K.	Jasa keuangan dan asuransi	36,21	18,44	(39,50)	(6,88)	0,13
L.	Real estate	1,59	4,73	3,75	5,01	1,41
M, N	Jasa perusahaan	7,68	6,23	8,50	7,67	3,61
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	2,60	1,75	0,42	2,02	0,16
P.	Jasa pendidikan	4,35	5,51	8,96	5,24	0,68
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	8,60	7,99	2,56	9,94	0,87
R, S, T, U	Jasa lainnya	5,54	11,39	11,86	7,81	4,39
Pertumbuhan ekonomi		**4,52**	**3,68**	**2,69**	**1,19**	**4,64**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2017



Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 kota Dumai selama kurun waktu 2010-2014 cenderung melambat. Pada Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Dumai adalah sebesar 4,52%, tahun 2011 melambat menjadi 4,27% dan tahun 2012 menjadi 3,66%. Pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi membaik menjadi 3,72% namun pada tahun 2014 kembali melambat menjadi 3,53%. Hal ini perlu menjadi perhatian dalampengambilan strategi dan kebijkan terkait perkembangan ekonomi kota Dumai kedepannya.

Berdasarkan hasil perhitungan sektor basis pada sektor PDRB kota Dumai, maka sektor-sektor PDRB kota Dumai tahun 2014 dapat ditipologikan pada:

1. Sektor basis dan unggulan yaitu Industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib; jasa lainnya
2. Sektor non basis prospektif jasa pendidikan

3. Sektor non basis, non prospektif Pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan & penggalian; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan analisa *shift share* dengan metode klasik didapatkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah sektor pengadaan listrik dan gas ; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan
2. Sektor Yang Berkembang Adalah Sektor pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Industri Pengolahan; Bangunan; Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasimobil Dan Sepeda Motor; Transportasi Dan Pergudangan; Jasa Keuangan Dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya
3. Sektor yang cenderung berpotensi adalah sektor pertambangan & penggalian

   Sektor yang tidak mampu berkembang adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib

c. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Tapi kenyataannya PDRB/kapita tidaklah selalu menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB perkapita tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata.

Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Muta'ali (2015) mengatakan bahwa indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan regional, bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai determinasi kemajuan wilayah. Satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan regional, tapi juga tergantung dari banyaknya jumlah penduduk.

Salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah adalah Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya dan membandingkan PDRB perkapita wilayah dengan PDRB perkapita wilayah acuannya. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat

digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Adapun pengklasifikasian wilayah berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen tersaji pada Tabel 1.8 dibawah ini:

Tabel 1.8 Kriteria Tipologi Klassen - Perkembangan Ekonomi Wilayah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	Yi > Y	Yi < Y
ri > r	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
ri < r	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

Sumber: Syafrizal, 1997

Dimana:

ri : laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota i
r : laju pertumbuhan PDRB Provinsi
Yi: PDRB per kapita Kabupaten/Kota i
Y: PDRB per kapita Provinsi

Berdasarkan pengklasifikasian wilayah seperti yang tersaji pada Tabel di atas, pada Tabel di bawah ini tersaji hasil analisis Tipologi Klassen untuk Kota Dumai tahun 2011-2016. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mulai tahun 2015 Kota Dumai masuk dalam kategori wilayah cepat maju dan cepat tumbuh karena memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.9 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2011-2016

Uraian	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB ADHK perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	70,19	70,55	71,53	71,87	71,74	73,55
PDRB ADHK perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	71,64	72,40	72,30	72,39	70,77	70,60
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	4,27	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	5,57	3,76	2,48	2,71	0,22	2,23
Klasifikasi Wilayah	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah berkembang cepat	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

d. Kemiskinan

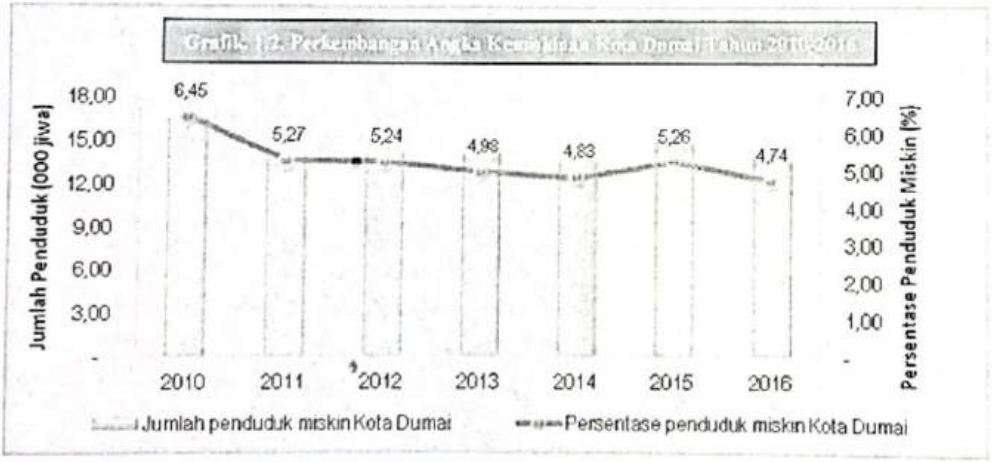
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak

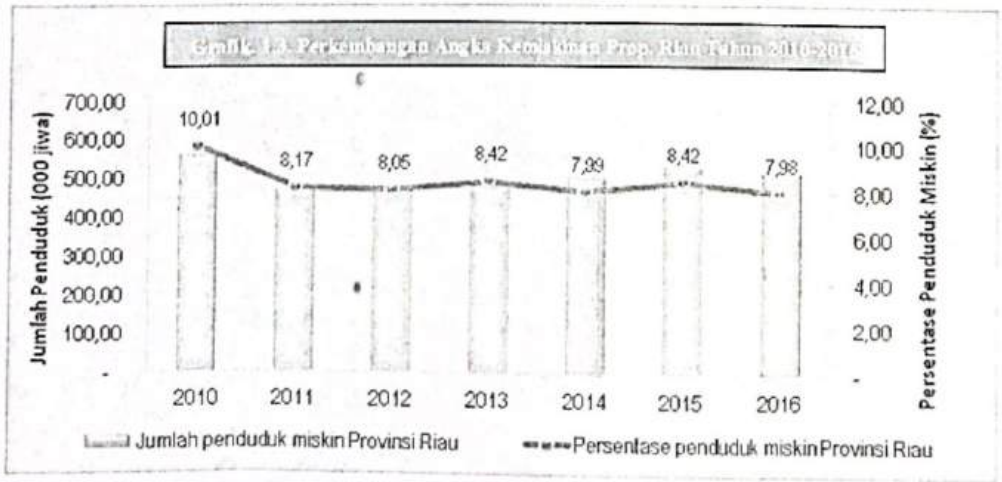
untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan *(poverty line)* untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2010-2016 fluktuatif. Adapun rincian Data dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut:

Tabel 1.10. Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2010-2016 Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata r (% per tahun)
Kota Dumai								
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	287.975	298.127	311.891	328.158	341.525	353.079	369.624	4,34
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	16,50	13,97	14,20	14,11	13,62	14,97	13,76	(2,98)
Persentase penduduk miskin (%)	6,45	5,27	5,24	4,98	4,83	5,26	4,74	(2,48)
Provinsi Riau								
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	301.190	296.379	310.603	350.129	379.223	399.211	426.001	8,22
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	558,00	472,45	481,30	476,46	498,28	531,39	515,40	1,73
Persentase penduduk miskin (%)	10,01	8,17	8,05	8,42	7,99	8,42	7,98	(0,22)

Sumber: Badan Pusat Statistik



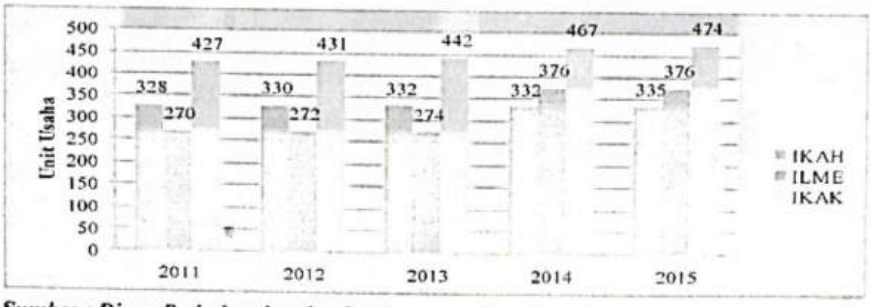


5. Perkembangan Investasi

a. Industri

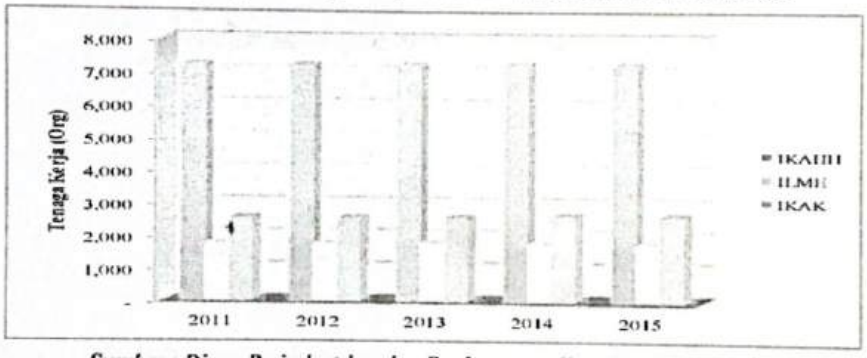
Dari rangkaian Program/ Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2011 - 2014, tujuannya selain menumbuhkan dan mengembangkan industri kecil, juga meningkatkan produktifitas dan daya saing industri kecil itu sendiri melalui peningkatan kwalitas serta diversifikasi produk dengan menggunakan teknologi madya sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan mampu bersaing dipasaran.

Grafik 1.4. Perkembangan Unit Usaha Industri Tahun 2011 s/ d 2015



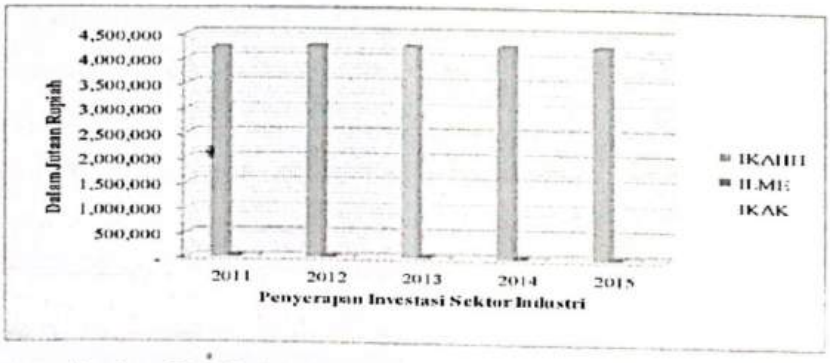
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

Grafik 1. 5. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Tahun 2011 s/ d 2015



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

Grafik 1. 6. Penyerapan Investasi Sektor Indstri 2011 s/ d 2015 Kota Dumai



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

Untuk lebih jelasnya perkembangan sektor industri dirinci menurut Unit Usaha, Nilai Investasi dan penyerapan tenaga kerja sampai dengan akhir tahun 2015 di Kota Dumai dapat dilihat seperti Tabel 1. 11 berikut ini :

Tabel 1. 11. Perkembangan Industri berdasarkan Unit Usaha, Nilai Investasi dan Tenaga Kerja Kota Dumai sampai dengan Tahun 2015

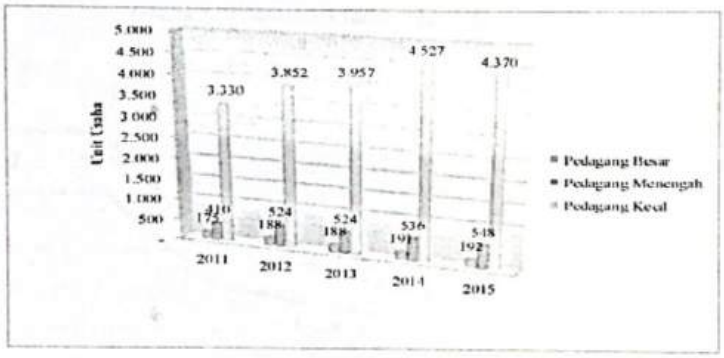
Uraian	Unit Usaha	Nilai Investasi (Jutaan Rp)	Tenaga Kerja (Orang)
Ind. Kimia, Agro dan Hasil Hutan	335	4.248.378	7.259
Ind. Logam, Mesin dan Elektronika	376	26.215	1.771
Ind. Kecil Aneka dan Kerajinan	474	50.601	2.650
Total	**1.185**	**4.325.194**	**7.071**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

b. Perdagangan

Dari rangkaian program/ kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011 - 2015 disektor Perdagangan cukup memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan usaha di Sektor perdagangan di Kota Dumai.

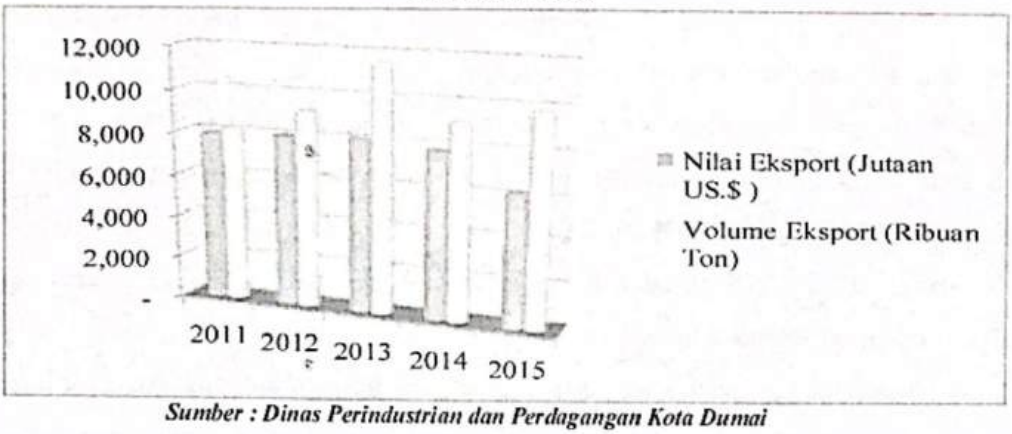
Grafik 1. 7 Perkembangan Unit Usaha Sektor Perdagangan Berdasarkan Kelompok Usaha Kota Dumai Tahun 2011 - 2015



Sejak tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2015 terjadi peningkatan unit usaha perdagangan dari 3.915 unit usaha pada tahun 2011 meningkat menjadi 55.110 unit usaha pada akhir tahun 2015 atau terjadi peningkatan usaha sebanyak 1195 Unit Usaha (30,52%). Jika dilihat dari kelompok usaha, maka 85,22% adalah kelompok Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM).

Selanjutnya melihat kinerja *eksport* Kota Dumai selama tahun 2011 - 2013 trendnya terus meningkat, namun pada tahun 2014 - 2015 menurun bila dilihat dari volume dan nilai *eksport*. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pajak *eksport* serta menurunnya permintaan luar negeri, untuk gambaran kinerja *eksport* kota Dumai dapat dilihat pada ***Grafik 1. 8*** berikut :

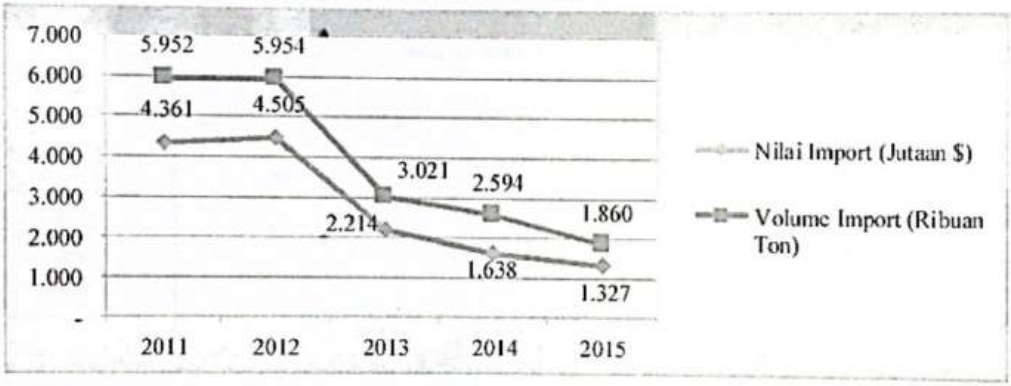
Grafik 1. &Realisasi Ekspor Non Migas Kota Dumai
Tahun 2011 - 2015



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

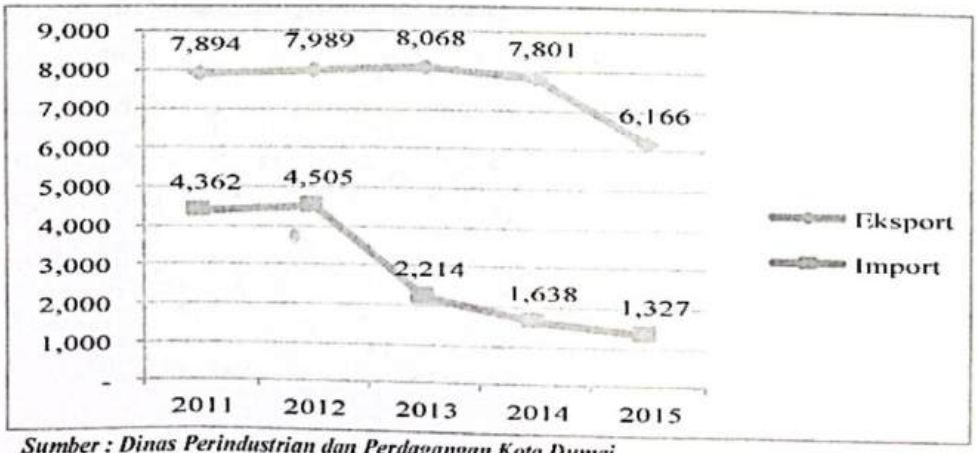
Demikian pula dengan *Import*, dari tahun 2011 samapai dengan akhir tahun 2015 cendrung menurun baik dari segi nilai maupun volume, dan sebagian besar barang *import* di Kota Dumai merupakan barang - barang modal. Untuk mendapat gambaran perkembangan *import* sebagaimana ***Grafik 1. 9*** berikut :

Grafik 1. 9. Realisasi Import Kota Dumai
Tahun 2011 - 2015



Bila diambil perbandingan antara nilai *eksport* dengan nilai *import* dari tahun 2011 sampai akhir 2015, maka *eksport* bersih Kota Dumai (Nilai *eksport* dikurangi nilai *Import*) rata - rata setiap tahunnya terjadi surplus, dan sebagai gambaran dapat dilihat ***Grafik 1. 10*** berikut :

*Grafik 1. 10.*Perbandingan Nilai *Eksport* dan *Import (Jutaan US $)*
Tahun 2011 – 2015 Kota Dumai



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai

6. Bidang Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

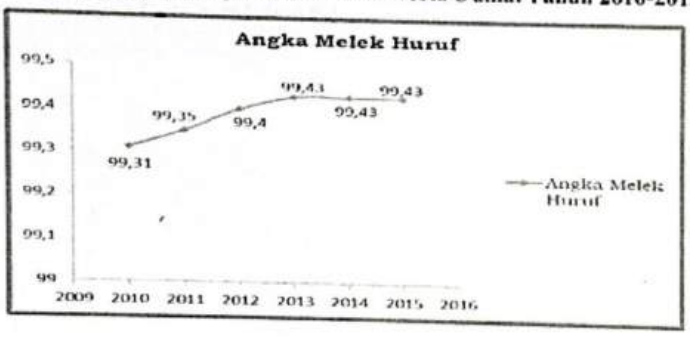
Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia lebih dari 14 tahun yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan tren yang sangat baik. Pada tahun 2010 angka melek huruf sebesar 99,31%, dan pada tahun-tahun berikutnya, selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2013. Angka melek huruf pada tahun 2013-2015 konstan pada angka 99,43%, hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai.

Tabel 1.12. Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2010-2015

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melek Huruf	99.31	99.35	99.40	99.43	99.43	99.43

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

Grafik 1.11. Grafik Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2010-2015

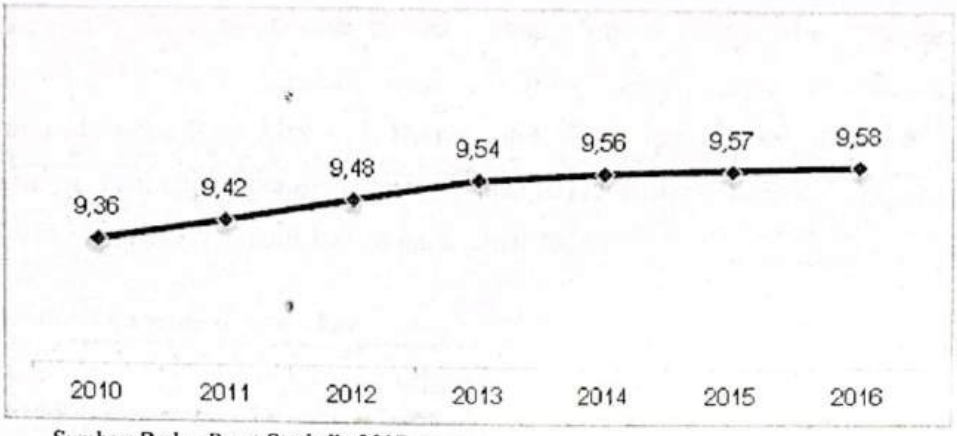


b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: (a) partsipasi sekolah; (b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c) ijasah tertinggi yang dimiliki; (d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

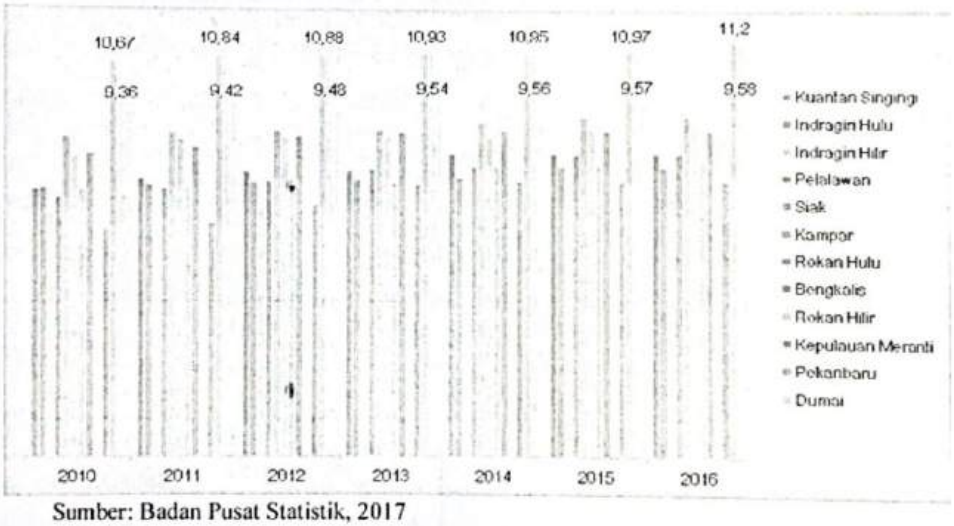
Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2016 terus mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada Grafik 1... dan Grafik 1... Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat kota Dumai terus meningkat dalam membiayai pendidikan mereka. Untuk tingkat Provinsi Riau, angka rata-rata lama sekolah Kota Dumai menempati urutan nomor 2 setelah Kota Pekanbaru.

Grafik 1.12 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Grafik 1.13 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

c. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 1.13 Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Dumai Tahun 2010-2016

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
APK SD/MI	113,80	115,05	>100	>100	107,27	107,20	107,79
APK SMP/MTs	108,38	110,20	>100	>100	89,67	91,58	100,18
APK SMA/SMK/MA	84,22	85,37	75,37	85,68	73,45	78,36	87,97

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2010 hingga tahun 2016 pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA menunjukkan tren perkembangan yang sedikit fluktuatif. Secara umum, pada tahun 2016 APK Kota Dumai untuk semua jenjang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada APK SMP/MTs yaitu dari 91,58 pada tahun 2015 meningkat menjadi 100,18 pada tahun 2016.

d. Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh masyarakat dalam persentase. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu misalnya perguruan tinggi. Semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan secara maksimal di suatu wilayah menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sangat baik. Selain faktor keinginan, faktor kemampuan secara ekonomi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan juga dapat menjadi pendorong tingkat partisipasi masyarakat. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan tersebar serta pilihan yang beragam, merupakan salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat.

Tabel 1.14 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2011-2016

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tdk/Belum Pernah Sekolah	28,10%	NA	NA	32,10%	34,30%	9,38%
Tidak/Belum tamat SD	12,10%			11,00%	10,30%	
SD/MI/Sederajat	17,80%			16,80%	16,20%	30,70%
SLPT/MTs	13,00%			12,20%	12,00%	13,34%
SMA/SMK	23,20%			22,40%	21,90%	36,74%
D I/II	0,70%			0,60%	0,60%	0,85%
AKADEMI/D III	1,80%			1,80%	1,70%	2,54%
S1/Sarjana	3,10%			3,00%	2,90%	6,45%
S2/S3/Pasca Sarjana	0,10%			0,10%	0,10%	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas, secara umum sampai tahun 2016 persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas masyarakat yang berada di Kota Dumai adalah jenjang SMA/SMK. Selama 6 tahun, mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2016, perkembangan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini cukup baik. Pada tahun 2016 sebanyak 36,74% penduduk Kota Dumai menamatkan pendidikan SMA/SMK. Disamping itu jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD atau tidak pernah sekolah sama sekali menurun drastis dari ±45% menjadi 9,38%. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, sebagai jembatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kemungkinan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah daerah,antara lain dengan program pendidikan gratis juga mampu mendorong hal ini.

Dua hal yang patut menjadi perhatian pemeritah Kota Dumai diantaranya: (1) masih ada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dasar atau belum lulus jenjang pendidikan SD; dan (2) masih rendahnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3. Rendahnya persentase lulusan pendidikan tinggi ini bisa disebabkan oleh kurangnya perguruan tinggi yang tersedia di Kota Dumai, juga rendahnya akreditasi perguruan tinggi yang ada sehingga banyak lulusan SMA/SMK/MA yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kota Dumai. Ketersediaan jumlah perguruan tinggi beserta akreditasinya ini juga akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang berpotensi, terampil dan mampu berdaya saing.

e. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang oenddikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

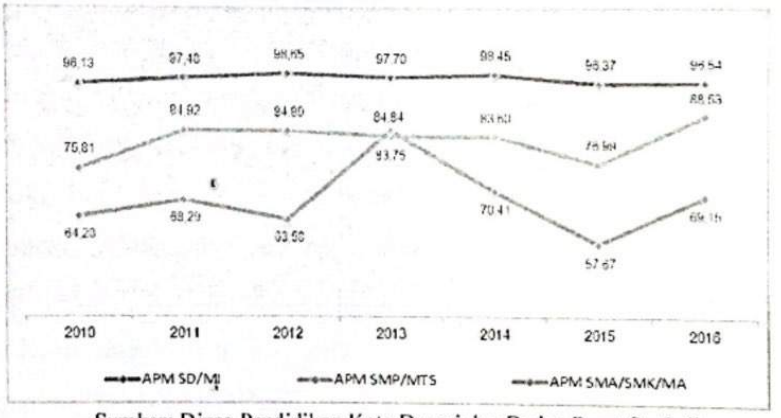
Tabel 1.15 Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2010-2016

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
APM SD/MI	96,13	97,48	98,65	97,70	98,45	96,37	96,54
APM SMP/MTs	75,81	84,92	84,89	83,75	83,60	76,99	88,53
APM SMA/SMK/MA	64,20	68,29	63,58	84,84	70,41	57,67	69,15

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas, tren perkembangan angka partisipasi murni dari tahun 2010 hingga tahun 2016 fluktuatif. Pada tahun 2010, nilai APM SD/MI adalah sebesar 96,13%, kemudian mengalami perkembangan yang fluktuatif sampai tahun 2016 dengan angka partisipasi murni di tahun 2016 sebesar 96,54%. Sama halnya dengan nilai APM SD/MI, APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2010-2016. Secara umum nilai APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2010 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.25 diatas. Disamping itu, diantara ketiga jenjang pendidikan, nilai APM yang terendah ada pada jenjang SMA/SMK/MA. Berfluktuatifnya nilai APM tersebut, terutama untuk jenjang SMA sederajat, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sebaran fasilitas pendidikan yang tidak merata sampai ke pinggiran Kota Dumai sehingga membuat orang tua kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Befluktuatuifnya APM ini juga dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.

Grafik 1.14 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2016



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai dan Badan Pusat Statistik

7. Bidang Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Selama tahun 2010 – 2016 realisasi capaian Angka Kematian Bayi adalah sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Dumai dari tahun 2010 s.d. tahun 2016 menunjukkan

tren perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat seperti yang tersaji pada Grafik 2.20. Pada tahun 2014 angka kematian bayi sudah menurun dari 14,70 di tahun 2013 menjadi 13,08 di tahun 2014, tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 14,09. Kemudian turun kembali di tahun 2016 menjadi 13,73. Adapun Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.

Grafik 1.15 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2010-2016



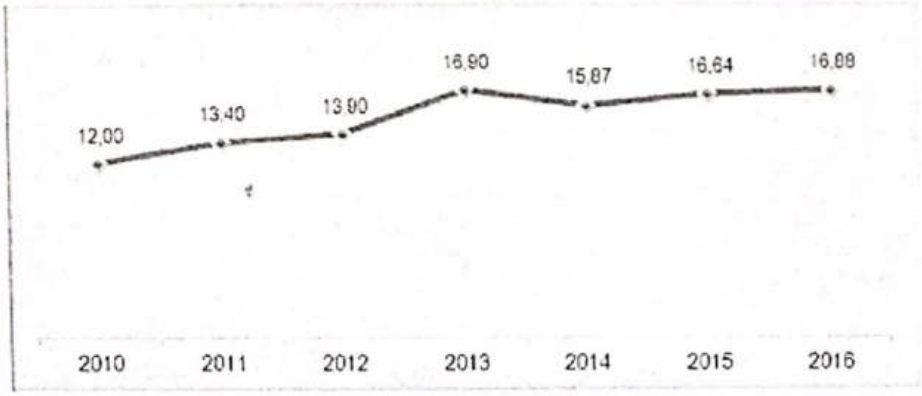
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua.

b. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Selama tahun 2010–2016 realisasi capaian angka kematian balita adalah sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2010 s.d. tahun 2016 menunjukkan kecenderungan meningkat seperti yang tersaji pada Grafik 2.21. Pada tahun 2014 angka kematian balita sudah menurun dari 16,90 di tahun 2013 menjadi 15,87 di tahun 2014, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2015 dan 2016 berturut-turut sebesar 16,64 dan 16,88. Penyebab kematian balita masih didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.

Grafik 1.16 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2010-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

c. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: *eklampsi*, pendarahan, *partus macet*, infeksi, *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, *thypoid* serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklampsi/pre eklampsi. Selama tahun 2010–2016 realisasi capaian angka kematian ibu dapat dilihat pada Grafik 2.22, adapun angka kematian ibu melahirkan di tahun 2016 adalah sebesar 109,32 per 100.000 kelahiran hidup.

Grafik I.17 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2010-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dari data angka kematian bayi dan ibu, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada kedua indikator tersebut. Hal ini terjadi karena data angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Kota Dumai sulit untuk dipantau. Misal, kasus bayi yang sakit atau ibu yang melakukan persalinan di luar Kota Dumai karena tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai kemudian pindah ke Kota Dumai dan menggunakan fasilitas layanan kesehatan di Kota Dumai. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi.

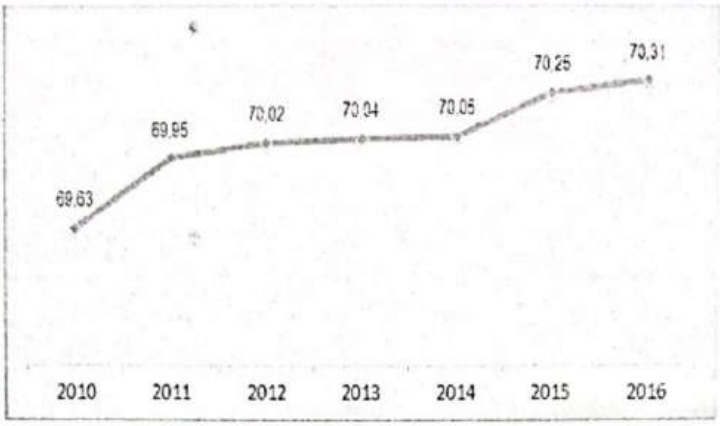
d. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 cenderung meningkat seperti yang tersaji pada Grafik 2.23. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi antara lain dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah. Jika pembangunan sosial ekonomi semakin baik maka kecenderungan Angka Harapan Hidup akan semakin tinggi, dan sebaliknya jika Angka Harapan Hidup lebih rendah mengisyaratkan terjadinya degradasi pada beberapa sektor

pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah bisa diminimalisir melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan.

Grafik 1.18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

e. Presentase Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi.



BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2017

BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Rencana strategis pembangunan Kota Dumai disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 telah dilegalitaskan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2016. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut merupakan dokumen bersifat taktis strategis untuk periode lima Tahun yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah Kota Dumai dalam rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Dumai.

Di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 dijabarkan pernyataan visi, misi, dan program Kepala Daerah serta memuat strategi pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, kebijakan umum, dan program Oraganisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana - rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renstra - OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada Renstra - OPD dan mengacu pada RKPD, selanjutnya setiap OPD menyusun dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD.

A. Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Visi Pembangunan Kota Dumai tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai periode 2016 - 2021 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021"

B. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

1. Misi Pertama :

" Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar"

2. Misi Kedua :

" Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing"

3. Misi Ketiga :

" Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan"

4. Misi Keempat :

" Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan"

5. Misi Kelima :

"Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan"

6. Misi Keenam :

"Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah"

7. Misi Ketujuh :

"Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu"

C. Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan masalah dan tantangan yang dihadapi Kota Dumai, maka disusun Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 yang dijabarkan setiap misi sebagai berikut :

Misi Pertama : '' *Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar''*

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pekerjaan Umum
   a) Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting
   b) Koordinasi lintas stakeholder dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase
   c) Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga
   d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan hydrant umum
   e) Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
   f) Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
   g) Normalisasi sungai dan jaringan drainase
   h) Meningkatkan luas daerah resapan air
   i) Menyediakan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an

2. Urusan Perhubungan
   a) Mengembangkan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi
   b) Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi
   c) Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
   d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan
   e) Meningkatkan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota
3. Urusan Perumahan
   a) Mengembangkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
4. Urusan Lingkungan Hidup
   a) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dan air limbah domestik
   b) Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang seimbang
   c) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
   a) Mengembangkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan
   b) Meningkatkann sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN

Misi Kedua : *" Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing"*

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pendidikan
   a) Penyediaan TK pembina untuk setiap kecamatan.
   b) Penyelengaraan Pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP khususnya sekolah negeri dan penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
   c) Memfasilitasi pendidik untuk meningkatkan kualifikasinya
   d) Mengembangkan sekolah yang terakreditasi dan berstandar nasional
2. Urusan Tenaga Kerja
   a) Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
3. Urusan Pendidikan/Menangani Perpustakaan Daerah
   a) Mengembangkan layanan perpustakaan sampai ke tingkat kelurahan.
4. Urusan Kesehatan
   a) Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat
   b) Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar
   c) Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan

d) Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat

e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah peredaran obat-obatan terlarang dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan

f) Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan

g) Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat dan memelihara mutu institusi pelayanan kesehatan pemerintah melalui paradigma sehat dengan promotif, preventif dan rehabilitatif.

h) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan RSUD yang tidak diskriminatif

5. Urusan Sosial

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, dan perlindungan sosial terhadap PMKS

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan social

6. Urusan Pemberdayaan Perempuan

a) Memberikan pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan

b) Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak

c) Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah

d) Mewujudkan kota Dumai sebagai kota layak anak

e) Meningkatkan sosisalisasi manfaat keluarga berencana

Misi Ketiga : *"Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan"*

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a) Meningkatkan kinerja koperasi aktif sebagai sumber pendanaan UMKM

b) Mengembangkan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan

c) Mengembangkan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan

d) Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar

e) Pemanfaatan dan pengembangan potensi subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Dumai

2. Urusan Sosial

a) Meningkatkan kualitas data jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral

b) Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan

c) Meningkatkan akses dan bantuan usaha bagi keluarga miskin

d) Memberdayakan kelompok usaha keluarga miskin

e) Mengembangkan kegiatan usaha produktif masyarakat miskin

f) Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan dasar

g) Meningkatkan lifeskill keluarga miskin

Misi Keempat : *"Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan "*

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Umum

   a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan public

   b) Penyelesaian tapal batas administrasi kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai serta perbatasan dengan kabupaten Bengkalis dan Rokan hilir

   c) Memantapkan pelayanan publik yang prima.

   d) Menyalurkan aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal

   e) Meningkatkan sistem pelayanan publik ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya.

   f) Pengalokasian Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada setiap Kecamatan

   g) Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

   h) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

   i) Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah

   j) Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan

   k) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya aparatur Sekretariat DPRD

   l) Meningkatkan kualitas penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

   a) Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan

3. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

   a) Peningkatan operasi penyakit masyarakat di Kota Dumai

   b) Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana alam lainnya.

   c) Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana alam lainnya

   d) Meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat

4. Urusan Kepegawaian
   a) Menyediakan acuan kerja dan pedoman teknis dalam sistem kerja profesional untuk setiap jenis dan jenjang aparatur pemerintah daerah
   b) Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
   c) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi manajemen kepegawaian
   d) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi dan kinerja
5. Urusan Perencanaan Pembangunan
   a) Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
   b) Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, applicable dan accountable
   c) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah
   d) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan
6. Urusan Kearsipan
   a) Menerapkan tata kelola arsip daerah sesuai peraturan/Undang-undang kearsipan.
   b) Peningkatan konektifitas jaringan teknologi informasi dalam layanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a) Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan
   b) Meningkatkan peran dan kualitas Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Misi Kelima: *"Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan"*

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pertanian
   a) Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan
   b) Ekstensifikasi/Intensifikasi pertanian dan sektor perikanan
   c) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan
   d) Menyediakan sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian
   e) Memperkuat/meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesmavet, pelayanan, pembinaan, pengawasan pangan dan suveylance penyakit zoonosis

2. Urusan Perikanan dan Kelautan
   a) Meningkatkan promosi dan pemasaran hasil produksi
   b) Meningkatkan mutu produk dan jumlah keragaman

c) Urusan Kehutanan
   a) Merehabilitasi lahan kritis, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

Misi Keenam : *''Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritimian dalam mendukung perekonomian daerah''*

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Perdagangan
   a) Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani pasar lokal dan regional
   b) Penyediaan dan peningkatkan fasilitas pergudangan
   c) Meningkatkan pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangandan jasa
   d) Memperluas networking pelaku usaha perdagangan dan jasa
2. Urusan Perindustrian
   a) Mewujudkan kerjasama dalam pengembangan kawasan industry
   b) Menyusun Rencana induk pengembangan industri daerah
   c) Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan kawasan industri
   d) Penataan kawasan industri
   e) Menyusun Rencana induk pengembangan industri daerah
   f) Meningkatkan daya Saing Industri Kecil dan Menengah
3. Urusan Penanaman Modal
   a) Memantapkan kualitas pelayanan perizinan
   b) Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor
   c) Mengintegrasikan hubungan harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
4. Urusan Tenaga Kerja
   a) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global
   b) Mengintegrasikan Hubungan Harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
   c) Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja

Misi Ketujuh : "*Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu*"

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
   a) Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur
   b) Mengadakan peringatan hari-hari besar keagaamaan
   c) Meningkatkan pembinaan kualitas pembangunan sosial keagamaan
2. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
   a) Pengembangan seni dan tradisi budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
   b) Meningkatkan pembinaan sanggar-sanggar tradisional untuk dikelola secara profesional dan berkelanjutan
   c) Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memeliharan objek-objek yang memiliki nilai sejarah dan budaya
   d) Menyusun masterplan kepariwisataan
   e) Pembenahan pusat informasi kepariwisataan dengan berbasis IT
   f) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan
3. Urusan Pemuda dan Olahraga
   a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
   b) peningkatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda
   c) Pembangunan Gedung Kepemudaan
   d) Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan
   e) Pembangunan GOR
   f) Revitalisasi sarana olahraga
   g) Peningkatkan pembinaan kepada organisasi keolahragaan

D. Prioritas Belanja Daerah.

Dalam proses penetapan prioritas belanja daerah Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2017, Pemerintah Kota Dumai mempedomani muatan RPJMD Kota Dumai tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2017 :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Pemerataan kualitas pendidikan formal dan informal bagi seluruh masyarakat.
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Dumai.
4. Peningkatan nilai investasi dan peran swasta dalam pembangunan serta peluang kerja bagi masyarakat kota dumai.
5. Peningkatan bidang sosial, keagamaan, pariwisata, olahraga dan budaya lokal serta kesetaraan gender.
6. Peningkatan penerapan dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup.
7. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Pengembangan potensi daerah dalam rangka memperkuat struktur perekonomian masyarakat.



BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke Daerah yang semakin besar, kepada Daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan dan Belanja Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga, Pasal 25, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Pendapatan asli Daerah (PAD) ;
b. Dana Perimbangan ;
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Dumai berusaha meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Langkah - langkah intensifikasi yang telah dilaksanakan, antara lain :

a) Melaksanakan sosialisasi / penyuluhan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membuat himbauan melalui media elektronik (TV, moving sign, billboard) maupun melakukan pemanggilan atau peringatan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya secara rutin.
b) Menurunkan Tim untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi guna untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam upaya untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang berlaku.
c) Melakukan penertiban kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah secara rutin / berkala, dengan melibatkan Unit Kerja atau Instansi terkait.
d) Melakukan rapat untuk mengevaluasi target dan realisasi penerimaan daerah dari berbagai jenis-jenis penerimaan, baik dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin / berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali, yang diikuti oleh seluruh unsur pimpinan OPD pengelola PAD.
e) Melakukan pendataan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
f) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan serta sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 1.295.452.128.604,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.184.647.139.864,23 atau 91,45% dari target semula. Untuk lebih jelasnya, Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2017

NO.	URAIAN	TARGET APBD-P TAHUN 2017	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
	PENDAPATAN DAERAH (I+II+III)	**1.295.452.128.604,00**	**1.184.647.139.864,23**	**91,45%**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (A+B+C+D)**	**228.331.050.400,85**	**229.030.944.242,62**	**100,31%**
A	**PAJAK DAERAH**	**93.044.526.897,72**	**94.994.377.648,91**	**102,10%**
1.	Pajak Hotel	3.500.000.000,00	3.596.681.295,50	102,76%
2.	Pajak Restoran	3.750.000.000,00	4.178.485.984,01	111,43%
3.	Pajak Hiburan	650.000.000,00	909.846.165,05	139,98%
4.	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.657.347.947,75	118,38%
5.	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.000.000.000,00	16.979.000.148,00	106,12%
6.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	8.091.270.000,00	9.258.015.780,60	114,42%
7.	Pajak Air Bawah Tanah	2.366.844.000,00	2.621.254.094,00	110,75%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	606.700.000,00	2.985.200,00	0,49%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	47.631.438.397,42	50.418.075.565,00	105,85%
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.206.114.500,30	5.242.795.469,00	63,89%
11.	Pajak Parkir	750.000.000,00	37.500.000,00	5,00%
12.	Pajak Sarang Burung Walet	92.160.000,00	92.390.000,00	100,25%
B	**RETRIBUSI DAERAH**	**40.208.241.844,20**	**35.868.514.170,00**	**89,21%**
1.	Retribusi Izin Gangguan	2.654.814.844,20	2.757.430.993,00	103,87%
2.	Retribusi Pelayanan Pasar	600.000.000,00	561.410.000,00	93,57%
3.	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	2.140.671.000,00	2.224.240.840,00	103,90%
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.000.000,00	427.890.000,00	71,32%
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.350.000.000,00	18.510.000,00	1,37%
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.187.999.000,00	554.755.050,00	46,70%
7.	Retribusi Jasa Usaha Terminal	17.949.586.000,00	18.138.887.500,00	101,05%
8.	Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	344.000.000,00	14.814.000,00	4,31%
9.	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	285.000.000,00	120.802.701,00	42,39%
10.	Retribusi Perizinan Tertentu	12.541.171.000,00	10.521.501.186,00	83,90%
11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	450.000.000,00	414.931.900,00	92,21%
12.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	105.000.000,00	113.340.000,00	107,94%
C	**Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**7.347.426.187,00**	**1.626.568.826,00**	**22,14%**
1.	PT. Bank Riau	1.347.426.187,00	1.347.426.187,00	100,00%
2.	PT. Pembangunan Dumai	5.000.000.000,00	232.388.639,00	4,65%
3.	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	1.000.000.000,00	46.754.000,00	4,68%
D	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	**87.730.855.471,93**	**96.541.483.597,71**	**110,04%**
1.	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	15.950.000,00	18.792.000,00	117,82%
2.	Jasa Giro Kas Daerah	1.285.000.000,00	1.200.517.154,76	93,43%
3.	Jasa Giro Bendahara	82.197.263,00	144.485.539,00	175,78%
4.	Penerimaan Bunga Deposito	3.192.636.986,30	3.415.745.731,37	106,99%
5.	Pendapatan Denda Pajak	305.207.811,00	587.157045,00	192,38%
6.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	625.500,00	225.611.324,00	36068,96%
7.	Pendapatan Denda Retribusi	9.792.900,00	24.411.665,00	249,28%
8.	Pendapatan dari Pengembalian dari Temuan	627.345.989,20	1.092.808.729,34	174,20%
9.	Pendapatan lain-lain	-	999.603.953,00	100,00%
10.	Fasilitas Umum	92.500.000,00	37.500.000,00	40,54%
11.	Pendapatan BLUD RSUD Kota Dumai	70.000.000.000,00	78.085.174.497,50	111,55%
12.	Pendapatan BLUD Puskesmas	12.119.599.022,43	10.709.675.958,74	88,37%
II.	**DANA PERIMBANGAN (A+B+C)**	**855.435.909.105,13**	**755.592.886.590,00**	**88,33%**
A.	**Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	**269.563.719.105,13**	**184.407.972.937,00**	**68,41%**
1.	Bagi Hasil Pajak	57.465.831.928,00	42.924.641.373,00	74,70%

NO.	URAIAN	TARGET APBD-P TAHUN 2017	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	212.097.887.177,3	141.483.331.564,00	66,71%
B.	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**408.643.780.000,00**	**408.643.780.000,00**	**100,00%**
C.	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**177.228.410.000,00**	**162.541.133.653,00**	**91,71%**
1.	DAK Fisik	117.514.352.000,00	107.041.407.132,00	91,09%
2.	DAK Non Fisik	59.714.058.000,00	55.499.726.521,00	92,94%
III.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (A+B+C)**	**211.685.169.098,02**	**200.023.309.031,61**	**94,99%**
A.	**Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya**	**91.258.360.711,17**	**84.630.386.181,00**	**92,74%**
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.717.954.093,64	17.414.332.698,00	88,32%
	• Perkiraan PKB TW. IV (Desember 2017)	1.778.517.283,00	1.778.517.283,00	100,00%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15.738.447.530,41	14.018.603.538,00	89,07%
	• Perkiraan BBNKB TW.IV (Desember 2017)	1.150.775.101,00	1.150.775.101,00	100,00%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	35.519.570.498,16	34.177.999.461,00	96,22%
	• Perkiraan PBBKB TW. IV (Desember 2017)	(82.279.558,00)	-	0,00%
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.989.805.359,44	618.503.864,00	31,08%
	• Perkiraan Pajak AP TW. IV (Desember 2017)	91.059.155,00	91.059.155,00	100,00%
5.	DBH Pajak Rokok	10.830.599.862,52	10.856.683.695,00	100,24%
	• Perkiraan Pajak Rokok TW. IV (Desember 2017)	4.523.911.386,00	4.523.911.386,00	100,00%
B.	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya**	**84.605.008.386,85**	**79.503.402.850,61**	**93,97%**
1.	Alokasi Gaji Guru Bantu	7.296.000.000,00	7.062.000.000,00	96,79%
2.	Alokasi Kesehatan	6.041.008.386,85	1.340.998.000,00	22,20%
3.	Alokasi Pendidikan	31.408.000.000,00	29.698.092.680,00	94,56%
4.	Alokasi PERKIM	11.072.500.000,00	910.645.920,00	8,22%
5.	Alokasi PU & PR	5.787.500.000,00	13.155.326.780,00	227,31%
6.	MTQ	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00%
7.	RSUD	17.000.000.000,00	21.336.339.470,61	125,51%
C.	**Pendapatan Hibah**	**35.821.800.000,00**	**35.889.520.000,00**	**100,19%**
1.	Hibah Dana BOS	35.821.800.000,00	35.889.520.000,00	100,19%
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (I+II+III)	**1.295.452.128.604,00**	**1.184.647.139.864,23**	**91,45%**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2017

Berdasarkan uraian ***Tabel 3.1*** diatas sebagaimana tersebut diatas, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 228.331.050.400,85,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 229.030.944.242,62,- atau 100,31% dari target semula. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

a) Pajak Daerah

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 93.044.526.897,72,- terealisasi sebesar Rp 94.994.377.648,91,- atau 102,10% dari target semula.

Rincian dari pencapaian penerimaan Pajak Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp 3.500.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 3.596.681.295,50,- atau 102,76% dari target semula. Faktor – faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini antara lain :
   - Naiknya tingkat hunian hotel (Room Accoupancy), yang mengakibatkan omzet/ penerimaan hotel meningkat, sehingga besaran jumlah Pajak Hotel yang dibayarkan oleh Pihak Hotel meningkat.
   - Dan Adanya Pemeriksaan Pajak Hotel
2. Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp 3.750.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 4.178.495.984,01,- atau 111,43% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini antara lain ;
   - Hal ini disebabkan karena adanya obyek Pajak Restoran yang baru, dan tingkat penerimaan omset Restoran meningkat
3. Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp 650.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 909.846.165,05,- atau 139,98% dari target semula. Faktor tercapainya target penerimaan ini antara lain :
   - Naiknya penerimaan omset Pajak hiburan
4. Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp 1.400.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 1.657.347.947,75,- atau 118,38% dari target semula, hal ini disebabkan karena :.
   - Tingkat pemasangan reklame/iklan pelaku usaha.
   - Penagihan dilakukan secara terus menerus sehingga mengurangi jumlah tunggakan.
5. Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 16.000.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 16.979.000.148,- atau 106,12% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini , antara lain pembayaran PPJ PLN yang dilakukan oleh Pihak PT. (Persero) PLN Cab. Dumai dilakukan tepat waktu, hal ini disebabkan karena kebijakan yang dilakukan oleh Pihak PT. (Persero) PLN Pusat, bahwa sejak tahun 2012, Pihak PLN telah menerapkan aplikasi tata usaha langganan terpusat yang bernama AP2T, dimana database sudah terpusat untuk seluruh Indonesia, semua pembayaran PPJ telah terpusat dan langsung di transfer ke Kab./Kota di Indonesia, sehingga semua tagihan PPJ, pembayarannya atau penyalurannya ke Kas Umum Daerah dapat dilakukan tepat waktu.

6. Pajak Penerangan Jalan Non PLN ditargetkan sebesar Rp 8.091.270.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 9.258.015.780,60,- atau 114,42% dari target semula. Faktor pendukung tercapainya target penerimaan ini kerena meningkatnya jumlah pemakaian tenaga listrik Non PLN oleh Perusahaan.

7. Pajak Air Bawah Tanah ditargetkan sebesar Rp 2.366.844.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 2.621.254.094,- atau 110,75% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini antara lain :

   - Adanya pemantauan secara langsung kelapangan terhadap pemilik usaha penjualan Air.
   - Penyuluhan dilakukan secara langsung kepada wajib pajak;
   - Tim penagihan secara terus menerus melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.
   - Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 606.700.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 2.985.200,- atau 0,49% dari target semula. Faktor penghambat yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan ini adalah sebagai berikut :

   - Adanya Surat Edaran dari Dirjend Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang perizinan pertambangan mineral dan batuabara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang No, 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya **melarang** Gubernur dan Bupati/Walikota untuk untuk menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) sampai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Mineral dan Batubara, dengan adanya surat edaran ini, maka Pemko Dumai belum bisa menerbitkan izin baru terhadap pengusaha Galian C, yang berimbas pada rendahnya penerimaan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini.

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditargetkan sebesar Rp 47.631.438.397,42,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 50.418.075.565,- atau 105,85% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaaan adalah karena kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB.

10. Bea Perolehan Hak Atas' Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp 8.206.114.500,30,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 5.242.795.469,- atau 63,89% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaaan adalah karena rendahnya tingkat transaksi jual beli tanah di Tahun 2017.

11. Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp 750.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 37.500.000,- atau 5,00% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini karena belum optimalnya pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.

12. Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp 92.160.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 92.390.000,- atau 100,25% dari target semula.

b) Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 40.208.241.844,20,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 35.868.514.170,- atau 89,21% dari target semula. Adapun rincian lebih lanjut mengenaik realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah ini adalah sebagai berikut ;

1. Retribusi Izin Gangguan ditargetkan sebesar Rp 2.654.814.844,20,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 2.757.430.993,- atau 103,87% dari target semula.

2. Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp 600.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 561.410.000,- atau 93,57% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah karena:

   a. Pedagang di sekitaran Jl. Ombak apabila di musim hujan dan pasang keling pada saat penertiban menolak untuk melakukan pembayaran retribusi.

   b. Untuk kios di Pasar Lepin masih banyak yang kosong sejumlah 28 kios karena kurangnya minat masyarakat untuk berjualan di Pasar Lepin.

3. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Daerah ditargetkan sebesar Rp 2.140.671.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 2.224.240.840,- atau 103,82% dari target semula.

   a. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Alat-Alat Berat ditargetkan sebesar Rp 335.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 339.000.000,- atau 101,19% dari target semula.

   b. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Gedung/ Ruangan/ Aula dan Asrama dan Sewa Mess (Kamar Standar AC), ditargetkan sebesar Rp 95.550.000,- dan realisasi pencapainnya sebesar Rp 108.820.000,- atau 113,89%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagi berikut:

- Tidak tercapainya target Sewa Gedung/ Ruangan/ Aula dan Asrama yang dikelola oleh PT. Pembangunan Dumai ditagetkan sebesar Rp 15.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 9.070.000,- atau 60,47%.

  Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target karena:

  - Gedung serba guna yang dikelola oleh PT. Pembangunan Dumai masih belum dapat bersaing dalam hal kompetisi bisnis penyewaan gedung karena keterbatasan fasilitas yang disediakan. Fasilitas yang ada di gedung serba guna saat ini yakni kursi, lisitrik dan air yang harus dibeli.
  - PT. Pembangunan Dumai belum mempunyai *Concrete Pump* dan harus menambah *Mobile Truck Mixer* sebanyak 5 (lima) unit, tergantung dari hasil pendapatan pada tahun berjalan.

- Tercapainya target Sewa Mess (Kamar Standar AC) yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai ditagetkan sebesar Rp 80.550.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 99.750.000,- atau 123,84%. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena naiknya tingkat hunian mess Pemko Dumai di pekanbaru

c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Pelayanan Bandar Udara ditargetkan sebesar Rp 1.355.721.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.440.560.840,- atau 106,26% dari target semula.

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Workshop Konveksi ditargetkan sebesar Rp 14.400.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.200.000,- atau 8,33% dari target semula Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini adalah:

   - Belum adanya minat IKM Konveksi untuk menyewa workshop konveksi dikarenakan:
     - Terbatasnya modal usaha
     - Mahalnya upah tenaga kerja sehingga menyulitkan IKM untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang konveksi
     - Letak UPT BLI yang cukup jauh dari pusat kota
     - Sebagian alat rusak

e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air ditargetkan sebesar Rp 310.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 317.780.000,- atau 102,51% dari target semula. Faktor pendorong tercapainya target penerimaan ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan ditargetkan sebesar Rp 30.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 18.080.000,- atau 60,27% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini antara lain :

- Pemotongan ternak belum seluruhnya dilakukan di Rumah Potong Hewan di Bagan Besar.
- Harga sapi yang masih tinggi

4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditargetkan sebesar Rp 600.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 427.890.000,- atau 71,32% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini antara lain :

a. Retribusi pelayanan Persampahan/ Kebersihan pembayarannya dilakukan sekali setahun, sehingga masyarakat/ toko akan membayar retribusi menjelang akhir tahun

b. Beberapa obyek retribusi tidak bersedia membayar retribusi karena sampahnya dikelola atau dibuang sendiri

c. Belum diterapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda No. 09 Tahun 2012

d. Masih kurangnya sarana dan prasarana operasional, seperti kontainer dan truk sampah karena ada yang mengalami kerusakan.

e. Objek pajak tidak bertambah dan wajib retribusi ada yang sudah tutup.

5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp 1.350.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 18.510.000,- atau 1,37% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah:

a. Belum optimalnya pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp 1.187.999.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 554.755.050,- atau 46,70% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan antar lain disebabkan:

a. Masyarakat luas belum ada kesadaran untuk andil dalam melakukan uji emisi kendaraan penumpang yang tidak dijasakan dan sepeda motor.

b. Tingkat kesadaran pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus Uji KIR.

c. Dinas Perhubungan dan SAMSAT Kota Dumai belum mempunyai kerjasama yang kongkrit seperti penundaan perpanjangan STNK apabila wajib pajak belum melakukan Uji Emisi Gas Buang Kendaraannya.

d. Belum adanya sanksi hukum atau penindakan hukum di jalan tentang Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Khusunya Uji Emisi Gas Buang Kendaraan yang tidak dijasakan.

e. Kondisi Peralatan Uji yang tidak baik sehingga menyulitkan untuk melakukan implementasi Emisi Gas Buang Kendaraan dengan cara jemput bola ke pemilik kendaraan.

7. Retribusi Jasa Usaha Terminal ditargetkan sebesar Rp 17.949.586.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 18.138.887.500,- atau 101,05% dari target semula. Retribusi Jasa Usaha Terminal ini meliputi:

   a. Terminal Penumpang tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi pencapaian sebesar Rp 610.000,- atau 100%.

   b. Terminal Barang target sebesar Rp 17.825.786.000,- dan realisasi sebesar Rp 18.014.377.500,- atau 101,06%.

   c. Pemakaian Tempat Usaha Terminal Barang target sebesar Rp 105.550.000,- dan realisasi sebesar Rp 123.900.00,- atau 117,39%.

   d. Retribusi Terminal Oplet target sebesar Rp 18.250.000,- dan realisasi sebesar Rp 0,- atau 0,00%.

8. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp 344.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 14.814.000,- atau 4,31% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan karena :

   a. Belum tercapainya target dari Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, hal ini dikarenakan tempat khusus parkir RSUD Kota Dumai, Ramayana, Bukit Gelanggang, Pelabuhan Penumpang Roro dan Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan belum mencapai target.

9. Retribusi Jasa Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp 285.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 120.802.701,- atau 42,39% dari target semula. Retribusi Jasa Kepelabuhan ini meliputi :

   a. Jasa Tiket Penumpang (Perusahaan Pelayaran) target sebesar Rp 200.000.000,- realisasi sebesar Rp 120.201.600,- atau 60,10%

   b. Jasa Dermaga target sebesar Rp 85.000.000,- realisasi sebesar Rp 601.101,- atau 0,71%

Faktor pedorong tidak tercapainya target penerimaan ini adalah :

- Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat menggunakan transportasi penyebrangan (roro)
- Dinas Perhubungan telah membuat kontrak dengan CV. Mundam Sejahtera dalam pengelolaan dermaga untuk meminta rekomendasi izin dari KSOP, namun tidak mendapat izin tersebut.
- Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 bahwa jasa labuh disetor ke kas negara melalui KSOP

10. Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp 12.541.171.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 10.521.501.186,- atau 83,90% dari target semula.
    a. Retribusi Izin Trayek ditargetkan sebesar Rp 2.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 760.000,- atau 38% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah menurunnya tingkat pengurusan izin angkutan kota.
    b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditargetkan sebesar Rp 12.529.221.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 10.513.341.186,- atau 83,91% dari target semula.
    c. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ditargetkan sebesar Rp 9.950.000,- realisasi pencapaiannya Rp 7.400.000,- atau sebesar 74,37%.
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp 450.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 414.931.900,- atau 92,21% dari target semula.
    a. Retribusi Pabrik Es Balok ditargetkan sebesar Rp 370.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 371.835.000,- atau 100,50% dari target semula.
    b. Retribusi Bibit Ikan, Benih Ikan ditargetkan sebesar Rp 80.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 43.096.900,- atau 53,87% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah akibat perubahan musim sehingga pembibitan/ benih ikan tidak berhasil dan Pengadaan Pakan Ikan untuk induk ikan masih belum memenuhi kadar gizi yang baik untuk menghasilkan bibit ikan yang baik dan berkualitas.
12. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ditargetkan sebesar Rp 105.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 113.340.000,- atau 107,94% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalahsebagai berikut:

- Tidak atau belum adanya pembangunan pabrik yang baru, sehingga banyak tenaga kerja asing yang hanya bersifat sementara.
- Tenaga Kerja Asing yang bersifat menetap atau permanent dari data tahun 2017 hanya sebanyak 9 (sembilan) orang dari 4 Perusahaan, yaitu sebagai berikut:
  - PT. Kuala Lumpur Kelong sebanyak 1 (satu) orang dengan jangka waktu 12 bulan.
  - PT. Kreasi Jaya Adhi Karya sebanyak 1 (satu) orang dengan jangka waktu 12 bulan.
  - PT. Pasific Indopalm Industries sebanyak 5 (lima) orang dengan jangka waktu 12 bulan.
  - PT. Intibenua Perkasatama sebanyak 2 (dua) orang dengan jangka waktu 12 bulan.

  Dari data di atas, masa berlaku IMTA habis pada bulan September, Oktober dan Desember 2017. Dan untuk PT. Paramitha Bangun Sarana telah habis kontrak kerja pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit.

c) Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp 7.347.426.187,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.626.568.826,- atau 22,14% dari target semula. Perincian lebih lanjut realisasi dari Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah :

1. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank Riau ditargetkan sebesar Rp 1.347.426.187,- dan realisasai pencapaian sebesar Rp 1.347.426.187,- atau 100% dari target semula.
2. PT. Pembangunan Dumai ditargetkan sebesar Rp 5.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 232.388.639,- atau 4,65 % dari target semula.
3. PT. Pelabuhan Dumai Berseri ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 46.754.000,- atau 4,68 % dari target semula.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp 87.730.855.471,93,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 96.541.483.597,71 atau 110,04% dari target semula.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 855.435.909.105,13,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 755.592.886.590,- atau 88,33% pada Pendapatan Daerah 2017. Penerimaan terdiri dari :

a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp 269.563.719.105,13,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 184.407.972.937,- atau 68,41% dari target semula. Dana ini terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp 57.465.831.928,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 42.924.641.373,- atau 74,70% dari target semula.
2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam ditargetkan sebesar Rp 212.097.887.177,13,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 141.483.331.564,- atau 66,71% dari target semula.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp 408.643.780.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 408.643.780.000,- atau 100,00% dari target semula.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp 177.228.410.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 162.541.133.653,- atau 91,71% dari target semula.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat adalah :

- Tidak tersalurnya Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat sesuai yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 86 tahun 2017.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar Rp 211.685.169.098,02,- terealisasi sebesar Rp 200.023.309.031,61 atau 94,49%. Penerimaan ini terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintahan lainnya

Dana ini ditargetkan sebesar Rp 91.258.360.711,17,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 84.630.386.181,- atau 92,74%. Adapun realisasi tersebut terdiri dari :

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan sebesar Rp 19.717.954.093,64,- dan realisasi sebesar Rp 17.414.332.698,- atau 88,32%. Dan Perhitungan PKB TW. IV (Desember) Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.778.517.283,- dan realisasi Rp 1.778.517.283,- atau 100%.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp 15.738.447.530,41 dan realisasi sebesar Rp 14.018.603.538 atau 89,07%. Dan Perkiraan BBNKB TW. IV (Desember) Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.150.775.101,- dan realisasi sebesar Rp 1.150.775.101,- atau 100%.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan sebesar Rp 35.519.570.498,16 dan realisasi sebesar Rp 34.177.999.461,- atau 96,22%. Dan Perkiraan PBBKB TW. IV (Desember) Tahun 2017 ditargetkan mengalami pengurangan sebesar Rp 82.279.558,-.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ditargetkan sebesar Rp 1.989.805.359,44 dan realisasi pencapaian sebesar Rp 618.503.864,- atau 31,08%. Dan Perkiraan AP TW. IV (Desember) Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 91.059.155,- dan realisasi sebesar Rp 91.059.155,- atau 100%.

5) Dana Bagi Hasil Pajak Rokok ditargetkan sebesar Rp 10.830.599.862,52,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 10.856.683.695,- atau 100,24%. Dan Perkiraan Bagi Hasil Pajak Rokok TW. IV Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 4.523.911.386,- dan realisasi sebesar Rp 4.523.911.386,- atau 100%.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah tidak disalurkannya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Triwulan IV Desember Tahun 2017.

b) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp 84.605.008.386,85 dan realisasi sebesar Rp 79.503.402.850,61 atau 93,97% yang terdiri dari :

1) Alokasi Gaji Guru Bantu, ditargetkan sebesar Rp 7.296.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 7.062.000.000,- atau 96,79%.

2) Alokasi Kesehatan, ditargetkan sebesar Rp 6.041.008.386,85,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.340.998.000,- atau 22,20%.

3) Alokasi Pendidikan, ditargetkan sebesar Rp 31.408.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 29.698.092.680,- atau 94,56%.

4) Alokasi PERKIM, ditargetkan sebesar Rp 11.072.500.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 910.645.920,- atau 8,22%.

5) Alokasi PU&PR, ditargetkan sebesar Rp 5.787.500.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 13.155.326.780,- atau 227,31%.

6) MTQ, ditargetkan sebesar Rp 6.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 6.000.000.000,- atau 100%.

7) RSUD, ditargetkan sebesar Rp 17.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 21.336.339.470,61,- atau 125,51%.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi adalah dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan oleh OPD Teknis dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2017.

c) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah berupa Hibah Dana BOS ditargetkan sebesar Rp 35.821.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 35.889.520.000,- atau 100,19%.

3. Permasalahan dan Solusi

Situasi perekonomian saat ini masih dalam kondisi yang kurang menguntungkan, dimana berbagai krisis masih tetap berlangsung menimbulkan dampak terhadap tingkat ekonomi masyarakat. Disisi lain perekonomian yang menurun tadi menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Adapun **permasalahan** yang ada, antara lain :

a. Letak dan tofografi Wilayah Kota Dumai serta lokasi potensi berjauhan atau berpencar-pencar, sehingga menyulitkan dalam hal pendataan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
b. Kemampuan masyarakat terhadap pembayaran Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah, sebagai akumulasi dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
c. Terbatasnya jasa pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah, sehingga menyulitkan bagi petugas untuk menagih Retribusi Daerah.
d. Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan PBB sering pindah alamat tampa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai serta status kepemilikan obyek yang tidak jelas, sehingga keakuratan data dan penyampaian Surat Ketetapan serta penagihan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sering mengalami kesulitan.
e. Pengisian SPOP PBB maupun mengenai data subyek dan obyek Pajak Daerah dan Retribusi daerah belum sepenuhnya jujur dan benar, sehingga Surat Ketetapan yang diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya dari Wajib Pajak tersebut.
f. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar PBB dan Pajak/Retribusi Daerah dirasa masih kurang dan sering atau cenderung menghindar terhadap kewajibannya.

g. Adanya berbagai jenis pungutan yang illegal, sehingga memberatkan bagi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun **solusi** yang diusulkan yaitu :

a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :
   1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi Pendapatan Daerah;
   2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada, melalui :
      - Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;
      - Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.
   3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan system pelayanan minimal.
c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;
d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.
e. Ekstensifikasi pendapatan daerah berdasarkan potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Kota Dumai, disamping mengkaji peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam pemungutan pendapatan daerah agar target yang ditetapkan dicapai dengan optimal.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka

menengah dan rencana jangka panjang. Disamping itu juga untuk menerapkan kesepakatan antara DPRD Kota Dumai dan Pemerintah Daerah Kota Dumai terhadap prioritas yang perlu dicapai dan ditingkatkan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2017 yang kemudian dibahas kembali dengan penyesuaian terhadap isu strategis yang berkembang, kemudian untuk dapat menjadi kegiatan dengan urutan prioritas, maka harus ditetapkan Strategis dan Prioritas Belanja Daerah. Strategis dan Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diperlukan dalam rangka merumuskan langkah-langkah dalam mencapai arah dan Kebijakan Umum APBD. Mengingat kapasitas sumber daya yang dimiliki masih terbatas, sehingga diperlukan adanya penentuan strategi dan pemilihan prioritas dalam upaya pencapaian arah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja

b. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.280.663.488.811,46 dengan realisasi sebesar Rp. 1.167.815.041.973,93 atau 91,19 %. Pelaporan realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2017 berdasarkan penghitungan sementara atau ***un audit*** dari bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Tabel 3. 2
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2017

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
2	**Belanja**	1.280.663.488.811,46	1.167.815.041.973,93	(112.848.446.837,53)	91,19
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	503.322.728.116,67	475.375.211.298,00	(27.947.516.818,67)	94,45
2.1.1	Belanja Pegawai	486.664.738.836,67	462.009.896.218,00	(24.654.842.618,67)	94,93
2.1.3	Belanja Subsidi	2.442.720.000,00	2.442.348.000,00	(372.000,00)	99,98
2.1.4	Belanja Hibah	8.290.000.000,00	7.645.200.000,00	(644.800.000,00)	92,22
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.772.500.000,00	1.032.500.000,00	(1.740.000.000,00)	37,24
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	2.652.769.280,00	2.245.267.080,00	(407.502.200,00)	84,64
2.1.8	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	0,00
2.2	**Belanja Langsung**	777.340.760.694,79	692.439.830.675,93	(94.900.930.018,86)	89,08
2.2.1	Belanja Pegawai	163.189.813.817,00	145.217.963.204,00	(17.971.850.613,00)	88,99
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	325.840.166.860,00	282.971.940.732,10	(42.868.226.127,90)	86,84
2.2.3	Belanja Modal	288.310.780.017,79	264.249.926.739,83	(24.060.853.277,96)	91,65

Sumber : Data Un Audit (per tanggal 07/02/ 2018) Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kota Dumai

Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2017 tersebut terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Adapun anggaran belanja tidak langsung kota dumai pada tahun 2017 sebesar Rp. 503.322.728.116,67 dengan realisasi sebesar Rp. 475.375.211.298,00 atau 94,45% yang dialokasikan melalui :

1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 486.664.738.836,67,00 dengan realisasi sebesar Rp. 462.009.896.218,00 atau 94,93 %.
2) Belanja Subsidi sebesar Rp. 2,442,720,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 2,442,348,000.00 atau 99.98%
3) Belanja Hibah sebesar Rp. 8,290,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 7,645,200,000.00 atau 92.22 %.
4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2,772,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,032,500,000.00 atau 37.24%
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Rp. 2,652,769,280.00 dengan realisasi sebesar Rp. 2,245,267,080.00 atau 84.64 %.
6) Belanja Tak Terduga Rp. 500.000.000,00 dengan realisasi sebesar 0,00 atau 0,00%.

2) Belanja Langsung

Adapun anggaran Belanja Langsung Kota Dumai pada tahun 2017 sebesar Rp. **777,340,760,694.79** dengan realisasi sebesar Rp. **692,439,830,675.93** atau **89.08%** yang dialokasikan melalui :

1) Belanja Pegawai Rp. 163,189,813,817.00 dengan realisasi sebesar Rp. 145,217,963,204.00 atau 88.99%.
2) Belanja Barang Dan Jasa Rp. 325,840,166,860.00 dengan realisasi sebesar Rp. 282,971,940,732.10 atau 86.84 %.
3) Belanja Modal Rp. 288,310,780,017.79 dengan realisasi sebesar Rp. 264,249,926,739.83 atau 91.65%.

c. Realisasi Belanja Menurut OPD Pemerintah Kota Dumai.

Adapun realisasi belanja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017, baik jenis Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dapat terlihat pada ***Tabel 3. 3*** berikut ini.

Tabel. 3.3. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017

NO	NAMA OPD KOTA DUMAI	BELANJA		CAPAIAN
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**			
	- Belanja Tidak Langsung	234.664.886.671,00	224.978.939.012,00	95,87%
	- Belanja Langsung	153.792.469.032,00	110.244.248.968,00	71,68%
2	**Dinas Kesehatan**			
	- Belanja Tidak Langsung	33.448.133.040,00	32.806.798.287,00	96,58%
	- Belanja Langsung	62.708.856.475,00	57.684.869.095,33	91,98%

NO	NAMA OPD KOTA DUMAI	BELANJA		CAPAIAN
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
3	**Dinas Perhubungan**			
	- Belanja Tidak Langsung	10.121.729.400,00	9.310.932.367,00	91,98%
	- Belanja Langsung	17.950.531.590,00	17.622.533.159,00	98,17%
4	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
	- Belanja Tidak Langsung	8.398.698.310,00	7.946.096.877,00	92,99%
	- Belanja Langsung	143.696.540.197,00	133.487.163.411,00	92,90%
5	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
	- Belanja Tidak Langsung	2.554.098.920,00	2.374.552.448,00	92,97%
	- Belanja Langsung	28.565.889.896,94	25.839.546.381,00	90,46%
6	**Dinas Pendapatan**			
	- Belanja Tidak Langsung	11.663.186.681,67	11.193.453.454,00	95,97%
	- Belanja Langsung	10.971.995.713,00	9.402.197.211,00	85,69%
7	**Dinas Sosial**			
	- Belanja Tidak Langsung	2.344.917.060,00	2.047.992.781,00	87,34%
	- Belanja Langsung	4.265.586.736,00	3.706.086.455,00	86,88%
8	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
	- Belanja Tidak Langsung	3.396.771.220,00	3.256.952.798,00	95,88 %
	- Belanja Langsung	4.836.209.680,00	4.788.104.798,00	99,00 %
9	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**			
	- Belanja Tidak Langsung	2.972.993.460,00	2.828.508.479,00	95,14 %
	- Belanja Langsung	2.560.200.000,00	2.395.853.230,00	93,58 %
10	**Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata**			
	- Belanja Tidak Langsung	3.511.328.880,00	3.288.151.529,00	93,64 %
	- Belanja Langsung	4.547.346.298,00	4.407.343.908,00	96,92 %
11	**Dinas Perikanan**			
	- Belanja Tidak Langsung	3.405.925.860,00	3.162.161.874,00	92,84 %
	- Belanja Langsung	2.953.706.050,00	2.933.521.850,00	99,31 %
12	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**			
	- Belanja Tidak Langsung	7.492.996.460,00	7.151.997.750,00	95,44 %
	- Belanja Langsung	7.748.409.350,00	7.657.836.181,00	98,83 %
13	**Dinas Perdagangan**			
	- Belanja Tidak Langsung	4.514.928.300,00	4.283.597.092,00	94,87 %
	- Belanja Langsung	3.931.225.100,00	3.752.154.270,00	95,44 %
14	**Dinas Perindustrian, Koperasi , UKM**			
	- Belanja Tidak Langsung	3.716.423.920,00	3.569.640.982,00	96,05 %
	- Belanja Langsung	3.459.084.630,00	3.186.616.554,00	92,12 %
15	**Inspektorat**			
	- Belanja Tidak Langsung	5.228.213.514,00	4.770.276.816,00	91,24 %
	- Belanja Langsung	3.519.684.000,00	3.154.040.291,00	89,61 %
16	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**			
	- Belanja Tidak Langsung	3.530.454.770,00	3.356.870.497,00	95,08 %
	- Belanja Langsung	7.884.190.805,00	6.953.217.635,00	88,19 %
17	**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**			
	- Belanja Tidak Langsung	2.722.456.160,00	2.452.291.456,00	90,08 %
	- Belanja Langsung	5.270.536.000,00	4.998.873.770,00	94,85 %
18	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**			
	- Belanja Tidak Langsung	3.417.650.900,00	3.281.838.632,00	96,03 %
	- Belanja Langsung	2.212.950.000,00	1.772.816.717,00	80,11 %
19	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
	- Belanja Tidak Langsung	3.151.762.040,00	3.025.302.456,00	95,99 %
	- Belanja Langsung	3.698.971.147,00	3.600.406.762,00	97,34 %
20	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**			
	- Belanja Tidak Langsung	5.360.175.240,00	5.091.454.873,00	94,99 %
	- Belanja Langsung	5.214.250.000,00	5.075.933.613,00	97,35 %
21	**Sekretariat DPRD**			
	- Belanja Tidak Langsung	4.414.765.820,00	4.097.977.402,00	92,82 %
	- Belanja Langsung	23.047.509.000,00	18.756.548.611,00	81,38 %
22	**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**			
	- Belanja Tidak Langsung	27.641.881.580,00	26.380.286.894,00	95,44 %
	- Belanja Langsung	155.168.432.492,85	153.436.001.799,60	98,88 %

NO	NAMA OPD KOTA DUMAI	BELANJA		CAPAIAN
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
23	**Ktr. Satuan Polisi Pamong Praja**			
	- Belanja Tidak Langsung	5.318.308.260,00	5.069.294.877,00	95,32 %
	- Belanja Langsung	3.240.816.000,00	3.182.548.823,00	98,20 %
24	**Dinas Lingkungan Hidup**			
	- Belanja Tidak Langsung	4.134.685.780,00	3.813.125.347,00	92,22 %
	- Belanja Langsung	14.423.270.271,00	14.033.744.910,00	97,29 %
25	**Ktr. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**			
	- Belanja Tidak Langsung	1.097.244.480,00	972.070.170,00	88,59%
	- Belanja Langsung	3.608.910.200,00	3.526.540.116,00	97,72 %
26	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**			
	- Belanja Tidak Langsung	33.725.747.890,00	28.542.719.552,00	84,63 %
	- Belanja Langsung	9.043.553.038,00	7.778.611.668,00	86,01 %
27	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**			
	- Belanja Tidak Langsung	2.584.072.840,00	2.436.384.895,00	94,28 %
	- Belanja Langsung	1.916.350.000,00	1.758.040.520,00	91,74 %
28	**Sekretariat Daerah**			
	- Belanja Tidak Langsung	14.641.783.970,00	13.950.730.221,00	95,28 %
	- Belanja Langsung	62.038.998.610,00	52.709.650.813,00	84,96 %
29	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
	- Belanja Tidak Langsung	3.283.014.420,00	3.044.093.513,00	92,72 %
	- Belanja Langsung	4.266.288.383,00	4.139.286.464,00	97,02 %
30	**Camat Dumai Barat**			
	- Belanja Tidak Langsung	4.354.807.860,00	4.211.025.809,00	96,70 %
	- Belanja Langsung	3.136.000.000,00	3.103.252.730,00	98,96 %
31	**Camat Dumai Timur**			
	- Belanja Tidak Langsung	4.875.298.120,00	4.673.372.956,00	95,86 %
	- Belanja Langsung	3.313.000.000,00	3.250.795.292,00	98,12 %
32	**Camat Bukit Kapur**			
	- Belanja Tidak Langsung	5.642.137.900,00	5.447.017.343,00	96,54%
	- Belanja Langsung	2.692.140.000,00	2.608.145.904,00	96,88%
33	**Camat Medang Kampai**			
	- Belanja Tidak Langsung	4.886.748.840,00	4.624.898.746,00	94,64 %
	- Belanja Langsung	2.143.000.000,00	2.113.175.161,00	98,61 %
34	**Camat Dumai Kota**			
	- Belanja Tidak Langsung	5.557.264.360,00	5.323.134.995,00	95,79 %
	- Belanja Langsung	3.305.000.000,00	3.255.489.587,00	98,50 %
35	**Camat Dumai Selatan**			
	- Belanja Tidak Langsung	5.145.601.180,00	4.863.202.935,00	94,51 %
	- Belanja Langsung	3.229.000.000,00	3.183.205.368,00	98,58 %
36	**Camat Sungai Sembilan**			
	- Belanja Tidak Langsung	5.174.423.730,00	4.940.901.769,00	95,49 %
	- Belanja Langsung	2.875.000.000,00	2.819.229.538,00	98,06 %

Sumber : Data Unaudit (pertanggal 07/2/2018) Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kota Dumai

Keterangan ***Tabel 3. 3*** diatas : Data Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 posisi ***Un Audit.***



BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2017

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Perarutan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maka berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintah.

Adapun Urusan Wajib beserta organisasi yang melaksanakannya adalah sebagai berikut

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar :

1. Urusan Wajib Pendidikan, oleh Dinas Pendidikan;
2. Urusan Wajib Kesehatan, oleh Dinas Kesehatan dan RSUD;
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, oleh Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang ;
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, oleh Satuan Polisi Pamong Praja , Kantor Kesbangpol dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Urusan Wajib Sosial oleh, Dinas Sosial.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Urusan Wajib Tenaga Kerja oleh, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Urusan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup;
4. Urusan Wajib Adm Kependudukan dan Catatan Sipil oleh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

5. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Urusan Wajib Perhubungan oleh Dinas Perhubungan;
7. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. Urusan Wajib Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
10. Urusan Wajib Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

C. Urusan Pilihan beserta organisasi yang melaksanakannya sebagai berikut :

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai;
2. Urusan Pilihan Pertanian oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai;
3. Urusan Pilihan Perdagangan oleh Dinas Perdagangan Kota Dumai.

D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang beserta organisasi yang melaksanakannya sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintah oleh Sekretariat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD Kota Dumai dan 7 Kecamatan se-Kota Dumai;
2. Urusan Pengawasan oleh Inspektorat Kota Dumai;
3. Urusan Perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai;
4. Urusan Keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai;
5. Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan Wajib Pendidikan dan Kebudayaan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kinerja 2017	Realisasi sampai tahun 2017	Capaian Kinerja
Angka melek huruf	99,44	99,53	100,09
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	>100	121,60	121,60
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	>100	125,07	125,07
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	107,33	107,33

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kinerja 2017	Realisasi sampai tahun 2017	Capaian Kinerja
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,76	100,89	113,67
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah:			
- SD/MI	1:339	1: 288,42	117,54
- SMP/MTs	1:473	1: 228,97	206,58
Sanggar seni dan budaya yang dibina	85 sanggar	40 sanggar	47,06
Jumlah grup kesenian	40	35	87,50
Jumlah Gedung Kesenian	1	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2017 disampaikan sebagai berikut :

a. Angka Melek Huruf

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Angka melek huruf maksud adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bias baca tulis.target capaian kondisi akhir 2016 adalah 99,52% sedangkan realisasi 2017 adalah 99,53% yang berarti capaian telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian yaitu 100,09%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak meningkatkan angka melek huruf yaitu penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SD dan jenjang SMP. Selain itu untuk penduduk yang putus sekolah, pada program ini terdapat kegiatan penyelenggaraan Paket A dan Paket B untuk menekan angka buta huruf.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi kasar atau APK SD/MI/Paket A yang menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI/ Paket A. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. Capaian indikator ini sampai tahun 2016 sudah lebih besar dari 100% begitu juga realisasi pada tahun 2017 yang mencapai 121,60%. Hal ini menunjukkan daya serap penduduk pada jenjang SD/MI di Kota Dumai sangat baik.

Nilai APK yang lebih dari 100% disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang

pendidikan yang bersangkutan. Pada jenjang SD/MI, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD/MI atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD/MI. Hal lain yang menyebabkan besarnya APK ini yaitu banyaknya perpindahan penduduk ke Kota Dumai yang masuk ke sekolah, tetapi belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga jumlah penduduk usia sekolah lebih sedikit dari jumlah peserta didik yang ada pada jenjang SD/MI.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pada program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian APK SD/MI/Paket A. Diantaranya seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kegiatan-kegiatan lain yang meningkatkan partisipasi penduduk untuk masuk sekolah.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi kasar atau APK SMP/MTs/Paket B yang menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. Capaian indikator ini sampai tahun 2016 sudah lebih besar dari 100% begitu juga realisasi pada tahun 2017 yang mencapai 125,07%. Hal ini menunjukkan daya serap penduduk pada jenjang SMP/MTs/Paket A di Kota Dumai sangat baik.

Nilai APK yang lebih dari 100% disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Pada jenjang SMP/MTs, banyak anak-anak usia diatas 15 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SMP/MTs atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 13 tahun tetapi telah masuk SMP/MTs. Hal lain yang menyebabkan besarnya APK ini yaitu banyaknya perpindahan penduduk ke Kota Dumai yang masuk ke sekolah, tetapi belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga jumlah penduduk usia sekolah lebih sedikit dari jumlah peserta didik yang ada pada jenjang SMP/MTs.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pada

program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian APK pada jenjang SMP/MTs/Paket B. Diantaranya seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kegiatan-kegiatan lain yang meningkatkan partisipasi penduduk untuk masuk sekolah.

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SD/MI/Paket A yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7-12 Tahun Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Capaian indikator ini sampai tahun 2016 adalah 99,54% sedangkan realisasi tahun 2017 adalah 107,33% yang berarti capaian sudah mencapai target yaitu sebesar 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pencapaian target tersebut dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi dan pengetatan aturan usia masuk sekolah. Sebagaimana diketahui dari tahun ke tahun usia masuk sekolah pendidikan dasar cenderung semakin cepat. Menurut data tahun 2016 siswa baru yang memasuki sekolah SD di tingkat pertama atau calon siswa yang mendaftar masuk SD atau sederajat lebih hampir 15% belum mencukupi umur 7 tahun. Bahkan masih ada yang belum mencapai umur 6 tahun.

Hal ini pada dasarnya diharapkan peserta didik dapat mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu sesuai dengan kematangan psikologi perkembangan anak dan sesuai juga dengan lingkungan pendidikan yang diterimanya. Namun di sisi lain dapat dikatakan bahwa jika banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya meskipun secara usia belum cukup, yang seringkali diasumsikan seiring dengan perkembangan tingkat ekonomi sebuah keluarga atau masyarakat.

Namun tentu saja selain berpengaruh terhadap kesiapan siswa tersebut dalam mengikuti pendidikan secara mental dan emosional, hal ini juga mempengaruhi angka partisipasi murni, dimana indikator ini membandingkan siswa SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun (bukan seluruh siswa SD/ sederajat) dengan penduduk usia sekolah 7-12 tahun.

Hal ini didukung oleh surat edaran dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan umur calon peserta didik bagi sekolah pada saat penerimaan siswa baru. Dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal ini dipandang penting karena jika aturan umur tidak secara ketat dilakukan pada tingkat SD/ sederajat akan mempengaruhi APM di tingkat pendidikan selanjutnya.

e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Target dari indikator sasaran ini yaitu yaitu angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SMP/MTs/Paket B yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 13-15 Tahun Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Capaian indikator ini sampai tahun 2016 adalah 80,46% sedangkan realisasi tahun 2017 adalah 100,89% yang berarti capaian sudah melebihi target yaitu sebesar 88,76%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sama seperti APM SD/MI/SDLB/ Paket A, pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi dan pengetatan aturan usia masuk sekolah yang dimulai dari pendidikan anak usia dini. Hal ini tentu saja selain berpengaruh terhadap APM di tingkat pendidikan selanjutnya. Diharapkan upaya sosialisasi dan pengetatan usia sekolah ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

f. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah: - SD/MI

Target dari indikator sasaran ini yaitu tercukupinya kebutuhan sekolah dengan penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah 1:307,64 hal ini berarti 1 sekolah jenjang SD/MI dapat melayani kurang lebih 307 penduduk usia 7-12 tahun. Capaian tahun 2017 ini cukup baik karna sudah melebihi target yaitu 1:339 dengan persentase capaian yaitu 110,19%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

g. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah: - SMP/MTs

Target dari indikator sasaran ini yaitu tercukupinya kebutuhan sekolah dengan penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah 1:366,35 hal ini berarti 1 sekolah jenjang SMP/MTs dapat melayani kurang lebih 366 penduduk usia 13-15 tahun. Capaian tahun 2017 ini cukup baik karna sudah melebihi target yaitu 1:473 dengan persentase capaian yaitu 129,11%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

h. Sanggar seni dan budaya yang dibina

Sanggar seni dan budaya yang dibina pada tahun 2016 realisasinya adalah sebanyak 80 sanggar yang dibina. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah sanggar yang dapat dibina oleh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebanyak 40 sanggar. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh terdapat beberapa sanggar yang belum memiliki izin operasional dan terdapat beberapa sanggar yang sedang dalam proses pengurusan izin sehingga hanya sanggar yang sudah memiliki izin saja yang dapat dibina.

Program pendukung pada indikator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya.

i. Jumlah Grup Kesenian

Partisipasi masyarakat dalam mengembangan ragam budaya demi menciptakan keserasian hubungan antar antar unit sosial dan antar budaya yang ada di Kota Dumai. Dengan partisipasi dimaksud diharapkan seluruh komponen masyarakat yang tergabung dalam organisasi seni budaya dapat berinteraksi langsung dengan budaya tempatan sehingga menimbulkan feedback antara masyarakat dan pemerintah. Capaian kondisi akhir 2016 terdapat 35 jumlah group kesenian, ditahun 2017 jumlah grup kesenian belum mengalami perubahan yaitu sebanyak 35 group kesenian yang mengikuti kegiatan seni budaya. Hal ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 40 group kesenian. Oleh karena itu kedepannya diharapkan partisipasi aktif dari seluruh grup kesenian yang ada di Kota Dumai.

Program pendukung pada indicator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya.

j. Jumlah Gedung Kesenian

Sampai tahun 2017 indikator kinerja sasaran jumlah gedung kesenian realisasinya 0 belum tersedianya gedung kesenian dimana kegiatan kesenian dilaksanakan di panggung lapangan bukit gelanggang. Untuk kedepannya perlu direncanakan untuk membangun gedung kesenian sebagai sarana pendukung pelestarian seni dan budaya di Kota Dumai.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh berbagai pihak baik dari Dinas Pendidikan Kota Dumai dan Sekolah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, untuk indikator kinerja yang belum tercapai diantaranya adalah pada urusan kebudayaan. Untuk selenjutnya diharapkan indicator-indikator ini dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut:

Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 388.457.355.703,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 234.664.886.671,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 153.792.469.032,- Data alokasi dana dan realisasi anggaran dapat dilihat pada table dibawah:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui kegiatan :

a. Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 15.850.000,- (Lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan target kinerja pembangunan gedung sekolah, penyerapan anggaran Rp. 15.850.000,- (Lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100,00%. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah Tercapainya Program Pendidikan Anak Usia Dini

b. Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 428.000.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan target Terbangunnya Ruang Kelas, penyerapan anggaran Rp. 211.852.000,- dua ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau 49,50%. Kegiatan pembangunan ruang kelas sekolah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dibangunnya ruang kelas sekolah

c. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 321.000.000,- (Tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan target kinerja terbangunnya Taman, Taman upacara dan Fasilitas Parkir, realisasi penyerapan anggaran Rp. 149.996.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 46,73%. Kegiatan pembangunan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dibangunnya Taman, Taman upacara dan Fasilitas Parkir.

d. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Jumlah anggaran yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 48.150.000,- (Empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan target kinerja Terbangunnya Sarana Air bersih, realisasi penyerapan anggaran Rp 0,- (nol rupiah) atau 0,00%. Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary tingkat pencapaiannya sebesar 0%, dengan capaian program adalah terbangunnya wc siswa dan guru.

e. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 195.905.800,- (Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dengan target kinerja tersedianya alat bermain peserta didik dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 195.905.800,- (Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus rupiah) atau 100,00%. Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga

siswa tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah APE dan APL yang disediakan.

f. Pengadaan mebeluer sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 69.800.000,- (Enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan target kinerja meubiler yang diadakan dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 24.900.000,- (nol rupiah) atau 35,67%. Kegiatan pengadaan meubeler sekolah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah mobiler sekolah yang diadakan

g. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 173.287.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan target kinerja Jumlah guru yang mengikuti dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 49.319.000,- (Empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) atau 28,46%. Kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah tidak terlaksananya kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik.

h. Pengembangan Pendidik Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 59.515.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan target kinerja Jumlah yang mengikuti kegiatan PAUD Peserta yang Mengikuti kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 58.423.000,- (Lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau 98,17%. Kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah Jumlah yang mengikuti kegiatan PAUD Peserta yang Mengikuti kegiatan.

i. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 628.322.500,- (Enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan target kinerja Penyediaan biaya Operasional Taman Kanak kanak dan Penyediann biaya Operasional SLB dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 470.525.971,- (Empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 74,89%. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah tersedianya biaya operasional TK sebanyak 4 sekolah.

j. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model pembelajaran Pendidkan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 40.410.000,- (Empat puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan target kinerja

Jumlah Guru Yang mengikuti Diklat dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 36.710.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau 90,84%. Kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah guru yang mengikuti diklat.

k. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 59.435.000,- (Lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan target kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 57.925.000,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 97,46%. Kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah kepala sekolah yang mengikuti kegiatan koordinasi.

l. Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 57.018.000,- (Lima puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah) dengan target kinerja Peserta yang mengikuti Jambore PTK PNFI dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 56.918.000,- (Lima puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) atau 99,82%. Kegiatan Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini tingkat pencapaiannya sebesar 100% dengan capaian program adalah jumlah guru yang mengikuti jambore PTK PNFI

m. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 324.971.000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan target kinerja Guru Dan Siswa yang mengikuti Gebyar PAUD dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 184.151.000,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) atau 56,67%. Kegiatan Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini tingkat pencapaiannya sebesar 100% dengan capaian program adalah jumlah Guru Dan Siswa yang mengikuti Gebyar PAUD

n. Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 20.843.127,- (Dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan target kinerja Persentase guru Naik Pangkat dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 13.401.500,- (Tiga belas juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) atau 64,30%. Kegiatan Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini tingkat pencapaiannya sebesar 100% dengan capaian program adalah jumlah Guru Naik Pangkat.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

a. Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.322.073.750,- (Tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan target kinerja terlaksannya pembangunan gedung dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 3.102.226.800,- (Tiga milyar seratus dua juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atau 42,37%. Kegiatan pembangunan gedung sekolah tingkat pencapaiannya sebesar 42,37%, dengan capaian program adalah terlaksananya pembangunan gedung sekolah.

b. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 642.000.000,- (Enam ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan target kinerja Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas guru dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 223.880.000,- (Dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 34,87%. Kegiatan Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas guru.

c. Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 20.616.130.000,- (Dua puluh milyar enam ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan target kinerja meningkatnya daya tampung pendidikan dasar dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 9.893.409.900,- (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau 47,99%. Kegiatan penambahan ruang kelas tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah Jumlah ruang kelas baru yang ditambah

d. Penambahan ruang guru sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.039.000.000,- (Satu milyar tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan target kinerja tercukupinya kebutuhan ruang majelis guru dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 543.094.500,- (Lima ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau 52,27%. Kegiatan penambahan ruang guru sekolah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah ruang majelis guru yang dibangun.

e. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 214.907.000,- (Dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan target kinerja tercukupinya kebutuhan laboratorium dan ruang paktik bagi siswa, realisasi

penyerapan anggaran Rp. 214.907.000,- (Dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) atau 100,00%. Kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah terlaksanaya pembangunan laboratorium yang dibangun.

f. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5.211.580.000,- (Lima milyar dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan target kinerja tesedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 3.517.877.700,- (Tiga milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau 67,50%. Kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dibangunnya pagar sekolah, semenisasi dan parkir sekolah.

g. Pembangunan ruang ibadah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 160.500.000,- (Seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan target kinerja terpenuhinya kebutuhan ruang ibadah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 155.826.000,- (Seratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau 97,09%. Kegiatan Pembangunan ruang ibadah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terpenuhinya kebutuhan ruang ibadah sekolah.

h. Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.063.040.000,- (Dua milyar enam puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan target kinerja terbangunnya perpustakaan sekolah dasar Sembilan tahun dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 798.563.500,- (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau 38,71%. Kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terpenuhinya kebutuhan ruang perpustakaan.

i. Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5.456.924.500,- (Lima milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan target kinerja dibangunnya sarana sanitasi di sekolah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 2.780.951.900,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) atau 50,96%. Kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terlaksananya pembangunan wc siswa dan guru.

j. Pengadaan Meubiler Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 12.342.045.000,- (Dua belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan target kinerja tercukupinya kebutuhan meubiler sekolah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 11.670.921.000,- (Sebelas milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau 94,56%. Kegiatan pengadaan meubiler sekolah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah tersedianya mobiler sekolah

k. Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 16.814.164.080,- (Enam belas milyar delapan ratus empat belas juta seratus enam puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dengan tercukupinya kebutuhan perlengkapan sekolah dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 3.255.312.600,- (Tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) atau 19,36%. Kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terlaksananya penyediaan perlengkapan sekolah

l. Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.573.226.000,- (Empat milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan target kinerja telaksananya rehabilitasi ruang kelas dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.029.634.000,- (Empat milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau 88,11%. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terpeliharanya ruang kelas sekolah.

m. Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 203.732.600,- (Dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan target kinerja meningkatkan kualitas dan kompetensi guru khususnya dalam pembuatan kurikulum di Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 180.762.200,- (Seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau 88,73%. Kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi guru khususnya dalam penyusunan kurikulum.

n. Penyediaan Bantuan Operasional sekolah BOS Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.472.609.050,- (Dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan ribu lima puluh rupiah) dengan target kinerja terpenuhinya indeks kebutuhan siswa pertahun yang di subsidi dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 2.468.375.090,- (Dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh rupiah) atau 99,83%. Kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah tersedianya biaya operasional sekolah jenjang SD se Kota Dumai.

o. Penyelenggaran Paket A Setara SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 8.725.000,- (Delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan target kinerja berkurangnya persentase masyarakat belum taman SD/Setara di Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 8.725.000,- (Delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 100,00%. Kegiatan penyelenggaraan Paket A setara SD tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terselenggaranya ujian nasional Paket A setara SD.

p. Penyelenggaran Paket B Setara SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan target kinerja berkurangnya persentase masyarakat belum taman SMP/Setara di Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp 31.945.000,- (Tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 82,97%. Kegiatan penyelenggaraan Paket B setara SMP tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terselenggaranya ujian nasional Paket B setara SMP.

q. Pembinaaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 78.211.200,- (Tujuh puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) dengan target kinerja Tercapainya pembukuan standar pelayanan minimal (SPM) di Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 77.942.200,- (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau 99,66%. Kegiatan pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah tersedianya data dan informasi tentang standard pelayanan minimal (SPM) sekolah di Kota Dumai.

r. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 372.536.016,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam belas rupiah) dengan target kinerja Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 223.278.900,- (Dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau 59,93%. Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terlaksananya seleksi OSN,O2SN dan FLS2N tingkat Kota Dumai dan keikutsertaan tingkat Provinsi dan Nasional.

s. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 589.296.400,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan target kinerja terlaksananya hari pendidikan nasional dan penyusunan profil pendidikan mengikuti kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 505.200.025,- (Lima ratus lima juta dua ratus ribu dua puluh lima rupiah) atau 85,73%. Kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terlaksananya penyusunan profil pendidikan, terlaksananya peringatan hari pendidikan nasional, serta keikutsertaan dalam rangkaian kegian HUT Kota Dumai.

t. Penyediaan Beasiswa Transisi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.11.445.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan Jumlah pembuatan SPJ Transisi dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 11.445.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 100%. Kegiatan penyediaan beasiswa transisi tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terseleksinya siswa SD/SMP untuk mendapatkan BSM

u. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 337.192.550,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan target kinerja Dokumen Hasil Monitoring Aset Dinas Pendidikan dan realisasi penyerapan anggaran Rp 224.675.600,- (Dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau 66,63%. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terdatanya dan terkelolanya aset Dinas Pendidikan.

v. Penyediaan Dukungan Operasional SMPN se Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 6.143.087.856,- (Enam milyar seratus empat puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan target terbayarnya dukungan operasional siswa dan realisasi penyerapan anggaran Rp 5.330.950.535,- (Lima milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atau 86,78%. Kegiatan penyediaan dukungan operasional SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Dumai tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah tersedianya dukungan operasional SMP Negeri se Kota Dumai.

w. Penyelengaraan Ujian Nasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 854.456.150,- (Delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dengan target kinerja tersedianya peserta UN dan US SD/MI, SMP/MTS Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp 535.538.505,- (Lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) atau 62,68%. Kegiatan penyelenggaraan ujian nasional tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terlaksananya ujian nasional tingkat SD dan SMP.

3. Program Pendidikan Menengah

a. Pembangunan Gedung sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 99.890.000,- (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan target kinerja terpenuhinya kebutuhan sekolah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. Rp. 99.890.000,- (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau 100,00%. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program terpenuhinya kebutuhan gedung sekolah

b. Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 49.900.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan target kinerja Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 49.900.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 100,00%. Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terpenuhinya kebutuhan ruang kelas sekolah

4. Program Pendidikan Non Formal

a. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 102.766.000,- (Seratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan dengan

target Jumlah Peserta Pelatihan Pendidikan Non Formal dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 74.626.000,- (Tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau 72,62%.

5. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan melalui kegiatan:

a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 753.231.000,- (Tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan target kinerja mutu pendidikan meningkat dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 465.546.188,- (Empat ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) atau 61,81%. Kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah jumlah guru TK, SD, SMP, SMA/SMK tersertifikasi.

b. Pelaksanaan uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 182.902.000,- (Seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dengan target kinerja Terlaksananya Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- (nol rupiah) atau 0,00%. Kegiatan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah meningkatnya kemampuan dan keahlian guru.

c. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 116.082.000,- (Seratus enam belas juta delapan puluh dua ribu rupiah) dengan target kinerja terlatihnya guru kurikulum dan terlatihnya guru labor dan pengelola labor dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 90.344.736,- (Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) atau 77,83%. Kegiatan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standard kompetensi tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah terpenuhinya kompetensi guru kurikulum.

d. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 549.837.500,- (Lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan target kinerja meningkatnya kreativitas guru dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 331.821.500,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau 60,35%. Kegiatan pembinaan kelompok kerja guru (KKG) tingkat pencapaiannya 100%,dengan capaian adalah meningkatnya kreatifitas guru.

e. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 14.869.802.500,- (Empat belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan target kinerja pendidik yan profesional dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 12.335.215.238,- (Dua belas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 82,95%. Kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian adalah Guru yang naik pangkat.

f. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 651.554.596,- (Enam ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan target kinerja Guru yang naik pangkat dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 567.508.515,- (Lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu lima ratus lima belas rupiah) atau 87,10%. Kegiatan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah terdatanya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan se Kota Dumai.

g. Pengembangan Sistem Perencanaan dan pengedalian Program Profesi pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 418.840.000,- (Empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan target kinerja Guru Pengawas Kepala Sekolah dan pengawas sekolah yang berprestasi dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 289.248.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau 69,06%. Kegiatan pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah meningkatnya kemampuan kreatifitas guru, pengawas dan kepala sekolah.

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

a. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 80.050.000,- (Delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan target kinerja satuan pendidikan yang disurvei dan jumlah laporan hasil survei dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 80.050.000,- (Delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) atau 100,00%. Kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program Satuan Pendidikan yang di survey dan jumlah laporan hasil survey.

b. Pengendalian dan pengawasan penerapan azaz efesiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsitrasi dan dana pembantuan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 73.331.000,- (Tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan target kinerja laporan monitoring yang tersedia dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 72.406.000,- (Tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) atau 98,74%. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah Jumlah peserta yang dibimbing Kepala Sekolah dan Wakil sarpras.

c. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.244.423.975,- (Satu milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan target kinerja data siswa yang di input dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 959.012.018,- (Sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua belas ribu delapan belas rupiah) atau 77,06%. Kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah terdatanya serta terupdatenya data pendidikan.

d. Penyelengggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 427.149.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan target kinerja Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penata Usaha Keuangan Sekolah, Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Kegiatan Sekolah, Terlaksananya Sosialisasi Lalu Lintas dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 230.451.000,- (Dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau 53,95%. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penata Usaha Keuangan Sekolah dan Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Kegiatan Sekolah.

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 321.820.300,- (Tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan target kinerja terdatanya sarana prasarana pendidikan di Kota Dumai dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 246.618.506,- (Dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam rupiah) atau 76,63%. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah terdatanya sarana dan prasarana sekolah se Kota Dumai. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat

pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah terdatanya sarana dan prasarana sekolah se Kota Dumai.

7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

a. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 654.482.500,- (Enam ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan target kinerja jumlah Entry Registrasi Cagar Budaya Kota Dumai, penyerapan anggaran Rp. 649.525.000,- (Enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 99,24%. Kegiatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya tingkat pencapaiannya sebesar 99,24%, dengan capaian program adalah jumlah Entry Registrasi Cagar Budaya Kota Dumai (cagar budaya).

8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.500.000,- (Seratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan target kinerja Jumlah terlaksananya event budaya tradisi masyarakat melayu (event), penyerapan anggaran Rp. 89.300.141,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu seratus empat puluh satu rupiah) atau 88,86%. Kegiatan Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaantingkat pencapaiannya sebesar 88,86%, dengan capaian program adalah Jumlah terlaksananya event budaya tradisi masyarakat melayu (event).

2. URUSAN WAJIB KESEHATAN

Dinas Kesehatan

Pelaksanaan program di bidang kesehatan selama tahun 2017 dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 4.2. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Menurunnya Mortalitas (angka kematian)

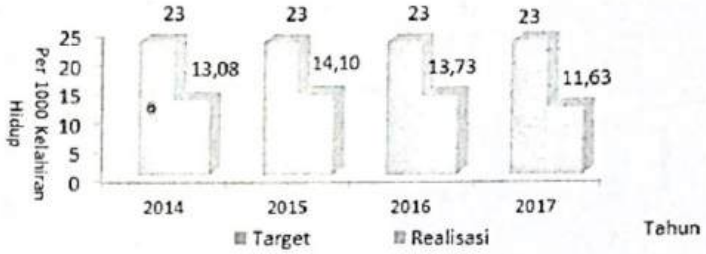
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 23	11,63	100%
2.	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 32	13,44	100%
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	per 100.000 Kelahiran Hidup	120	142,63	81,14%
4.	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	Tahun	70,08	70,31	100%

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 1 yakni menurunnya Mortalitas (angka kematian) pada tahun 2017 adalah sebesar 95,29%.

a. Angka Kematian Bayi

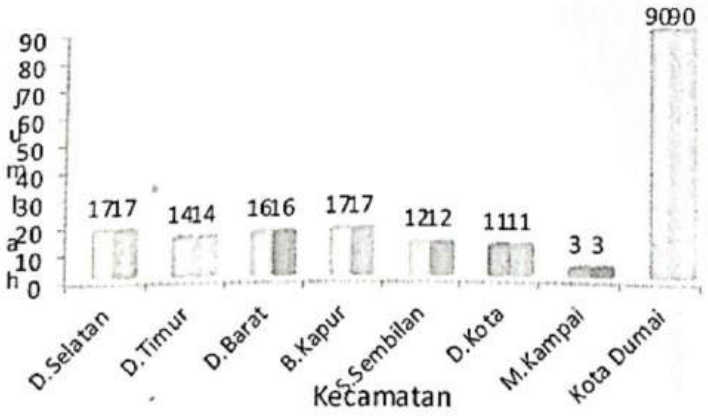
Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 90 kasus dari 7.738 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11,63 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana angka kematian bayi sebesar 13,73 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2014 sampai dengan 2017 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 4.1 berikut ini :

Grafik 4.1. **Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2017**



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 26 kasus, disusul dengan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 20 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.2 berikut ini :

Grafik 4.2. **Pencapaian Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai tahun 2017**

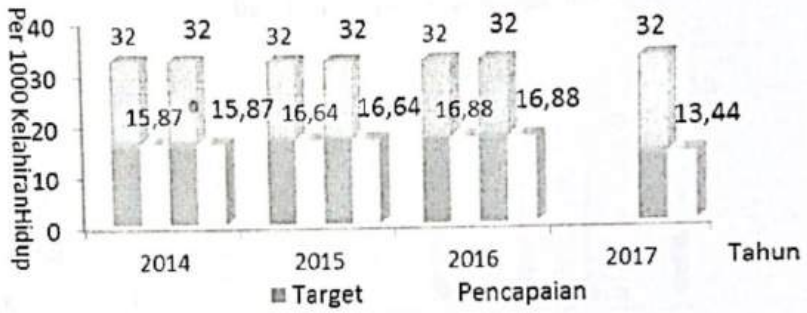


Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.

b. Angka Kematian Balita

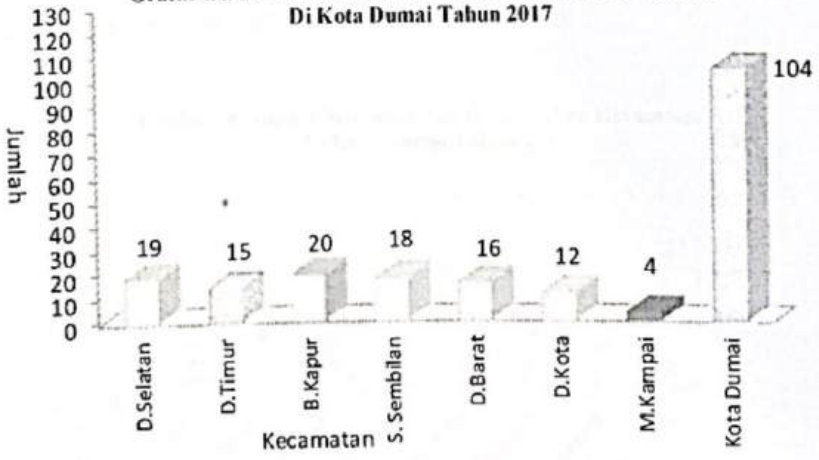
Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 104 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2017 di Kota Dumai sebesar 13,44 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana angka kematian bayi sebesar 16,88 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita dan Tahun 2014 sampai dengan 2017 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 4.3 berikut ini :

Grafik 4.3. **Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2017**



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 20 kasus, disusul dengan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 19 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.4 berikut ini :

Grafik 4.4. Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2017

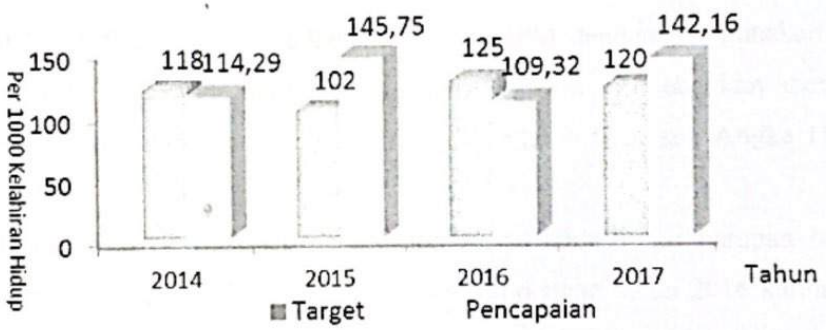


Penyebab kematian balita masih didominasi oleh Asfiksia dan Penyebab lain.

c. Angka Kematian Ibu

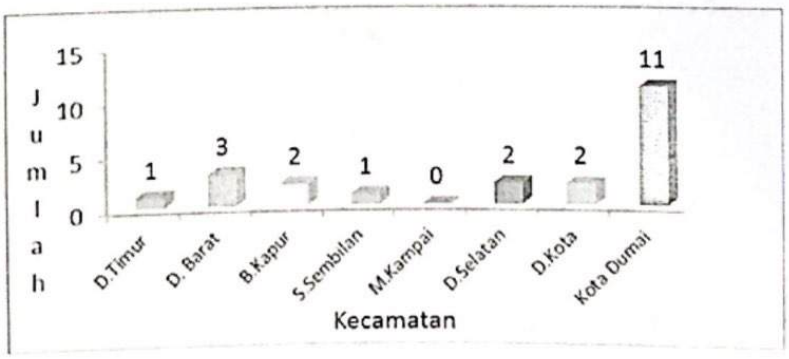
Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 11 kasus dari 7.738 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2017 di Kota Dumai sebesar 142,16 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, di mana angka kematian ibu sebesar 109,32 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 120 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini diatas target (yang berarti tingkat pencapaiannya kurang baik). Pencapaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2014 sampai dengan 2017 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 4.5 berikut ini :

Grafik 4.5. **Pencapaian Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2017**



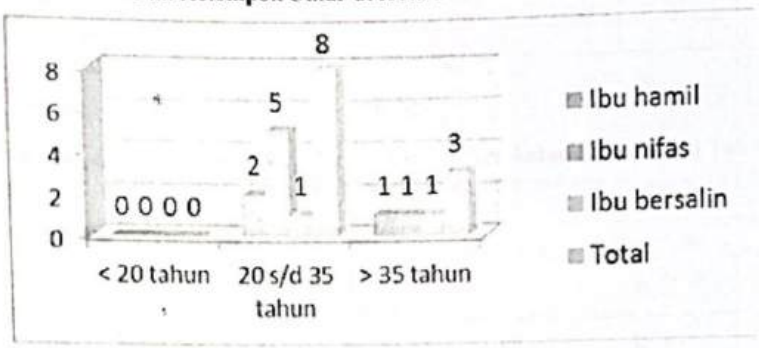
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 3 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.6 berikut ini :

Grafik 4.6. Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2017



Penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena penyebab tidak langsung sebanyak 5 kasus disusul dengan pre eklmasi berat sebanyak 4 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 8 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian terbanyak pada kelompok ibu nifas sebanyak 6 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 4.7. Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu Dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2017

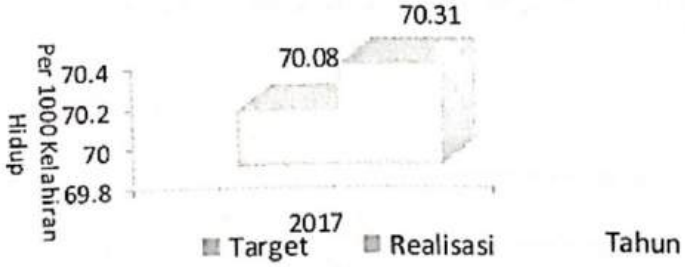


d. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir

Mulai tahun 2017 karena ada perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), maka Badan Pusat Statistik Pusat telah merilis data IPM dengan mengunakan metode baru. Dengan diterapkannya metode baru dalam menghitung IPM menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH).

Pada tahun 2017 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 70,31 tahun tahun (diasumsikan sama dengan tahun 2016 karena data terbaru dari BPS belum ada). Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 yakni sebesar 70,25 tahun terlihat ada sedikit peningkatan angka harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Pencapaian Angka Harapan Hidup waktu lahir di Kota Dumai tahun 2017 dapat di lihat pada grafik 4.8 berikut ini :

***Grafik 4.8.* Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kota Dumai Tahun 2017**



Tabel 4.3. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Dari Tahun 2010 sampai dengan 2017

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2010	69,81	70,15	69,93
2.	2011	70,01	70,32	69,95
3.	2012	70,20	70,49	70,02
4.	2013	70,40	70,67	70,04
5.	2014	70,59	70,76	70,05
6.	2015	70,70*	70,93	70,25
7.	2016	70,70*	70,93	70,25
	2017	70,70*	70,97	70,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2017
* UN, World Population Prospects the 2012 revision

Tabel 4.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kesakitan Malaria	per 1.000 penduduk	1	0,02	100%
2.	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	86,87	98,72%
3.	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0,75	100%
4.	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	per 100.000 penduduk	59	30,91	100%

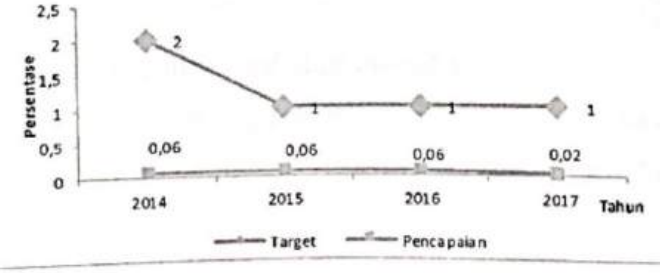
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 2 yakni menurunnya Morbiditas (angka kesakitan) pada tahun 2017 adalah sebesar 99,68%.

e. Angka Kesakitan Malaria

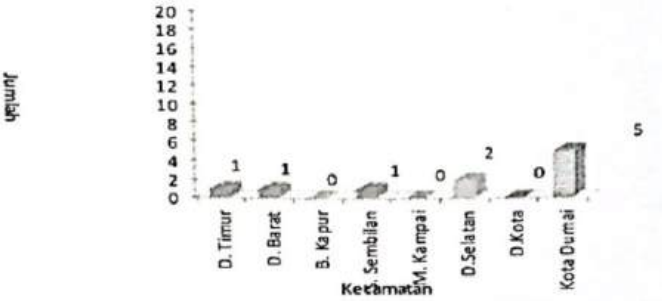
Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2017 ditemukan sebanyak 944 kasus malaria klinis. Dari 944 kasus yang ada terdapat 5 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,02 per 1.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,06 per 1.000 penduduk, terlihat pencapaiannya meningkat. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2017 yakni 1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian dapat dilihat dari grafik 4.9 dibawah ini:

***Grafik 4.9.* Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017**



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 2 kasus (40%). Hal tersebut disebabkan tingginya mobilitas penduduk baik warga lokal maupun warga pendatang dari luar Kota Dumai dan pembukaan lahan perkebunan yang berpotensial berkembangnya nyamuk malaria. Hal ini cukup mengejutkan mengingat daerah yang selama ini dikenal dengan daerah high endemis Malaria adalah Kecamatan Sungai Sembilan. Kecamatan Sungai Sembilan merupakan kecamatan terbanyak kedua ditemukannya kasus Malaria positif yakni sebanyak 1 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.10 berikut ini :

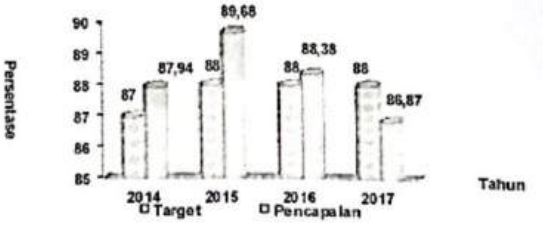
Grafik 4.10. Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2017



a. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2017 dari total 297 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 258 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 86,87%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar 88,38%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Namun bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2017 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2014 sampai dengan dapat dilihat dari grafik 4.11 berikut ini :

Grafik 4.11
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017

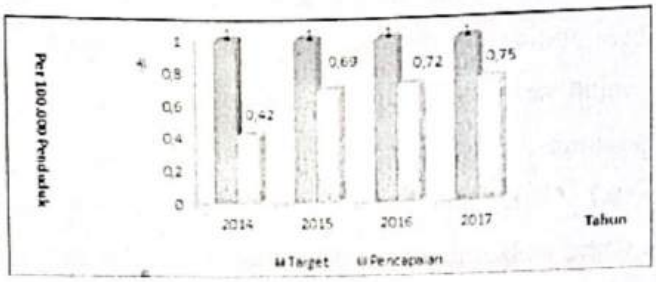


b. Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 398 kasus yang terdiri dari 341 kasus lama dan 57 kasus baru yang ditemukan

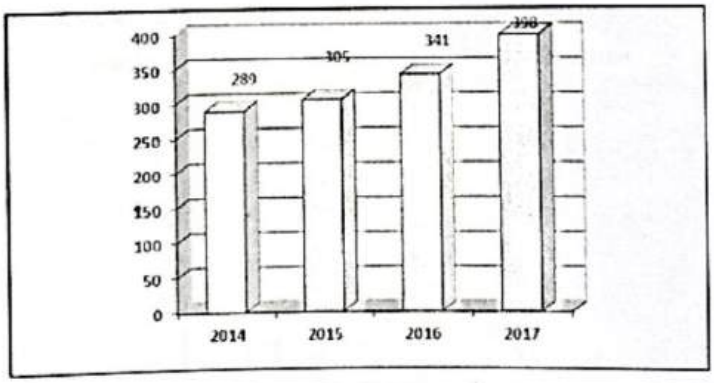
tahun 2017. Dari 398 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 153 orang sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 245 orang, Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2017 adalah sebesar 0,75% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 32.719 orang).

***Grafik 4.12.* Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017**



Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0,72%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2017 sebesar < 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai.

Grafik 4.13.Data Kasus HIV/AIDSKota Dumai Dari Tahun 2014 s/d 2017

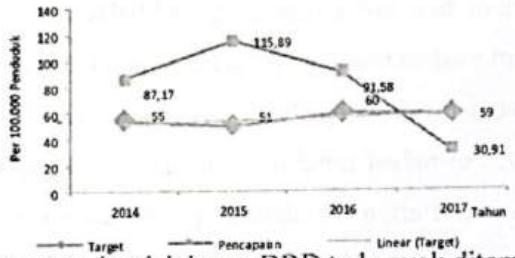


c. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2017 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 92 kasus atau IR = 30,91 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 1 orang atau CFR = 1,09%. Bila dibandingkan dengan tahun

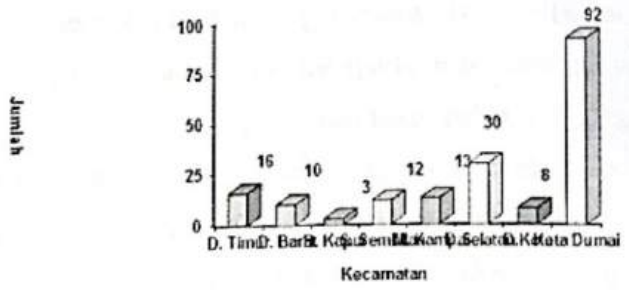
2016 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 290 kasus atau IR = 91,58 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 2 kasus atau CFR = 0,69%, maka ada sedikit penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai yaitu 59 per 100.000 penduduk, maka angka tersebut dibawah target indikator Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti ± 80% penduduk Dumai masih menggunakan bak–bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Grafik 4.14. **Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2017**



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 30 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Timur sebanyak 16 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.15 berikut ini :

Grafik 4.15. Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2017



Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektit dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk

tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M2 dan dilakukan di 100 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

Tabel 4.5. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Meningkatnya Status Gizi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	< 3	0,02	100%
2.	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	< 7	0,30	100%

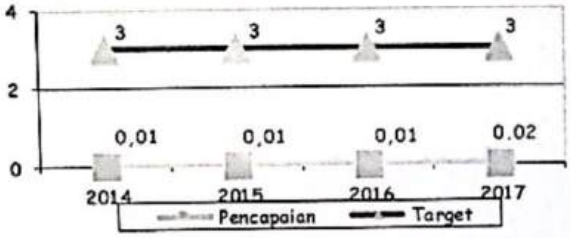
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 3 yakni meningkatnya status gizi pada tahun 2017 adalah sebesar 100%.

d. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2013 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2015, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal Ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2015, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2017 ditemukan 3 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Jaya. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 0,01%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 5 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2017 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 4.16. **Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2017**

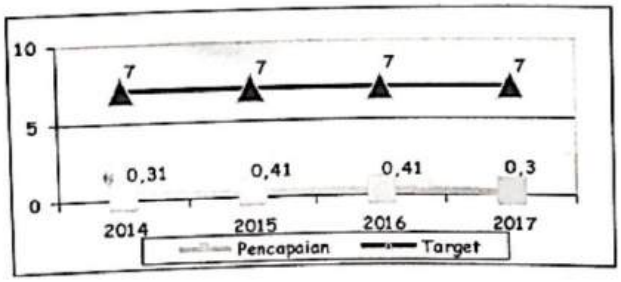


Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

e. Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya. Selama tahun 2017 kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 104 kasus dari 34.278 balita yang ditimbang, sehingga persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 0,30%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 152 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0,41%, terlihat ada penurunan kasus balita dengan gizi kurang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2017 yakni sebesar 7%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 4.17. **Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2014sampai dengan 2017**



Melalui pelaksanaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yakni pelacakan kasus balita dengan gizi kurang selama tahun 2017 ditemukan 232 kasus balita gizi kurang dan balita BGM. Setelah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu yaitu sebanyak 80 gram selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pada akhir tahun 2017 jumlah kasus balita gizi kurang dan balita BGM berkurang menjadi 38 kasus balita gizi kurang. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi kurang pada balita diharapkan dapat segera diantisipasi.

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 96.156.989.515,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 33.448.133.040,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.62.708.856.475,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 32.806.798.287,- atau terserap 98,08 % dan belanja langsung terserap Rp. 57.684.869.095,33,- atau 91,99. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut:

1. **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**

   Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.110.328.889. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 3.911.691.874,50 atau sebesar 95,17% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

   a. **Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan**

      Pada kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp 4.110.328.889 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 3.911.691.874,50 atau sebesar 95,17%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

2. **Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

   Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp28.141.611.108,19 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp26.078.357.035,83 atau sebesar 92,67% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

   a. **Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.13.098.155.281,64 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp13.035.673.924 atau sebesar 99,52% dari anggaran.Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan JKN di puskesmas dan pembinaan pelayanan jaminan kesehatan realisasi 100%.

b. Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp4.734.984.736,55 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp4.645.701.448,83 atau sebesar 98,11% dari anggaran.Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini jumlah pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya, dengan realisasi semuanya sebanyak 100%.

c. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp56.514.590. dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp56.504.000 atau sebesar 99,98% dari anggaran.Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan lomba posyandu teladan sebanyak 196 posyandu dan pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk 150 kasus, dan pelatihan mutu kader posyandu dengan realisasi semuanya 100%.

d. Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.427.972.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp794.604.653 atau sebesar 55,65% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

Tabel 4.6. apaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017 penanggulangan masalah kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi	Kasus	36	36	100%
Pelaksanaan workshop bedah kasus maternal	Kali	1	1	100%
Pelatihan peningkatan kapasitas bidan dalam kegawatdaruratan maternal perinatal	Kali	2	2	100%
Pelaksanaan pertemuan pengembangan diri dan peningkatan kinerja petugas kesehatan	Angkatan	2	2	100%
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis emergency	Orang	30	15	50%
Penyediaan rumah tunggu kelahiran	RKT	2	2	100%

Dapat dilihat dari ***Tabel 4.6*** diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk pelaksanaan pelacaknya kematian ibu dan bayi, pelaksanaan workshop bedah kasus maternal, pelatihan peningkatan kapasitas bidan dalam kegawatdaruratan maternal perinatal, pelaksanaan pertemuan pengembangan diri dan peningkatan kinerja petugas kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis emergency,penyediaan rumah tunggu kelahiran semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

a. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan khusus

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp107.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp102.800.000 atau sebesar 96,07% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017
Pelayanan kesehatan khusus

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera	puskesmas	10	10	100%
Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa	puskesmas	10	10	100%
Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan	sekolah	280	280	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari ***Tabel 4.7*** diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program kesehatan indera, jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa, jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan, capaian cakupannya sudah 100% dari realisasi target kinerja.

b. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp8.596.984.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp7.324.640.910 atau sebesar 85,20% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

***Tabel 4.8.* Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Pelayanan kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas	Kali	2	2	100%
Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas	Bulan	12	12	100%
Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal	anak	200	140	70%
Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kacamata gratis	anak	200	320	100%
Pelaksanaan kegiatan sahabat ambulance PSC 119	Bulan	12	12	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.8 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas, Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas, pelaksanaan kegiatan sahabat ambulance PSC 119, semua cakupannya sudah 100% dari realisasi target kinerja sedangkan Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunat massal realisasi 70%.

c. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit

Jumlah anggaran yang tersedia dalam elaksanakan kegiatan ini sebesar Rp120.000.000. dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp118.432.100 atau sebesar 98,69% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

***Tabel 4.9.* Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah sarana pelayanan kesehatan di RS.rad.lab yang dibina	Sarana	18	18	100%
Pelaksanaan sistem pelaporan SIMRS	Triwulan	4	4	100%
Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dokter spesialis di puskesmas	kali	2	2	100%
Pelaksananaan visitasi supervisi pelayanan rumah sakit	kali	2	2	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari table 4.9 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah sarana pelayanan kesehatan di RS,Rad, Lab yang dibina, pelaksanaan sistem pelaporan SIMRS, pelaksanaan pelayanan kesehatan dokter spesialis ke puskesmas, dan pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan rumah sakit kota dumai semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp82.500.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp82.243.000 atau sebesar 99,69% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp82.500.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp82.243.000atau sebesar 99,69% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

Tabel 4.10. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Pengawasan keamanan pangan dan bahaya berbahaya

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah apotik yang diawasi dan di bina	Sarana	30	30	100%
Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina	Sarana	30	30	100%
Jumlah toko makanan dan minuman yang diawasi dan dibina	Sarana	30	30	100%
Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina	Sarana	50	50	100%
Jumlah puskesmas yang diawasi & dibina	puskesmas	10	10	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.10 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah apotik yang diawasi dan di bina, jumlah toko obat yang diawasi dan dibina, jumlah IRTP yang diawasi dan dibina, jumlah toko makanan-minuman yang diawasi dan dibina dan jumlah puskesmas yang diawasi dan dibina semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 652.455.675 Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 637.919.050 atau sebesar 97,77% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp162.231.950 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp159.981.750 atau sebesar 98,61% dari anggaran.

Tabel 4.11. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Promosi dan Informasi sadar hidup sehat

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif	Kelurahan	20	20	100%
Jumlah pelaksanaan promkes dengan menggunakan media cetak (buletin koran)	kali	17	17	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.11 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif, jumlah pelaksanaan promkes dengan menggunakan media cetak (buletin koran) semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

b. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp360.683.725 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp353.497.300 atau sebesar 98,01% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

***Tabel 4.12.* Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pembinaan PHBS tatanan sekolah	Sekolah	18	18	100%
Jumlah penyuluhan Napza dan penyakit menular lainnya	Sekolah	45	45	100%
Jumlah pelatihan guru pembina UKS	Kali	10	10	100%
Jumlah pelatihan dokter kecil	Kali	1	1	100%
Jumlah sekolah dasar yang mendapatkan pembinaan UKS	SD	10	10	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.12 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah pembinaan PHBS tatanan sekolah,.jumlah penyuluhan Napza dan penyakit menular lainnya , jumlag pelatihan guru pembina UKS, jumlah pelatihan dokter kecil dan jumlah sekolah dasar yang mendapatkan pembinaan UKS semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

c. Kegiatan peringatan hari kesehatan nasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 99.440.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 94.340.000 atau sebesar 94,87% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional sebanyak 1 kegiatan dengan realisasi sebesar 100%.

d. Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp30.100.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp30.100.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinannya 50 orang, jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis ketenagaan 10 puskesmas, jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 50 tempat,dan jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi 116 orang realisasi sebesar 100%.

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp174.631.385 Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp168.142.575 atau sebesar 96,28% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

a. Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp112.409.175.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp109.733.075 atau sebesar 97,62% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.13. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah balita yang mendapat vitamin	Balita	500	500	100%
PMT pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk	Balita	6	6	100%
pelaksanaan data bumil KEK dan PMT Bumil KEK	orang	30	30	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.13 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah jumlah balita yang mendapat vitamin, PMT balita gizi kurang/buruk dan pelaksanaan data bumil KEK dan PMT bumil KEK semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

a. Kegiatan penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp62.222.210 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp58.409.500 atau sebesar 93,87% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

Tabel 4.14. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Penanggulangan Kurang energi protein (KEP)

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium	Kelurahan	33	33	100%
Pengadaan MP-ASI balita 6-24 bulan	Anak	17	17	100%
Peningkatan kinerja program gizi	orang	60	60	100%
Pemantapan dan evaluasi anemia Gizi pada remaja putri	Orang	100	100	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari table 4.14 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium dan Pengadaan MP-ASI balita 6-24 bulan, peningkatan kinerja program gizi, pemantapan dn evaluasi anemia gizi pada remaja putri semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp483.970.550 Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp482.010.550 atau sebesar 99,60% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini:

a. Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp483.970.550 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp482.010.550 atau sebesar 99,60% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

Tabel 4.15. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Kajian Pengembangan lingkungan sehat

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%

Dapat dilihat dari tabel 4.15 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan,dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan, dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan, dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan, dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkansemuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp1.516.931.900 Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 1.453.775.590 atau sebesar 95,84% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

a. Kegiatan penyemprotan/*fogging* sarang nyamuk

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp365.174.980 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp331.983.500 atau sebesar 90,91% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan fogging fokus sebanyak 140 semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

b. Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksankan kegiatan ini sebesar Rp. 38.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 37.900.000 atau sebesar 99,74% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran untuk jumlah ketersediaan insektisida DBD 50 liter semuanya mencapai cakupan 100 % dari realisasi target kinerja.

c. Kegiatan pengadaan vaksin penyakit menular

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp40.100.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp40.100.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pengambilan vaksin rutin ke Dinas Kesehatan Propinsi 12 bulan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

d. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp82.193.250 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesitar Rp81.875.000 atau sebesar 99,61% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah sebanyak 114 SD dari target 114 SD, pelaksanaan catch up campaign campak SD di 114 SD dari target 114 SD dengan realisasi semuanya sebesar 100%.

e. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp714.391.420 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp692.700.490 atau sebesar 96,96% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.16. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Terlaksananya larvasidasi massal	Kali	2	2	100%
Pelaksanaan PE DBD larvasidasi selektif	Kasus	140	140	100%
Pelaksanaan penemuan BTA(+) TB paru	Kasus	250	250	100%
Pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS	Puskesmas	10	10	100%
Pelaksanaan pengendalian penyakit IMS	Puskesmas	10	10	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.16 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk terlaksananya larvasidasi massal, Pelaksanaan PE DBD larvasidasi selektif, Pelaksanaan penemuan BTA(+) TB Paru, pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan pelaksanaan pengendalian penyakit IMS semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

f. Kegiatan peningkatan imunisasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp87.908.600 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp82.257.000 atau sebesar 93.57% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pembinaan peningkatan cakupan imunisasi, pelaksanaan pengelolaan rantai penyimpanan vaksin dengan realisasi 100%.

g. Kegiatan peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp189.163.650 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp186.959.600 atau sebesar 98,83% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.17. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji	Jemaah	219	217	99,09%
Pelaksanaan vaksinasi meningitis jemaah calon haji	Jemaah	219	217	99,09%
Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB	Kali	5	5	100%
Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu	Bulan	12	12	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji, pelaksanaan vaksinasi meningitis jemaah calon haji, dan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB, Jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp13.909.375.237,81 Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp12.578.379.691 atau sebesar 90,43% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

a. Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp138.290.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp110.792.989 atau sebesar 80.12% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.18. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Standar pelayanan kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan, jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan, jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan, dan jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

b. Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp67.090.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp50.639.000 atau sebesar 75.48% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.19. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**
Evaluasi standar pelayanan kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan T.A 2017 yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) T.A 2018 yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan	Kali	3	3	100%
Jumlah dokumen DHA yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan T.A 2017 yang dihasilkan, jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) T.A 2018 yang dihasilkan, jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan

anggaran yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dan jumlah dokumen DHA yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

c. Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.666.395.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.595.961.090 atau sebesar 95.77% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.20. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan	Kali	1	1	100%
Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan	Kali	2	1	100%
Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	Puskesmas	10	10	100%
Jumlah rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	RS	3	3	100%

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan, jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan, jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan, jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan, jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan dan jumlah rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

d. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp120.800.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp99.257.000 atau 82.17% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.21. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017 Monitoring, evaluasi dan pelaporan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan	Dokumen	4	4	100%
Jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan dan jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

e. Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.930.827.784,19 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.625.280.207 atau sebesar 84.18% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

f. Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Barat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp954.776.563,19 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp792.193.495 atau sebesar 82.97% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

g. Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.085.362.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.081.809.791 atau sebesar 99.67% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan100% dari realisasi target kinerja.

h. Kegiatan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.703.390.125 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.571.562.688 atau sebesar 92,26% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan100% dari realisasi target kinerja.

i. Kegiatan BLUD Puskesmas Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp775.656.492,63 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp735.397.108 atau sebesar 94,81% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan100% dari realisasi target kinerja.

j. Kegiatan BLUD Puskesmas Bumi Ayu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.089.212.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.897.246.748 atau sebesar 82,38% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan100% dari realisasi target kinerja.

k. Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Timah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 500.950.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp443.609.634 atau sebesar 88,55% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

l. **Kegiatan BLUD Puskesmas Jaya Mukti**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.988.846.772,80 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.774.761.209 atau sebesar 89,24% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

m. **Kegiatan BLUD Puskesmas Purnama**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp620.568.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp632.047.259 atau sebesar 101,85% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan100% dari realisasi target kinerja.

n. **Kegiatan BLUD Bukit Kayu Kapur**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.267.210.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.167.821.473 atau sebesar 92.16% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan100% dari realisasi target kinerja.

9. **Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.**

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp9.447.514.900. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp8.226.541.718 atau sebesar 87,08% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

a. **Kegiatan pembangunan puskesmas**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.092.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.070.200.000 atau sebesar 98,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah puskesmas yang dibangun 3 unit dengan realisasi 100%

b. **Kegiatan rehap sedang/berat puskesmas**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp3.549.250.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.399.141.000 atau sebesar 67,60% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah rehabilitasi puskesmas sebanyak 3 puskesmas dengan realisasi 100%

c. **Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.900.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 899.506.718 atau sebesar 99,95% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pengadaan peralatan non kesehatan dipuskesmas sebanyak 5 puskesmas dengan realisasi 100%.

d. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.767.175.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.724.915.000 atau sebesar 98,47% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengadaan pusling roda 2 biasa 5 unit, jumlah pengadaan ambulance transport 4 unit, jumlah pengadaan mobil operasional lapangan 2 unit dan jumlah pengadaan mobil jabatan 1 unit dengan realisasi 100%

e. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan inisebesar Rp1.079.200.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.076.190.000 atau sebesar 99,72% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan rehabilitasi pustu/poskeskel sebanyak 10 unit dengan realisasi sebesar 100%.

f. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp59.889.900 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 56.589.000 atau sebesar 94.49% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah puskesmas yang dibina sebanyak 2 kali dengan realisasi sebesar 100%.

10.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp131.461.650. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp130.790.600 atau sebesar 99,49% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini:

a. Kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp37.290.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 36.980.000 atau sebesar 99,17% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan evaluasi SDIDTK di 10 puskesmas, pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak dan pelaksanakan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak 40 PAUD/TK dengan realisasi sebesar 100%.

b. Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp94.171.650 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp93.810.600 atau sebesar 99.62% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak 1 kali, pelaksanaan pelatihan SHK (Skrining Hipotyroid Kongenital) dan pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan anak semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

11.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp104.145.550 Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp102.088.700 atau sebesar 98,03% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini:

a. Kegiatan pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp104.145.550 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp102.088.700 atau sebesar 98,03% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

Tabel 4.22. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017**

Pelayanan Kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Pelaksanaan lomba senam lansia	Kali	1	1	100%
Pelaksanaan bimbingan teknis program lansia	Kali	2	2	100%
Pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia	Kali	1	1	100%
Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pengelola program lansia	Kali	2	2	100%

Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari ***Tabel 4. 22*** diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk Pelaksanaan lomba senam lansia, Pelaksanaan bimbingan teknis program lansia, Pelaksanaan pertemuan ilmiah kualitas hidup lansia, serta Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pengelola program dengan realisasi semuanya sebesar 100%.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib pendidikan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 23. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran RSUD Kota Dumai Tahun 2017**

Indikator kinerja Sasaran	Satuan	Target Capaian kondisi Akhir 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian (%)
Persentase Pemakaian Tempat Tidur di RSUD (BOR)	%	78	81,19	104
ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3	3,57	119
TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD di Kota Dumai	Hari	1,5	1,06	71
BTO, Frekuensi Pemakaian tempat tidur	Kali	78	64,8	83
GDR (Gross Death Rate). Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	34,31	111
NDR (Nate Death Rate). Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	20	14,23	71

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai

Adapun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Pemakaian Tempat Tidur di RSUD (BOR)

Dengan terbangunnya gedung ruang rawat inap I,II dan III tekah dioperasionalkannya gedung tersebut terutama lantai I dengan bertambahnya jumlah tempat tidur tersebut, angka persentase

tempat tidur yang digunakan di RSUD Kota Dumai selama 2017 yaitu 81,19. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas perawatan Rumah Sakit oleh Masyarakat telah ideal. Adapun standar ideal BOR menurut depked 2005 adalah 60%-85%.

2. **ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di Kota Dumai serta adanya peningkatan pasien dengan kepesertaan BPJS yang dirawat di RSUD Kota Dumai. Dengan demikian Rata-rata lamanya seorang pasien dirawat di Rumah sakit (hari) menjadi 3,57 hari dengan capaian 100% selama tahun 2017. Hal ini terjadi karena diagnosisi pasien yang dirawat oleh dokter memerlukan waktu perawatan yang lebih lama dari target yang ditetapkan.

3. **TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD di Kota Dumai**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di Kota Dumai serta adanya peningkatan pasien dengan kepesertaan BPJS yang dirawat di RSUD Kota Dumai. Dengan demikian jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu antara waktu sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien, sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya yaitu 1,06 hari dengan capaian 100% selama tahun 2017. Hal ini terjadi karena panjangnya antrian pasien yang akan menepati ruangan pearwatan. Angka ini masih dalam batas normal dikarenakan masih tingginya jumlah pasien yang datang dari Kabupaten tetangga yaitu Bengkalis dan Rokan Hilir, dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional.

4. **BTO, Frekuensi Pemakaian tempat tidur**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di Kota Dumai serta adanya peningkatan pasien dengan kepesertaan BPJS yang dirawat di RSUD Kota Dumai. Dengan demikian tingkat penggunaan sebuah tempat tidur selama tahun 2017 adalah 64,80 kali sedangkan batas ideal BTO adalah 40-50 kali/pasien. Hal ini menunjukkan bahwa BTO RSUD Kota Dumai Kurang efisiensi artinya dari angka tersebut terlihat bahwa perlu penambahan tempat tidur di RSUD Kota Dumai.

5. **GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Dimana angka kematian umum untuk setiap penderita keluar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai sebesar 34,31% dengan capaian 100%, hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien yang keluar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai setiap 1000 pasien masih dalam batas normal. Hal ini sesuai dengan standar ideal GDR adalah kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien keluar.

6. **NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Indikator kinerja sasaran ini menunjukkan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar di RSUD Kota Dumai selama tahun 2017 adalah sebesar 14,23% dengan capaian 71%. Sedangkan nilai batas ideal NDR adalah kurang dari 25 orang dari setiap 1000 penderita keluar.hal ini menunjukkan bahwa angka NDR di RSUD Kota Dumai berada dalam batas normal. Dan ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan rumah sakit Umum Daerah Kota Dumai masih baik.

Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 27.641.881.580,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 85.168.432.492,85,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 26.380.286.894,- atau terserap 95,44% dan belanja langsung terserap Rp. 80.705.058.715,-. atau 94,76%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

   Untuk program ini, jumlah anggaran sebesar Rp.1.080.496.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.868.736.750,- atau 80,40% yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan dibawah ini :

   a. **Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

      Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.080.496.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.868.736.750,- atau 80,40%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu hasil terlayaninya masyarakat miskin dan kurang mampu.

2. **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**

   a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Kesehatan.

      Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.362.516.140,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.325.744.200,- atau 89,86%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksananya akreditasi RSUD hasil terlaksananya akreditasi RSUD.

3. **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - paru.**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.61.543.607.902,85,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.58.565.855.201,- atau 67,31 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pembangunan Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.5.101.015.816,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.4.088.633.816,- atau 95,16% realisasi fisiknya sebesar 100%. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pembangunan RSUD Kota Dumai. Dengan hasil terlaksananya pembangunan RSUD Kota Dumai.

b. Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.48.004.731.086,85,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.46.126.279.109,- atau 96,09% dengan realisasi fisiknya 100% . Adapun indikator kinerja keluaran adalah pengadaan Alat-alat Kesehatan rumah sakit. Dengan hasil keluarnya peningkatan pelayanan RSUD Kota Dumai.

c. Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.710.333.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.4.675.131.681,- atau 99,15 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penyediaan obat-obat rumah sakit, hasil untuk terpenuhinya kebutuhan obat-obat rumah sakit.

d. Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.841.892.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.830.942.320,- atau 99,51%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pengadaan bahan-bahan logistic rumah sakit sebanyak 4 kegiatan.

e. Pengadaan Bahan-bahan Logistik keperawatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.325.355.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.298.690.775,- atau 91,80 % realisasi fisik 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pengadaan logistik keperawatan RSUD Kota Dumai.

4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - paru.

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.3.796.763.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.3.776.042.729,- atau 99,45% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.3.497.363.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.3.487.634.000,- atau 99,72 % realisasi fisik 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit.

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.299.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.288.408.729,- atau 96,33% realisasi fisik 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat RSUD Kota Dumai.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.8.996.275.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.8.160.570.000,- atau 90,71% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.8.953.000.000 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.8.118.195.000,- atau 90,68%. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah tenaga kesehatan harian RSUD Kota Dumai dengan hasil terlayaninya pasien RSUD Kota Dumai.

b. Pelatihan dan Pendidikan tenaga Keperawatan RSUD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 43.275.000 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.42.375.000,- atau 97,92% realisasi fisik 100%. Adapun indikator kinerja keluaran Penyediaan tenaga Keperawatan yang Mengikuti Pelatih dengan hasil Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan Tenaga Keperawatan.

6. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.70.000.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.73.161.527.553,- atau 104,52 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.70.000.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.73.161.527.553,- atau 104,52 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan RSUD Kota Dumai.

3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 4. 24. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PUPR Kota Dumai Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Infrastruktur jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	%	2,23	2,19	98,20
		Prosentase infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan	%	3,42	3,23	94,39
2	Mengembangkan sistem drainase dan pengendalian banjir	Prosentase Daerah Pemukiman yang Bebas Banjir dan Kekurangan Air Bersih	%	4,20	3,42	81,44
		Prosentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	24	24	100
3	Tersedianya lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	Prosentase Pembangunan Saluran Drainase demi Kelancaran Air	%	19	17,18	90,42
4	Mengembangkan Fasilitas Peralatan dan Pengujian	Persentase Fasilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat Mendukung Kuantitas dan Kualitas pembangunan Infrastruktur ke PU-an	%	25	25	100

Adapun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun

   Target s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 2,23%, capaian s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 98,20%. Target yang tidak tercapai adalah disebabkan :

   a. Curah hujan yang cukup tinggi
   b. Volume yang ada dikontrak tidak sesuai dengan volume yang ada dilapangan
   c. Ada beberapa kegiatan fisik

2. Prosentase infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan

   Target s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 3,42%, capaian s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 94,39%. Target yang tidak tercapai adalah disebabkan :

   a. Curah hujan yang cukup tinggi
   b. Adanya penyesuaian volume perencanaan dengan volume kondisi dilapangan.

3. Prosentase Daerah pemukiman yang bebas banjir dan kekurangan air bersih

   Target s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 4,20%, capaian s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 81,44%. Target yang tidak tercapai adalah disebabkan :

a. Curah hujan yang cukup tinggi
b. Operasional IKK Medang Kampai belum bisa dilaksanakan karena tidak tersedianya bahan kimia untuk pengolahan air minum
c. Volume perencanaan disesuaikan dengan volume pekerjaan lapangan.

4. Prosentase Daerah sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai
   Target s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 24%, capaian s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 100%.
5. Prosentase pembangunan Saluran Drainase demi Kelancaran Air
   Target s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 19%, capaian s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 90,42%. Target yang tidak tercapai adalah disebabkan :
   a. Curah hujan yang cukup tinggi
   b. Kondisi lapangan yang cukup sulit karena berada pada tanah gambut
   c. Ada beberapa kegiatan fisik tidak diselesaikan 100% oleh kontraktor.
6. Prosentase fasilitas peralatan dan pengujian yang tersedia yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan insfrastruktur ke PU-an
   Target s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 25%, capaian s/d akhir tahun 2017 adalah sebanyak 100%. Target yang tidak tercapai adalah disebabkan

Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 152.095.238.507,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 8.398.698.310,00,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 143.696.540.197,00,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 7.946.096.877,00,- atau terserap 92,99% dan belanja langsung terserap Rp. 133.487.163.411,00,-. atau 92,90%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.80.230.795.296,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.75.497.537.901,00 atau 94,10%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Jalan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.72.044.821.157,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.68.083.893.445,00 atau 94,50%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Jalan yang di bangun sepanjang 37 Ruas dengan realisasi 33 Ruas atau 89,19%

b. Pembangunan Jembatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.7.860.839.439,00,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.7.049.594.456,00 atau 90,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jembatan yang di bangun sebanyak 20 Unit dengan realisasi 20 Unit atau 100%.

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.325.134.700,00,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.319.050.000,00 atau 98,13%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Monitoring Proyek sebanyak 36 buku dengan realisasi 36 buku atau 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.11.801.581.525,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.10.329.286.076,00 atau 87,52% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.9.790.950.500,00,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.8.566.540.262,00 atau 87,49 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Bangunan fasilitas umum/perkantoran yang di bangun sebanyak 1 Unit, dengan realisasi 4 unit atau 100 %.

b. Rehabilitasi Sedang / berat Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.898.466.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.875.286.500,00 atau 97,42%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 12 bulan dengan realisasi 12 bulan atau 100%.

3. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.3.434.591.800,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.3.324.928.704,00 atau 96,81 % Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.130.025.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.2.032.791.204,00 atau 95,44%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang saluran drainase yang dibangun sepanjang 2400 M dengan realisasi 1940 M atau 80,83%.

b. Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong - gorong

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.304.566.800,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.292.137.500,00 atau 99,05%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang saluran drainase yang dipelihara sepanjang 12 bulan dengan realisasi 12 bulan atau 100%

4. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.918.472.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.854.339.969,00 atau 93,02% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Turap/ Talud/ Brojong

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.570.672.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.551.594.050,00 atau 96,66 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah buku perencanaan/DED Turap sebanyak 3 Buku dengan realisasi 3 Buku atau 100%.

b. Pembangunan Turap/ Talud/ Brojong

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.347.800.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.302.745.919,00 atau 87,05 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Turap yang di bangun 150 m dengan realisasi 92 m atau 61,33%.

5. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.18.829.872.831,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.16.920.520.652,00 atau 89,86%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.17.543.487.300,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.15.745.108.952,00 atau 89,75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Jalan yang di pelihara sebesar 12 bulan dengan realisasi 12 bulan atau 100%.

b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.286.385.531,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.175.411.700,00 atau 91,37%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jembatan yang di pelihara sebanyak 12 bulan dengan realisasi 12 bulan atau 100%.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.2.137.479.850,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.2.061.659.800,00 atau 96,45% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.441.807.200,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.429.869.239,00 atau 97,30%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peralatan Laboratorium yang di adakan sebanyak 15 unit dengan realisasi 15 unit atau 100 %.

b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.695.672.650,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.631.790.561,00 atau 96,23%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Alat-alat berat yang di pelihara sebanyak 12 bulan dengan realisasi 12 bulan atau 100%.

7. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.15.261.374.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.14.122.600.142,00 atau 92,54 % Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.6.026.885.500,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.6.021.841.450,00 atau 99,92%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang saluran Sungai yang dibersihkan sepanjang 90.000 m dengan realisasi 130.564 m atau 100 %.

b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.738.792.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 703.634.492,00 atau 95,24 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang saluran Sungai yang dibersihkan sepanjang 1000 m dengan realisasi 1000 m atau 100 %.

c. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 761.274.500,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 673.377.572,00 atau 88,45 %. Jumlah Rehab/Pemeliharaan Pintu Air sebanyak 15 Unit dengan realisasi 100 %.

d. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.7.734.422.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.6.723.746.628,00 atau 86,92 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pembangunan Jaringan Air Minum skala kecamatan 1385 SR dengan realisasi 400 SR atau 28,88 %.

8. Program Pengendalian Banjir

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.1.819.620.900,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.699.993.534,00 atau 93,43% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengendalian Banjir pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.531.954.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.462.412.098,00 atau 95,46%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang dipelihara sepanjang 300 m dengan realisasi 300 m atau 100 %.

b. Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.142.956.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.108.691.336,00 atau 76,03%. Adapun indikator kinerja keluaran Jumlah Buku perencanaan pengendalian banjir yang sesuai dengan kondisi permasalahan sebanyak 80 m realisasi 80 M atau 100 %.

c. Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendalian Banjir

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.144.710.900,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.128.890.100,00 atau 89,07%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pompa air sebanyak 1 Unit dengan realisasi 1 Unit atau 100 %.

9. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.6.339.510.400,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.6.129.157.931,00 atau 96,68% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.497.111.500,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.441.641.800,00 atau 88,84%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 8 kegiatan dengan realisasi 11 kegiatan atau 100%.

b. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.635.787.500,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.551.964.900,00 atau 86,82 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 8 kegiatan dengan realisasi 9 kegiatan atau 100%.

c. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.820.475.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.810.935.250,00 atau 98,84 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 8 lokasi dengan realisasi 6 lokasi atau 100%.

d. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.892.225.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.862.493.300,00 atau 96,67 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 7 lokasi dengan realisasi 6 lokasi atau 100%.

e. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.072.120.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.065.023.531,00 atau 99,34 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 9 lokasi dengan realisasi 9 lokasi atau 100%.

f. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.988.853.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.973.351.750,00 atau 98,43 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 4 lokasi dengan realisasi 4 lokasi atau 100%.

g. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.432.938.400,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.423.747.400,00 atau 99,36%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang di bangun sepanjang 340 M dengan realisasi 340 M atau 100%.

4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Bahwa dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat didalam renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai tahun 2016-2021, maka dapat disampaikan pencapaian pada anggaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 25. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Tahun 2017**

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian (dalam %)
Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	7 Ha	7 Ha	100
Panjang Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	3,42%	2,73%	80
Prosentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	2,79%	7,5%	277,78
Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	5,92%	14,40%	243,24
Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum	3,638 Ha	3,638 Ha	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

Adapun Capaian Indikator Sasaran tersebut yaitu :

a. Fasilitas Lahan untuk Pemakaman Umum

Pemakaman yang dimiliki dan dikelola oleh OPD terkait yaitu Tempat Pemakaman Umum dan Taman Pemakaman Pahlawan berjumlah 2 lokasi dengan program dan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman.

b. Panjang Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan

Untuk melaksanakan indikator sasaran maka dilaksanakan beberapa program yaitu Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini bertujuan untuk membangun jalan lingkungan (semenisasi dan infrastruktur lainnya dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Program ini bertujuan untuk membangun jalan dan jembatan pedesaan.

Jumlah Ruas jalan sesuai dengan Keputusan Walikota nomor 613/DPUPR/2017 berjumlah 2569 ruas jalan (gang dan jalan), dan ruas yang memiliki lebar lebih kecil atau sama dengan 3 meter yang diasumsikan merupakan kewenangan OPD DPRKP dan UPT DPUPR berjumlah 1542 ruas jalan (60% dari 2569 ruas jalan). Tahun 2017 jumlah kegiatan infrastruktur berjumlah 42 ruas jalan/gang dengan lebar lebih kecil dari atau sama dengan 3 meter. Adapun realisasi nya 2,34 % dengan capaian realisasinya 68,42%. Adapun permasalahan adalah sebagai berikut :

1. OPD DPRKP merupakan pemekaran dari SKP PU dan SKPD DKPLH pada tahun 2016/2017.
2. Persentase target dan realisasi belum termasuk kegiatan infrastruktur pada UPT OPD DPUPR

c. Prosentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat

Sesuai dengan buku MPS kota Dumai tahun 2015-2019 menjelaskan bahwa selain tangki septic on site, jumlah yang direncanakan untuk pembangunan sanitasi selama 5 (tahun) berjumlah 40 unit yaitu IPAL,Tangki septic komunal dan MCK ++. Berdasarkan realisasi tahun 2017 telah terbangun 3 unit dengan realisasi IKU nya 7,5 %. Adapun capaian realisasinya berjumlah 277,78 % atau melebih target 2017 yang bersumber APBD Kota Dumai.

d. Persentase pembangunan rumah tidak layak huni

Berdasarkan data yang bersumber Bidang Perumahan OPD DPRKP, jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 3779 RTLH. Yang dilaksanakan pada tahun 2017 lebih kurang 544 unit, yang brsumber dari DAK, Dana Dekonsentrasi (regular), APBD provinsi dan APBD Kota Dumai. Adapaun realisasinya 14,40 % dengan capaian realisasinya 243,24% atau melebihi target 2017.

e. Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum

Indikator ini dilaksanakan dengan satu program, yaitu Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan 2 kegiatan yang bertujuan melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan di Kota Dumai.

Anggaran Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 31.119.988.816,49,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 2.554.098.920,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 28.565.889.896,94,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 2.374.552.448,- atau terserap 92,97% dan belanja langsung terserap Rp. 25.839.546.381,00,-. atau 90,46%. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Pada tahun 2017, jumlah anggaran Rp. 986.111.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.922.138.792,- atau sebesar 93,51 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.465.903.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp.463.025.000,- atau 99,38 % ada pun indicator kinerja keluaran adalah Bertambahnya sarana dan prasarana pada TPU.

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.520.208.450,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 459.113.792,- atau 88,26 % adapun indicator kinerja Terpeliharanya sarana dan prasarana TPU yang baik.

2. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Pada tahun 2017, jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.5.422.212.476,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.5.299.043.269,- atau 97,73% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. **Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.5.422.212.476,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.5.299.043.269,- atau 97,73% Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya infrastruktur lingkungan kawasan pemukiman yang layak dan baik.

3. Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 282.345.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 278.223.000,- atau 98,54% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 282.345.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 278.223.000,- atau 98,54% . Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tercapainya penyediaan jalan dan jambatan wilayah kelurahan basis pertanian/perkebunan

4. Program Pengembangan Perumahan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 6.240.851.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.957.302.255,- atau 79,43% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Perumahan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.623.046.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.504.502.446 atau 95,48 % Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana perumahan yang baik dan sehat bagi masyarakat kurang mampu/masyarakat miskin.

b. Kegiatan Pembangunan Sanitasi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.617.805.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.452.799.809 atau 67,80 % Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kelurahan Yang Melaksanakan Kegiatan sanitasi.

5. Program Pembinaan dan Pengembagan Bidang Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Pengembagan Bidang Ketenagalistrikan merupakan kegiatan yang berjalan di bidang listrik, pada penerangan jalan umum pada khususnya. Adapun pada program ini memiliki dua kegiatan yaitu kegiatan pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum, dan pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum. Adapun program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 14.081.824.550,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.001.891.794,- atau (92,33%) :

a. Pengembangan Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum

Pengembangan Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum dianggarkan dana sebesar Rp. 1.442.057.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 1.417.888.000 atau terealisasi (98,32%). Dengan indicator Tersedianya penerangan jalan umum Yang Memadai dan baik di Kota Dumai.

b. Pemeliharaan Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum

Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum dianggarkan dana sebesar Rp. 12.639.767.550,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 11.584.003.794,- atau terealisasi (91,46%). Dengan indicator Terpeliharanya penerangan jalan umum yang memadai dan baik se-Kota Dumai.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

1. Belum sinkronnya antara juklak dan juknis baik angaran maupun pelaksanaan antara kebijakan pusat, lintas instansi vertikal maupuun pusat dan daerah seperti Dana Alokasi Khusus. Isu tersebut mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan DAK.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana maupun SDM PNS yang memahami kegiatan terkait.
3. Lemahnya kelompok masyarakat maupun organisasi masyarakat dalam mengemban kegiatan yang bersifat swakelola

5. URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 26. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2017**

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian (dalam %)
Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konflik sosial yang ditindaklanjuti	60%	60%	100

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

Adapun realisasi pelaksanaan Indikator pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut Indikator kinerja sasaran : Jumlah anggota Kominda Dumai dan terselenggaranya kegiatan komunikasi informasi inteligen Daerah Kota Dumai, anggota Kominda yang aktif 33 orang dengan 12 kali rapat dan pertemuan dengan penganganan laporan 120 kasus gangguan kamtibnas dan konflik sosial

Anggaran Belanja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.706.154.116,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 1.097.244.480,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.608.910.200,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 1.097.244.480,- atau terserap 100% dan belanja langsung terserap Rp. 3.526.540.116,- atau 97,72%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

   Indikator hasil program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah terciptanya keamanan Kota Dumai dengan capaian 80%. Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.670.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.645.063.318,- atau 98,5% dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

   a. **Pada kegiatan Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat inteligen daerah**

      Jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 537.950.000,- dari dana yang dialokasikan dapat terealisasikan sebesar Rp. 530.000.000,- atau 98,52%. Indikator kinerja keluarannya adalah jumlah anggota Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA) yang aktif sebanyak 33 orang di Kota Dumai .

   b. **Kegiatan Pemantauan Kegiatan dan Aktifitas Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat**

      dialokasikan dana sebesar Rp. 159.250.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 159.248.290.- atau 100%. Indikator kinerja keluarannya adalah adanya Pedoman dan Pemantauan Ormas, LSM diKota Dumai dengan hasil terpantaunya dan terkumpulnya 100% data ormas dan LSM (lembaga swadaya masyarakat)

   c. **Kegiatan PEngawasan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah**

      dialokasi dana sebesar Rp. 319.250.000.- terealisasi sebesar Rp. 317.975.000,- atau 99,60%. Indikator kinerja keluarannya adalah pendataan dan pemantauan orang asing di Kota Dumai dengan hasil tersedianya pusat informasi tentang kegiatan orang asing di Kota Dumai.

d. Kegiatan Rumusan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah

dialokasikan dana sebesar Rp. 653.650.000.- terealisasi sebesar Rp. 637.840.028.- atau 97,58%. Indikator kinerja keluarannya adalah meningkatnya pengetahuan aparatur dan stakeholder yang terkait informasi potensi konflik dan terselenggaranya rakor/pertemuan rutin guna percepatan penyelesaian realisasi rencana aksi Kota Dumai Tahun 2017 dengan hasil tercapainya pemahaman anggota teknis pelaporan penyampaian rencana aksi Kota Dumai.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator hasil program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai dengan capaian kerukunan umat dari 7 agama/kepercayaan di Kota Dumai. Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 95.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 82.690.000,- atau 87,04% dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 47.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.110.000,- atau 78,96%. Indikator kinerja keluarannya adalah terselenggaranya rapat – rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan hasil terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai dengan dengan terselenggaranya kegiatan 4 kali rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

b. Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

Dengan dana sebesar Rp. 48.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.580.000,- atau 94,96%. Indikator kinerja keluarannya adalah terselenggaranya rapat-rapat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan terbentuknya pengurus FPK tingkat Kecamatan, dengan hasil terciptanya kerukunan antar 18 suku di Kota Dumai.

3. Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

Indikator hasil program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan adalah tersampaikannya informasi tentang pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat/pelajar Kota Dumai, dengan kegiatan Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan dengan alokasi dana Rp. 121.626.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.626.000,- atau 100%. Indikator Kinerja keluarannya yaitu tersampaikannya informasi tentang pemahaman 4 pilar wawasan kebangsaan kepada pelajar di Kota Dumai sebanyak 100 orang.

4. **Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**

   Indikator hasil program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan adalah terwujudnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 55.600.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 41.033.038 dengan 1 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini masyarakat dengan Indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya 4 kali rapat FKDM yang mencapai 100%.

5. **Program Pendidikan Politik Masyarakat**

   Indikator hasil program Pendidikan Politik Masyarakat adalah tersosialisasinya informasi tentang politik dan meningkatnya wawasan masyarakat tentang politik, dengan kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik. Alokasi dana yang ditetapkan Rp. 135.000.000 dna terealisasi sebesar Rp. 131.306.000 atau 97,26%. Indikator kinerja keluarannya adalah meningkatnya wawasan masyarakat tentang politik di Kota Dumai sebayak 140 orang.

Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian (dalam %)
Cakupan patrol petugas Satpol PP Kota Dumai	2,25 Patroli/Kec	2,25 Patroli/Kec	100%
Persentase peningkatan jumlah petugas Linmas dan masyarakat yang sigap dan tanggap	N/A	-	-
Persentase perda yang ditegakkan	40%	40%	100%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	50%	51,15	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Capaian keberhasilan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2017 terdiri dari 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. **Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai**

   Cakupan patroli ini dengan kegiatan mengamati dan mengawasi kondisi kota yang mampu memberikan rasa tentram dan kondisi yang tertib dalam masyarakat. Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan dan tempat keramaian/hiburan baik hiburan permainan maupun hiburan malam. Tetapi dalam implementasi Patroli yang dilaksanakan tidak mencakup 7 kecamatan se- Kota Dumai tetapi diprioritaskan sesuai kemampuan dan kekuatan personil di 4 Kecamatan, yaitu Dumai Kota, Dumai Timur, Dumai Selatan dan Dumai Barat.

   Maka Capaian Kinerja Cakupan Patroli pada tahun 2017 adalah :

$$\text{Cakupan Patroli} = \frac{3 \text{ kelompok x } 3 \text{ kali}}{4 \text{ Kecamatan}} = 5 kalipatroli / Kec$$

Sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian Laporan Kinerja Satpol PP Tahun tahun 2016 yang menggunakan rumusan sesuai Permendagri 86 tahun 2017, maka disampaikan realisasi Cakupan Patroli dengan 4 Kecamatan yaitu :

$$\text{Cakupan Patroli} = \frac{2 \text{ kelompok x } 3 \text{ kali}}{4 \text{ Kecamatan}} = 1{,}5 kalipatroli / Kec$$

Maka terjadi peningkatan dari 1,5 Patroli/Kec menjadi 2,25 Patroli/Kec yang disebabkan ada penambahan anggaran operasional Satpol PP dan Efektifitas mobil patroli yang sudah bisa digunakan kembali. Patroli di 4 Kecamatan meliputi sasaran antara lain Penertiban Perizinan Usaha Warung Internet, Penertiban Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan sudirman dan area Bukit Gelanggang, Penertiban Karaoke yang melewati batas waktu izin operasi yang ditentukan oleh OPD Terkait, serta Pengechekan perizinan Tempat Usaha Salon dan Karaoke. Namun pencapaian hal tersebut diatas masih dibawah target SPM Nasional yaitu 3 Patroli/Kec sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2. Persentase Peningkatan Jumlah Petugas Linmas Dan Masyarakat Yang Sigap Dan Tanggap

Sesuai Peraturan Walikota Dumai Nomor 66 Tahun 2016 tentang SOTK Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, maka terjadi perubahan urusan wajib Linmas yang sebelumnya di Kantor Kesbang Kota Dumai. Pada tahun 2017 tidak diketemukan data-data pendukung untuk menjawab capaian kinerja pada sasaran sesuai Permendagri 86 tahun 2017.

3. Persentase Perda/Perwako yang ditegakkan

Dalam pelaksanaan indikator kinerja Perentase Perda/Perwako yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Dumai meliputi 18 Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang akan ditegakkan baik dalam bentuk operasi penegakkan Non Yustisi ataupun penegakkan Yustisi.

Dalam target tahun 2017, Satpol PP akan melakukan secara bertahap dengan kekuatan anggaran penegakkan Peraturan Daerah yang meliputi 8 (delapan) Peraturan Daerah Kota Dumai atau sebanyak 40% dari jumlah Perda/Perwako, yaitu :

a. Perda Nomor 12 Tahun 2002 tengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum
b. Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatatn Sipil
c. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
d. Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Warnet
e. Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai

f. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
g. Perda Nomor 24 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Pariwisata
h. Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Secara lengkap data pencapaian disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.28. Pencapaian kinerja berdasarkan tindak lanjut dari Penegakan Peraturan Daerah

NO	NO PERDA	URAIAN TEMUAN LAPANGAN	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	% TINDAK LANJUT
1	Perda Nomor 12 Tahun 2002	1. Terjadinya pelanggaran lokasi pedagang kaki lima yang menggunakan fasum Kota Dumai 2. Tidak komitmen pedagang yang menempati lokasi di areal bukit gelanggang dengan masih meninggalkan gerobak. 3. Diketemukan pelanggaran yang langsung diberikan teguran lisan dan tertulis	212	100	40%
2	Perda Nomor 6 Tahun 2017	1. Tidak membawa KTP saat beraktifitas di luar rumah 2. Masih ada penduduk luar Dumai yang bekerja dan menetap tetapi belum meribah domisili 3. Tidak mempunyai KTP walupun usia sudah harus memiliki KTP	309	309	100%
3	Perda Nomor 11 Tahun 2011	Diketemukan badan usaha/toko yang belum membayar pajak reklame kepada daerah	16	16	100%
4	Perda Nomor 24 Tahun 2010	Menemukan pengusaha warnet yang belum memiliki ijin dan jam buka melewati batas waktu	13	13	100%
5	Perda Nomor 11 Tahun 2002	Ditemukan bangunan yang belum mengurus IMB dan dibuat teguran untuk mengurus ke instansi terkait	12	12	100%
6	Perda Nomor 1 Tahun 2016	Banyak bangunan gedung yang penggunaan atau pemanfaatan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam surat ijin bangunan gedung	157	157	100%
7	Perda Nomor 24 Tahun 2017	Dijumpai prosedur dan tatacara pemberian ijin usaha pariwisata yang sudah mati atau tidak sesuai peruntukannya dalam ijin yang dikeluarkan	32	32	100%
8	Perda Nomor 22 Tahun 2011	Diketemukan tempat usaha yang menjual minuman beralkohol melebihi batas maksimun yang diijinkan	26	26	100%

Dalam pencapaian penegakkan Peraturan Daerah tersebut diatas dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian bentukan tindakan di lapangan dengan Operasi Penegakkan Perda Non Yustisi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenagan Menindak terhadap anggota masyarakat atau badan hukum yang melanggar ketentuan dan obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Represif Non Yustisial. Yang dimaksud dengan tindakan Represif Non Yustisial adalah Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan Represif atau penindakan pada pelanggar Peraturan Daerah, namun

mereka tidak dapat meneruskan tindakan sampai penyidikan seperti halnya aparat Polri kecuali bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)

Pada tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja menerima laporan sebanyak 85 kasus pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Dumai yang langsung terkait dengan ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3). Selain laporan dari masyarakat atau instansi terkait, Satpol PP Kota Dumai juga mengidentifikasi terdapat 46 pelanggaran K3. Pelanggaran yang dilaporkan maupun temuan Satpol PP Kota Dumai dilapangan meliputi kejadian sebagai berikut :

- Pemanfaatan trotoar jalan untuk usaha kaki lima
- Pemakaian jalur hijau yang tidak sesuai peraturan
- Pedagang kaki lima yang membuang sampah sembarangan
- Para pengamen anak-anak di lampu merah Kota Dumai
- Penertiban pengemis jalanan di Kota Dumai
- Pemakaian badan jalan yang menggangu ketertiban masyarakat
- Penggunaan warnet yang melanggar jam operasi dan masih ada pelajar pada jam pelajaran di warnet-warnet
- Pengamanan orang gila yang potensi pengganggu ketentraman masyarakat
- Melakukan penghentian sementara/penyegelan pembangunan yang belum mengantongi ijin atau IMB dari instansi terkait.

Tetapi dari jumlah pelanggaran K3 tersebut sebanyak 131 kasus maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan sesuai kewenangannya dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dapat diselesaikan sebanyak 67 kasus dengan tindakan yang ambil yaitu :

- Patroli Pengawasan dan Pemantauan
- Teguran langsung
- Teguran tertulis
- Pengambilan barang dagangan sementara yang terus melanggar
- Tindakan penyegelan.

Maka capaian kinerja sasaran Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) adalah :

$$\text{Persentase Tingkat Penyelesaian} = \frac{\text{Pelanggaran Terselesaikan}}{\text{Kasus Pelanggaran}} = \frac{67}{131} = 51{,}15\%$$

Anggaran Belanja Daerah OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 8.559.124.260,- dengan rincian Belanja Tidak

Langsung (BTL) Rp. 5.318.308.260,- sedangkan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.240.816.000,-. Untuk realisasi Belanja Daerah OPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 sebesar Rp. 8.251.843.700,- atau capaian realisasi 96,41%. Capaian tersebut dengan rincian realisai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.069.294.877,- Atau capaian 95,32% dan Realisasi Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.182.548.823,- atau capaian 98,20 %. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

   Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ini sebesar Rp. 1.366.833.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.353.998.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 98,06% dengan capaian indikator program yaitu persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan target 70% tercapai sebesar 70% dengan capaian target mencapai 100%, melalui kegiatan di bawah ini :

   a. **Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

      Dialokasikan dana sebesar Rp. 826.800.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 825.100.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau sebesar 99,79%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dari target sebesar 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja mencapai 100%.

   b. **Pengendalian Keamanan Lingkungan**

      Dialokasikan dana sebesar Rp. 420.816.000,- (empat ratus dua puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), direalisasikan sebesar Rp. 414.616.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) Atau sebesar 98,53%. Adapun capaian indikator keluaran(output) kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dari target sebesar 3 kegiatan terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau capaian kinerja 100%.

   c. **Pembinaan dan pendampingan pengawas keamanan dan kenyamanan lingkungan di kecamatan dan kelurahan**

      Dialokasikan dana sebesar Rp. 119.217.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 114.282.000,- (seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Atau sebesar 95,86%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pembinaan dan pendampingan pengawas keamanan dan kenyamanan lingkungan dari target 1 kegiatan terealisasi 1 kegiatan atau capaian kinerja 100%.

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal ini sebesar Rp. 310.160.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 310.160.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100% dengan capaian indikator program yaitu persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan target 70% dengan realisasi sebesar 70% atau capaian target sebesar 100%, yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

dialokasikan dana sebesar Rp. 174.460.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)', dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 174.460.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 100%. Adapun capaian indikator keluaran(output) kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dari target 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan atau capaian kinerja 100%.

b. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan

dialokasikan dana sebesar Rp. 135.700.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 135.700.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), atau sebesar 100%. Adapun capaian indikator keluaran(output) kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan dengan target sebesar Jumlah Operasi Yustisi 1 kali terealisasi juga 1 kali dengan capaian kinerja 100%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ini sebesar Rp. 176.675.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 176.675.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 100% dengan capaian indikator program yaitu peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan target sebesar 15%, maka realisasi sebesar 15% atau capaian kinerja sebesar 100%, yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Perlindungan Masyarakat dan Hari Bela Negara

dialokasikan dana sebesar Rp. 176.675.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp.

176.593.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 99,95%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Perlindungan Masyarakat dan Hari Bela Negara dari target 1 kegiatan terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau capaian kinerja 100%.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pencapain Indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra BPBD dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017 yang diselenggarakan oleh SKPD BPBD dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4. 29. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dumai Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Kondisi Akhir Tahun 2021	Realisasi S/D Tahun 2017	Capaian (%)
1.	Tingkat waktu tanggap darurat	< 15 pemukiman < 30 lahan < 60 lahan	< 30 pemukiman < 45 lahan < 75 lahan	99,14
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya	15%	8	53,33

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Adapun Realisasi Pelaksanaan Indikator pada Tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya dengan kegiatan Penyuluhan Pencegahan bencana kebakaran dengan jumlah dana Rp 33.295.000,- dan terealiasi sebesar Rp 24.095.000,- atau 72.37% dengan indikator kinerja keluaran jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan ancaman bahaya kebakaran.
2. Indikator Kinerja Tingkat Waktu Tanggap Darurat dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp 483.063.000,- dan terealisasi sebesar Rp 452.641.500,- atau 93.70% dengan indikator kinerja keluaran jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran.

Tabel 4. 30. Jumlah Kejadian Kebakaran di Kota Dumai Tahun 2017

Bulan	Pemukiman	Toko/kedai/kios	Hotel	Kapal	Hutan/ Lahan	Lain-lain	Korban bendan	Korban jiwa
Januari	-	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-
Februari	1 kali	-	-	1 kali	-	-	-	-
Maret	2 kali	-	-	-	-	-	-	-
April	2 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-
Mei	2 kali	-	-	-	-	-	-	-
Juni	2 kali	-	-	-	-	-	-	-
Juli	1 kali	Ikali	-	-	-	1 kali	-	-
Agustus	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	1 kali	-	-
Oktober	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
November	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	1 kali	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	13 kali	4 kali	-	1 kali	-	4 kali	-	-

Sumber : Laporan Tahunan UPT. Pemadam Kebakaran Kota Dumai, 2017

Tabel. 4. 31. Data kejadian Kebakaran di Kota Dumai Dirinci Menurut Kecamatan dan Lokasi Tahun 2017

Wilayah	Pemukiman	Toko/kedai/kios	Hotel	Kapal	Hutan/ Lahan	Lain-lain	Korban bendan	Korban jiwa
Dumai Kota	5 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-
Dumai Barat	2 kali	-	-	-	-	-	-	-
Dumai Timur	3 kali	2 kali	-	-	-	1 kali	-	-
Dumai Selatan	2 kali	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	-
Sungai Sembilan	-	-	-	-	-	-	-	-
Medang Kampai	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukit Kapur	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-
Jumlah	13 kali	4 kali	-	1 kali	-	4 kali	-	-

Sumber : Laporan Tahunan UPT. Pemadam Kebakaran Kota Dumai, 2017

Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.630.600.900,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.417.650.900,00,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.212.950.000,00,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.281.838.632,00,- atau terserap 96,03% dan belanja langsung terserap Rp. 1.772.816.717,00,- atau 80,11%. Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.**

   Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 91.765.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 65.834.000,- atau 71,74%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Pencegahan Dini Tahun 2017 ada 2 Kegiatan sebagai berikut :

   a. **Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Bencana Alam.**

      Jumlah Anggaran sebesar Rp. 44.320.000,- dengan realisasi penyerapan Rp.37.729.000, atau 85,13% %.

   b. **Kegiatan Identifikasi Potensi dan Dampak Bencana.**

      Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 47.445.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.105.000,- atau 59,24%.

2. **Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Kebakaran**

   a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran

      Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 33.295.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.095.000,-atau 72,37%.

   b. **Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran**

      Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 114.970.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 113.978.425,-atau 99,14%.

c. **Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 486.063.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 452.641.500,-atau 93,70%.

3. **Program Penyelenggaraan penanggulangan bencana**

a. **Fasilitas Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 403.750.000. dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 171.735.000,- atau 42,53%.

4. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.**

a. **Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana,**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 82.517.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 77.451.600 atau 93,86%,-.

6. URUSAN WAJIB SOSIAL
Dinas Sosial

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/313/OTDA Tanggal 24 Januari 2011, Program nasional yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota adalah (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, (2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, (3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma (4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo (5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) (6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, ,yang disampaikan pencapaiannya pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.32. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2017

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Jumlah sarana sosial	13	21	100%
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	13.500	11919	88%
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	62	127	205%

Sumber : Dinas Sosial Kota Dumai

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang termasuk di dalam indikator kinerja sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Jumlah sarana sosial 21**

Maksud dari indikator ini, dimana adanya 21 lembaga kesejahteraan sosial di Kota Dumai yang menjadi sarana sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial diantaranya : (1) Adanya 11 (sebelas) panti asuhan anak yang merupakan milik swasta (2) Solidaritas masyarakat peduli

sosial (SMPS) (3) Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) (4) Forum komunikasi anak dengan kecacatan (FKADK) (5) LSM Matahati (6) LSM Bahtera (7) Rumah Sosial Fakir Miskin (RSFM) (8) SLB Asyifa Maimanah (9) Panti Jompo Dhu'afa " Sayang Ummi "(10) Wanita Dumai berkarya (Waduya) (11) Perempuan Dumai Berbakti (Pedati). Hal ini menunjukkan bahwa peranan masyarakat sangat berpengaruh didalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. **PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial 11.919**

   Uraian dari indikator ini, dimana Pemerintah melaksanakan program raskin/rastra para penyandang masalah kesejahteraan sosial mendapatkan bantuan berupa beras 15 (lima belas) kg /bulan per RTM yang diperuntukan kepada 8.481 RTM Kota Dumai yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tigapuluh tiga) Kelurahan. Disamping itu bagi keluarga miskin pemerintah Pusat juga menjalankan program keluarga harapan (PKH) dengan dimulai tahun 2013 sampai 2017 dengan jumlah penerima bantuan keluarga penerima manfaat sebanyak 3.360 KPM dengan nilai sebesar Rp. 408.229.000 ,- yang digelontorkan setiap triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sangat miskin telah meningkat kesejahteraannya. Kota Dumai pada tahun 2017 memiliki Kelompok Usaha Bersama yang mendapat bantuan dana sebesar Rp. 600.000.000,- untuk 30 KUBE yaitu 20 (Dua puluh) Kube untuk Kecamatan Sei.Sembilan, 6 (enam) Kube untuk Kecamatan Medang Kampai dan 4 (empat) Kube untuk Kecamatan Dumai Selatan yang berasal dari Dana Dekosentrasi Provinsi Riau. Program ini merupakan program Dinas Sosial Provinsi Riau yang diperuntukan bagi keluarga miskin yang mau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang diperuntukkan bagi lansia miskin dan atau terlantar di Kota Dumai mendapatkan bantuan langsung dari Kementrian Sosial RI sebanyak 48 orang melalui PT.BNI dengan alokasi dana sebesar Rp. 96.000.000,-

3. **Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 127**

   Uraian dari indikator ini, pembinaan terhadap penayandang masalah sosial ini secara komprehensif mengingat keterbatasan tenaga dan fasilitas untuk melakukan pendidikan dan pelatihan tersebut. Dengan dikirimnya anak putus sekolah ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai -Pekanbaru sebanyak 7 (tujuh) orang di tahun 2017. Pada tahun 2017 ini juga adanya pengiriman pasien gangguan jiwa yang dikirim Rumah Sakit Jiwa Propinsi Riau sebanyak 30 kasus. Penanganan dan pendampingan melalui Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) sebayak 50 kasus yang ditangani langsung Pekerja Sosial, sedangkan untuk kasus anak berhadapan dengan hukum pada tahun ini sebanyak 40 kasus/orang anak yang penanganannya langsung pendampingannya dilakukan oleh pekerja sosial mulai dari tingkat kelurahan, polres dan kejaksaaan.

Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.6.610.503.796,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.2.344.917.060,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.4.265.586.736,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 2.047.992.781,- atau terserap 87,33% dan belanja langsung terserap Rp. 3.706.086.455,- atau 86,88%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial.**

   Pada tahun 2017, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 408.229.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 345.016.220,- atau 87,24% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

   a. **Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

      jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 308.529.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 252.739.884,- atau 81,92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya data PMKS dan PSKS, tersedianya data Verivali PBI JKN dan tersedianya data Bantuan Sosial Non Tunai (Ranstra dan PKH).

   b. **Kegiatan Pengembangan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)**

      Jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 99.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 92.276.336,- atau setara dengan 92,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH.

2. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

   Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp1.186.236.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.010.267.937,- atau 72,58% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

   a. **Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal**

      Jumlah anggaran Rp. 37.108.000,- dengan realisasi Rp. 17.512.500,- atau 47,19%. Adapun jumlah yang mengikuti praktek belajar kerja bagi anak cacat, anak terlantar dan jalanan dengan melaksanakan Pelatihan di PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Pekanbaru 7 orang

   b. **Penanganan masalah-masalah stratgis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 148.984.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp132.984.500,- atau 89,26% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya bantuan kepada korban bencana. Yang mengalami korban bencana selama tahun ini sebanyak 614 KK dengan rincian jumlah korban

bencana kebakaran rumah di Kota Dumai yang ditangani sebanyak 15 KK dengan 9 kali kebakaran di Kota Dumai selama tahun 2017, sedangkan 599 KK adalah korban banjir yang terjadi 1 kali dalam setahun.

c. Kegiatan Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 153.300.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 116.717.675,- atau 76,14% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah berkurangnya masyararkat gangguan jiwa di Kota Dumai, jumlah PMKS yang dilayani untuk menunjang Program Nasional (Bebas Pasung, Bebas anak jalanan, penutupan lokalisasi).

d. Kegiatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan , Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 85.260.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 23.824.243,- Atau 27,94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Penghormatan kepada Veteran yang telah berjuang membela NKRI

e. Kegiatan Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 56.450.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.356.295,- Atau 76,80% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Adanya tenaga pendamping untuk pengemangan usaha bersama yang dilakukan secara kontinue.

f. Kegiatan Penyaluran beras bagi keluarga kurang mampu dengan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 535.782.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp515.921.224,- Atau 96,29% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah ranstra atau raskin tersalurakan kepada masyarakat kurang mampu.

g. Kegiatan perlindungan Sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.169.351.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.159.951.500,- atau 94,45%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya kegiatan penangganan TKI bermasalah, orang terlantar dan korban tindak kekerasan , jumlah PMKS yang dilayani.

3. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 128.960.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 106.041.582,- atau 82,23% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 128.960.000,-

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp Rp. 106.041.582,- atau 82,23% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelatihan khusus bagi penghuni panti asuhan/jompo.

4. **Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya.**

   Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 181.719.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 92.404.000,- atau 48,03% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

   a. **Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 62.325.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 24.330.000 atau 39,04% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pecandu narkoba yang di rehab di panti rehabilitas kecanduan narkoba dan jumlah PMKS yang di berikan ilmu keterampilan berusaha.

   b. **Kegiatan Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial**

      Jumlah anggaran Rp. 119.394.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 68.074.000,- atau 57,02% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah gepeng dan penyakit social lainnya yang dikembalikan ketempat asalnya.

5. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

   Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 298.341.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 275.317.000,- atau 92,51% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

   a. **Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.961.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 94.106.000,- Atau 93,21% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan senam lansia, keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan sunattan massal, jumlah pelaku usaha yang bekerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

   b. **Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 197.380.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 181.211.000,- atau 91,81% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Peningkatan Kinerja TKSK, Peningkatan Kinerja PSM, Peningkatan Kinerja Kessos Masyarakat, Jumlah Peningkatan SDM yang menjadi mitra Kerja Sosial.

Adapun penghargaan yang diperoleh dapat dilihat dengan penghargaan yang diperoleh Dinas Sosial Kota Dumai sebagai berikut :

1. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2010 Peringkat 3 an. ARNITA.
2. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2011 Peringkat 7 an. YUSI YANTI.
3. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2012 Peringkat 3 an. MURTIANINGSIH.
4. ORSOS (Organisasi Sosial) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2012 a.n Yayasan Hidayatullah
5. Peringkat 1 Karang Taruna berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2012 Kel. Teluk Makmur.
6. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2014 Peringkat 1 an. NASRI BUTAR-BUTAR.
7. ORSOS (Organisasi Sosial) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2010 Peringkat 1an. Yayasan Halimahtussa'diah Muhammadiyah.
8. Peringkat 1 Karang Taruna berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2010 Kel. Sukajadi.
9. TKSK berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2014 Peringkat 4 an. ARNITA.
10. Peringkat 1 Tk. Nasional Tahun 2014 an. SUPARJIH Penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial.
11. Peringkat 2 TKSK berprestsi
12. Peringkat 3 PSM berprestasi

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

7. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 4.33. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian
1.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	72%	75%	75%
2.	Kota Layak Anak	Madya	Madya	100%
3.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Tidak ada program dan kegiatan yang mendukung indikator ini	-	-
4.	Rasio KDRT	1:6253	1:6253	6:73962
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	13,33	13,33	100%
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	16 %	16 %	100%

Terlihat dari tabel 4.33 di atas pada sasaran misi kedua ini dengan 6 indikator sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Target dari indikator sasaran ini yaitu Pendampingan kasus Perempuan dan Anak dengan terlaksana nya Kegiatan Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak . pada tahun 2017 menangani 60 kasus diantaranya ;1.kasus KDRT sebanyak 7 kasus 4 kasus diselesaikan dengan kegiatan konseling keluarga dan 3 kasus masih dalam proses.2. kasus kasus Kekerasan terhadap perempuan (KTP) sebanyak 4 kasus semuanya telah diselesaikan dengan mediasi dan konseling keluarga 3. Kasus percobaan pencabulan dan Persetubuhan sebanyak 24 kasus , 1kasus sudah diselesaikan dengan mediasi karenan kasus ini masih dalam tahap percobaan pencabulan dan 23 kasus masih dalam proses dan kami juga melakukan pendampingan melalui konsultasi hukum dan melakukan konseling melalui psikolog. 4. Kasus Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 17 kasus , 11 kasus sudah selesai melalui putusan pengadilan dan difersi di kepolisian dan 6 kasus masih dalam proses ini juga kami lakukan layanan psikolog dan konsultasi hukum.5. Kasus Pemisahan terhadap anak (PTA) sebanyak 4 kasus 1 kasus telah selesai melalui kesepakatan kedua belah pihan dalam layanan mediasi kedua belah pihak orang tua berhak menemui anaknya dengan bergantian mengasuh bagi haridan 3 kasus masih dalam proses ini juga masih dalam proses mediasi .6. Kasus Kekerasan terhadap anak (KTA) sebanyak 2 kasus ,kedua kasus ini sudah diselesaikan melalui mediasi .7 kasus Penelantaran Pendidikan sebanyak 2 kasus, 1 kasus sudah diselesaikan melewati mediasi dengan pihak keluarga dan sekolah

hasilnya anak dapat diterima kembalai disekolah yang bersangkutan.dan 1 kasus masih dalam proses.

2. Kota layak anak

Target dari indikator sasaran ini yaitu terselenggaranya bimbingan teknis terhadap 20 aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kota Dumai, Bimbingan teknis Konveksi hak anak bagi 40 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Dumai, serta Bimtek Sekolah Ramah Anak bagi 100 orang tenaga pendidik di Sekolah Kota Dumai, serta terselenggaranya Pesta Demokrasi Forum Anak Sekota Dumai. Dengan dilaksanakan Kegiatan ini pada Tahun 2017 telah terjadi peningkatan pencapaian Kota Layak Anak pada tahun 2016 dari Tingkat Paratama menjadi Madya, dilihat dari peningkatan kinerja dengan terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kota Dumai yang sebelumnya pada Tahun 2016 berjumlah 2 di Kelurahan menjadi 15 PATBM di Kelurahan, dan telah dikukuhkannya Forum Anak Kota Dumai periode 2017- 2019, serta di kukuhkannya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Dumai. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh meningkatnya kapasitas dan jaringan Forum Anak Dumai melalui pembinaan dan pertemuan Forum Anak dalam mewujudkan Dumai menjadi Kota Layak Anak.

3. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Tidak ada Program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama ini karena tidak di temukan pekerja anak dibawah umur di kota Dumai.

4. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rasio KDRT dalam rumah tangga adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 Rumah tangga.

$$\text{Rasio kdrt tahun } 2017 = \frac{7\,(\text{P2TP2A}) + 488\,(\text{PA})}{73692} = 6{,}36$$

Jadi rasio KDRT dalam tahun 2017 sebanyak 6:73962 Rumah tangga sedangkan untuk target dari indikator sasaran ini pada tahun 2017 sebesar 1:62030. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi undang - undang KDRT di masyrakat, masih adanya anggapan masyarakat bahwa KDRT merupakan hal tabu untuk dibicarakan di luar, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor jika ditemukannya kasus KDRT. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut yakni dengan terlaksananya kegiatan pengembangan pusat layanan terpadu masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Dumai. Pusat layanan terpadu masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

sekretariatnya berada di exs.Puskesmas Jaya Mukti Jl. Janur Kuning Jaya Mukti Dumai. Pusat layanan terpadu masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) memiliki koordinator Sekretariat P2TP2A 1 orang, petugas pendamping 6 orang dan petugas konselor 1 orang. Pusat layanan terpadu masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam pendampingan kasus petugas pendamping melakukan kerjasama lintas sektoral seperti layanan konseling, layanan hukum dan layanan psikologis. Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak s.d Tahun 2017 yang telah ditangani oleh Pusat Layanan Tepadu masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebanyak 60 kasus, dan dari 60 kasus tersebut dijumpai kasus KDRT sebanyak 7 kasus dan dari 7 kasus tersebut 4 kasus sudah selesai sedangkan 3 kasus lagi dalam proses. Selain itu dari 60 kasus kekerasan perempuan dan anak telah dilakukan layanan Konseling kepada klien sebanyak 40 kasus, layanan konsultasi psikologis sebanyak 28 kasus, layanan konsultasi hukum sebanyak 40 kasus. Dari 60 kasus kekerasan perempuan dan anak yang telah diberikan pendampingan sebanyak 22 kasus selesai ditangani.

5. **Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik dimana kegiatan ini melibatkan OPD dan Perempuan Partai Politik dan Legislatif yang berjumlah 50 orang, sehingga diharapkan adanya peningkatan partisipasi perempuan untuk ikut berkecimpung di bidang Politik dan Jabatan Publik. Dimana target Tahun 2017 sebesar 13,3% dikarenakan masih legislatif sekarang masih dalam periode berjalan (2014 - 2019).

6. **Partisipasi angkatan kerja perempuan**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu tercapainya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera dilakukan pada program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan didalam kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dan melakukan 7 kali pembinaan pada 7 Kecamatan yang melibatkan 210 orang warga dan Pembina dengan capaian partisipasi angkatan kerja perempuan pada Tahun 2017, dimana target sebesar 16% dengan realisasi 16% dengan realisasi fisik Rp 144.185.692.

Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.549.302.803,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.283.014.420,00,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.266.288.383,00,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.044.093.513,00,- atau terserap 92,72 % dan belanja langsung terserap Rp. 4.139.286.464,00,- atau 97,02%. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 93.871.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 92.241.842,- atau 98,26% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 93.871.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 92.241.842,- atau 98,26% dari anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang konsep gender dalm bidang politik dan jabatan public. yang mana outputnya adalah terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan publik, dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 75%.

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.946.705.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.918.276.905,- atau 98,54% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 399.625.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 382.968.705,- atau 95,83% dari anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusatamaan gender dan anak yang mana outputnya adalah terselenggaranya kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan peningkatan kapasitas organisasi perempuan dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 85%.

b. Kegiatan penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 197.302.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 197.241.000,- atau 99,9% dari anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga pendidik dan tenaga kesehatan seperti pegawai puskesmas dan rumah sakit tentang konvensi hak anak sehingga dapat diterapkan di waktu pelayanan yang mana outputnya adalah terselerenggaranya Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (40 orang). dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 85%.

c. Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 720.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 716.694.000,- atau 99,54% dari

anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan status Kota Layak Anak yang mana outputnya adalah terselenggaranya Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak 100 orang, terselenggaranya lomba dalam rangka HAN 5 lomba, terselenggaranya Peringatan HAN tingkat Kota Dumai Tahun 2017 (250 orang), terselenggaranya pesta demokrasi forum anak Kota Dumai (100 orang), dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 85%.

d. Kegiatan Pengembangan pusat layananan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 629.778.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 621.373.200,- atau 98,7% dari anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusatamaan gender dan yang mana outputnya adalah terselenggaranya Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), tersusunnya Dokumen Profil Perempuan dan Anak Tahun 2016, Pendampingan Kasus Perempuan dan Anak, terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapsitas SDM Pendamping dan Manajer Kasus. dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 85%.

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 762.604.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 725.845.999,- atau 95,18% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 762.604.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 762.845.000,- atau 95% dari anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak di Kota Dumai yang mana outputnya adalah terselenggaranya Konsultasi Publik dan Sosialisasi Perda dan PERWA, terselenggaranya Sarasehan CSR Peduli Anak, terselenggaranya Lokakarya Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak di Kelurahan, Penyusunan Best Practice Pemenuhan Hak Anak, Pemetaan Pemenuhan Hak Anak di Kota Dumai, terselenggaranya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 90%.

4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 219.358.482,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 204.405.692,- atau 93,18% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 71.752.732,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 60.220.000,- atau 83,92% dari anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yang mana outputnya adalah terlaksananya Rapat Kerja Gabungan Organisasi Wanita dan Terlaksananya Peringatan Hari Kartini, dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 70%.

b. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.147.605.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.144.185.692,- atau 97.68% dari anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas yang mana outputnya adalah terlaksananya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai, dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 70%.

8. URUSAN WAJIB TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan wajib Ketenagakerjaan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 34. **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2017**

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi sampai tahun 2017	Capaian (dalam %)
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	16 orang	16 orang	100%
Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	1.210 orang	1.210 orang	100%
Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	1 dokumen	1 dokumen	100%
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	24 kasus	24 kasus	100%
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	416 perusahaan	416 perusahaan	100%
Jumlah pelayanan dan penyuluhan bagi warga transmigrasi	0 KK	0 KK	0%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

1. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan

Indikator kinerja untuk program ini yaitu besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan dimana Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan

dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan

Beberapa manfaat nyata dari program pelatihan adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas ;

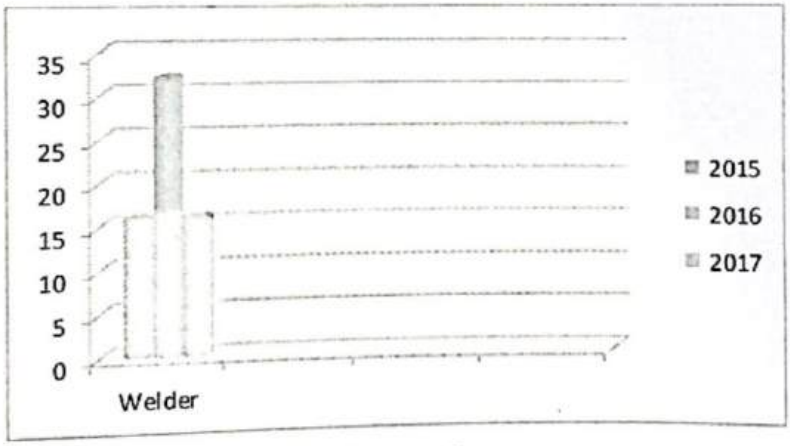
- Mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang dapat diterima. ;
- Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan ;
- Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia ;
- Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja ;
- Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi.

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada TA 2017 mengadakan pelatihan sebanyak 64 orang

- Pelatihan Sertfikasi Welder Angkatan I sebanyak 16 org
- Pelatihan Instalasi Listrik sebanyak 16 orag
- Pelatihan Teknik Pendingin sebanyak 16 org
- Pelatihan Teknisi Komputer 16 org

Sehubungan dengan adanya pengurangan APBD TA 2017 Kota Dumai bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai hanya dapat melaksanakan pelatihan sebanyak 16 orang adapun pelatihan yang dilaksanakan yaitu pelatihan Welder

Grafik. 4.18. Perbandingan Pelatihan Welder yang dilaksanakan Tahun 2015 s/d 2017



2. Besaran tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan sesuai dengan jumlah lowongan kerja dan realisasi pencari kerja yang terdaftar ditempatkan sebanyak 1.210 orang sesuai pada Tabel. A1

Langkah awal dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang terampil dan andal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan karyawan yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan.Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada

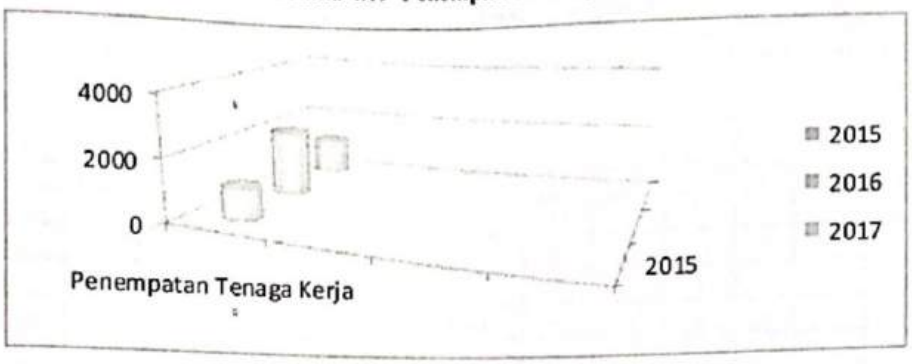
ketepatan dalam penempatan tenaga kerja , baik penempatan tenaga kerja baru maupun lama pada posisi jabatan baru, proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan, karena penempatan yang tepat dalam jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Saat ini ketenagakerjaan menjadi penting untuk diketahui, baik bagi tenaga kerja maupun bagi perusahaan sebagai pemberi kerja.

Tabel 4.35
Jumlah Lowongan Kerja dan Realisasi Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2017

NO.	PERUSAHAAN	JUMLAH (orang)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	PT. TEGMA	50	SMU/SMK, SI	Safetyman, Grinder, HRD Staff, Welding Inspector	L = 50
2	PT. PACIVIC INDOPALM INDUSTRIES	4	SMU/SMK, DIII, SI	Mekanik, Operator, Technician	L = 4
3	PT GENERALI GALAXY DUMAI	100	SMU/SMK, DIII, SI	Marketing	L = 50
					W = 50
4	RAMAYANA PLAZA DUMAI	3	SMU/SMK	Kasir	w = 3
5	PT. SMIP	200	SMU/SMK, DIII, SI	Operator, Teknisi	
6	CITITEL HOTEL	15	SMU/SMK	FO, Cook, Waiter, Teknisi Ac	L = 8
					w = 7
7	ALFAMART	50	SMU/SMK, DIII, SI	Acos, Crew Store, Helper, MRO	L = 25
					w = 25
8	PT. SDS	2	DIII	Teknisi Mekanik, Op. Turbine	L = 2
9	PT. CATUR MAHARASA WARALABA	4	SMA/SMK	Server/Waiter, Helper	L = 2
10	KISEL DUMAI	5	DIII	Mobile Grapari/Sales	L = 3
11	PT. KOIN PRATAMA	23	SMA/SMK	Helper Mekanik, Safetyman	L = 23
12	PT. ELNUSA PETROFIN	20	SMA/SMK	Awak/Kenek	L = 20
13	PT. CAPELLA DINAMIK NUSANTARA	10	SMA/SMK	Salesman	L = 5
14	PT. CATUR MAHARASA WARALABA	5	DIII, SI	Supervisor	L = 3
					P = 2
15	PT. SUMBERDAYA DIAN MANDIRI	4	DIII	Marketing Perbankan, Frontliner,	L = 2
				Admin Perbankan, Picker, Driver,	P = 2
				Deliveryman	
16	PT. PATRA TRADING	2	SMA/SMK	Security	L = 2
17	PT. ASURANSI JIWASRAYA	50	SMA/SMK	Marketing Asuransi	L = 25
					P = 25
18	PT. IVOMAS TUNGGAL	4	SMA/SMK, DIII	Mekanik, Operator, Admin, Analis	L = 2
					P = 2
19	PT. LESTARI INDOMABAHARI	10	SMA/SMK	Crew Kapal	L = 10

NO.	PERUSAHAAN	JUMLAH (orang)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
20	PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA	42	SMA/SMK, DIII, SI	Analisis Lab, Safety, Staff	L = 38
				Purchasing, Maintanance, Operator	P = 4
21	PT. TEGMA	1	DIII, SI	Procurement/Purchasing Staff	L = 1
22	PT. KREASIJAYA ADHIKARYA	3	SMA/SMK, DIII, SI	Sample Boy, Admin, Operator	L = 2
					P = 1
23	PT. KLK DUMAI	2	SMA/SMK	Sample Raw Material	L = 2
24	PT. PERTAMINA	60	SMA/SMK, DIII	Operator	L = 60
25	PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	5	SMA/SMK	Colector	L = 5
26	PT. PACIVIC INDOPALM INDUSTRIES	10	SMA/SMK, DIII, SI	Operator, Foreman	L = 10
27	PT. JOCELYN ANUGRAH JAYA	2	SMA/SMK, DIII	Financial Consultant	L = 1
					P = 1
28	PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	1	SMA/SMK	Colector	L = 1
29	PT. ELNUSA PETROFIN	40	SMA/SMK	Awak/Kenek	L = 40
30	PT. BUMI KARYATAMA RAHARJA	5	SMA/SMK, DIII, SI	Analisis Lab, Safety, Staff	L = 5
				Purchasing, Maintanance, Operator	
31	KANTOR PERTANAHAN NASIONAL	25	SMA/SMK	Admin, Customer Service, Op. Komp	
	KOTA DUMAI (NON PEGAWAI/PTT)			Teknisi	
32	PT. INDOPALM PACIVIC INDUSTRIES	1	SI	Maintanance Superintendent	L = 1
33	PT. CIPTA REKSA PITAMA	30	SMA/SMK	Sales Marketing	L = 15
					P = 15
34	PT. IVOMAS TUNGGAL	10	DIII	Boiler Op, Admin, Analyst, Mekanik	L = 5
					P = 5
35	PT. MARITIM SINAR UTAMA	10	SMA/SMK	Checker, Op. Driver, Op. Forklift	L = 10
36	PT. INDOPALM PACIVIC INDUSTRIES	2	SI	Operator	L = 2
37	PT. ENERGI SEJAHTERA MAS	6	SMA/SMK	Op. Forklift, Foreman, Trucking	L = 6
38	PT. JAYANIKA (JNP)	2	SMA/SMK	Sales Marketing	
39	PT. PATRA SK	2	DIII, SI	Teknisi	L = 2
40	PT. JOCELYN ANUGRAH JAYA	20	SMA/SMK, DIII	Sales Marketing	L = 10
					P = 10
41	PT. GESINDO	20	SMA/SMK, DIII	Sales Marketing	L = 10
					P = 10
42	PT. PRIORITAS	20	SMA/SMK, DIII	Sales Marketing	L = 10
					P = 10
43	PT. GUDANG GARAM	10	SMA/SMK	Driver, Helper	L = 10
44	Subkontraktor PT. PERTAMINA RU II DUMAI	320	SMA/SMK, DIII, SI	Operator, Teknisi	
	(Bekerja bersifat sementara / TA)				
	TOTAL	1210			

Grafik. 4.19 Penempatan Tenaga kerja



Penempatan Tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan merupakan suatu tantangan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dalam mengurangi permasalahan pengangguran Kepres nomor 04 thn 1980 tentang wajob lapor ketanagakerjaan dan Pemerintah Kota Dumai sudah mengeluarkan PERDA 10 tentang ketenagakerjaan yang terdiri dari 70% tenaga kerja lokal dan 30% dari tenaga kerja luar dan Perwako Dumai juga mengotpimalkan penempatan tenaga kerja helper 100%. Adapun tingkat kenaikan serta penurun penempatan tenaga kerja sesuai diagram penempatan tenaga kerja dan Tabel A2.

Tabel. 4.36. Penempatana Tenaga Kerja

No	Keterangan	2015	2016	2017
1	Penempatan Tenaga Kerja	1.053	2.156	1.210

3. Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja

Mengumpulkan dan meneliti data hasil antar kerja (data pencari kerja, lowongan kerja, penempatan tenaga kerja), mengatur dan menyusun data dalam kelompok umur, jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan, dan sektor lapangan usaha di buat dalam suatu Dokumen Rencana Tenaga Kerja (Tabel. B1. B2)

Pemberi kerja wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Informasi lowongan pekerjaan memuat Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan; Jenis pekerjaan, jabatan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, keahlian, pengalaman kerja dan syarat-syarat lain yang diperlukan, Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota bersama-sama dengan pemberi kerja melakukan seleksi calon tenaga kerja sesuai dengan persyaratak jabatan yang dibutuhkan untuk itu perlu adanya BKOL (Bursa Kerja Online) mengenai Kepmenaker 07 /MEN/IV/2008 dan Kep Dirjen Nomor : 251/DPPTK/IX/2008, KEP DIRJEN 258//DPPTK/IX/2008.

Tabel 4.37. Data Pencari Kerja Yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

NO	BULAN	KELOMPOK UMUR												JUMLAH	
		10-14		15-19		20-29		30-44		45-54		54+			
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Januari	-	-	63	47	472	217	120	24	3	-	1	-	659	288
2	Februari	-	-	19	18	159	99	45	12	4	-	-	-	227	129
3	Maret	-	-	21	15	160	89	34	48	2	-	-	-	217	152
4	April	-	-	28	24	111	50	15	4	1	-	-	-	155	78
5	Mei	-	-	87	56	151	77	30	6	1	1	-	-	269	140
6	Juni	-	-	51	27	67	31	18	1		-	-	-	136	59
7	Juli	-	-	106	75	170	103	22	3	3	-	-	-	301	181
8	Agustus	-	-	130	119	345	232	81	10	13	-	-	-	569	361
9	September	-	-	71	47	162	90	31	8	2	0	1	-	267	145
10	Oktober	-	-	64	39	174	96	38	2	2		-	-	278	137
11	November	-	-	60	59	228	142	46	4	-	-	-	-	334	205
12	Desember	-	-	33	26	167	91	38	4		-	-	-	238	121
														3650	1996
														5646	

Tabel 4.38. Banyaknya Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No.	Bulan	Kelompok umur																Jumlah	
		Tidak Tamat SD		Tamat SD		SLTP/ Sederajat		SLTA/ Sederajat		D-I & D-III		Sarjana /D-III		Sarjana/ S-I		Pascasarjana/ S-II			
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Januari	-	-	2	-	9	2	517	183	2	-	29	26	100	77	-	-	659	288
2	Februari		-	1	-	2	1	186	87	1	-	10	13	27	28		-	227	129
3	Maret	2	-	-	-	5	-	180	78	-	-	4	53	28	21	-	-	217	152
4	April	-	-	-	-	11	4	122	54	-	-	4	8	18	12	-	-	155	78
5	Mei	-	-	3	-	7	4	226	101	1	-	8	6	27	29	-		269	140
6	Juni	-	-	-	-	-	-	114	40	-	-	3	5	19	14	-	-	136	59
7	Juli	-	-	-	-	5	-	258	135	-	-	5	12	33	34	-	-	301	181
8	Agustus	-	-	-	-	1	-	477	252	-	-	9	31	81	78	1	-	569	361
9	September	1	-	1	-	3	-	229	103	-	-	8	18	25	24		-	267	145
10	Oktober	-	-	1	-	2	2	221	91	1	-	11	16	40	28	-	-	278	137
11	November	-	-	2	-	3	1	259	139		-	22	22	48	43	-	-	334	205
12	Desember	-	-	2	-	2	-	192	75	-	-	13	28	29	18	-	-	238	121
	Jumlah																	3650	1996

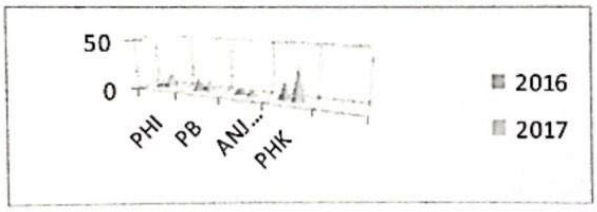
4. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)

Semua jenis perselisihan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah secara Bipartit, apabila perundingan mencapai persetujuan atau kesepakatan, maka persetujuan bersama (PB) tersebut di catatkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun apabila perundingan ticlak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak

mencatatkan persel isihannya ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota. Salah satu persyaratan yang mutlak dalam pencatatan tersebut adalah bukti atau risalah perundingan Bipartit (Pasal 3), apabila bukti perundingan tidak ada, maka pencatatannya ditolak selanjutnya diberi waktu 30 hari untuk melakukan perundingan Bipartit, jika perundingan menghasilkan kesepakatan (damai) maka akan dibuat Perjanjian Bersama (PB) yang akan dicatatkan ke PHI, jika tidak menemui kesepakatan dengan bukti/risalah perundingan yang lengkap, maka kepada para pihak ditawarkan tenaga penyelesaian perselisihan apakah melalui Konsiliator atau Arbitrase, jika para pihak tidak memilih atau justru memilik mediasi maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dalam forum mediasi

Menurut UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 16, Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus dicipatkan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi dan sejalan, agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut.

Grafik 4.20. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama



Tabel 4.39. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

NO	KASUS	2016	2017
1	PHK	18	34
2	PHI	1	18
3	PB	12	12
4	ANJURAN	7	6
	JUMLAH	38	70

5. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Salah satu indikator besaran pemeriksaan perusahaan dimana Upah Minumum juga termasuk pemeriksaan setiap tahunnya yang ada di Perusahaan Kota Dumai Nilai upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum umumnya ditetapkan oleh gubernur untuk

tingkat provinsi, kabupaten/kota dan sektoral, mengikuti rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan/atau dewan pengupahan kabupaten/kota

Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan mengatur mengenai Dewan Pengupahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dimana fungsi dari Dewan Pengupahan tersebut adalah menjadi penasihat penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan upah dan mengembangkan sistem upah nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten akan mengirimkan usulan mereka kepada Walikota yang nanti akan diteruskan kepada Gubernur. Usulan ini juga akan dibagi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dimana mereka akan mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah, dibentuk secara tripartit. Keterlibatan pihak akademisi dipastikan ada di ketiga tingkat. Perwakilan pemerintah setara dengan perwakilan dari pekerja dan pengusaha di semua tingkat dewan pengupahan, sementara keterlibatan akademisi dan ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menentukan upah minimum provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun. Formula tersebut mengharuskan penyesuaian nilai upah minimum setiap tahun, berdasarkan akumulasi nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

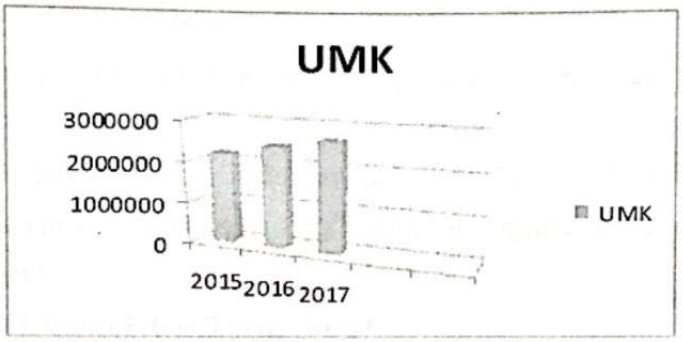
Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan mengatur mengenai Dewan Pengupahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dimana fungsi dari Dewan Pengupahan tersebut adalah menjadi penasihat penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan upah dan mengembangkan sistem upah nasional.
Dewan Pengupahan Kabupaten akan mengirimkan usulan mereka kepada Walikota yang nanti akan diteruskan kepada Gubernur. Usulan ini juga akan dibagi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dimana mereka akan mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah, dibentuk secara tripartit. Keterlibatan pihak akademisi dipastikan ada di ketiga tingkat. Perwakilan pemerintah setara dengan perwakilan dari

pekerja dan pengusaha di semua tingkat dewan pengupahan, sementara keterlibatan akademisi dan ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menentukan upah minimum provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun. Adapun begitu Dewan Pengupahan masih berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal pengupahan, seperti membantu melakukan supervisi dan monitor penerapan struktur dan skala upah di perusahaan dan juga melakukan survei kebutuhan hidup layak setiap 5 tahun sekali.

Grafik 4.21. Persentase kanaikan upah minimum kota dalam 1 tahun 2015-2017



6. Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi

Pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik, semula hanya diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Tercapainya indikator kegiatan akan mengakibatkan tercapai pula target kinerja program yang telah dirumuskan, yang selanjutnya akan berdampak terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam 2 (dua) urusan, namun di tahun anggaran 2017 program/ kegiatan yang ada dibidang ketransmigrasian tidak dapat dilaksanakan berkenaan masa pembinaan dan pengembangan yang di anggarkan melalui Dana APBN (tugas Pembantuan) sudah tidak ada lagi, target pembinaan dan pengembangan hanya 5 (lima) tahun pelaksanaan oleh Depnakertrans RI

Adapun Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dengan Jumlah 4 program dan 5 kegiatan di Tahun Anggaran 2017

1. **Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 262.338.350,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 256.806.224,- atau 97,89%. Indikator Hasil adalah Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan sebanyak 312 orang dan terealisasi 16 orang atau 5%, Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 262.338.350,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 256.806.224- atau 97,89% dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah peserta pelatihan sebanyak 16 orang dan terealisasi sebanyak 16 orang atau 100% Menigkatnya keterampilan Pencari Kerja seperti Pelatihan Welder

2. **Program Peningkatan Kesempatan Kerja.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 314.549.900- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 312.164.634,- atau 99,24%. Indaktor hasil program adalah :

- Besaran Tenaga Kerja yang terdaftra ditempatkan sebanyak 2.520 orang dan terealisasi sebanyak 2.520 orang atau 100%
- Besaran penyebarluasan informasi tenaga kerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau100%,

Sehingga meningkatnya pengetahuan pencari kerja yang berkompetensi dan mandiri, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kesempatan Kerja pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 120.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 119.870.175,- atau 99.89 % dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Terselenggaranya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kepres RI No.04 Tahun 1980 sebanyak 70 Perusahaan dan terealisasi sebanyak 70 Perusahaan atau 100 %. Meningkatnya Pemahaman Perusahaan dalam menerapkan Kepres RI No.04 Tahun 1980 persentase mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai 100%

b. Penyebarluasan Informasi Busra Tenaga Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 194.549.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp .192.294.459,- atau 98.84% dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Data Infromasi Pasar Kerja dan Implementasi ISO 9001-2015 selama 12 bulan dengan terealisasi 12 bulan atau realisasi 100% tersedianya data IPK dan Implementasi ISO 9001-2015 selama 12 bulan

3. **Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 144.425.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 140.375.000 atau 97.20 %. Indikator hasil program adalah Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian Bersama (PB) sebanyak 24 kasus dengan realisasi 24 kasus atau 100% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan pada tahun 2017 sebagai berikut:

a. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 144.425.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 140.375.000,- atau 97.20% dari anggaran, adapun Indikator Peningkatan LKS Tripartit dan Hari Buruh (May Day) sebanyak 2 kegiatan dengan realisasi 100% terlaksananya pemberdayaan LKS Tripartit dan Hari Buruh (May Day)

4. **Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 174.635.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 174.635.000,- atau 100% indikator hasil program adalah Besaran Pemeriksaan Perusahaansebanyak 216 perusahaan yang menerpakan UU Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 atau 100% terealisasi , Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja pada tahun 2017 adalah sebagai berikut

a. Pembinaan Dewan Pengupahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 174.635.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 174.635.000,- atau 100% dari anggaran, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah rapat rutin Dewan Pengupahan Dumai sebanyak 5 kali sidang/rapat dan terealisasi sebanyak 5 Kali. Terpenuhinya laporan penetapan UMK Dumai yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Riau .

9. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.40. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian (%)
Persentase jumlah sampah yang tertangani	65%	60%	92%
Kualitas Air	75%	65%	86%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Adapun Indikator Kinerja Kantor Lingkungan Hidup tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup yaitu persentase Jumlag sampah yang tertangani selama 1 tahun, dengan adanya kegiatan ini telah terealisasi

dengan baik sebesar Rp. 4.864.381.350,- atau sebesar 99% dari total anggaran Rp.4.880.225.600,- telah mencapai target yang diinginkan yaitu Meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat.

b. Kualitas Air .

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya pengujian kualitas air dengan perlakuan pengambilan sampel air sumur sebanyak 7 sampel air, air sungai sebanyak 15 sampel, air laut sebanyak 10 sampel, air hujan sebanyak 2 sampel di Kota Dumai. Dengan anggaran sebesar Rp. 107. 965.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 107.396.123 atau 99%.

Tahun 2017, jumlah anggaran untuk 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebesar Rp. 18.557.956.051,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.134.685.780,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.423.270.271,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.815.025.347,- atau terserap 92% dan belanja langsung terserap Rp. 14.033.744.910,- atau 97 %.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**
   a. **Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan**

      Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.880.225.600 dan realisasi keuangan Rp. 4.864.381.350 atau 99%. Kegiatan ini tercapai dengan keluaran meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat selama 12 bulan.
2. **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,**
   a. **Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura**

      Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 129.462.900 dan realisasi keuangan Rp. 112.859.119 atau 87% telah mencapai target yang diinginkan yaitu terwujudnya Kota Dumai yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan.

   b. **Pencemaran air**

      Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar 107.965.000 dan realisasi keuangansebesar Rp. 107.396.123,-atau 99%. Telah mencapai target yang diinginkan yaitu tercapainya pelayanan pencegahan pencemaran air.

   c. **Pengembangan laboratorium lingkungan hidup**

      Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar 416.657.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 382.845.986 ,-atau 92%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah belanja bahan-bahan kimia untuk analisa air dan beberapa peralatan laboratorium seperti portable turbidity meter, generator listrik,do meter,tds,digital termometer,ph meter.

d. Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)

Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar 36.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.760.988 ,-atau 80% dengan target keluaran terlaksananya Kegiatan Pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL).

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup

Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 49.930.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.335.758 atau sebesar 90%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan sekolah-sekolah yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat mengikuti program adiwiyata Kota Dumai dengan capaian sekolah yang mengetahui dan memahami program adiwiyata.

b. Pengembangan data dan informasi lingkungan

Pada kegiatan ini realisasi anggaran sebesar Rp. 66.843.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.843.900 atau sebesar 100%. Kegiatan ini menghasilkan buku data dan buku laporan yang disebut buku status lingkungan hidup kota dumai

c. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Pada kegiatan ini realisasi anggaran sebesar Rp. 180.900.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 164.618.009 atau sebesar 90% telah mencapai target yang diinginkan yaitu tercapainya informasi lingkungan Kota Dumai.

4. Program pengendalian kebakaran hutan

a. Pembentukan dan pembinaan MPA dan Satgas

Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 46.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.347.456 atau sebesar 91% telah mencapai target yang diinginkan yaitu pembinaan terhadap Tim yang terbentuk sebanyak 25 tim.

5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Pemeliharaan RTH

Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.825.436.155,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.822.055.510 atau sebesar 99% telah mencapai target yang diinginkan terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota sehingga tercapai keindahan kota.

b. Pengembangan Taman Rekreasi

Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 761.355.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 710.775.500 atau sebesar 93% telah mencapai target yang diinginkan yaitu tercapainya penataan taman-taman didalam kota dan tertatanya pedestrian ditaman bukit gelanggang dan terpeliharanya taman kota dan jalur hijau.

PRESTASI DALAM BIDANG PENGELOLAAN LH

Prestasi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dicapai sejak tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional SMPN 1 Dumai;
b) Penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi SMP PGRI Dumai, SDN 019 Bumi Ayu Dumai, MAN Dumai;
c) Meraih predikat adiwiyata tingkat kota tahun 2016 yaitu MAN Dumai, SMP PGRI Dumai, SDN 019 Bumi Ayu Dumai, SDN 009 Tanjung Palas Dumai dan SMP Lancang Kuning Dumai.

10. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.41. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian (dalam %)
Kepemilikan KTP Elektronik	%	67,7%	66,51%	95,81%
Kepemilikan Akta Kelahiran	%	85%	99,3%	94,06%
Kepemilikan Akta Perkawinan	%	65%	95 pasangan	61,29%
Kepemilikan KIA	%	10%	27,64%	25,63%
Kepemilikan KK	%	93%	81,19%	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Secara umum, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan program dan Kegiatan berdasarkan indikator sasaran yang telah di tetapkan, adapun pencapaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

a) Kepemilikan KTP Elektronik

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu terkumpulnya data Bio Metrik wajib KTP-e

b) Kepemilikan Akta Kelahiran

Target dari indikator sasarn ini yaitu tercapainya akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun sesuai dengan target nasional sebesar 85% dimana Dumai telah melebihi target nasional sebesar 94,06%.

c) Kepemilikan Akta Perkawinan

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya pencatatan perkawinan bagi masyarakat Non Muslim pada tahun 2017terdapat 97 pasangan yang mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.

d) Kepemilikan KIA

Target indikator sasaran ini yaitu terlaksananya pencetakan Kartu Identitas Anak untuk tahun 2017 realisasi pencetakan KIA sebanyak 27.645 (25,63%) dari jumlahanak usia 0-17 tahun sebanyak 107.855

e) Kepemilikan KK

Target dari indikator ini yaitu Jumlah KK yang terdata pada data base kependudukan yaitu 81.192 KK.

1. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan). Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (Membangun, Updating dan pemeliharaan) jumlah anggaran Rp. 821.536.000 realisasi Rp. 814.027.100 (99,08%) dengan indikator keluaran terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan e-ktp di daerah, serta telaksananya tertib administrasi kependudukan denga tersedianya data informasi pendudukyang akurat dan terpadu
2. Kegiatan Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan jumlah anggaran Rp. 539.950.000,00realisasi Rp. 537.208.499,00 (99,49%) dengan indikator keluaran meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat.
3. Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan jumlah anggaran Rp. 466.400,00 realisasi Rp. 464.782.417,00 (99,65%) dengan indikator keluaran Peningkatan kualitas dan kuantitas data base kependudukan serta terlaksananya pelayanan pencataan sipil secara on line.
4. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan jumlah anggaran Rp. 570.950.000,00 realisasi Rp. 560.709.641,00 (98,21%) dengan indikator keluaran Tersosialisasinya informasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kegiatan Pencetakan Kartu Identitas Anak jumlah anggaran Rp. 409.563.070,00 Realisasi 409.563.070,00(100%) dengan indikator terlaksananya pencetakan KIA di Kota Dumai.
6. Kegiatan Pendataan Akta Kelahiran jumlah anggaran Rp. 100.000.000,00realisasi Rp. 97.479.000,00 (97,48%) dengan indikator keluaran Termonitornya jumlah akta klahiran di Kota Dumai

7. Kegiatan Pendataan Warga Negara Asing (WNA) jumlah anggaran Rp. 100.000.000,00realisasi Rp. 99.629.000,00 (99,63%) dengan indikator keluaran Termonitornya jumlah WNA di Kota Dumai.

11. URUSAN WAJIB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan program dibidang kesehatan selama tahun 2017 dapat dilihat dari pencapaian sasaran indikator kinerja utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 4.42. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian
1.	Rasio Akseptor KB	1:48,7	1:69,76	143,24%
2.	Cakupan peserta KB Aktif	65%	69,79	143,24%

Terlihat dari tabel diatas pada misi kedua dengan 2 (dua) indikator sasarantersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Rasio Akseptor Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan.

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita tetap terlaksana sehingga kader menguasai tumbuh kembang anak 0 s/d 5 tahun dan mampu memberikan penyuluhan pada orang tua atau keluarga yang mempunyai balita yaitu sebanyak 16 orang penyuluh keluarga berencana.

b. Cakupan peserta KB aktif

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami isteri yang sah yang isterinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian peserta aktif disuatu Kabupaten / Kota dihitung/diperkirakan setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate = TFR) yang telah ditetapkan secara Nasional dan didistribusikan ke Provinsi melalui Rapat Kerja Daerah program KB Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Target dari indikator sasaran ini yaitu keberhasilan/tercapainya pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh pentingnya bagi suatu keluarga yang merupakan Pasangan Usia

Subur (PUS) dalam berKB yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan dimotivasi/didukung oleh penyuluh dan petugas lapangan KB dengan target 80%. Terlaksananya kegiatan pelayanan KB gratis dilaksanakan 4 kali dalam setahun sesuai dengan momen IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes dan PKK KB Kes.

Anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.850.733.187 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.151.762.040,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3,698.971.147,-. Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung menjadi Rp. 3.025.302.456,- atau terserap 95,99% dan Belanja Langsung terserap Rp. 3.600.406.762 atau 97,34%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Keluarga Berencana**

   Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 663.505.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 655.538.000,- atau 98,80 % yang dialokasikan melalui kegiatan :

   a. **Kegiatan Pelayanan KIE**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 208.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 208.428.000,- atau 99,82 % dari anggaran dengan realisasi target pencapaian 100% dengan tuuan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program KB. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya operasional 11 orang tenaga penyuluh lapangan KB selama 12 bulan.

   b. **Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 454.705.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 447.110.000,- atau 98,33 % dari anggaran yang dialokasikan untuk Meningkatnya motivasi kelompok KB untuk mensukseskan program Keluarga Berencana. Adapun indikator keluaran dari kegiatan adalah Terbinanya kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera dengan capaian kegiatan sebesar 100% dari target pencapaian 80%.

2. **Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**

   Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 249.751.304,- atau 99,90 % yang dialokasikan melalui kegiatan :

   a. **Kegiatan Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 250.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 249.751.304,- atau 99,90 % dari anggaran yang dialokasikan untuk Meningkatnya pengetahuan remaja dengan adanya Pusat Informasi Konseling. Adapun indikator keluaran dari kegiatan adalah Terlaksananya ajang prestasi remaja (kelompok PIK) Tingkat Kota Dumai dengan capaian kegiatan sebesar 100% dari target pencapaian 80%.

3. Program Pelayanan Kontrasepsi

Pada Tahun 2017, Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 270.746.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 266.021.390 atau 98,25% dari anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan :

a. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 270.746.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 266.021.390 atau 98,25% dari anggaran dengan realisasi target pencapaian 100% dengan tujuan Meningkatnya capaian peserta KB aktif dan KB Baru. Indikator hasil yg diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kegiatan Pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes dan terealisasi sebanyak 50.400 akseptor dengan persentase tercapainya peserta KB aktif dan KB baru 109,97%.

4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 508.318.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 505.770.292,- atau 99,50% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. **Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengasutamaan gender dan anak**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 144.095.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 142.919.749,- atau 99,18 % dari anggaran yang bertujuan agar meningkatnya keakuratan Data dan Informasi yang lengkap dan akurat. Adapun indikator keluaran berupa jumlah keluarga yang didata dengan realisasi capaian sebesar 80% dari target sebesar 90%.

b. **Kegiatan Pembinaan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.173.380.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 172.978.285,- atau 99,77% dari anggaran yang bertujuan untuk Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang konsep gender. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa Terlaksananya Pembinaan Kader PP dan PA Kota Dumai dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 90%.

c. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 190.842.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 189.872.258,- atau 99,49% dari anggaran yang bertujuan untuk Meningkatnya ketertiban dan terkoordinasinya infomasi kegiatan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa Tersedianya Media Informasi yang Komunikatif dan Efektif realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 85%.

12. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 43. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian (dalam %)
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	1020	1726	168
Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan	201	237	118
Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	6	4	67
Rasio izin trayek	8	112	1400
Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi	2173	485	22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai

Secara umum, Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari dapat dilaksanakan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang telah diwujudkan dalam Tahun 2017 melalui pelaksanaan 5 (Lima) Indikator Sasaran.

Meskipun demikian, masih terdapat indikator kinerja sasaran belum tercapai sepenuhnya dan perlu ditingkatkan di masa yang akan datang, khususnya terkait denganCapaian Kinerja belum dapat berhasil dilaksanakan 100 %.

Adapun Capaian Indikator Sasaran tersebut yaitu :

1. Kepemilikan KIR Angkutan Umum di dalam indikator ini ditargetkan 1020 namun dalam realisasinya sudah dapat terlaksana 168% dikarenakan tingkat kesadaran pemilik kendaraan pemilik kendaraan sehingga benar-benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang lulus uji serta sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor yang belum memadai.
2. Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan di dalam indikator ini ditargetkan 200 unit/jenis dalam realisasinya sudah melebihi target sebanyak 237 unit/jenis.

3. Jumlah Terminal Darat, Laut dan Udara yang sesuai standar di dalam indikator ini ditargetkan 6 terminal namun dalam realisasinya baru 4 Terminal yang diantaranya terminal Barang, Bandar Udara Pinang Kampai, Pelabuhan Penumpang, Terminal Penumpang / Penyeberangan Ro-Ro. Belum tercapainya Indikator Kinerja tersebut disebabkan Besarnya data yang diolah sehingga merealisasikannya butuh dana dan waktu yang yang bertahap.
4. Rasio izin trayek di dalam indikator ini ditargetkan 8 Dokumen dalam realisasinya sudah 112 Dokumen yang diantaranya izin trayek yang telah dikeluarkan Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah izin trayek angkutan perkotaan. tercapainya Indikator Kinerja dimaksud sehubungan dengan dilaksanakannya operasi penertiban dokumen angkutan penumpang dan barang dikota Dumai.
5. Persentase Rambu-rambu lalu lintas yang benar dan tepat lokasi di dalam indikator ini ditargetkan 1.573 unit dalam realisasinya hanya 485 Unit yang diantaranya pengadaan rambu pembatas tonase, papan rambu rppj, rambu tiang tunggal dan papan nama jalan.

Adapun realisasi pelaksanaan program Urusan Wajib dan kegiatan ada tahun 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

   Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.633.071.803,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.572.536.803,- atau 98,33% yang dialokasikan melalui kegiatan–kegiatan dibawah ini :

   a. **Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan**

      Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 363.311.053,- dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 307.188.000,- atau 84.55% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya data untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang berupa :

      - Tim Perumus regulasi dan kebijakan kepelabuhan sungai dan penyeberangan daerah kota dumai
      - Pendataaan potensi PAD retribusi parkir tepi jalan umum
      - Pendataan angkutan perkotaan

      Capaian dari kinerja keluaran kegiatan ini sudah berhasil dikarenakan tercapainya data-data dukung perencanaan dibidang perhubungan dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 3 dokumen dari target 1 dokumen.

   b. **Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Sektor Perhubungan**

      Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.50.000.000,- atau 100 % dari

anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) adalah Tersedianya data untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang berupa :

- Sosialisasi Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- Sosialisasi dokumen kapal dibawah GT-7

Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 2 Kegiatan dari target 1 Kegiatan.

c. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 3.219.760.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar sebesar Rp. 3.215.348.225,- atau 99,86 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa peningkatan pelayanan melalui penyediaan tenaga kerja honorer. Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 12 Bulan dari target 12 Bulan.

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.596.328.110,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.590.464.660,- atau 99,02% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rambu, marka jalan, traffic light, warning light, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 596.328.110,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 590.464.660,-atau 99,02% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini terlaksananya kegiatan berupa Terpeliharanya rambu, marka jalan, traffic light, warning light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya yang dialokasikan ke kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi rambu, marka jalan, traffic light, warning light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di Kota Dumai. Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 12 Bulan dari target 12 Bulan.

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.315.187.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.293.116.000,- atau 98,32 %. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 876.550.000,- dengan kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi

dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa peningkatan pelayanan melalui penyediaan tenaga teknis kontrak. realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 858.878.500,- atau 97,98% dari anggaran. Adapun indikator Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 12 Bulan dari target 12 Bulan.

b. Kegiatan penyelenggaran, pengendalian, dan pengamanan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 438.637.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 434.237.500,- atau 99% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah terselenggaranya pengendalian, pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang tertib, aman dan lancar. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa koordinasi antar instansi / lintas sektoral dalam penyelenggaraan angkutan lebaran serta angkutan natal dan tahun baru. Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 2 Kegiatan dari target 2 Kegiatan yaitu Angkutan Lebaran dan Angkutan Natal dan Tahun Baru.

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 127.716.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 127.716.000,- atau 100%. dari anggaran. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 127.716.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 127.716.000,- atau 100 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Tersediannya Halte untuk angkutan umum yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan Rehab Halte Sekota Dumai namun dalam pelaksanaannya fisiknya sudah mencapai 100% akan tetapi dengan adanya kekurangan Dana APBD Kota Dumai pada tahun berjalan, maka pencairan kegiatan ini ditunda.

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.734.589.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.716.233.000,- atau 99,33%. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan pengadaan rambu lalu lintas

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 751.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 748.806.000,-atau 99,60% dari anggaran.

Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Terwujudnya rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perelengkapan jalan lainnya yang memadai demi menciptakan ketertiban berlalu lintas, yang berupa tersedianya rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya yang memadai demi menciptakan ketertiban berlalu lintas.

b. Kegiatan pengadaan marka jalan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.367.724.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.355.957.000,- atau 99,14% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Terwujudnya marka jalan dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya yang baik dan memadai guna terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, lancar, teratur dan terkendali keluaran kegiatan ini yaitu :

a. Pemasangan Marka Jalan H.R. Soebrantas
b. Pemasangan Marka Jalan Zona Selamat Sekolah dan Pita Pengaduh di Jalan Bintan
c. Pemasangan Marka Jalan dan Zebra Cross di Jalan Diponegoro
d. Pemasangan Marka Pita Pengaduh di Daerah Rawan Kecelakaan
e. Pemasangan ZOSS di Kelurahan Lubuk Gaung
f. Pengecatan Kantin Jl. Soebrantas
g. Pengecatan Kantin Jl. Sultan Syarif Kasim
h. Pengecatan Kantin Jl. Putri Tujuh
i. Pengecatan Kantin Jl. Sudirman
j. Pengecatan Kantin Jl. Hasanudin

Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 100 % dari target 100 %.

c. Kegiatan operasi penertiban dan penegakan hukum

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 417.665.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 414.940.000,-atau 99,35% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Terwujudnya armada lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib dan teratur. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa pelaksanaan operasi penertiban lalu lintas dan Angkutan Umum, yaitu :

a. Operasi Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dipersimpangan pasar dan lokasi sekolah pada pagi dan siang hari.
c. Operator Radio Orari.
d. Jaga Pos Pengendalian Lalu Lintas (Posdallalin).
e. TIM Panitia bidang transportasi MTQ Provinsi Riau 2017.

Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 5 Kegiatan dari target 5 Kegiatan.

d. Kegiatan Pengadaan Traffic Light dan Warning Light

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 197.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 196.530.000,-atau 99,56% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Terpasangnya APILL dan LPJU yang lengkap dan memadai pada lokasi rawan kecelakaan yaitu berupa kegiatan :

a. Pengadaan dan Pemasangan Module LED Uk. 20 Traffic Light Simpang Bundaran Putri Tujuh Soekarno Hatta
b. Pengadaan dan Pemasangan Lampu LPJU Solar Cell untuk Daerah Rawan Kecelakaan Jl. Cendrawasih RT. 3 Kelurahan Laksamana.

Dengan tingkat keberhasilan kinerja keluaran kegiatan sebesar 2 lokasi dari target 2 lokasi

13. URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 44. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian (dalam %)
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	13.029.529,00	20.361.588,50	156,27
Penataan Kawan Indudtri	2	0	0
Jumlah Pengusaha industri kecil dan menengah dan industri kreatif	943	847	89,82
Jumlah Koperasi yang aktif	139 koperasi	161 koperasi	115,83
Jumlah UMKM aktif yang dibina	875 UKM	875 UKM	100

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran di Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

a) Pencapaian indikator kinerja sasaran **Kontribusi sektor industri terhadap PDRB,** yang mana kondisi akhir Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 13.029.529,00, dimana realisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 20.361.588,50, sehingga capaian sebesar 156.27%.
b) Pencapaian indikator kinerja sasaran Penataan Kawasan Industri, yang mana kondisi akhir **Penataan Kawasan Industri** pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2 kawasan dimana realisasi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 0 sehingga capaian sebesar 0%.

c) Pencapaian indikator kinerja sasaran Penataan Kawasan Industri, yang mana kondisi akhir Jumlah pengusaha industri kecil dan menengah dan industri kreatif pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 943 pengusaha dimana realisasi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 847 pengusaha sehingga capaian sebesar 89,82%.

d) Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah Koperasi yang aktif, yang mana kondisi akhir jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 139 koperasi, dimana realisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 161 koperasi, sehingga capaian sebesar 115.83%.

Dalam hal ini, peningkatan koperasi aktif disebabkan dari hasil pendampingan, pembinaan dan pengawasan terjadi peningkatan koperasi, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan diketahui bahwa dari jumlah koperasi sebanyak 199 terdapat 161 koperasi aktif (80,91%) dan 38 koperasi tidak aktif (19,10 %).

Jumlah Koperasi 199 pada tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2015 jumlah koperasi yang ada 272 terjadi penurunan sebesar 73 koperasi penyebab penurunan koperasi pada tahun 2017 dikarenakan belum adanya pemahaman pengurus dan anggota tentang perkoperasian serta koperasi yang telah ada belum melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta adanya pembubaran koperasi.

e) Pencapaian indikator kinerja sasaran Jumlah UMKM aktif yang dibina, yang mana kondisi akhir jumlah Usaha Kecil Menengah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 875 UMKM dimana realisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 875 UMKM sehingga capaian sebesar 100%.

Dalam hal ini, peningkatan jumlah usaha kecil menengah disebabkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan UMKM, dimana pada tahun 2017 jumlah UMKM sebanyak 9.821 UMKM mengalami kenaikan sebesar 875 UMKM dari pada tahun 2016 jumlah usaha kecil menengah sebesar 8.946 UMKM.

Anggaran Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.175.508.550,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.716.928.300,00,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.459.084.100,00,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.569.640.982,00,- atau terserap 96,05% dan belanja langsung terserap Rp. 3.186.616.554,00,- atau 92,12%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.58.860.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.57.958.246,00 *atau* 98,47% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. **Bimbingan Bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 58.860.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 57.958.246,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atau 98,47%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi 21 IKM dengan harapan meningkatnya pengetahuan IKM dalam pengelolaan manajemen usaha serta meningkatnya kemasan dan merek bagi industri kecil dan menengah di Kota Dumai dengan jumlah IKM di Kota Dumai sejumlah 847 IKM.

2. **Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.495.042.425,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.458.921.816,00 *atau* 92,71% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. **Pengembangan dan pelayanan teknologi industri**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.211.090.400,00 (dua ratus sebelas juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 195.711.388,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 92,72%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Bimtek Kerajinan Batik dan Kerajinan Anyaman Tali Kur dengan diikuti sebanyak 20 IKM di Kota Dumai dengan harapan meningkatnya pengetahuan IKM dalam membatik dan merajut serta meningkatnya jumlah usaha baru di Kota Dumai.

b. **Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.283.952.025,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 263.210.428,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) atau 92,70%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya pembinaan industri kerajinan daerah bekerjasama dengan Dekranasda.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT – BLI Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan industri kerajinan daerah bagi IKM berupa promosi hasil kerajinan di dalam daerah maupun luar daerah seperti Jakarta bekerja sama dengan Dekranas sebagai tempat pusat promosi produksi kerajinan daerah Kota Dumai. Pencapaian target pada tahun 2017, dilakukan dengan cara memberikan pembinaan-

pembinaan berupa kunjungan ke sentra kerajinan dan usaha kecil menengah Kota Dumai. kunjungan ke sentra kerajinan dan usaha kecil menengah Kota Dumai, dengan harapan meningkatnya pengetahuan IKM sehingga promosi kerajinan daerah Kota Dumai dapat meningkat.

3. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.443.978.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.435.402.200,00 *atau* 98,07% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.301.493.500,00 (tiga ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 293.863.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) atau 97,47%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan 10 koperasi aktif dan 3 koperasi berprestasi di Kota Dumai sehingga capaian hasil meningkatnya kualitas kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi pada tahun 2017 dengan realisasi 100%.

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan diketahui bahwa dari jumlah koperasi pada tahun 2017 sebanyak 199 terdapat 161 koperasi aktif (80,91%) dan 38 koperasi tidak aktif (19,10 %) jika dibandingkan tahun 2016 jumlah koperasi 272 terjadi penurunan koperasi dikarenakan kurangnya pemahaman pengurus dan anggota koperasi tentang perkoperasian dan ada juga pembubaran koperasi.

b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.69.964.300,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.69.318.100,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus rupiah) atau 99,08%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap koperasi yang produktif di Kota Dumai dengan target dan realisasi capaian hasil sebanyak 20 koperasi yang produktif dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Dumai pada tahun 2017.

c. Pelatihan Penyusunan laporan dan neraca koperasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.72.520.600,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.72.220.600,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) atau 99,59%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pelatihan penyusunan laporan dan neraca keuangan bagi 30 orang pengurus koperasi pada tahun 2017 dengan realisasi 100 %.

4. **Program Penciptaan Iklim Usaha usaha Kecil Menengah Yang Konduksif**

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.283.497.450,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.236.797.450,00 atau 83,53% yang alokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.186.535.025,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.186.295.025,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) atau 99,88%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya penyusunan regulasi pengembangan UMKM tahun 2017 dengan harapan adanya jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang dibina sejumlah 875 UMKM.

b. Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.96.962.425,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.50.502.425,00 (lima puluh juta lima ratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) atau 52,09%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pembinaan UMKM yang produktif di setiap kecamatan, dengan harapan jumlah usaha mikro kecil dan menengah pada tahun 2017 meningkat.

5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.202.780.650,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.176.471.445,00 atau 87,03% yang alokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp105.868.000,00 (seratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.82.354.499,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 77,79%.

Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pelatihan bagi pelaku UMKM sebanyak 50 orang yang mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai dengan target capain hasil meningkatnya kemampuan kewirausahaan bagi pelaku UMKM di Kota Dumai.

b. Pengembangan pemasaran produksi melalui promosi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.96.912.650.,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.94.116.946,00 (sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau 97,12%.

Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya penyelenggaraan promosi UMKM pada pameran dan promosi luar daerah yang diikuti 6 pelaku UMKM dengan realisasi 100%.

14. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Wajib Pemerintahan Umum dan Urusan Wajib Penanaman Modal, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 4. 45. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kinerja 2017	Realisasi sampai tahun 2017	Capaian (dalam %)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	74	75,99	102,69
Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp. 252.103.974.540.510,-	261.712.742.159.132	103,81

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Adapun realisasi pelaksanaan Indikator pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

a) Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 adalah sebesar 74, capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 75,99 (masuk dalam kategori kinerja "BAIK") atau tercapai sebesar 102,69 % dari target yang telah ditetapkan.

b) Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Investasi PMA dan PMDN

Target Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun 2017 adalah Rp. 252.103.974.540.510,- capaian pada tahun 2017 adalah Rp. 261.712.742.159.132,- atau sebesar 103,81% dari target yang ditetapkan. Realisasi investasi tersebut berdasarkan data LKPM dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 10.574.425.240,- dengan rincian belanja tidak langsung 5.360.175.240,- Dan belanja langsung sebesar 5.214.250.000,- , untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi 5.091.454.873,- Atau terserap 94.99% Dan belanja langsung terserap 5.075.933.613,- Atau 97.35%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

   Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2017 dianggarkan Rp. 428.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp 399.686.561,- 93.21 % Atau Indikator Kinerja hasil Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi adalah Jumlah Investor Berskala Nasional dengan target 149 investor tercapai sebanyak 210 investor atau 140,93%. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi adalah sebagi berikut

   a. **Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Penagawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

      Indikator kinerja keluaran yaitu tersedianya Laporan Kegiatan Penananaman Modal (LKPM) yang Akuntabel selama 12 bulan dengan capaian selama 12 bulan atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 70.170.000,- atau sebesar 99.62%.

      Kegiatan ini merupakan pengawasan dan pembinaan agar meningkatnya kesadaran investor untuk melaporkan LKPM sesuai periode yang ditentukan..

   b. **Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi**

      Indikator kinerja keluarannya yaitu jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan Pameran/seminar/rakor/presentasi investasi daerah sebanyak 1 event dengan capaian sebanyak 1 event atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 358.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 329.516.561,- atau sebesar 91.95%.

      Hal ini diwujudkan dengan keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Dumai dalam 1 event pameran/expo tahun 2017 yaitu Dumai Expo guna mempromosikan potensi investasi dengan menampilkan produk-produk unggulan daerah dalam upaya meningkatkan inovasi dan kreativitas guna mengoptimalkan pengembangan pembangunan serta meningkatkan nilai investasi daerah.

2. **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

   Untuk pelaksanaan program pada Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 447.520.800 dan yang terealisasi sebesar Rp. 438.919.600 atau 98.08%.

   Indikator Kinerja Hasil Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah Penyelenggaraan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan selama 12 bulan dengan capaian selama 12 bulan atau 100%.

   Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Indikator kinerja keluarannya yaitu tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan selama 12 bulan dengan capaian selama 12 bulan atau 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 447.520.800,- terealisasi sebesar Rp. 438.919.600,- atau sebesar 98,08%. Dengan adanya sistem informasi layanan public tersebut memudahkan pengawasan terhadap izin yang akan dan telah diterbitkan serta member informasi seluas luasnya terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

Untuk pelaksanaan program pada Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 646.250.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 637.200.500,- atau 98.59%. Indikator Kinerja Hasil Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu yaitu optimalisasi pelayanan administrasi perizinan sebanyak 4.700 izin dengan capaian sebanyak 3388 izin atau 72,08 %

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan terpadu adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Terpadu

Indikator kinerja keluarannya yaitu terlaksananya Sosalisasi perizinan dan non perizinan selama 12 bulan dengan capaian sebanyak 12 bulan atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 111.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 103.400.500,- atau sebesar 92,49%. Upaya untuk peningkatan pengurusan perizinan dan non perizinan di Kota Dumai telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pelayanan terpadu antara lain berupa sosialisasi Standar Pelayanan Terbaru guna penguatan birokrasi ai serta sosialisasi melalui media cetak dan iklan banner.

b. Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator Kinerja keluarannya terlaksanannya koordinasi penerbitan izin selama 12 bulan dengan capaian sebanyak 12 bulan atau 100% atau 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 213.580.000,- terealisasi sebesar Rp. 213.030.000,- atau sebesar 99,74%.

koordinasi penerbitan izin ini melibatkan Tim yang anggotanya terdiri dari instansi terkait dalam penerbitan perizinan sehingga izin yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dan memberikan kemudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan.

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator kinerja keluarannya yaitu terpantaunya izin-izin yang diterbitkan dengan capaian selama 12 bulan atau 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 320.870.000,- terealisasi

sebesar Rp. 320.770.000,- atau sebesar 99,97%. Kegiatan ini berupa survey/monitoring penerbitan izin yang Melibatkan Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Kota Dumai.

15. URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 46. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahrana dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian (%)
Jumlah organisasi pemuda	47	47	100
Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	100
Jumlah pembinaan cabang olahraga	28	32	114
Kunjungan wisata - Mancanegara - Domestik Kunjungan Wisata	12.757 39.263	12.515 32.825	87.16

a. Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi pemuda yang terdata pada tahun 2017 adalah 47 organisasi, sampai dengan akhir tahun 2017 masih terdata sebanyak 47 organisasi pemuda.

b. Jumlah kegiatan kepemudaan

Target awal dari indikator sasaran rentstra untuk kegiatan kepemudaan ditarget 2 kegiatan, namun karena terbatasnya anggaran, akhirnya bisa dilaksanakan 2 kegiatan, yaitu kegiatan seleksi dan pembinaan Paskibraka dan kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dengan realisasi sebesar 100 %.

c. Jumlah pembinaan cabang olahraga

Dalam meningkatkan prestasi olahraga, perlu didukung dengan pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan, terutama untuk membina mental dan memupuk bakat-bakat yang ada. Dalam rangkaian tersebut, dukungan klub-klub olahraga akan sangat membantu untuk menciptakan bibit-bibit pemuda yang berprestasi dibidang olahraga. Pada tahun 2017 target capaian tercatat 28 klub olahraga sementara realisasi mengalami peningkatan klub olahraga sebanyak 32 klub yang tercatat di KONI. Untuk kegiatan pada tahun 2017 realisasinya sebesar 114 %..

d. Jumlah kunjungan wisata

Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Pembangunan pariwisata dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang. Jumlah target wisatawan mancanegara pada tahun 2017 sebanyak 52.020 wisatawan, namun realisasi pada tahun 2017 terjadi penurunan kunjungan wisatawan menjadi 45.340 wisatawan.dengan rincian kunjungan domestic sebanyak 32.825 orang, kunjungan mancanegara sebanyak 12.515 orang.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah menyusun program kerja yang telah ditetapkan terdiri dari program pokok yang akan menjadi inti dari pembangunan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan jumlah anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.8.058.675.178,- Dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.511.328.880,- Dan belanja langsung sebesar Rp. 4.547.346.298,- dari belanja langsung selanjutnya dialokasikan untuk belanja rutin, urusan wajib dan pilihan dengan rincian anggaran untuk rutin sebesar Rp. 1.586.329.798,- urusan wajib sebesar Rp. 1.838.674.600,- dan anggaran untuk urusan pilihan sebesar Rp. 1.122.341.900,- Dengan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

a. Seleksi dan Pembinaan PASKIBRAKA

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 624.838.000,-(Enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 623.243.000,- (Enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau 99,74% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta seleksi PASKIBRAKA tingkat Kota Dumai dan Tingkat Provinsi Riau. Dengan realisasi kegiatan sebesar 100%.

2. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

a. Peningkatan dan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 171.963.100,- (Seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 169.854.773,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 98,77 % dari anggaran. Adapun indikator keluaran adalah jumlah pemuda yang ikut training motivasi dengan realisasi kegiatan sebesar 100%.

3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99.160.000,- (Sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau 99,16% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan pelaksanaan senam jasmani dan rekreasi. Dengan realisasi kegiatan sebesar 100%.

b. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). atau 100% dari anggaran. adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kab/kota yang mengikuti pertandingan volly Walikota Cup antar kab/kota yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Kota Dumai. Dengan realisasi kegiatan sebesar 100%.

c. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 591.873.500,- (Lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 582.533.000,- (Lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau 98,42% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta marching band yang dilatih. Dengan realisasi kegiatan sebesar 100%.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 149.781.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau 99,85% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah sarana olahraga yang direhab, yaitu rehab lapangan tennis. Dengan tingkat pencapaian adalah 100%.

5. Program pengembangan Pemasaran Pariwisata

a. Pengembangan Jaringan kerjasama Promosi Pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah bahan promosi dan informasi kepariwisataan sebanyak 2 bahan pariwisata yaitu : cetak goodybag promosi pariwisata dan cetak kalender. Dengan tingkat pencapaian adalah 100%

b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 442.972.900,- (Empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 437.480.800,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau 98,76% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah pameran yang diikuti sebanyak 3 pameran yaitu Dumai Expo, Riau Expo 2017 Provinsi Riau dan Batam Investment Trade Tourism (ITT) 2017 di Kota Batam,dengan tingkat pencapaian adalah 100%.

6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 210.900.000,- (Dua ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 210.649.000,- (Dua ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau 99,88% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah terbangunnya sarana danobjek wisata Kota Dumai sebanyak 1 objek wisata yaitu berupa rehabilitasi sarana prasarana prasarana objek wisata Kota Dumai, pengadaan permainan anak-anak, dengan tingkat pencapaian adalah 100%.

b. Pembersihan dan pemeliharaan Lahan Wisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 105.270.000,- (Seratus lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 104.346.500,- (Seratus empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau 99,12% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah lahan objek wisata (Hutan Wisata) yang dibersihkan sebanyak 1 objek wisata yaitu berupa pembersihan lahan di hutan wisata, dengan tingkat pencapaian adalah 100%.

7. Program Pengembangan Kemitraan

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 246.599.000,- (Dua ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 241.871.734,- (Dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau 98,08% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah peserta yang mengikuti Lomba Mancing dan Lomba Kicau Burung dengan tingkat pencapaian adalah 100%.

PRESTASI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA :

a. Bidang Olahraga :

Juara I Kompetisi Olahraga Volly Walikota Cup I tahun 2017

b. bBdang Pariwisata :

Stand favorit Dumai Expo

Stand Runer UP Batam ITT

16. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perpustakaandan Kearsipan dan RPJMD kota Dumai Tahun 2016 - 2021, Urusan Wajib Perpustakaan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 47. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Dumai Tahun 2017

No	Indikator kinerja sasaran	Target 2017	Realisasi tahun 2017	capaian (dalam %)
1	Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat	10% (29.022)	28.194	245,10

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai

a) Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat

Jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah Kota Dumai pada Akhir Tahun 2017 dengan target 29.022 pengunjung/pemustaka, namun realisasi kunjungan masyarakat ke perpustakaan hanya sebesar 28.194 pengunjung/pemustaka atau sebesar 97.15% yang terdiri

dari kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah Kota Dumai, Perpustakaan Keliling, perpustakaan masyarakat dan kelurahan serta perpustakaan tugu reformasi/lancing kuning.

Anggaran Belanja Kantor Perpustakaan Arsip dan Data Elektronik Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.500.422.840,00 dengan dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.584.072.840,00 sedangkan Belanja Langsung Sebesar Rp. 1.916.350.000,00. Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.436.384.895,00 atau terserap 94% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.758.040.520,00 atau sebesar 91%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan urusan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

a. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana penunjang yang sangat penting bagi dunia pendidikan, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan meluas pada semua sector kegiatan dan kehidupan manusia baik dilingkungan instansi/lembaga pemerintahan maupun perkantoran swasta untuk mendukung dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan fungsi yang dimiliki perpustakaan adalah sebagai sarana sumber belajar, penelitian, informasi dan kebudayaan serta dapat member kontribusi penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, maka konsekwensi yang harus dipenuhi oleh perpustakaan adalah berusaha menyediakan bahan pustaka yang baik dan juga setepat mungkin bagi keperluan pimpinan pada suatu organisasi dan masyarakat pengguna lainnya.

Alokasi anggaran anggaran belanja langsung yang digunakan untuk urusan perpustakaan adalah sebesar Rp. 158.258.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 134.667.000,- atau sebesar 85% yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;**

   a) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;

   Jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.18.471.000,00,- sedangkan jumlah penyerapan anggaran sebesar Rp.17.771.000,00,- atau 96%. Adapun indikator keluaran *(out put)* dari kegiatan ini jumlah bahan perpustakaan yang dirawat yaitu dengan target 24 bundel dan terealisasi 100%. Sedangkan *out come* dari kegiatan ini yaitu jumlah kunjungan masyarakat/pemustaka ke perpustakaan umum daerah kota dumai dan perpustakaan binaan lainnya dengan target 29.022 pengunjung/ pemustaka dan terealisasi 28.194 pengunjung/ pemustaka atau sekitar 97,15%.

   b) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah;

   Dengan anggaran sebesar Rp.75.530.000,00 dan terlealisasi Rp. 72.540.000,00 atau 96%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah perpustakaan desa/kelurahan, khusus dan masyarakat yang dibina atau terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari

kegiatan ini adalah jumlah perpustakaan desa/kelurahan, khusus dan masyarakat yang menjalankan standar pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan undang-undang/peraturan perpustakaan dengan target sebanyak 4 (empat) perpustakaan dan terealisasi 100%.

Menurunnya jumlah pembinaan terhadap perpustakaan masyarakat/ kelurahan yang awalnya dianggarkan untuk 15 perpustakaan masyarakat/kelurahan dikurangi menjadi 4 perpustakaan masyarakat/kelurahan saja sesuai dengan anggaran yang ada.

c) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca;

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.64.257.500,00 dan realisasi Rp.44,356.000,00 atau 69% . *Out put* dari kegiatan ini adalah jumlah lomba mendongeng, lomba duta pustaka, lomba perpustakaan kelurahan/perpustakaan khusus, pameran perpustakaan provinsi dengan target sebanyak 4 (empat) jenis kegiatan/lomba namun dikarenakan rasionalisasi maka yang dilaksanakan hanya 2 (dua) kegiatan (lomba) dan teralisasi 100%. Sedangkan *out come* dari kegiatan ini adalah sama dengan diatas yaitu jumlah kunjungan masyarakat/ pemustaka ke perpustakaan umum daerah kota dumai dan perpustakaan binaan lainnya dengan target 29,022 pengunjung/ pemustaka dan teralisasi 28.194 pengunjung/ pemustaka atau sekitar 97,15%.

b. Urusan Kearsipan

Arsip memiliki arti penting dan strategis karena merupakan pusat informasi, pusat ingatan, bahan bukti resmi dan sejarah penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan kebangsaan Indonesia yang diatur dalam Undang - undang No. 07 tahun 1971 tentang ketentuan - ketentuan pokok kearsipan dan Undang-Undang KearsipanNomor 43 tahun 2009.

Untuk melaksanakan kegiatannya, di alokasikan anggaran sebesar Rp. 85.837.025,00 dan terealisasi sebesar Rp. 76.695.200,00 atau sebesar 89%, Beberapa program kegiatan yang menjadi indikator kinerja pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut :

1. **Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan;**

Pada tahun tahun anggaran 2017 untuk program ini jumlah anggaran sebesar Rp. 65.946.850,00 dan jumlah realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 59.634.500,00,- atau sebesar 90% dari anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

a) Pengumpulan Data;

Jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 34.290.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.504.500,- atau 95.4%, dengan Indikator Kinerja keluaran *(Out put)* dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pengumpulan data arsip Kota Dumai dengan target 5 (lima) Instansi/Kantor/SKPD deangan realisasi 2 Instansi/Kantor/SKPD yang menyerahkan data atau terealisasi 40%, Sedangkan hasil *(Out come)* dari kegiatan ini adalah Jumlah penambahan dok/Arsip kota Dumai yang terkumpulkan dengan target sebanyak 200 dokumen dan realisasi kinerja

sebanyak 106 dokumen dari 2 (dua) OPD yang menyerahkan dari 5 (lima) OPD yang dikunjungi.

b) Pengklasifikasian Data;

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.656.000,- dan terealisasi Rp. 27.030.000 atau berkisar 85% Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pengklasifikasian yang dilaksanakan yaitu satu kali kegiatan dan terlaksana 100%, sedangkan *Outcome* dari kegiatan ini adalah jumlah kantor/SKPD/Instansi pemerintah daerah yang diklasifikasi yaitu dengan target 5 SKPD/Kantor, terealisasi 100%.

2. **Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah;**

Adapun kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

a) Penduplikasian dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika;

Jumlah anggaran sebesar Rp. 11.082.275,- dan realisasi anggaran Rp. 9.210.000,- atau sebesar 83%. Indikator kinerja keluaran *(Output)* dari kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan sarana pengolahan arsip penduplikasian dokumen arsip sebanyak 1.791 lbr.

Sedangkan *Outcome* dari kegiatan ini adalah Persentase peningkatan sarana pemeliharaan arsip daerah dengan target 80% dan terealisasi 80% dari target tersebut.

3. **Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan;**

a) Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip;

Untuk kegiatan ini Pagu Anggaran yang tersedia Rp. 8.807.900,- dan terealisasi sebesar 7.850.700 atau sebesar 89%. *Output* dari kegiatan ini adalah Jumlah/ jenis dokumen/arsip yaitu arsip textual, arsip audio video dan arsip fot yang dirawat atau dipelihara dengan target kinerja keluaran 3 jenis dokumen/arsip dan 250 Vhs 3.340 dokumen dan terealisasi 100%. Sedangkan *Outcome* dari kegiatan ini adalah Persentase peningkatan fasilitas pemeliharaan dokumen arsip yang diperkirakan 80%, perkiraan realisasi dari ketersediaan fasilitas/ peralatan dan perlengkapan untuk pemeliharaan dan perawatan arsip sebesar 80%, terealisasi 80%. Minimnya fasilitas pemeliharaan dokumen arsip akan mempengaruhi dokumen arsip yang sudah ada dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada pada saat ini. Dengan bertambah nya alat-alat untuk pemeliharaan/perawatan dokumen/arsip yang tersimpan sehingga keselamatan arsip yang tersimpan juga semakin meningkat.

C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

17. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pelaksanaan urusan pilihan pertanian sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Pencapaian sasaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai sampai dengan tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 48. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2017

No	Indikator kinerja sasaran	Target 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian (%)
A	**Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat**			
1	Angka Kecukupan Protein	50 gr/kap/hari	52 gr/kap/hari	104,00%
B	**Penguatan Kelembagaan Petani**			
1	Cakupan Bina Kelompok Tani	33 Kelompok	33 Kelompok	100,00 %
C	**Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian**			
1	Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan	104.131 Ton	105.525 Ton	101,34 %
2	Jumlah Penyuluh Terlatih	4 Orang	4 Orang	100,00%
3	Populasi Ternak Unggulan	5.673 Satuan Ternak	5.775 Satuan Ternak	101,79%
D	**Berkurangnya Angka Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis serta Menurunnya Kasus Cemaran PAH**			
1	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan	3 Kasus	7 Kasus	233,00%
2	Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis	30 Kasus	30 Kasus	100,00%
3	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis	29 Kasus	15 Kasus	233,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian sasaran kinerja sampai dengan tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Katahanan Pangan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Katahanan Pangan Masyarakat ini dilaksanakan melalui program pembangunan peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan). Sasaran ini mempunyai indikator kinerja yakni ; Angka Kecukupan Protein.

Standar untuk konsumsi gizi dan protein nasional dengan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Sedangkan target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2017 yakni Angka Kecukupan Protein sebesar 50 gr/kapita/hari. Capaian indikator kinerja Angka Kecukupan Protein sampai dengan tahun 2017 yakni 52 gr/kapita/hari atau 104,00% dari target 50 gr/kapita/hari. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan. Keempat kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

2. Sasaran Penguatan Kelembagaan Petani

Sasaran Penguatan Kelembagaan Petani ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Target indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Tani pada tahun 2017 sebesar 33 Kelompok dengan capaian sebesar 33 Kelompok atau 100,00%. Program ini direalisasikan ke dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani. Dari jumlah 33 kelompok tersebut berasal dari Kelompok Tani Pengembangan Tanaman Non Unggulan Daerah 10 Kelompok, Kelompok Tani yang meningkat kelasnya 15 Kelompok dan Jumlah Kelompok Ternak yang terlatih 8 kelompok.

3. Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi dan Produktifitas Pertanian

Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi dan Produktifitas Pertanian mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut :

a) Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 3 program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Target indikator kinerja Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan pada tahun 2017 sebesar 104.131 Ton dengan capaian sebesar 105.525 Ton atau 101,34%.

b) Jumlah Penyuluh Terlatih

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui program utama yaitu Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dan dijabarkan kedalam 2 (dua) kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan dan Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Petanian/Perkebunan. Target indikator kinerja Jumlah Penyuluh Terlatih pada tahun 2017 sebanyak 4 Orang dengan realisasi 4 orang atau 100%.

c) Populasi Ternak Unggulan

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Dua program tersebut kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat, Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak dan dan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Target indikator kinerja Populasi Ternak Unggulan pada tahun 2017 sebanyak 5.673 Satuan Ternak dengan realisasi 5.775 Satuan Ternak atau 101,79%.

4. **Sasaran Berkurangnya Angka Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis serta Menurunnya Kasus Cemaran PAH**

Sasaran Penurunan Berkurangnya Angka Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis serta Menurunnya Kasus Cemaran PAH pada tahun 2017 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut :

a. **Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan**

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Target indikator kinerja Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kasus dengan capaian sebanyak 7 (tujuh) atau 233,00%. Data awal pada tahun pertama Renstra sebesar 17 kasus, pada tahun 2017 terdapat 10 kasus sehingga pengurangannya sebanyak 7 kasus. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.

b. **Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis**

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Target indikator kinerja Jumlah Kasus Hewan Menular Strategi Zoonosis pada tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) kasus dengan capaian sebanyak 30 (tiga puluh) kasus atau 100,00%. Data awal pada tahun pertama Renstra sebesar 35 kasus, pada tahun 2017 terdapat 30 kasus sehingga penurunan sebanyak 5 kasus. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

c. **Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis**

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Target indikator kinerja Jumlah Kasus Hewan Menular Strategi Non Zoonosis pada tahun 2017 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kasus dengan capaian sebanyak 15 (lima belas) kasus atau 233,00%. Data awal pada tahun pertama Renstra sebesar 35 kasus, pada tahun 2017 terdapat 29 kasus sehingga penurunan sebanyak 6 kasus. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.162.705.750,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.159.024.201,00 atau 99,68% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 837.770.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 835.467.450 atau 99,73% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Jumlah even yang diikuti kelompok tani (Pekan Nasional KTNA Nasional di Prov.Nangro Aceh Darussalam) 80 Orang dengan realisasi 80 Orang.

b) Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 55.267.750,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 54.302.000,00 atau 98,25% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Jumlah peternak yang terlatih 90 KK dengan realisasi 90 KK.

c) Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 269.668.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 269.254.751,00 atau 99,85% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Pengembangan Tanaman Hortikultura 11 Kelompok dengan realisasi 11 Kelompok.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.500.986.765,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.482.251.932,00 atau 98,75% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.179.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.955.000,00 atau 99,55% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data SKPG 1 laporan dengan realisasi 1 laporan.

b) Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 160.077.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 98.268.122,00 atau 91,80% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.

c) Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 196.841.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 195.907.000,00 atau 99,53% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pemantauan

situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi 2 kali dengan realisasi 2 kali.

d) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 126.844.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 124.102.000,00 atau 97,84%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelompok pengembang lahan pekarangan 2 kelompok dengan realisasi 2 kelompok, Terlaksananya pembinaan dan pengembangan penganekaragaman bahan pangan dan olahan pada kelompok dasawisma pekarangan 2 kelompok dengan realisasi 2 kelompok, Terlaksananya introduksi pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga 1 kelompok.

e) Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 361.429.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 361.215.319,00 atau 99,94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pengembangan tanaman padi dan palawija 60 Ha dengan realisasi 60 Ha.

f) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 160.100.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 159.463.900,00 atau 99,60% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Berpartisipasi dalam lomba cipta menu B2SA tingkat propinsi/nasional 1 kali dengan realisasi 1 kali, Terlaksananya sosialisasi menu B2SA utk anggota PKK tingkat kecamatan 210 orang dengan realisasi 210 Orang, Terlaksananya lomba cipta menu B2SA dan lomba pengolahan pangan lokal tingkat Kota Dumai 1 kali dengan realisasi 1 kali, Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI 400 orang dengan realisasi 400 orang.

g) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu produk perkebunan, produk pertanian

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan in sebesar Rp. 445.515.765,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 444.654.213,00 atau 99,81% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan, Terlaksananya Pengembangan Tanaman Cabe 12 Ha dengan realisasi 12 Ha, Terlaksananya pengembangan tanaman nenas 2,5 Ha dengan realisasi 2,5 Ha.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 289.050.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 281.631.095,00 atau 97,43% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 202.485.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 195.331.000,00 atau 96,46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya sarana dan prasarana alat mesin pertanian 8 unit dengan realisasi 8 unit.

b) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 86.570.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.300.095,00 atau 99,68% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan 2 Kelompok dengan realisasi 2 kelompok.

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 586.178.893,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 579.897.427,00 atau 98,93% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 85.353.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 83.596.300,00 atau 97,94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Temu Lapang/bimtek budidaya tanaman perkebunan 3 kali dengan realisasi 3 kali, Terlaksananya sosialisasi permentan No.98/2013 2 kali dengan realisasi 2 kali.

b) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 174.610.893,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 172.544.127,00 atau 98,81% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya intensifikasi tanaman perkebunan 100 Ha dengan realisasi 100 Ha, Terlaksananya pembinaan/ perlindungan tanaman perkebunan 50 KK dengan realisasi 50 KK.

c) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 326.215.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 323.757.000,00 atau

99,25% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya peremajaan sawit rakyat 50 Ha dengan realisasi 50 Ha.

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 396.058.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.386.272.000,00 atau 97,53% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 222.710.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 222.710.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan programa penyuluhan 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/magang dan sertifikasi profesi penyuluh pertanian 4 orang dengan realisasi 4 orang.

b) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 159.348.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 173.348.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 163.562.000,00 atau 94,35% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Pembangunan Embung 1 Unit dengan realisasi 1 Unit. Sumber dana dari DAK (Dana Alokasi khusus) bidang kedaulatan pangan sub bidang pertanian.

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.388.680.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.386.080.000,00 atau 99,33% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 208.680.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 208.680.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana san SE 1 kegiatan dengan realisasi 1 Kegiatan, Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik verteriner di puskeswan 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan 1 kegiatan.

b) Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 180.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 177.400.000,00 atau 98,55% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pengawasan Peredaran BAH/HBAH 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan, Terlaksananya Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban 1 Kali.

7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 710.034.700,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 692.885.000,00 atau 97,58% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 429.572.950,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 428.852.700,00 atau 99,83% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Jumlah Inseminasi Buatan (IB) yang dilakukan 950 Ekor dengan 950 ekor, Tersedianya operasional perawatan ternak di UPT peternakan 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.

b) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 298.417.500,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp. 280.461.750,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 264.032.300,00 atau 94,14% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Peternak 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan, Terlaksananya seleksi calon petani calon lokasi 15 Kelompok dengan realisasi 15 Kelompok.

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pada tahun 2017, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 547.412.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 532.874.000,00 atau 97,34% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 547.412.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 532.874.000,00 atau 97,34% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Pengamatan Dini dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan 15 kali dengan realisasi 15 kali.

PRESTASI ATAU PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Prestasi atau penghargaan yang diterima Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

1. Juara I Adikarya Pangan Nasional "**Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Kelompok Masyarakat**" Tingkat Propinsi Riau (LKK Karya Mandiri, Ketua : Sudarji)
2. Juara II Adikarya Pangan Nasional "Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan/Penyuluh PNS" Tingkat Propinsi Riau (Fara Shaliza, SP, M.Si)
3. Juara II BPP Terbaik Tingkat Provinsi Riau (BPP Dumai Barat/Dumai Selatan)

4. Juara II Temu Karya Tingkat Nasional pada Acara Pekan Nasional (PENAS) XV di Provinsi Nangro Aceh Darusalam.
5. Juara I Balai Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Provinsi Riau
6. Juara I Lembaga Ekonomi Petanian Berprestasi Tingkat Provinsi Riau
7. Juara II Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi Tingkat Provinsi Riau
8. Kelompok Tani Perkebunan Berprestasi Tingkat Provinsi Riau

18. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Perikanan

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Perikanan Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Kelautan dan Perikanan, disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 4. 49. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian (%)
Nilai Konsumsi ikan	31 Kg/kapita/th	32 kg/kapita/th	103 %
Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat	2 kelompok	0 kelompk	0 %
Produksi perikanan budidaya	203.24 ton	342.36 ton	168 %
Produksi perikanan tangkap	275 ton	930.81 ton	338 %
Luas penanaman mangrove	0	0	0
Cakupan bina kelompok pembudidaya	28 kelompok	28 kelompok	100 %
Cakupan bina kelompok nelayan	25 kelompok	25 kelompok	100 %
Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	29 ton	29 ton	100 %

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut:

1. Nilai Konsumsi ikan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 31 kg/kapita/th, dan target dapat dicapai atau realisasi tahun 2017 yaitu 32 kg/kapita/th. Pencapaian dapat tercapai karena adanya kegiatan sosialisasi makan ikan atau gemar ikan yang dilakukan oleh Forum Gemar Makan Ikan yang diketua oleh Walikota Dumai dengan bekerjasama PKK Kota Dumai dan Dinas Perikanan Kota Dumai. Program yang capai target ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan Kegiatan Peningkatan Keanekaragaman Produk Hasil Olahan Perikanan. Diluar kegiatan ini dilakukan survey ikan masuk ke Kota Dumai dalam bentuk segar dan produksi ikan di Kota Dumai yang dibantu tenaga pendampingan baik dari Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan APBD Kota Dumai. Bila di kaitkan dengan capaian tahun lalu, dapat dikatakan menurun hal ini karena jumlah penduduk yang terus meningkat sedangkan konsumsi ikan masih pada tahapan normal atau tahapan yang mampu di capai kinerja dinas.

2. **Pembinaan dan Pembentukan kelompok pengawas masyarakat**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu 2 kelompok pengawas masyarakat, namun kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terkait dengan kewenang pembinaan terhadap kelompok pengawas sudah berada di Provinsi atau Daerah Tingkat I, sehingga kegiatan inipun tidak mendapatkan anggaran tahun 2017, tapi tetap di usulkan ke pemerintah Provinsi Riau, dan bentuk tindak lanjut mereka provinsi memberikan bantuan alat transportasi berupa speed boat untuk kelompok pecinta alam Bahari.

3. **Produksi perikanan budidaya**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu 203,24 ton, capaian kinerja di peroleh sebesar 342,36 ton atau 109 % dari target, capaian ini tidak terlepas bagaimana upaya peningkatan dengan pendampingan teknologi baik sektor air tawar maupun air payau, berupa teknologi intensif pemeliharaan udang.

4. **Produksi Perikanan Tangkap**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu 275 ton, capaian kinerja di peroleh sebesar 930,81 ton atau 338 % dari target, capaian ini tidak terlepas dari pembinaan nelayan melalui tenaga pendamping yang berasal dari pusat dan Kota Dumai sendiri. Bila mencermati angka capaian akan terlihat sangat signifikan sekali, hal ini karena adanya perbaikan cara menghitung data yang dipusatkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Dumai dan pendataan yang dilakukan langsung oleh tenaga pendamping perikanan tangkap/ bidang kenelayanan.

5. **Luas Penanaman Mangrove**

   Indikator capaian kegiatan ini tidak dilaksanakan lagi karena merupakan kewenangan provinsi sejak tahun 2017.

6. **Cakupan bina kelompok pembudidaya**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu 28 Kelompok, capaian kinerja di peroleh sebesar 28 kelompok atau 100 % dari target, hal ini dapat tercapai melalui pendampingan yang dilakukan oleh 5 orang tenaga pendamping yang didanai dari APBD Kota dan pusat sebanyak 3 orang yang merupakan lanjutan pada program PUMP tahun 2015 dan 2016.

7. **Cakupan bina kelompok nelayan**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu 25 Kelompok, capaian kinerja di peroleh sebesar 25 kelompok atau 100 % dari target, hal ini dapat tercapai melalui pendampingan yang dilakukan oleh 3 orang tenaga pendamping yang didanai dari APBD Kota dan pusat sebanyak 2 orang yang merupakan lanjutan pada program PUMP tahun 2015 dan 2016.

8. **Peningkatan produksi hasil olahan perikanan**

   Target dari indikator sasaran ini yaitu 29 ton, capaian kinerja di peroleh sebesar 29 kelompok atau 100 % dari target, pengukuran hasil produksi olahan dilakukan kepada kelompok yang

pernah dibina oleh Dinas Perikanan Kota Dumai, namun untuk tahun berikutnya nilai produksi tidak lagi menjadi target kinerja dari Dinas Perikanan Kota Dumai namun menjadi target kinerja Provinsi Riau khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai wewenang yang diberikan sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Walaupun demikian Dinas Perikanan Kota Dumai masih melakukan survey nilai produksi olahan karena masih terkait dengan penghitungan nilai komsumsi ikan untuk tahun 2017. Guna mendukung penghitungan hasil olahan di lakukan Tingkat Pencapaian Program dalam pelaksanaan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan adalah meningkatnya jumlah produk hasil perikanan sebesar 29 ton.

Adapun realisasi anggaran pada Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. **Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

   a) **Kegiatan Peningkatan Keanekaragaman Produk Hasil Olahan Perikanan.**

   Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000.000,- namun mengalami pengurangan anggaran di APBD-P 2017 menjadi sebesar Rp. 49.650.000,- realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 49.491.200 atau sebesar 99,68 %. Diluar kegiatan ini dilakukan survey ikan masuk ke Kota Dumai dalam bentuk segar dan produksi ikan di Kota Dumai yang dibantu tenaga pendampingan baik dari Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan APBD Kota Dumai. Bila di kaitkan dengan capaian tahun lalu, dapat dikatakan menurun hal ini karena jumlah penduduk yang terus meningkat sedangkan konsumsi ikan masih pada tahapan normal atau tahapan yang mampu di capai kinerja dinas.

2. **Program pengembangan budidaya perikananan**

   a) **Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul**

   Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 382.768.200,- pada APBD murni dan terjadi pengurangan pada APBD-P menjadi Rp. 348.691.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 348.640.000,- atau 99,94. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran tersedianya peralatan pembenihan sebanyak 13 item, tersedianya pakan untuk budidaya 9.8 kg. tolak ukur hasil pekerjaan berupa produksi benih ikan sebanyak 800.000 ekor. Realisasi fisik telah dilaksanakan 100 %, Produksi benih dicapai sebesar 833.773 ekor. Memenuhi kebutuhan akan benih ikan tahun 2017 pada awalnya sulit di capai karena adanya kerusakan sumur artesis sebagai sumber air pembenihan namun selesai pekerjaan perbaikan sumur artesis, maka capaian terhadap benih dapat di penuhi yaitu sebesar 104 %.

   b) **Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan**

   Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dialokasikan dana Tahun Anggaran 2017 melalui program Pengembangan Budidaya Perikanan sebesar Rp.

146.320.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Mengalami perubahan menjadi Rp. 105.920.000,- (seratus lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 105.710.000 (seratus lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar 99,80 %. Pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan indikator pencapaian kegiatan terpenuhinya operasional pembinaan pelaku usaha perikanan sebanyak 14 kali dan hasilnya mendapat pendampingan pada kelompok budidaya perikanan sebanyak 25 kelompok. Realisasi kegiatan berupa pendampingan tani pembudidaya 25 kelompok oleh 5 (lima) orang tenaga honorer perikanan dan PNS pada Bidang Budidaya, nilai produksi air tawar pada tahun 2017 sebesar 336,40 ton dari pembudidaya ikan Kota Dumai tercatat sebesar 230,005 ton, produksi budidaya air payau 17,93 ton dan keramba 88,46 ton dari total produksi perikanan tahun 2017 yaitu sebesar 336,40 ton, hal ini merupakan peluang pasar bagi masyarakat Dumai yang mau melakukan aktifitas budidaya ikan.

3. Program Pengembangan Perikanan produksi perikanan tangkap

a. Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Realisasi Keuangan Sampai dengan bulan Desember 2017, untuk pelaksanaan kegiatan adalah sejumlah Rp. 70.730.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Realisasi serapan anggaran kegiatan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp. 70.334.200,- (Tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) 99,44 % dari jumlah keseluruhan anggaran kegiatan tersebut.

Pada kegiatan ini telah terlaksana 100% karena pada kegiatan ini merupakan honorarium tenaga pendamping bidang kenelayanan sebanyak 3 orang dan belanja operasional pembinaan untuk tenaga pendamping non PNS 36 kali dengan hasil kunjungan terhadap 25 KUB (Kelompok Usaha Bersama).

Realisasi kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang dilakukan oleh tenaga penyuluh Non PNS, meliputi 27 Kelompok nelayan yang ada yang terdaftar di Dinas Perikanan Kota Dumai, Namun sampai saat ini hanya ada 22 kelompok yang masih aktif pelaksanaannya. Adapun kelompok nelayan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- KUB Batu Karang, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
- KUB Nelayan Bakti, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
- KUB Nelayan Bersatu, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
- KUB Lomek, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
- KUB Nelayan Kurnia, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
- KUB Camar Laut, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat

- KUB Mekar Jaya, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
- KUB Kuda Laut, berlokasi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan
- KUB Nelayan Bersatu Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan
- KUB Mampu Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan
- KUB Terbut Fajar, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
- KUB Selat Basilam, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
- KUB Basilam Pesisir, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
- KUB Harapan Baru, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
- KUB Hiu Mas, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
- KUB Tanjung Penyembal, berlokasi di Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan
- KUB Nelayan Tuna, berlokasi di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur
- KUB Teluk Makmur, berlokasi di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai
- KUB Guntung Sejati, berlokasi di Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai
- KUB Nelayan Sejahtera, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai
- KUB Medang Kampai Jaya, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.
- KUB Nelayan Bunga Mawar, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.

4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

Realisasi Keuangan sampai dengan bulan Desember 2017, untuk pelaksanaan kegiatan adalah sejumlah Rp. 164.855.000,- *(seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah),* dan Realisasi serapan anggaran kegiatan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp. 164.775.000,- *(seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 99,95* % dari jumlah keseluruhan anggaran kegiatan tersebut. Pada kegiatan ini memiliki indikator capaian keluaran terlaksananya operasional pabrik es balok sebanyak 2 unit selama 1 tahun, hasil yang di peroleh terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung TPI.

Kegiatan ini terdiri dari biaya tenaga pemeliharan mesin pabrik es sebanyak 2 orang, pemeliharaan mesin genset untuk pabrik es bila dalam menutupi rentang masa matinya listrik PLN, kemudian penyediaan garam sebagai katalisastor proses

pendinginan/pembekuan es balok, service dan penggantian suku cadang mesin es balok, semua kegiatan telah di lakukan 100%.

5. **Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar**

   a. **Kegiatan Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya Perikanan**

   Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran honorarium pemeliharaan dan operasional tambak untuk 3 orang selama 12 bulan, Produksi tambak sebesar 2,25 ton. kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.200.000.000,-. pada APBD murni dan terjadi pengurangan pada APBD-P sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 174.504.996,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 174.458.000,- atau 99,97%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran operasional tambak tambak plastik untuk 1 periode, Realisasi fisik telah dilaksanakan 100 %, Produksi tambak sebesar 2,5 ton.

19. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Dumai dan RPJMD tahun 2016- 2021, maka disampaikan pencapaian tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 50. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian kinerja tahun 2017	Capaian Kondisi Akhir Tahun 2017	Capaian (%)
Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	Rupiah (juta)	561.410.000,00	49,236,029.00	
Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha	Unit Usaha	5	10	50%
Jumlah pasar tradisional yang sesuai standard	Unit	2	2	100%
Jumlah pengusaha Dagang terlatih	Unit	3	5	60%

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Dumai

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

   Pada tahun 2017 targetnya adalah sebesar Rp 49.236.029,00 sedangkan realisasi adalah sebesar Rp 561.410.000,00 yang berasal dari retribusi pasar. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 100%.

2. **Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha**

   Pada tahun 2017 targetnya adalah sebesar 10 unit sedangkan realisasi adalah sebesar 5 unit. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 50%.

3. **Jumlah pasar tradisional yang sesuai standard**

   Adalah sebesar 2 pasar sedangkan realisasi adalah sebesar 3 pasar. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 150%.

4. Jumlah pengusaha Dagang terlatih

5 orang sedangkan realisasi. adalah sebesar 3 orang. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 60%.

Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.175.508.550,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.514.928.300,00,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.931.225.100,00,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 4.283.597.092,00,- atau terserap 94,87% dan belanja langsung terserap Rp. 3.752.154.270,00,- atau 95,44%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a. Pengembangan sarana pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ibu rupiah) denga realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ibu rupiah) atau 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha dengan targetnya adalah 500 alat UTTP.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

a. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 36.670.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 36.310.900,00 (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 99,02%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersosialisasinya peraturan dan prosedur ekspor impor.

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a. **Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat** Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 53.600.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 40.591.100,00 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Rupiah) atau 75,72%.

b. Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 75.872.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 74.869.450,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 98,67%.

c. Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 585.650.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 584.594.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 99,81%.

4. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

a. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp 75.850.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapa dana sebesar Rp 31.490.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau 41,52%.

b. Kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 20.650.000,00 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 20.650.000,00 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 100%.

D. URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

20. URUSAN PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah

Dalam pencapaian indicator sasaran yang terdapat dalam Renstra Sekertariat Daerah Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 51. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2017

IndikatorKinerjaSasaran	Target Capaian Kondisi Akhir 2017	Realisasi S/D Tahun 2017	Capaian (dalam %)
Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK	260 Binaan PKK	260 Binaan PKK	100%
PKK Aktif	41 PKK	41 PKK	100%
Posyandu aktif	241 Posyandu	241 Posyandu	100%
Jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK)	8 OPD	8 OPD	100%
Jumlah Website milik Pemerintah Daerah	1 Website	1 Website	100%
Penyelesaian konflik tanah masyarakat	3 Kasus	3 Kasus	100%
Kriteria penilanan LPPD	Peringkat 7	Peringkat 8	85,71%
Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	20 Media	15 Media	75%
	5 Radio	3 Radio	60%
	3 TV	3 TV	100%

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2017 dapat disampaikan adalah, sebagai berikut:

1) Pencapaian indikator kinerja sasaran rata - rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2017 target sebanyak 260 kelompok binaan PKK dan realisasinya sebanyak 260 kelompok binaan PKK, sehingga capaian sebesar 100%. Dalam hal ini melaksanakan pembinaan melalui, 7 PKK Kecamatan dan 33 PKK Kelurahan di setiap kelurahan terdapat rata - rata 8 binaan PKK.
2) Pencapaian indikator kinerja sasaran PKK aktif dan Posyandu aktif, pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 41 PKK aktif dengan realisasinya sebanyak 41 PKK aktif dan Posyandu aktif dengan realisasinya sebanyak 241 Posyandu aktif, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Dalam hal ini, PKK aktif dan Posyandu aktif di Kota Dumai melakukan pembinaan di 7 kecamatan dan di 33 kelurahan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan PKK Kota Dumai tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut: jambore PKK tingkat Nasional dan Kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang diadakan di Jakarta.
3) Capaian indikator kinerja sasaran kriteria penilaian LPPD Kota Dumai Tahun 2016 yang dinilai Tahun 2017 adalah peringkat 8 regional/Provinsi Riau LPPD Tahun 2016 tercapai , dan target tahun 2017 adalah peringkat 7 dan terealisasi pada peringkat 8 dengan capaian persentase sebesar 85,71%.

4) Capaian indikator kinerja sasaran dan penyelesaian konflik tanah masyarakat yaitu 3 kasus yang telah diselesaikan dari target 3 kasus dan terealisasi sebanyak 3 kasus yang telah diselesaikan atau dengan capaian persentase sebesar 100%. Antara lain yang telah diselesaikan adalah terselesainya permasalahan tanah yang berada dikawasan hutan, permasalahan tanah PT. CPI Dumai yang dikuasai oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Dumai serta terselesainya permasalahan tanah Jl. Abdul Rabkan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan.
5) Jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2017 adalah publikasi 20 media dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dengan realisasi 15 media atau dengan capaian persentase 75% masih dibawah target, untuk radio dari target 5 radio dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dan terealisasi 3 radio atau dengan capaian persentase 60% sedangkan target capaian untuk publikasi 3 TV dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dan terealisasi 3 publikasi di TV atau dengan realisasi dari target yang ditetapkan 100%
6) Capaian jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) Pada IKU tahun 2016, dijelaskan bahwa jumlah SKPD/Kantor/Sarana Publik yang terkoneksi jaringan IT dengan Kantor PADE sebanyak 41 SKPD/Kantor/ Sarana Publik, realisasi tahun 2016 mencapai target 44 SKPD/Kantor atau atau dengan persentase 107%. Sedangkan untuk jumlah Sub Domain dan Email SKPD/Kantor/Instansi jumlah 30 SKPD sedangkan. Dengan perubahan OPD tahun 2017 maka IKU kantor PADE menadi IKU Sekretariat Daerah melalui revisi dengan target indikator 8 jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) dan realisasi 8 OPD atau dengan persentase 100%
7) Capaian jumlah Website Milik Pemerintah Daerah Jumlah website pemerintah Kota Dumai sebanyak 1 website (www.dumaikota.go.id) dengan target 12 bulan dan terlaksana 12 bulan atau 100 persen, dengan jumlah kunjungan 295.523 pengunjung/pengakses selama satu tahun. Adapun jumlah berita/dokumen/informasi daerah yang dikelola pada tahun 2017 sebanyak 93 berita/ dokumen/ informasi

Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.76.680.782.580,- dengan rincian sebagai berikut, yaitu: Belanja Tidak Langsung Rp.14.641.783.970,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.62.038.998.610,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah Rp.13.950.730.221,- atau dengan persentase sebesar 95,28% dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp.52.709.650.813,- atau dengan persentase sebesar 84,96%. Adapun program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM

Terdiri dari 4 (empat) program dan 6 (enam) Kegiatan, sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
   a) **Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

   Jumlah anggaran yang tersedia Rp.132.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.118.914.052,- atau dengan persentase 90.09%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai dan I-LPPD dari target 2 dokumen dengan realisasi 100%.

2. **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan**
   a) **Kegiatan Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada partai politik**

   Jumlah anggaran yang tersedia Rp.91.353.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.76.878.450,- atau dengan persentase 84,15%, adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bantuan untuk 12 Partai Politik (Parpol) dari target 12 Parpol realisasi 100%.

3. **Program Penataan Daerah Otonomi Daerah**
   a) **Kegiatan penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah**

   Jumlah anggaran yang tersedia Rp.67.980.350,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.61.434.950,- atau dengan persentase 90,37% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah ranperda pemekaran kelurahan dari target ranperda pemekaran kelurahan dengan realisasi 100%.

   b) **Kegiatan penyelesaian konfik perbatasan antar daerah**

   Jumlah anggaran yang tersedia Rp.93.329.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.80.122.680,- atau dengan persentase 85,85%, adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah ranperwa batas antar kecamatan daerah dari target ranperwa dengan realisasi 100%. Hasil ferifikasi BPKAD Provinsi Riau kegiatan semula **"fasilitasi"** penyelesaian konfik perbatasan antar daerah, redaksi fasilitasi kata - katanya dihilangkan.

4. **Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah**
   a) **Kegiatan Penyusunan buku monografi Kota Dumai**

   Jumlah anggaran yang tersedia Rp.52.436.050,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.50.391.050,- atau dengan persentase 96,10%, adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya 1 buku monografi Kota Dumai dari target 1 buku dengan realisasi 100%.

   b) **Kegiatan penyusunan data rupa - rupa bumi**

   Jumlah anggaran yang tersedia Rp.153.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.100.475.287,- atau dengan persentase 65,33%, adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen nama - nama rupa bumi dari target 1 dokumen dengan realisasi 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Terdiri dari 5 (lima) program serta 9 (sembilan) kegiatan, sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
   a) **Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan**

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.96.550.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.46.367.000,- atau dengan persentase 48,02%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah 1 dokumen/laporan hasil monitoring/survey lapangan objek yang mengajukan/menerima hibah/bansos tahun 2017 dari target 1 dokumen monev dengan realisasi 100%.

   b) **Kegiatan peningkatan koordinasi hibah/bansos**

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.258.919.860,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.172.988.000,- atau dengan persentase 66,81%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah proses verifikasi proposal hibah/bansos bagi badan/lembaga/organisasi masyarakat dengan realisasi 70%. Kata "fasilitasi" dihilangkan dari kegiatan "fasilitasi" peningkatan koordinasi hibah/bansos hasil ferifikasi BPKAD Provinsi Riau dalam APBD Kota Dumai

2. **Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**
   a) **Kegiatan peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan**

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.556.350.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.421.040.000,- atau dengan persentase 91,31%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah honorium tenaga pendidikan yaitu DTA, TPQ dan Madrasah dari taget yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja 100%.

3. **Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Masyarakat**
   a) **Kegiatan Penyediaan Beasiswa**

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.699.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.237.669.661,- atau dengan persentase 33,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah mahasiswa/i berprestasi dari kurang mampu yang dibantu asal Kota Dumai sebanyak 212 dari target dan realisasi 64 orang dengan persentase realisasi adalah 35%.

4. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
   a) **Kegiatan Pelaksanaan MTQ/STQ tingkat Kota dan tingkat Provinsi**

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.008.702.640,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.806.522.458,- atau dengan persentase 94,96%. Adapun indikator kinerja keluaran dari kegiatan ini adalah

terlaksananya kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kota Dumai dan Kota Dumai sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ XXXVI Provinsi Riau tahun 2017, dengan realisasi kegiatan 100%.

b) Kegiatan pembinaan kehidupan beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.598.097.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.409.252.290,- atau dengan persentase 68,43%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pengajian rutin, honorarium petugas ibadah, mubalik dan tokoh agama dengan realisasi kegiatan 100%.

c) Kegiatan peningkatan pelayanan dan pembinaan haji Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.219.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.837.776.150,- atau dengan persentase 68,69%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan dan pembinaan bagi calon jemaah haji Kota Dumai yang dimulai dari proses seleksi TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah), pelaksaan manasik haji, pemberangkatan ke embarkasi Batam Provinsi Kepulauan Riau hingga pulang ke Dumai, realisasi pelaksanaan haji adalah 98%.

5. **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

a) Kegiatan penyusunan data base dan sistem informasi bantuan sosial dan hibah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.88.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.40.500.000,- atau dengan persentase 46,02%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terverifikasi data objek penerima hibah/bansos tahun 2017 sehingga penyaluran hibah/bansos tepat sasaran dan akuntabel, dengan realisasi kegiatan 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

a) Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.556,966,345,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.508,718,200,- atau 91,34%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah meningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai dengan target 41 PKK dan realisasi 41 PKK. Kegiatan PKK ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Kota Dumai melalui pembinaan-pembinaan PKK yang berada di 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan dengan capaian kinerja dengan persentase 100%.

2. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

   a) **Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan**

   Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.179,476,200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.177,581,200.- atau 98.94%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah persentase pengawasan UEK-SP yang dapat dilaksanakan terhadap 33 UEK-SP di Kota Dumai dari target 33 UEK-SP dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

3. **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

   a) **Kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)**

   Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.234,180,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.233,514,410,- atau 99.72%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2017 dengan capaian kinerja 100%.

   b) **Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna**

   Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.97,643,100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.90,132,100,- atau 96.78%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalahtersosialisasinya informasi dan edukasi teknologi tepat guna dengan terlaksananya sosialisasi Posyantek bagi 80 orang peserta dengan capaian kinerja 100%.

   c) **Kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan**

   Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.161,550,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.154,613,845,- atau 95,71%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya lomba kelurahan tingkat Kota Dumai Tahun 2017 dengan realisasi 100%.

Evaluasi perkembangan kelurahan dilakukan untuk menilai keberhasilan pembangunan yang ada dikelurahan yang dilakukan secara teratur, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya memberdayakan masyarakat dengan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di kelurahan.

BAGIAN HUKUM DAN HAM

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 4 (kegiatan) kegiatan, adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

   a) Kegiatan bantuan hukum dan pelayanan hukum Pemerintah Kota Dumai

   Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.337.503.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.288.118.522,- atau 85,37% yang adapun indikator keluarannya adalah

terlaksananya upaya bantuan hukum bagi PNS dan tersedianya kuasa hukum dalam rangka penyelesaian sengketa pidana, perdata dan tata usaha negara yang tersangkut perkara kedinasan yaitu berupa 6 (enam) perkara dan terealisasi 6 (enam) perkara dengan capaian kinerja 100%.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Kegiatan digitalisasi Perda dan pemeliharaan Peraturan Perundang -Undangan dan pembelian buku Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.165.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp.150.278.586,- atau 90,68%. Adapun indikator keluarannya adalah jumlah produk hukum bagi PNS dan masyarakat, yaitu buku lembaran daerah, berita daerah dan pembuatan naskah akademis dengan target 100% dengan capaian kinerja 100%.

3. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

a) Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang - undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.174.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp.138.384.104,- atau 79,28%. Adapun indikator keluarannya adalah jumlah peraturan perundang - undangan dalam bentuk produk hukum daerah sebanyak 8 Perda yang disahkan oleh DPRD Kota Dumai dari taget 8 Perda capaian kinerja 100%.

Dalam realisasinya Perda yang disahkan oleh Pemerintah Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai melebihi target yaitu 16 Perda dengan rincian sebagai berikut:

- Perda tentang Pencabutan Perda Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan AKTA Capil;
- Perda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belana Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Perda tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai;
- Perda tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh;
- Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Perda tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Dumai;
- Perda tentang Hari Jadi Kota Dumai;
- Perda tentang Penataan Dan Pembinaaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanaan Dan Toko Swalayan;
- Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Perda tentang Izin Usaha Industri;
- Perda tentang Perubahan Atas Perda Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Capil;

- Perda tentang Perubahan Atas Perda Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Perda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Perda tentang Pertanggungawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

b) Kegiatan publikasi peraturan perundang - undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.76.616.800,- dengan realisasi jumlah besar Rp.60.956.900,- atau 80,00 %. Adapun indikator keluarannya yaitu pemahaman hukum bagi PNS dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kepastian hukum sesuai target dengan capaian kinerja 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 3 (tiga) kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a) Kegiatan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.272.600,315,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.272.600,315,- atau dengan persentase 100%. Indikator kinerja keluarannya adalah terselenggaranya penyeleksian, pemilihan dan pelantikan direksi Badana Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Dumai sesuai target capaian realisasi sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.205,028.505,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.205,028.505,- atau dengan persentase 97,75% dari anggaran. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah pameran Dumai expo dengan capaian realisasi *out put* adalah 1 (satu) event pameran capaian realisasi kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a) Kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.187.698.800,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.187.698.800,- atau dengan realisasi 100% dari anggaran. Adapun indikator keluaran adalah kontribusi TIM pengendalian inflasi daerah terhadap sektor ekonomi dalam menjaga kestabilan harga melalui terselenggaranya rapat dan koordinasi pengendalaian inflasi daerah dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Terdiri dari 1 (satu) program serta 4 (empat) kegiatan,

1. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

   a) Kegiatan pelaksanaan pengawasan secara berkala

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.136.284.050,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.116.195.100,- atau 85,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen yaitu laporan kinera (LKj-IP) 2017 dan rencana kera (Renja) 2018 dari target 2 dokumen dengan realisasi capaian kinera 100%.

   b) Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.594.882.550,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.571.551.950,- atau 96,08%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah paket yang lelang oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan target 100 paket dan terealisasi 131 paket atau dengan capaian capaiannya 131%.

   c) Kegiatan pengembangan dan penataan LPSE Kota Dumai

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.638.015.950,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.622.446.185,- atau 97,56%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah peningkatan pelayanan layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan persentase 90% dari target persentase 90% dengan capaian realisasi kinerja 100%.

   d) Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Dumai

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.121.367.450,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.112.250.301,- atau 92,49%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kegiatan pembangunan Non APBD Kota Dumai tahun anggaran 2017 yang dimonitoring adalah 1 dokumen dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%.

BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Terdiri dari dari 2 (dua) program serta 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;**

   a) Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

   Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.2.295.480.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.119.017.432,- atau sebesar 52,23%, dengan indikator kinerja keluaran yaitu Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan yang

terkoneksi ke jaringan internet (TIK) dengan target pada tahun 2017 sebanyak 8 OPD dan realiasi 8 OPD atau dengan persentase 100%.

2. Program fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

a) Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi;

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.348.130.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.336.493.030,- atau sebesar 96,66%, dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dalam bidang komunikasi dan informasi dengan target sebanyak 35 orang dan realiasi adalah 35 orang atau dengan persentase 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

Terdiri dari 2 (dua) program serta 3 (tiga) kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

a) Kegiatan sertifikasi tanah asset Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.310.900.450,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.256.517.950,- atau dengan persentase 82,51%. Adapun indikator kinerja terbitnya sertifikat tanah asset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 15 persil dari target 15 persil dengan capaian kinerja 100%.

b) Kegiatan iventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.201.161.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.197.110.150,- atau dengan persentase 97,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya data tanah asset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 15 persil dari target 15 persil dengan capaian kinerja 100% dimana target tersebut melebihi dari realisasi yaitu 47 persil.

2. Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

a) Kegiatan penyelesaian konflik - konflik pertanahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.332.338.550,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.316.193.700,- atau dengan persentase 95,14%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah konflik/permasalahan tanah di Daerah Kota Dumai yang terfasilitasi/terselesaikan yaitu terealisasinya data penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 3 kasus dari target realisasi 3 kasus dengan capaian kinerja 100% yaitu: telah diselasaikan adalah terselesainya permasalahan tanah yang berada dikawasan hutan, permasalahan tanah PT. CPI Dumai yang dikuasai oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Dumai serta terselesainya permasalahan tanah Jl. Abdul Rabkan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan.

Kegiatan "fasilitasi" penyelesaian konflik - konflik pertanahan, kata - katanya dihilangkan yaitu fasilitasi hasil dari ferifikasi APBD Kota Dumai oleh BPKAD Provinsi Riau.

BAGIAN UMUM

Terdiri dari 6 (tujuh) program serta 35 (tiga puluh lima) kegiatan,

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.361.451.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 219.535.050,- atau 60,74 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi 8.000 surat, realisasi target 6.941 surat atau 86,76%.

b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.473.280.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.293.981.192,- atau 51.28%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya sarana prasarana komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi 12 bulan atau dengan capaian kinerja 100%.

c) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.91.920.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.91.080.000,- atau 99,09%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi 100% atau dengan capaian kinerja 100%.

d) Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.125.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.104.235.550,- atau 83.26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya barang milik daerah dengan realisasi 45 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

e) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.662.495.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.629.971.500,- atau 95,09%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan kantor 28 orang atau dengan capaian kinerja 100%.

f) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.794.940.083,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.755.180.517,- atau 95,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penyediaan alat tulis kantor dengan realisasi 100%.

g) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.199.983.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.185.052.800,- atau 92,53%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penyediaan barang cetakan dan pengadaan, realisasi 100%

h) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.212.828.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.163.169.000,- atau 76,67%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi 6 gedung atau dengan capaian kinerja 100%.

i) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.747.379.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.620.762.600,- atau 83,06%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi 104 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

j) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.997.355.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.967.355.000,- atau 96,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor selama 11 bulan dari target 11 bulan atau dengan realisasi 100%.

k) Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.890.564.885,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.4.890.459.729,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas dengan realisasi 90%.

l) Kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.798.280.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.781.972.600,- atau 97,96%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa tenaga keamanan kantor 20 orang atau dengan capaian kinerja 100%.

m) Kegiatan penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.126.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.126.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya tertib administrasi dalam pekerjaan dan terdistribusinya surat menyurat dengan tepat dan cepat dengan realisasi 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

a) Kegiatan pembangunan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.54.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.49.969.000,- atau 92,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya gedung kantor dengan realisasi 1 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

b) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.5.422.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.5.406.404.000,- atau 99,71%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor dengan realisasi 7 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

c) Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.891.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.738.221.850,- atau 82,83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan realisasi 39 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

d) Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 34.200.000,- atau 97,71%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan gedung kantor dengan realisasi 2 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

e) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.425.176.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.263.907.272,- atau 88,68%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota dengan realisasi 2 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

f) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.718.382.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.657.583.500,- atau 91,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya rumah dinas dengan realisasi 1 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

g) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.884.390.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.876.114.080,- atau 99,06%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya gedung kantor dengan realisasi 6 gedung atau dengan capaian kinerja 100%.

h) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.618.640.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.277.952.000,- atau 44,93%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya mobil jabatan dengan realisasi 4 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

i) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.805.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.838.882.764,- atau 65,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan realisasi 64 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

j) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.285.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.256.851.000,- atau 89,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan realisasi 12 bulan atau dengan capaian kinerja 100%.

k) Kegiatan pemeliharaan taman gedung kantor walikota, pendopo, PKK dan media center

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.913.380.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.867.554.500,- atau 94,98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan taman gedung kantor walikota, pendopo, PKK, dan media center dengan realisasi 38 orang atau capaian kinerja 100%.

l) Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.489.770.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.419.600.951,- atau 85,67%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya fungsi Mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru dengan realisasi 1 gedung atau dengan capaian kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.181.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.181.200.000,- atau 100%. Adapun

indikator kinerja keluaran adalah jumlah pakaian dinas (KDH/WKDH) beserta perlengkapannya dengan realisasi 2 orang atau dengan capaian kinerja 100%.

4. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

a) **Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh - tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.346.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.300.550.000,- atau 86,79%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terserapnya aspirasi masyarakat kota dumai dengan realisasi 75%.

b) **Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.892.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.207.725.000,- atau 63,76%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka kunjungan kerja pejabat negara/departement/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri dengan realisasi 80%.

c) **Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah lainnya.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.845.061.477,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.844.734.133,- atau 99,98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya koordinasinya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas dengan realisasi 80%.

d) **Kegiatan penyediaan biaya rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.561.125.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.559.712.000,- atau 99,75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan dan pelayanan terhadap KDH/WKDH dengan realisasi 100%.

e) **Kegiatan pisah sambut muspida Kota Dumai**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.347.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.209.100.000,- atau 60,16%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya hubungan kerja sama antar unsur muspida dengan realisasi 80%.

f) **Kegiatan open house Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.433.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.414.560.000,- atau 95,68%. Adapun

indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan realisasi 100%.

4. **Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

   a) **Kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.**

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.90.890.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.84.725.000,- atau 93,22%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya tertib administrasi arsip dengan realisasi 90%.

5. **Program Pelaksanaan Penghormatan Hari - Hari Besar**

   a) **Kegiatan peringatan hari - hari besar dengan tokoh masyarakat dan ormas**

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.688.486.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.616.007.500,- atau 97,30%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional dengan realisasi 9 kegiatan atau 100%.

   b) **Kegiatan upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional**

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.176.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.151.475.000,- atau 85,70%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional dengan realisasi 100%.

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Terdiri dari 4 (empat) program serta 10 (sepuluh) kegiatan:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

   a) **Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.178.200.000,- dan realisasinya sebesar Rp.138.600.000,- atau sebesar 77,78%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah media yang berlangganan sebanyak 20 media dari target 20 dan terealisasi 15 media atau dengan persentase 75%.

   b) **Kegiatan penyediaan dokumen kegiatan Pemerintah Kota Dumai**

   Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.116.220.000,- dan realisasinya sebesar Rp.114.360.000,- atau sebesar 98,40%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah dokumen Pemko Dumai adalah 3 (tiga) dokumen yaitu foto, pidato dan kliping koran dari 3 target dokumen dengan capaian kinerja 100%.

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a) Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.121.250.000,- dan realisasinya sebesar Rp.115.454.900,- atau sebesar 95,22%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya informasi audio visual Pemerintah Kota Dumai yang efektif dengan capaian kinerja 100%.

b) Kegiatan pengelolaan media online humas dan infokom Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.255.750.000,- dan realisasinya sebesar Rp.253.071.893,- atau sebesar 98,95%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya informasi audio visual Pemerintah Kota Dumai yang efektif.

3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

a) Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang kehumasan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.141.700.000,- dan realisasinya sebesar Rp.130.432.000,- atau sebesar 92,05%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah SDM yang dilatih dalam bidang kehumasan sebanyak 300 peserta **dengan capaian kegiatan adalah 100%.**

4. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

a) Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.543.450.000,- dan realisasinya sebesar Rp.393.245.000,- atau sebesar 72,36%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah adanya informasi yang komunikatif sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu baleho, kalender, buku kerja dan *paper bag* dari 4 target dokumen capaian kinerja 100%.

b) Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.333.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp.1.329.000.000,- atau sebesar 99,70%. Indikator kinerja keluarannya adalah jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2017 berupa himbauan, galeri, radio, advertorial dengan capaian kinerja 100%. Adapun keterangannya sebagai berikut : publikasi 20 media dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dengan realisasi 15 media atau dengan capaian persentase 75%, untuk radio dari target 5 radio dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dan terealisasi 3 radio atau dengan capaian persentase 60% sedangkan target capaian untuk publikasi 3 TV dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dan terealisasi 4 publikasi di TV atau dengan capaian persentase 110% melebihi realisasi dari target ditetapkan 100%.

c) Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.39.230.000,- dan realisasinya sebesar Rp.39.130.000,- atau sebesar 99,75%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah tersedianya informasi kegiatan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 3 pertemuan dari 3 target pertemuan dengan capaian kinerja 100%.

d) Pembinaan media peliput dalam bidang komunikasi dan informasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.315.880.000,- dan realisasinya sebesar Rp.314.243.200,- atau sebesar 99,48%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah jumlah majalah gerak pembangunan Pemerintah Kota Dumai dalam bentuk 1 (satu) majalah dari target 1 (satu) majalah dengan capaian kinerja 100%.

e) Kegiatan penyebarluasan informasi hari - hari besar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.439.843.000,- dan realisasinya sebesar Rp.436.394.125,- atau sebesar 99.22%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah terpublikasinya kegiatan hari besar, antara lain: hari jadi Kota Dumai dan HUT RI dari target yang telah ditetapkan atau dengan capaian kinerja 100%. Pada anggaran perubahan tahun 2017 Kota Dumai menjadi tuan rumah pada event MTQ ke-36 Propinsi Riau dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dengan indikator even MTQ ke-36 di Propivinsi Riau dengan capaian 100%.

BAGIAN ORGANISASI

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 4 (empat) kegiatan,

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Kegiatan asistensi penataan organisasi perangkat daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.181.630.375,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.165.152.643,- atau sebesar 90,93%. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah peserta ASN yang mengikuti asistensi penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah 70 orang dari target 70 orang dengan realisasi 100%.

b) Kegiatan bimtek penyusunan analisis jabatan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.222.954.725,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.206.511.380,- atau sebesar 92,62%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta ANS mengikuti bimtek penyusunan analisis jabatan adalah 40 orang dari target 40 orang peserta ASN dengan realisasi 100%.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Kegiatan penyusunan laporan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.132.264.900,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.129.954.132,- atau sebesar 98,25%. Adapun indikator kinerja

keluaran adalah laporan bidang SPM tahun 2017 dari target 1 (satu) laporan SPM tahun 2017 dengan realisasi 100%.

3. **Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan**

   a) **Kegiatan kajian Peraturan Perundang - Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang - Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang - Undangan Daerah.**

   Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.108.000.400,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.107.068.450,- atau sebesar 99,14%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah 1 dokumen (Perda Perubahan Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai), Perwako Dumai nomor 8 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (SKPD) dengan realisasi 100%.

BAGIAN KUANGAN DAN ASET

Terdiri dari 2 (Dua) program serta 8 (Delapan) kegiatan, sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

   a) **Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran**

   Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.51.326.700,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.43.109.450,- atau dengan persentase sebesar 83,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah laporan keuangan semester I Sekretariat Daerah tahun 2017 dari satu laporan semester I dengan realisasi 100%.

   b) **Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun**

   Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.154.301.700,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.143.356.604,- atau dengan persentase sebesar 92,91%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah laporan akhir keuangan Sekretariat Daerah dari satu laporan akhir keuangan dengan realisasi 100%.

2. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

   a) **Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah**

   Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.161.740.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.148.857.588,- atau sebesar 92,04%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti bimbingan teknis/diklatdengan realisasi 100%.

b) Kegiatan Penertiban Aset

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.133.616.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.114.964.200,- atau sebesar 86,04%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah rekonsiliasi tahunan laporan asset tahun 2016 dan rekon laporan asset semester I tahun 2017 dengan realisasi 100%.

c) Kegiatan Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.321.700.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.257.397.981,- atau sebesar 80,01%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah mengikuti konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah dengan realisasi 81%.

d) Rekonsiliasi Aset SKPD

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.54.518.800,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.42.583.150,- atau sebesar 78,11%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah rekonsiliasi tahunan laporan aset tahun 2016 dan rekon laporan aset semester I tahun 2017 dengan realisasi 100%.

e) Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.47.518.800,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.42.879.950,- atau sebesar 90,24%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah SKPD dalam pertemuan rekonsiliasi realisasi 100%.

f) Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.154.425.200,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.146.432.295,- atau sebesar 94,82%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan di Sekretariat Daerah dengan realisasi 100%.

Sekretariat DPRD

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran sebagai berikut:

Tabel 4. 52. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariart DPRD Tahun 2017

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kondisi akhir 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian (%)
Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Dumai	80%	88 %	80%

Keberhasilan atau tidak tercapainya Prosentase penyelesaian pelaksanaan Pelayanan Tugas dan Kewajiban Lembaga, pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Terlambatnya Pelaksanaan APBD Tahun 2017 .
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur Dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Dumai.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang termasuk di dalam indikator kinerja sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**

   Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp.78.200.000,- dengan Realisasi Penyerapan anggaran Sebesar Rp.78.200.000,- atau 100 %. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan, yaitu :

   a. **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.**

      Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 28.200.000,- dengan realisasi Penyerapan anggaran Rp.28.200.000,- atau 100 %. Adapun target indikator Kinerja Keluaran nya adalah tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau dengan tingkat capaian 100 %.

   b. **Penyusunan Rencana Kinerja SKPD.**

      Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi Penyerapan anggaran Rp. 50.000.000,-atau 100 %. Adapun target indikator Kinerja Keluaran nya adalah tersedianya Dokumen perencanaan kinerja SKPD sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau dengan capaian 100 %.

2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

   Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini pada tahun 2017 yaitu:

   a. **Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.**

      Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 202.000.000,- dengan realisasi Penyerapan anggaran Rp.136.950.000,- atau 67,80 %. Adapun indikator Kinerja Keluaran nya adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan target 80% dan terealisasi sebesar 100 % dan tingkat capaian 100%.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

   Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp.9.627.684.000,- dengan Realisasi Penyerapan anggaran Sebesar Rp.6.777.496.196,- atau 70,40 %. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2017 adalah sebagai Berikut :

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.166.150.000,- dengan realisai Penyerapan anggaran Rp.909.669.403,- atau 41,99 %. Adapun target indikator Kinerja Keluaran nya adalah disetujui RANPERDA Menjadi PERDA sebanyak 21 Ranperda dan terealisasi sebanyak 14 Ranperda atau dengan tingkat capaian 77 % dengan alasan adanya skala prioritas dari 14 usulan Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Dumai.

b. Hearing/ Dialog dan Koordinasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 375.292.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran Rp.312.700.000,- atau 83,32 %. Adapun Indikator keluarannya terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama dengan targetnya 2 kegiatan dengan realisasi sebesar 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100%.

c. Rapat Alat kelangkapan Dewan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 267.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 147.135.000,- atau 55,07 %. Adapun indikator kinerjanya adalah tercapainya fungsi dan wewenang DPRD dengan tingkat target 4 AKD, realisasi 100%.

d. Rapat - Rapat Paripurna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 945.750.000,- dengan realisasi Penyerapan anggaran sebesar Rp.651.947.000,- atau 68,93 % adapun target Indikator kinerja Keluaran nya adalah tercapainya fungsi dan wewenang DPRD sebanyak 32 kali rapat paripurna dan terealisasi sebanyak 27 kali. dengan Tingkat capaian adalah sebesar 84,37% karena terlaksananya rapat-rapat paripurna.

e. Kegiatan Reses

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.211.300.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.147.300.000,- atau 97,11 % adapun target indicator Kinerja keluaran nya adalah terlaksananya Penyerapan Aspirasi masyarakat sebanyak 3 kegiatan dengan realisasi sebanyak 3 kegiatan dengan tingkat capaian adalah 100 % dengan alasan tersedianya waktu yang cukup bagi anggota DPRD Kota Dumai untuk melaksanakan kegiatan reses.

f. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.312.000.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.288.461.700,- atau 92,46 % adapun indicator kinerja Keluarannya adalah terlaksananya Bimtek Pimpinan dan anggota DPRD

dan target 100 % dan terealisasi 100 % dengan tingkat capaian 100 % dengan alasan terlaksananya seluruh kegiatan Bimtek pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai

g. Kunjungan Kerja Komisi –Komisi DPRD

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.559.400.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.1.293.970.083,- atau 82,98 % adapun Indikator kinerja Keluaran nya adalah Peningkatan wawasan dan Pengetahuan DPRD Kota Dumai dengan target 9 kab/kota dan terealisasi sebanyak 9 kab/kota dengan tingkat capaian 100 % dengan alasan terlaksananya seluruh Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kota Dumai

h. Penyampaian Aspirasi masyarakat secara Langsung

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.97.300.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.0,- atau 0 % adapun indicator kinerja keluaran adalah terserapnya aspirasi masyarakat dengan target 7 kegiatan dengan realisasi 0 kegiatan dengan tingkat capaian 0 % dengan alasan tergantung situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

i. Pengkajian, penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS,RAPBD KUA-PPASP, RAPBD-P, laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta prognosis

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.182.092.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.395.400.000,- atau 53,37 % adapun indikator Kinerja keluaran nya adalah disetujui Ranperda menjadi PERDA dengan target 3 perda dan realisasi 3 PERDA dengan tingkat capaiannya 100 % dengan alasan terlaksananya Pengkajian, penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS,RAPBD KUA-PPASP, RAPBD_P, laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APB,Laporan Realisasi Semester Pertama beserta prognosis.

j. Penyedian Alat Kelengkapan DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.511.200.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 395.400.000,- atau 77,93 %. Adapun indikator nya adalah tersedianya jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD kota Dumai dengan target 8 orang / Fraksi dan realisasinya 8 orang / Fraksi dengan tingkat capaian nya 100% dengan alasan terlaksananya tenaga ahli untuk seluruh Fraksi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat beberapa Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah :

1. Terlambatnya Pelaksanaan APBD Tahun 2017 .
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur Dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Dumai.
3. Belum lengkapnya SOP sebagai pedoman kerja di masing-masing bagian.

KECAMATAN DUMAI TIMUR

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Dumai Timur dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 53. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Timur Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Kondisi Akhir TAhun 2017	Realisasi sampai tahun 2017	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	70%	*96,30 %*	*137*
kualitas sumber daya lembaga masyarakat	70%	100 %	142
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	70%	98.5 %	140

Sumber : Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

Adapun realisasi pelaksanaan Capaian Indikator pada Tahun Anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik**

   Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 hampir maksimal (100%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 98,70%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.

2. **Kualitas sumber daya lembaga masyarakat**

   Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 100%. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Timur sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Pada tahun 2017 ini Kecamatan Dumai Timur meraih peringkat keempat dalam penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota, yaitu Kelurahan Jaya Mukti. Untuk program nasional, pemerintah

pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras miskin (raskin) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Timur khususnya pada 5 (lima) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin Kecamatan Dumai Timur sampai tahun 2017 adalah :

- Kelurahan Tanjung Palas 265 KK
- Kelurahan Jaya Mukti 194 KK
- Kelurahan Teluk Binjai 495 KK
- Kelurahan Buluh Kasap 135 KK
- Kelurahan Bukit Batrem 404 KK

Jumlah penerima beras raskin sampai tahun 2017 ini adalah 1.493 KK, yang mana setiap KK mendapat bantuan beras 15 kg/KK

3. **Persentase swadata masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat**

   Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 hampir maksimal (100%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 95,59%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.

Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Timur pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 8.188.298.120,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 4.875.298.120,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 3.313.000.000,- untuk Belanja Langsung Realisasi sebesar Rp 3.250.799.292,- atau terserap 98,12%. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

   Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 401.196.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 396.546.500,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

   a. **Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan**

      Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 401.196.500,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 396.546.500,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 20 orang dengan realisasi kinerja 100 %.

2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 399.492.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 398.292.000,- atau 99,69 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 376.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 375.600.000,- atau 99,68 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 22.692.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 22.692.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penilaian perlombaan Kelurahan se-Kecamatan Dumai Timur sebanyak 5 (lima) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100%.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 75.730.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 75.730.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 75.730.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 75.730.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terwujudnya penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dengan realisasi kinerja 100 %.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 281.848.280,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 276.379.697,- atau 98,06 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 281.848.280,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 276.379.697atau 98,06 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya operasional kelurahan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

5. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 797.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 797.100.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 797.100.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 797.100.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT Kecamatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 19.780.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 19.780.000,-,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 19.780.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 19.780.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2017 dengan realisasi kinerja 100 %.

7. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 47.795.000,- atau 95,59 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 47.795.000,- atau 95,59 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan kegiatan PKK selama 1 (satu) tahun 4 Pokja dengan realisasi kinerja 100 %.

KENDALA / HAMBATAN

Kendala-kendala yang dijumpai dalam pencapaian kinerja Kecamatan Dumai Timur antara lain adalah :

1. Tugas dan fungsi umum Camat sebagaiman yang ditetapkan melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagian besar melakukan tugas umum pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi. Hal ini menyebabkan Camat sulit untuk mengambil keputusan strategis untuk menjawab respon masyarakat terhadap permasalahan-permaslahan yang terjadi;
2. Keterbatasan kemampuan APBD Kota Dumai dalam mengaplikasikan/mengakomodir pembiayaan program maupun kegiatan di Kecamatan, sehingga tidak semua kegiatan dalam program dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai sasaran strategis.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana di Kecamatan sehingga belum mampu sepenuhnya menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat.Persoalan ini ditambah dengan kurangnya

pemahaman dan tanggung jawab aparatur kecamatan/kelurahan dalam memahami tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan;

4. Hasil musrenbang yang dilaksanakan pada setiap tahunnya pada tingkat kelurahan maupun kecamatan belum mampu mengakomodir setiap usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi menghadiri kegiatan musrenbang baik yang diadakan kelurahan maupun kecamatan pada masa mendatang

SOLUSI

Untuk menghadapi kendala tersebut Kecamatan Dumai Timur telah mengambil langkah-langkah antisipasi antara lain :

a. Penguatan fungsi koordinasi kepada OPD yang terkait dan Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
b. Melakukan penyesuaian kemampuan anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran sesuai dengan Renstra Kecamatan;
c. Memaksimalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada guna peningkatan kinerja;
d. Melakukan upaya pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up selain Musrenbang untuk mengakomodir kepentingan dan keluhan masyarakat.

Kecamatan Dumai Selatan

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Selatan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan,maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 54. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2017

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kondisi Akhir 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian (dalam %)
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	100%	100%	100%
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	100%	100%	100%
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

Sebagaimana yang tersebut dalam tabel diatas, indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut adalah untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai dengan Rencana Strategis dan RPJMD diatas.

1. **Kualitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat.**

Target dari indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar 100% pada tahun 2017. Untuk mencapai sasaran ini Kecamatan Dumai Selatan melaksanakan 3 (tiga) program pada tahun 2017, yakni :

a. **Program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT dengan Kegiatan pembinaan RT dan LPMK se-Kecamatan Dumai Selatan** Pada program dan kegiatan ini, Kecamatan Dumai Selatan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya lembaga LPMK dan RT dengan melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta memberikan stimulus berupa bantuan honorarium terhadap Pengurus LPMK dan RT se-Kecamatan Dumai Selatan dalam rangka penyelerasan program-program pembangunan di wilayah kecamatan.

b. **Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**

1. Kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan Pada kegiatan ini Kecamatan Dumai Selatan berkomitmen untuk menjamin pelayanan kesehatan dasar khususnya terhadap balita dan usila melalui pelayanan Posyandu. Saat ini terdapat 38 Posyandu yang ada di Kecamatan Dumai Selatan dan tersebar pada 5 (lima) kelurahan. Pada Tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target keinerja yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, Untuk mengukur dan menilai sejauh mana kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan telah menjalankan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2017 yang lalu Kecamatan Dumai Selatan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja unit pelayanan publik. *Output* dari kegiatan ini adalah jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Dumai Selatan yang terdiri dari lomba kelurahan dan lomba gotong royong masyarakat. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menetapkan Kelurahan Mekar Sari mewakili Kecamatan Dumai Selatan dalam lomba kelurahan dan Kelurahan Mekar Sari dalam lomba gotong royong masyarakat pada tingkat Provinsi Riau.

c. **Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat dengan kegiatan pembinaan PKK kecamatan.**

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam program-program pembangunan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa PKK memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam memotivasi dan menggerakkan keluarga dalam memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki untuk menunjang peningkatan kesejahteraan keluarga.

TP. PKK Kecamatan Dumai Selatan selama ini aktif dalam menjalankan program-program pokok PKK bersama dengan TP. PKK Kelurahan. Hal ini terlihat dari berbagai perlombaan dan penilaian yang dilaksanakan baik pada tingkat kota maupun tingkat provinsi, TP. PKK turut memberi andil dan sumbangsih dalam penilaian tersebut. Selain itu TP. PKK

Kecamatan bersama TP. PKK Kelurahan juga secara rutin melaksanakan pertemuan untuk membahas program-program yang akan dan telah dilaksanakan.

Target Renstra untuk indikator kinerja sasaran ini adalah 100% dan realisasi juga sebesar 100%. Tercapainya target ini disebabkan Kecamatan Dumai Selatan berhasil menggerakkan dan memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan PKK. Keberhasilan ini tidak hanya dicapai pada tingkat Kecamatan akan tetapi juga pada tingkat kelurahan.

2. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik

Target kinerja sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 100%. Realisasi pada tahun 2017 adalah sebesar 100%. Keberhasilan dari capaian indikator ini dikarenakan Kecamatan Dumai Selatan berupaya untuk meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam pelaksanaan pelayanan di kecamatan maupun di kelurahan melalui program - program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Dumai dan Renstra Kecamatan Dumai Selatan. Program yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Keseluruhan program sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik pada Tahun Anggaran 2017 dan diharapkan akan mampu sebagai pemicu dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Dumai Selatan.

3. Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Meningkat

Untuk indikator kinerja sasaran ini ditetapkan targetnya adalah sebesar 100%. Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan peningkatan pastisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pada kegiatan ini realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pencapaian target ini dikarenakan Kecamatan Dumai Selatan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pada tahun 2017 dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan.

Anggaran belanja Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2017 sebesar Rp. 8,374,601,180,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 5,145,601,180,- sedangkan Belanja langsung sebesar Rp. 3,229,000,000,- untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 4,863,202,935,- atau terserap 94,51% dan belanja langsung terserap Rp. 3,183,205,368 atau 98,59%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

   Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 294.938.600,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 290.128.000,- atau 98.37% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

   a) **Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan**

      Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 294.938.600,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 290.128.000,- atau 98.37%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Cakupan pengelolaan Persampahan dengan realisasi 100%.

2. **Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

   Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 343.940.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 343.694.400,- atau 99,92% yang dialokasikan kegiatan dibawah ini :

   a) **Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan**

   Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 301.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 301.758.000,- atau 99.99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu balita dan usila dengan realisasi 100%.

   b) **Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik**

   Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 42.140.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 41.936.400,- atau 99,52%. Adapun indikator kinerja keluaran Terlaksananya kegiatan penilaian kelurahan dengan realisasi 100%.

3. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

   Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 137.288.525,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 136.915.000,- atau 99,73% yang dialokasikan kegiatan dibawah ini :

   a) **Pembinaan Kehidupan beragama.**

   Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 137.288.525,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 136.915.000,- atau 99,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan lomba tilawatil Qur'an di kelurahan dan kecamatan dengan realisasi 100%.

4. **Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan**

   Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 337.632.877,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 323.374.800,- atau 95,78% dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

   a) **Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan**

   Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 337.632.877,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 323.374.800,- atau 95,78%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya bahan, peralatan dan kegiatan penunjang kinerja kelurahan dengan realisasi 100%.

5. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 920.206.975,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 920.206.975,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 920.206.975,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 920.206.975,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase pembayaran honorarium RT dan pengurus LPMK dengan realisai 100%.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 31.550.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 30.490.000,- atau 98,07% dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.550.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 30.490.000,- atau 98.07%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan dengan realisasi 100%.

7. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 82.129.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 81.415.750,- atau 99.13% dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 82.129.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 81.415.750,- atau 99.13%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya kegiatan PKK kelurahan dan kecamatan realisasi 100%.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Dumai Selatan adalah salah satu kecamatan pemekaran dari Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur yang luas ± 69,02 Km², terdiri dari 5 (lima) kelurahan meliputi :

1.Kelurahan Ratu Sima

2.Kelurahan Bukit Timah

3.Kelurahan Mekar Sari

4.Kelurahan Bukit Datuk

Kelurahan Bumi Ayu

Prestasi Kecamatan Dumai Selatan yang telah diraih pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 55. Capaian Prestasi Keluaran/Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2017

No	Uraian Prestasi	Pemenang	Tingkat Lomba	Penyelenggara
1.	Juara III STAND TERBAIK Dumai Expo Tahun 2017	Kecamatan Dumai Selatan	Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai
2.	Juara I Lomba Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Terbaik Tingkat Kota Dumai Tahun 2017	Kelurahan Mekar Sari	Kota Dumai	Dinas UKM Kota Dumai
3.	Juara I Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kota Dumai Tahun 2017	Kelurahan Mekar Sari	Kota Dumai	Dinas PPPA Kota Dumai
4.	Harapan II Desa/Kelurahan Pelaksanaan Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2017	Kelurahan Mekar Sari	Provinsi Riau	Dinas PPPA Provinsi Riau
5.	Juara I Lomba Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kelurahan Se-Provinsi Riau Tahun 2017	Kelurahan Mekar Sari	Provinsi Riau	Dinas UKM Provinsi Riau
6.	Juara I Kader PKK Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Riau Tahun 2017	Kelurahan Mekar Sari	Provinsi Riau	Dinas PPKB Provinsi Riau
7.	Juara I Kelompok BKR KREATIF SEJAHTERA Dalam Rangka HARGANAS XXIV Tahun 2017 Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Kota Dumai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai
8.	Juara II Kelompok UPPKS SAKINAH Dalam Rangka HARGANAS XXIV Tahun 2017 Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Kota Dumai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai
9.	BKR Kreatif Sejahtera sebagai Kelompok BKR Terbaik Pertama Tingkat Provinsi Riau Dalam Rangka HARGANAS XXIV Tahun 2017	Kelurahan Bukit Timah	Provinsi Riau	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
10	PAKARTI UTAMA II – TINGKAT NASIONAL PEMENANG TERBAIK PKK –KB-KES	Kelurahan Bukit Datuk	Tingkat Nasional	Dinas PPKB Provinsi Riau

Sumber : Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

PERMASALAHAN

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia.
2. Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk meningkatkan sumber daya manusia.
3. Dukungan dari OPD yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan masih mengalami keterlambatan sehingga menghambat pada proses administrasi.

SOLUSI

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Tersedianya anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, bimtek dan semacamnya.
3. Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal kepada pihak terkait dalam menata manajemen kepegawaian di daerah.

KENDALA/HAMBATAN

Kurang optimalnya peran musrenbang dalam mengajukan usulan untuk pembangunan di Kecamatan Dumai Selatan, yang mana anggaran kita yang tidak memadai. Selain itu masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana gedung kantor sebagai penunjang pemberian layanan kepada masyarakat serta banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan.

Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk menciptakan lingkungan bersih di Kecamatan Dumai Selatan yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, khususnya untuk jalan dan gang sempit yang tidak bisa dilewati mobil/truk sampah serta kebijakan yang sering berubah.

Kecamatan Dumai Kota

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Dumai Kota dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 56. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Keamatan Dumai Kota Tahun 2017

Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Kondisi Akhir Tahun 2017	Realisasi Sampai Tahun 2017	Capaian (Dalam %)
1	4	5	6
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	100 %	97,40 %	97 %
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	100 %	99,87 %	100 %
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	100 %	100 %	100 %

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran di atas pada Tahun 2017, untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana berikut ini :

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

   Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 hampir maksimal (97%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 100%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. Berdasarkan Perwako Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dibidang Persampahan, maka pada Tahun 2017 ini Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kebersihan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan persampahan diwilayah kerja Kecamatan khususnya pada 5 (lima) Kelurahan. Kecamatan Dumai Kota mempunyai petugas Persampahan dan Kebersihan sebanyak 22 (dua

puluh dua) orang petugas yang tersebar pada 5 (lima) Kelurahan. Cakupan pelayanan persampahan adalah lingkungan perumahan. Pelaksanaan ini dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang dianggarkan melalui penganggaran pada Kecamatan. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya dan perlu penyempurnaan, baik dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan-bahan .penyusunan RPJMD, RKPD, Renja, Renstra, Laporan Kinerja/LKj (LAKIP), RKA/DPA murni maupun perubahan dan sistem kerja profesional aparatur kecamatan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ini.

2. Cakupan Sumber Daya Lembaga Masyarakat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 100%. Untuk peningkatan kinerja LPMK dan RT di Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2017 diadakan Rapat Koordinasi (RAKOR) sebagai evaluasi kinerja terhadap pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan menjalin silaturahmi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Pada tahun 2017 ini Kecamatan Dumai Kota meraih peringkat pertama dalam penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota Dumai dan peringkat kedua Tingkat Propinsi Riau, yaitu Kelurahan Sukajadi. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras sejahtera (RASTRA) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Kota khususnya pada 5 (lima) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat RASTRA Kecamatan Dumai Kota tahun 2017 adalah :

a) Kelurahan Laksamana 200 KK
b) Kelurahan Dumai Kota 155 KK
c) Kelurahan Bintan 165 KK
d) Kelurahan Sukajadi 186 KK
e) Kelurahan Rimba Sekampung 265 KK

Jumlah penerima beras RASTRA sampai tahun 2017 ini adalah ***971 KK***, yang mana setiap KK mendapat bantuan beras ***15 kg/KK*** setiap bulannya. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan terhadap SITKAMTIBMAS, masyarakat dilingkungan Kecamatan Dumai Kota sudah berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya melalui peningkatan program siskamling, pemberdayaan Linmas maupun penggunaan jasa Satpam. Setiap Lurah di Kecamatan Dumai Kota mengupayakan pembangunan balai kemitraan yang diperuntukkan Bhabinkamtibmas dan FKPM untuk dijadikan menyelesaikan masalah sosial di setiap kelurahan. Selain itu berkoordinasi dengan Ketua RT dan masyarakat untuk pelaksanaan siskamling pada masing-masing RT. Dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Kecamatan Dumai Kota akan melibatkan elemen masyarakat maupun pihak Upika, sehingga akan mengurangi terjadinya konflik maupun masalah pencurian dilingkungan Kecamatan Dumai Kota. Dengan kondisi ini keamanan dan ketertiban khususnya diwilayah Kecamatan Dumai Kota akan aman dan terkendali.

3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

   Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 100%. Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah yang ditujukan untuk mengidentifikasi rencana pembangunan infrastruktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan pada Kecamatan Dumai Kota dilaksanakan Musrenbang setiap tahunnya. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan maupun usulan rehabilitasi gedung dan anggaran untuk masyarakat diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan setiap tahunnya. Begitu juga untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Dumai. Dilihat dari awal tahun Rencana Strategis tahun 2017 ini pada Kecamatan Dumai Kota, belum optimalnya peran musrenbang dalam penataan dan penggunaan ruang dan masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan akibat pasang surut air laut (banjir ROBB).

Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Kota pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 8.862.264.360,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 5.557.264.360,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 3.305.000.000,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung menjadi Rp 5.323.134.995,- atau terserap 95,79 % dan Belanja Langsung Rp 3.255.489.587,-atau terserap 98,50%. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 886.884.400,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 856.012.509,- atau 96,52 % yang dialokasikan kegiatan dibawah ini :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 24.750.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 24.750.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah materai dan benda pos lainnya dalam 1 (satu) tahun sebanyak 600 lembar dan terealisasi semuanya atau 100 %.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 95.010.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 84.056.578,- atau 88,47 %. Indikator kinerja keluarannya adalah jumlah rekening telepon, air, listrik dan speedy dalam 1 (satu) tahun sebanyak 48 rekening dan realisasi kinerjanya 100 %. Pembayaran telepon, listrik dan speedy melalui KOPPEGTEL setempat berdasarkan pemakaian/kebutuhan kantor setiap bulannya.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 72.151.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 63.301.000,- atau 87,73 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kwitansi jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 26 lembar dengan realisasi kinerja 100 %.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 178.693.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 178.475.000,- atau 99,88 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar dengan realisasi kinerja 100 %.

e. Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 56.860.425,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 56.614.800,- atau 99,57 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibutuhkan kantor dengan realisasi kinerja 100 %.

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 30.244.820,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 29.889.500,- atau 98,83 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 4.005.120,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 3.932.700,- atau 98,19 %. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah kebutuhan alat listrik kantor selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 32.928.750,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 23.906.000,- atau 72,60 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah koran/majalah yang dibutukan oleh kantor dengan realisasi kinerja 100 %.

i. Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 40.125.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 40.025.000,- atau 99,75 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 189.006.685,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 188.539.531,- atau 99,75 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi ke luar daerah selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

k. Penyediaan jasa tenaga keamanan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 163.109.600,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 162.552.400,- atau 99,64 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar selama 12 bulan sebanyak 8 (delapan) orang dengan realisasi kinerja 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.110.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 97.838.840,- atau 97,73 % yang dialokasikan kegiatan dibawah ini:

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 70.410.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 68.846.840,- atau 97,78 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang terpelihara selama 12 bulan sebanyak 8 unit dengan realisasi dengan realisasi kinerja 100 %.

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 29.700.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 28.992.000,- atau 97,62 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 54.460.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 52.172.000,- atau 95,80 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 18.650.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 18.650.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen laporan kinerja (LKj/LAKIP, Renja, Renstra, DPA Murni dan DPA Perubahan) sebanyak 4 (empat) dokumen dengan realisasi kinerja 100 %.

b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 16.550.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 15.500.000,- atau 93,66 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan prognosis tahun 2017 sebanyak 2 (dua) dokumen dengan realisasi kinerja 100 %.

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 19.260.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 18.022.000,- atau 93,57 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu) dokumen dengan realisasi kinerja 100 %.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 482.258.800,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 482.180.040,- atau 99,98 % dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 482.258.800,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 482.180.040,- atau 99,98 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 22 orang dengan realisasi kinerja 100%.

4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 361.165.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 361.165.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 339.840.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 339.840.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran. adalah jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

b. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 21.325.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 21.325.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba tingkat Kecamatan Dumai Kota sebanyak 5 (lima) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100%.

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 90.425.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 89.756.000,- atau 99,26 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 90.425.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 89.756.000,- atau 99,26 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan yang diadakan sebanyak 4 jenis lomba dengan realisasi kinerja 100 %.

6. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 305.145.250,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 293.006.649,- atau 96,02 % yang dialokasikan kegiatan dibawah ini :

a. Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 305.145.250,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 293.006.649,- atau 96,02 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi untuk 5 (lima) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100 %.

7. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 934.808.550,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 934.408.550,- atau 99,96 % dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 934.808.550,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 934.408.550,- atau 99,96 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan ketua RT Kecamatan yang dibina sebanyak147 orang dengan realisasi kinerja 100%.

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 39.743.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 39.743.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 39.743.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 39.743.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 %.

9. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 49.206.999,- atau 98,41 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 49.206.999,- atau 98,41 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kecamatan selama 1 (satu) tahun sebanyak 6 TP PKK dengan realisasi kinerja 100 %.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIRAIH

Kecamatan Dumai Kota adalah salah satu kecamatan pemekaran yang luas wilayahnya ± 17 km^2, terdiri dari 5 (lima) Kelurahan meliputi :

a) Kelurahan Rimba Sekampung
b) Kelurahan Sukajadi
c) Kelurahan Dumai Kota
d) Kelurahan Bintan
e) Kelurahan Laksamana

Letak yang strategis di jantung Kota Dumai membuat Kecamatan Dumai Kota menjadi *barometer* pelayanan kepada masyarakat. Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2017 adalah :

Tabel 4. 57 Tabel Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2017

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
TAHUN 2017				
1	Juara II Lomba Pelaksana Terbaik Kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Kelurahan Bintan	Provinsi Riau	Tim Penggerak PKK Provinsi Riau
2	Juara II Lomba Kelurahan	Kelurahan Sukajadi	Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
3	Juara I Lomba Kelurahan	Kelurahan Sukajadi	Kota Dumai	Bag. Pemberdayaan Masyarakat Setdako Dumai
4.	Juara III BBGRM (Lomba Pelaksanaan GORO Masyarakat)	Kelurahan Sukajadi	Kota Dumai	Bag. Pemberdayaan Masyarakat Setdako Dumai
5.	Peringkat III Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai	Inspektorat Kota Dumai

PERMASALAHAN

a) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 belum diterapkan di Kecamatan, sehingga posisi Kecamatan hanya turut serta memberikan pelayanan/membantu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah terkait.

b) Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memiliki unit kerja/petugas ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditingkat Kecamatan belum melakukan koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan belum melaksanakan pelayanan terpadu serta dalam aktifitasnya tidak berkantor di Kantor Camat, namun masih berkantor di Kantor Dinas/Badan terkait.

c) Kecamatan hanya melakukan tugas atribut yakni melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan serta membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Sedangkan tugas delegatif/pelimpahan wewenang hanya sebagian kecil saja yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

d) Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya penggunaan aplikasi pelayanan yang belum menggunakan teknogi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-government* dan *smart city*.

SOLUSI

a) Penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan, dan harus memenuhi persyaratan substantif, administratif dan teknis

b) Memberikan kewenangan yang luas kepada Kecamatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KENDALA / HAMBATAN

Tahun 2017, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Dumai Kota setelah perubahan sama dengan APBD murni sebesar Rp. ***3.305.000.000,-*** yang mana tidak ada penambahan pagu anggaran dan jumlah ini mengakomodir 10 (sepuluh) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan di Kecamatan Dumai Kota, dan sebagian besar anggaran atau 54,7 % merupakan biaya beban tetap/Belanja Langsung digunakan untuk membayar insentif RT/LPMK, Kader Posyandu, Tenaga Persampahan, Keamanan dan Kebersihan Kantor. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai Program dan Kegiatan di Kecamatan Pemekaran khususnya.

Mencermati hal di atas, mengingat terbatasnya APBD Kecamatan Dumai Kota, maka sangat dibutuhkan adanya tambahan dana dari APBD Kota Dumai, untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Dumai Kota ke depannya

Kecamatan Dumai Barat

Pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Barat dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan Pemerintahan Umum, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 58 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Barat s/d Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi Sampai Tahun 2017	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan yang baik	65%	98,27%	98,37%
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	65%	100%	100%
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat	65%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 4.51 diatas dalam pencapaian sasaran terdapat beberapa capaian kinerja tersebut yang sama dengan target atau sudah mencapai target dan melewati capaian target capaian kinerja tahun 2017 dapat dilihat uraian dibawah ini :

1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik,

   Target capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 (65%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir tahun 2017 adalah 98,27%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoodinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.

2) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

   Target capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 (65%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir tahun 2017 adalah 100%.

Untuk peningkatan kinerja LPMK dan RT di Keamatan Dumai Barat pada tahun 2017 diadakan rapat koordinasi (RAKOR) sebagai evaluasi kinerja terhadap pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan menjalin silaturahmi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk sms terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelayanan dibidang kesehatan, Pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 4 (empat) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu dimasa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Barat sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Kecamatan Dumai Barat juga sudah melaksanakan MTQ/STQ tingkat Kota Dumai tahun 2017 dan meraih peringkat Juara Umum Tingkat Kota Dumai dan Lomba Penyuluhan POKJA III dalam rangka Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Riau Tahun 2017 meraih peringkat ke tiga di Pekanbaru. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras miskin (raskin) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Barat khususnya pada 4 (empat) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin Kecamatan Dumai Barat Tahun 2017 adalah :

- Kelurahan Purnama 253 KK
- Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihksan 95 KK
- Kelurahan Bagan Keladi 260 KK
- Kelurahan Pangkalan Sesai 176 KK

Jumlah penerima beras raskin sampai tahun 2017 ini adalah 785 KK, yang mana setiap KK mendapat bantuan beras 15 Kg/KK.

3) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana (65%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir tahun 2017 adalah 100% jadi mengalami kenaikan dan melebihi target. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana serta dukungan seluruh lapisan masyarakat, kelurahan dan kecamatan sehingga musrenbang dapat berjalan dengan lancar.

Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Barat pada Tahun 2017 sebesar Rp. 7.490.807.860,-

dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.354.807.860,- sedangkan Belanja Langsung Rp. 3.136.000.000,-. Untuk Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.211.025.809,- atau terserap 96,70% dan Belanja Langsung terserap Rp. 3.103.252.730,- atau 98,96%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

   anggaran untuk program ini sebesar Rp. 278.207.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 274.602.000,- atau 98,70% yang dialokasikan melalui kegiatan:

   a) **Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 278.207.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 274.602.000,- atau 98,70%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya tenaga kebersihan sehingga tercipta lingkungan yang bersih di 3 (tiga) kelurahan dengan realisasi kinerja 100%.

2. **Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

   Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 287.630.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 287.630.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

   a) **Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 266.135.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 266.135.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan sebanyak 115 kader posyandu balita dan sebanyak 40 kader posyandu usila di 31 (tiga puluh satu) posyandu dengan realisasi kinerja100%.

   b) **Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 21.495.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 21.495.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya penilaian perlombaan se – kelurahan Kecamatan Dumai Barat dengan realisasi kinerja 100%.

3. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

   Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 91.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 91.750.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

   a) **Pembinaan Kehidupan Beragama**

      Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 91.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 91.750.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terwujudnya penyelenggaraan STQ di Kecamatan Dumai Barat dengan realisasi kinerja 100%.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 295.581.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 284.599.032,- atau 96,28% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pelayanan Administrasi Pemerintah Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 295.581.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 284.599.032,- atau 96,28%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya kegiatan operasional dikelurahan/ Tersedianya kebutuhan kelurahan sebanyak 4 kelurahan dengan realisasi kinerja 100%

5. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlag anggaran untuk program ini sebesar Rp. 767.169.950,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 767.169.950,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 767.169.950,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 767.169.950,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya kegiatan RT dan LPMK untuk mewujudkan peningkatan kinerja RT dan LPMK sebanyak 69 orang RT dan 4 orang LPMK dengan realisasi kinerja 100%.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 44.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 44.300.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 44.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 44.300.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2018 dengan realisasi kinerja 100%.

7. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 51.368.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 51.368.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 51.368.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 51.368.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersusunnya laporan kegiatan PKK di kecamatan Dumai Barat Dengan realisasi kinerja 100%.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Dumai Barat mempunyai luas wilayah ± 6453 Ha yang terbagi dalam 4 (empat) kelurahan meliputi :

1. Kelurahan Pangkalan Sesai 882 Ha.
2. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan 1.800 Ha.
3. Kelurahan Purnama 2.700 Ha.
4. Kelurahan Bagan Keladi 1.071 Ha

Kecamatan Dumai Barat mempunyai batas-batas wilayah Administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Keamatan Dumai Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Kota.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Sembilan.

Prestasi/ Penghargaan yang diraih selama tahun 2017, Kecamatan Dumai Barat telah mengikuti beberapa perlombaan dan seleksi baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi. Uraian prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Dumai Barat diantaranya adalah :

Tabel 4. 59. Prestasi dan Penghargaan Yang diraih di Raih Kurun Waktu Tahun 2017

No	Uraian Prestasi	Pemenang	Tingkat Lomba	Penyelenggara
		2017		
1.	Juara Umum MTQ	Kec. Dumai Barat	Kota Dumai	Kesra
2.	Juara I Festival Rebana Pede	Kelurahan STDI	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
3.	Juara II Lomba Stop Buang Air Besar Sembarang	Kelurahan Bagan Keladi	Kota Dumai	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4.	Juara III Lomba Penyuluhan POKJA III	Kec. Dumai Barat	Provinsi Riau	PKK Provinsi Riau
5.	Juara II Lomba Pelaksana Gotong Royong Masyarakat terbaik	Kel. Bagan Keladi	Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai
6.	Juara III Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Kel. Bagan Keladi	Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai
7.	Harapan V Lomba Perpustakaan dan Arsip (Pustaka Tuah Ilmu)	Kel. Bagan Keladi	Provinsi Riau	Dinas Perpustakaan Prov. Riau

PERMASALAHAN

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 belum diterapkan di Kecamatan, sehingga posisi kecamatan hanya turut serta memberikan pelayanan/membantu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah terkait.
2. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memiliki unit kerja/petugas ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditingkat Kecamatan belum melakukan koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan belum melaksanakan pelayanan terpadu serta dalam aktifitasnya tidak berkantor di kantor Camat, namun masih berkantor di Kantor Dinas/Badan terkait.

3. Kecamatan hanya melakukan tugas atribut yakni melaksanakan tugas pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per undang - undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan serta membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Sedangkan tugas delegasi/pelimpahan wewenang hanya sebagian kecil saja yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
4. Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya penggunaan aplikasi pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-govermment* dan *smart city*.

SOLUSI

1. Penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan, dan harus memenuhi persyaratan substantif, administratif dan teknis.
2. Memberikan kewenangan yang luas kepada Kecamatan sesuai Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

KENDALA/HAMBATAN

Pada Tahun 2017, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Dumai Barat Sebesar Rp. 3.136.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.103.252.730,- atau sebesar 98,96%, jumlah ini mengakomodir 11 (sebelas) Program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan di Kecamatan Dumai Barat, dan sebagian besar anggaran merupakan biaya beban tetap/Belanja Langsung digunakan untuk membayar insentif RT/LPMK, Kader Posyandu, Tenaga Persampahan, Keamanan dan Kebersihan Kantor. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai program dan kegiatan di Kecamatan induk Khususnya.

Kecamatan Medang Kampai

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Medang Kampai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 60. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Medang Kampai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target 2017	Realisasi Tahun	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	98%	95%	98
Persentase peningkatan swadaya masyarakat	100%	100%	100
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	98%	95%	99

Sumber : Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas dalam pencapain sasaran terdapat beberapa capaian kinerja tersebut yang sama dengan target atau sudah mencapai target dan melewati capaian target capaian kineja tahun 2017 dapat dilihat uraian dibawah ini :

1) **Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik**

   Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 hampir maksimal (95%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 98%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku

2) **Persentase peningkatan swadaya masyarakat**

   Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 hampir maksimal (100%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 100%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan sudah memenuhi target yang diinginkan karena banyaknya Usulan. Walaupun ada beberapa usulan yang tidak terakomodir oleh OPD teknis kegiatan tersebut. Untuk itu kiranya OPD Teknis terkait kedepannya lebih memperhatikan usulan dari kegaiatan yang telah diprioritaskan pada Musrenbang tingkat kecamatan Medang Kampai.

3) **Persentase kualitas sumber daya lembaga masyarakat**

   Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2017 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2017 sudah maksimal (100%), sesuai capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2017 adalah 99%. Untuk peningkatan kinerja LPMK dan RT di Kecamatan Medang Kampai pada tahun 2017 diadakan Rapat Koordinasi (RAKOR) sebagai evaluasi kinerja terhadap pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan menjalin silaturahmi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 4 (empat) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya pembentukan kampung keluarga berencana Kota Dumai (KB), pembentukan Kelompok bina keluarga balita (BKB) "melati", Kelompok bina keluarga lansia (BKL) "dahlia" dan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) 'Sakura" yaitu kelurahan Pelintung. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif

bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Medang Kampai sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Pada tahun 2017 ini Kecamatan Medang Kampai meraih peringkat kesatu dan kedua dalam penilaian Lomba yel yel dan pesen show dalam rangka jambore PKK Kota Dumai. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras miskin (raskin) kepada masyarakat Kecamatan Medang Kampai khususnya pada 4 (empat) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin Kecamatan Medang Kampai sampai tahun 2017 adalah :

- Kelurahan Mundam 722 KK
- Kelurahan Teluk Makmur 819 KK
- Kelurahan Guntung 460 KK
- Kelurahan Pelintung 1365 KK

Anggaran Belanja Kecamatan Medang Kampai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 7.029.748.840,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 4.886.748.840,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 2.143.000.000,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung menjadi Rp 4.624.898.746,- atau terserap 94,64 % dan Belanja Langsung Rp 2.113.182.621,-atau terserap 98,61%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

   Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 37.394.750,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 36.962.750,- atau 98,84 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

   a) **Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan**

      Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 37.394.750,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 36.962.750,- atau 98,84 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan sebanyak 1 orang dengan realisasi kinerja 98,84 %.

2. **Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

   Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 242.576.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 242.576.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

   a) **Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan**

      Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 217.750.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 217.750.000,- atau 100 %. Adapun

indikator kinerja keluaran adalah jumlah kader posyandu pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 24.826.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 24.826.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan sebanyak 4 (empat) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100%.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 76.320.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 76.320.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 76.320.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 76.320.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terwujudnya penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dengan realisasi kinerja 100 %.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 209.435.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 193.639.948,- atau 92,46 % yang dialokasikan kegiatan dibawah ini :

a) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 209.435.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 193.639.948,- atau 92,46 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 92,46 %.

5. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 365.362.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 365.362.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 365.362.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 365.362.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan ketua RT Kecamatan yang dibina selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 71.910.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 71.910.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 71.910.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 71.910.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2017 dengan realisasi kinerja 100%.

7. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 52.063.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 50.503.709,- atau 97,00 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 52.063.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 50.503.709,- atau 97,00 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah TP PKK yang bina di kecamatan dan kelurahan selama 12 (dua belas) bulan Pokja dengan realisasi kinerja 97,00 %.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Medang Kampai pada tahun 2011 s/d 2017 adalah :

Tabel 4. 61. Capaian Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Medang Kampai Tahun 2017

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
TAHUN 2017				
1	Juara 1 lomba yel yel 10 program PKK (dalam rangka jamboree PKK Kota Dumai)	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
2	Juara II lomba pesen show baju harian PKK (dalam rangka jambore PKK Kota Dumai)	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	PKK Kota Dumai

Sumber : Kecamatan Medang Kampai

PERMASALAHAN

1. Kecamatan hanya melakukan tugas atribut yakni melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan serta membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Sedangkan tugas delegatif/pelimpahan wewenang hanya sebagian kecil saja yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
2. Masih adanya beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan dalam RPJMD tapi pelaksanaannya belum.
3. Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya

penggunaan aplikasi pelayanan yang belum menggunakan teknogi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-government* dan *smart city*.

SOLUSI

1. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan dalam RPJMD agar dapat dilaksanakan
2. Memberikan kewenangan yang luas kepada Kecamatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KENDALA / HAMBATAN

Tahun 2017, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Medang Kampai setelah perubahan sebesar Rp. ***2.143.000.000,-*** jumlah ini mengakomodir 10 (sepuluh) Program dan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan di Kecmatan Medang Kampai, dan sebagian besar anggaran atau 30,48 % merupakan biaya beban tetap/Belanja Langsung digunakan untuk membayar insentif RT/LPMK, Kader Posyandu, Tenaga Persampahan, Keamanan dan Kebersihan Kantor. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai Program dan Kegiatan di Kecamatan Pemekaran khususnya.

Kecamatan Bukit Kapur

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Bukit Kapur dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 62. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2017	Realisasi s/d Tahun 2017	Capaian (%)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	65 %	65 %	100 %
Kualitas sumber daya lembaga masyarat	65 %	65 %	100 %
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	65 %	65 %	100 %

Sumber : Kecamatan Bukit Kapur

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing - masing kinerja tersebut. Nilai capaian Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2017 dapat dilihat dari rencana tingkat capaian pada rencana kinerja tahunan terhadap realisasi kinerja capaian sasaran. Adapun rincian capaian sasaran tahun 2017 sebagaimana berikut ini :

1. **Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik**

   Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatkan kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar sehingga arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan publik.

2. **Kualitas sumber daya lembaga masyarat**

   Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sementara strategi dari indikator diatas adalah memperkuat kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat melayani sehingga arah kebijakan meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan.

3. **Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat.**

   Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa sehingga arah kebijakan meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 100%, hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi kinerja program kegiatan dan realisasi keuangan setiap tahunnya, yaitu :

Tabel 4. 63. Pencapaian Anggaran Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2017

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Kinerja (%)
2016	2.692.140.000.-	2.608.145.904.-	96.9	100
2017	2.797.000.000.-	2.730.345.016.-	97.6	100

Sumber : Kecamatan Bukit Kapur

1. **Pelayanan Kecamatan Bukit Kapur**

   Dalam meningkatkan pelayanan, Kecamatan Bukit Kapur lebih meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur yang profesional dan berkompetensi dengan berlandaskan IMTAQ dan IPTEK, meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan data dan akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

   Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang.

   Berdasarkan Perwako Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dibidang Persampahan, maka pada Tahun 2013 Kecamatan Bukit Kapur sudah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan

dibidang kebersihan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan persampahan diwilayah kerja Kecamatan. Kecamatan Bukit Kapur mempunyai petugas Persampahan dan Kebersihan sebanyak 1 (satu) orang petugas. Pelaksanaan ini dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang dianggarkan melalui penganggaran pada Kecamatan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Bukit Kapur sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras miskin (raskin) kepada masyarakat Kecamatan Bukit Kapur khususnya pada 5 (lima) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin Kecamatan Bukit Kapur sampai tahun 2017 adalah:

Tabel 4. 64. Penerima Raskin Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2017

No	Nama Kelurahan	Jumlah PenerimaRaskin	Keterangan
01	Bagan Besar	391 Kk	
02	Bukit Nenas	188 Kk	
03	Bukit Kayu Kapur	617 Kk	
04	Gurun Panjang	227 Kk	
05	Kampung Baru	477 Kk	
	Jumlah	1900 Kk	

Sumber : Kecamatan Bukit Kapur

Jumlah penerima beras raskin sampai tahun 2017 ini adalah 1900 KK, yang mana setiap KK mendapat bantuan beras 15 Kg/KK.

Dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah yang ditujukan untuk mengidentifikasi rencana pembangunan infrastruktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan pada Kecamatan Bukit Kapur dilaksanakan Musrenbang setiap tahunnya.Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan maupun usulan rehabilitasi gedung dan anggaran untuk masyarakat diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan setiap tahunnya.Begitu juga untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Dumai.

3. Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan terhadap SITKAMTIBMAS, masyarakat dilingkungan Kecamatan Bukit Kapur sudah berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya melalui peningkatan program siskamling, pemberdayaan Linmas maupun penggunaan jasa Satpam. Setiap Lurah di Kecamatan Bukit Kapur mengupayakan pembangunan balai kemitraan yang diperuntukkan Bhabinkamtibmas dan FKPM untuk dijadikan menyelesaikan masalah sosial di setiap kelurahan.Selain itu berkoordinasi dengan Ketua RT dan masyarakat untuk pelaksanaan siskamling pada masing-masing RT.

Dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Kecamatan Bukit Kapur akan melibatkan elemen masyarakat maupun pihak Upika, sehingga akan mengurangi terjadinya konflik maupun masalah pencurian dilingkungan Kecamatan Bukit Kapur. Dengan kondisi ini keamanan dan ketertiban khususnya diwilayah Kecamatan Bukit Kapur akan aman dan terkendali.

1. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.50.538.600,- (lima puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.49.915.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) atau 98 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 50.538.600 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 49.915.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) atau 98%.

2. **ProgramPengembangan Wawasan Kebangsaan**

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 84.575.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 84.575.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan kehidupan beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 84.575.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 84.575.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 100%.

3. **Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 272.925.000,- (dua ratus tujuh puluh dua sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 272.925.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau 100%.

b) Penilaian kinerja unit pelayanan publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 15.525.000,-(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 15.525.000,- (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 100%.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 321.745.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 308.861.386,- (tiga ratus delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) atau 96% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Dukungan Operasional Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 321.745.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 308.861.386,- (tiga ratus delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) atau 96%.

5. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.865.994.340,- (delapan ratus tujuh ratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.865.994.340,- (delapan ratus tujuh ratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 865.994.340,- (delapan ratus tujuh ratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 865.994.340,- (delapan ratus tujuh ratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 100%.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 100%.

7. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100 %

yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100%.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DI RAIH

Kecamatan Bukit Kapur adalah salah satu kecamatan pemekaran yang luas wilayahnya ± 200 km^2, terdiri dari 5 (lima) Kelurahan meliputi :

a. Kelurahan Bagan Besar
b. Kelurahan Bukit Nenas
c. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
d. Kelurahan Gurun Panjang
e. Kelurahan Kampung Baru

Kecamatan Bukit Kapur menjadi barometer pelayanan kepada masyarakat. Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2017 adalah :

Tabel 4. 65. Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2017

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
TAHUN 2017				
1	Juara I Lomba Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	Bagan Besar	Provinsi Riau	Provinsi Riau
2	Juara I Lomba Posyandu Teladan	Bagan Besar	Propinsi Riau	Propinsi Riau
3	Juara I Lomba UP2K	Bagan Besar	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
4	Juara Harapan III Lomba Kelurahan Terbaik	Bukit Nenas	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
5	Juara Harapan I Lomba BBGRM	Bukit Nenas	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
6	Juara III Lomba Poskamling Terbaik	Bukit Nenas	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
7	Juara III Lomba UPPKS	Bukit Nenas	Propinsi Riau	Propinsi Riau

PERMASALAHAN

a) Keberadaan Kecamatan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak massa dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
b) Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang lambat dan aparatur yang kurang profesional, serta belum banyaknya SDM kecamatan yang diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur kecamatan.

c) Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi didalam menjalankan tugas, masih rendahnya kepedulian pihak swasta/pengusaha terhadap pembangunan, serta masih rendahnya peran Musrenbang didalam pembangunan wilayah.

d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya dan masih kurangnya koordinasi antar Ketua RT, masyarakat maupun unsur Kecamatan terhadap pelaksanaan Siskamling pada masing-masing RT

SOLUSI

a) Penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Bukit Kapur ditingkatkan secara optimal dalam menanggani urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

b) Kecamatan Bukit Kapur akan terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal, akan segera mengusulkan SDM kecamatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatan profesionalisme dalam bertugas.

c) Meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas, peran serta aktif dari masyarakat, swasta dan pengusaha yang mendukung program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Bukit Kapur, adanya model musyawarah perencanaaan pembangunan yang bersifat bottom up untuk mengoptimalkan penataan dan pengunaan ruang pembangunan wilayah dan masyarakat Kecamatan Bukit Kapur.

d) Diadakannya koordinasi antar Ketua RT yang dikoordinir Lurah dengan masyarakat dan unsur Kecamatan agar kepedulian terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggal terpelihara dan terjaga dengan diadakannya Siskamling.

KENDALA / HAMBATAN

Tahun 2017, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bukit Kapur setelah perubahan sebesar Rp. ***2.797.000.000.-*** jumlah ini mengakomodir 10 (sepuluh) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan di Kecamatan Bukit Kapur. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai Program dan Kegiatan di Kecamatan Bukit Kapur.

Kecamatan Sungai Sembilan

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Sungai Sembilan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 66. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian kondisi akhir 2017	Realisasi s/d tahun 2017	Capaian (%)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	65%	65%	100%
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	65%	99,30%	100%
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	65%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis di atas pada tahun 2017 untuk masing-masing indikator kinerja Sebagai Berikut

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

   Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Sasaran strategis ini sebesar Rp. 1.573.400.00,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.526.459.120,- atau 97,02 %. adapun indikator kinerja adalah Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik dengan target 65% dan terealisasi 97,02%. Capaian Kinerja ini melebihi target yang diinginkan.
2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

   Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Sasaran strategis ini sebesar Rp. 1.182.170.418,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.191.000.000,- atau 99,26 %. adapun indikator kinerja adalah Kualitas Sumber daya lembaga masyarakat dengan target 65% dan terealisasi 99,26%. Capaian Kinerja ini melebihi target yang diinginkan.
3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

   Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Sasaran strategis ini sebesar Rp. 110.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 110.600.000,- atau 100%. adapun indikator kinerja adalah Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat dengan target 65% dan terealisasi 100%. Capaian Kinerja ini melebihi target yang diinginkan.

Anggaran Belanja Kecamatan Sungai Sembilan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 8.049423.730,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.174.423.730.- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.875.000.000.-Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 4.940.901.769.- atau terserap 95,49% dan Realiasasi Belanja Langsung Sebesar Rp. 2.819.229.538,- .atau terserap 98,,06% dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 27.849.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 27.849.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 27.849.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 27.849.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium petugas persampahan selama 12 Bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100%.

2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 302.700.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 302.700.000,- atau 99,08% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 280.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 278.020.000,- atau 99,01%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium Kader Posyandu dan Operasional Posyandu selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100 %.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 21.900.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Fasilitas Persiapan Lomba Kelurahan tingkat Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 5 Kelurahan dengan realisasi 100 %.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 78.400.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 78.400.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Kehidupan beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 78.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 78.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terwujudnya Penyelenggaraan STQ tingkat Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan atau 100 %.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 286.408.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 267.624.038,- atau 93.44% yang dialokasikan kegiatan dibawah ini :

a) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 286.408.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 267.624.038,- atau 93.44%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Kelurahan yang diberikan dana dukungan sebanyak 5 Kelurahan dengan realisasi 100%.

5. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 698.400.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 698.400.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 838.300.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 834.300.000,- atau 99,52%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium RT dan LPMK se Kecamatan Sungai Sembilan selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 32.200.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 32.200.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah 32.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 32.200.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen musrenbang tahun 2017 di kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 1 Dokumen dan Terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

7. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 47.950.418,- atau 95,90% yang dialokasikan kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 47.950.418,- atau 95,90%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah laporan kegiatan PKK selama 1 tahun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.

PERMASALAHAN/ KENDALA

Kendala-kendala yang dijumpai dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Sembilan antara lain adalah :

1. Tugas dan fungsi umum Camat sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagian besar melakukan tugas umum pemerintah yang melaksanakan

tugas dan fungsi koordinasi. Hal ini menyebabkan Camat sulit untuk mengambil keputusan strategis untuk menjawab respon masyarakat terhadap permasalahan-permaslahan yang terjadi;

2. Keterbatasan kemampuan APBD Kota Dumai dalam mengaplikasikan/mengakomodir pembiayaan program maupun kegiatan di Kecamatan, sehingga tidak semua kegiatan dalam program dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai sasaran strategis.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana di Kecamatan sehingga belum mampu sepenuhnya menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Persoalan ini ditambah dengan kurangnya pemahaman dan tanggung jawab aparatur kecamatan/kelurahan dalam memahami tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan;
4. Hasil musrenbang yang dilaksanakan pada setiap tahunnya pada tingkat kelurahan maupun kecamatan belum mampu mengakomodir setiap usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi menghadiri kegiatan musrenbang baik yang diadakan kelurahan maupun kecamatan pada masa mendatang.

LANGKAH ANTISIPASI YANG DIAMBIL

Untuk menghadapi kendala tersebut Kecamatan Sungai Sembilan telah mengambil langkah-langkah antisipasi antara lain :

1. Penguatan fungsi koordinasi kepada OPD yang terkait dan Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
2. Melakukan penyesuaian kemampuan anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran sesuai dengan Renstra Kecamatan;
3. Memaksimalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada guna peningkatan kinerja;
4. Melakukan upaya pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up selain Musrenbang untuk mengakomodir kepentingan dan keluhan masyarakat.

21. URUSAN PENGAWASAN
Inspektorat

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Inspektorat Kota Dumai tahun 2016-2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. 67. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Capaian kondisi akhir tahun 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian (%)
Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti	75%	69,15%	92,21 %
Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya.	5 Dokumen	3 Dokumen	60,00%

Untuk skala penilaian terhadap Indikator kinerja sasaran pemerintah, menggunakan Peraturan Menpan dan RB Nomor 15 Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 4. 68. Penilaian berdasarkan peraturan Menpan dan RB Tahun 2017

No	Kategori	Nilai Angka (%)	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan,
2	A	>80 – 90	Memuaskan,
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik,
4	B	>60 – 70	Baik,
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
6	C	>30 - 50	Kurang,
7	D	0 – 30	Sangat Kurang,

Dari 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama Inspektorat Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti.

   Pada tahun 2017 jumlah total rekomendasi adalah 402 temuan, rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 278 temuan, sebanyak 8 temuan masih dalam proses untuk ditindaklanjuti dan 116 temuan belum di tindaklanjuti.

   Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar 69,15%, masih dibawah target 75%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan nilai 92,21%, hal ini menunjukan capain dengan nilai sangat memuaskan.

2. Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya.

   Berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan RKPD, Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Bahwa inspektorat wajib mereviu setiap tahunnya , pada tahun 2017 target 5 Dokumen sedangkan realisasi 3 Dokumen atau capaian kinerja dengan nilai 60,00 % hal ini menunjukan capaianya dengan nilai **Cukup (memadai).** Hal ini disebabkan RKPD tidak bisa dilaksanakan reviu mengingat terbatasnya waktu dan Renja juga tidak bisa dilaksankan Reviu. Untuk LKj, RKA dan Laporan Keuangan telah dilaksanakan reviu.

Penanganan bidang pemerintahan umum khususnya bidang pengawasan oleh Inspektorat Kota Dumai pada tahun 2017, dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:

1. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.**

   Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.2.012.219.115,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.721.412.950,00 atau 83,55%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 960.240.190,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 891.450.000,00 atau 92,84 %.. Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 74 LHP dan terealisasi 74 LHP atau 100 %, dijalankan melalui Pemeriksaan Reguler sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan serta melaksanakan pemeriksaan diluar PKPT yang telah diprogramkan yakni yang bersumber dari pemeriksaan Kasus/Khusus.

b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI terlebih dahulu dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/ SJ tanggal 4 Maret 2016. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 207.231.200,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 80.701.200,00 atau 38,94%.Indikator kinerja keluarannya adalah dokumen yang terdiri dari target 5 (lima) Dokumen yang direviu setiap tahunnya dan terealisasi adalah 3 (tiga) Dokumen atau 60,00% dikarenakan waktu untuk mengevaluasi/mereviu sudah terlambat.

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 216.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 215.850.000,00 atau 99,93%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebanyak 16 laporan dan terealisasi sebanyak 16 laporan atau 100%. Tercapainya target yang telah ditetapkan.

d. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 61.464.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 55.472.850,00 atau 90,25%. Adapun indikator kinerja keluarannya indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengawasan Reguler (Dokumen) sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen atau pencapaian kegiatan sebesar 100%.

e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp. 225.901.725,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 191.616.400,00 atau 84,82%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 2 (Dua) kali dan terealisasi 2 (Dua) kali atau 100%.

f. Meneliti / Menilai Laporan Wajib LP2P

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 81.964.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 81.356.000,00 atau 99,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat watu dengan target 100% dan terealisasi 100%.

g. Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 158.998.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 143.046.500,00 atau 89,97%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah penilaian mandiri yang dilaksanakan OPD, yang direncanakan sebanyak 35 OPD dan terealisasi 35 OPD atau 100%.

h. Peningkatan Kapabilitas APIP

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.420.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 61.920.000,00 atau 61,66 %.

2. Program pada pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 205.154.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 171.212.900,00 atau 83,46%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp. 205.154.000,00 dengan relisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 171.212.900,00 atau 83,46%. Indikator kinerja kegiatan ini jumlah aparatur yang mengikuti Diklat JFA dari yang direncanakan sebanyak 40 orang dan terealisasi 40 orang atau tingkat capaian 100%.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Perlu penambahan jumlah Auditor, dikarenakan banyaknya kegiatan pendampingan dan pengawasan yang memerlukan keterlibatan auditor.
2. Kualitas Sumber daya Manusia (SDM) belum memadai hal ini ditandai dengan banyaknya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Dumai yang belum mengikuti diklat-diklat terkait di bidang pengawasan.
3. Masih minimnya komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari OPD terkait.

Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian sasaran *outcome* dimasa yang akan datang adalah :

1. Menambah jumlah personil terutama Auditor di lingkungan Inspektorat Kota Dumai.
2. Meningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pengawasan Inspektorat Kota Dumai dalam program pelatihan yang disediakan oleh Diklat BPKP, Mendagri dan Inspektorat Provinsi.
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan perlu lebih diintensifkan, selain itu OPD dari manajemen diatas hingga ke staaf perlu lebih proakti dan responsif menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan baik pengawas internal maupun eksternal

Saat ini di Inspektorat Kota Dumai sedang digiatkan slogan penyemangat **"WE CHANGE, WE CAN DO IT"**. Sebuah harapan besar diapungkan di lingkungan Inspektorat Kota Dumai. untuk merubah berbagai hal dari yang kurang baik menjadi lebih baik bahkan jauh lebih baik sehingga mencapai yang terbaik. Hal ini tentu dilandasi dengan keyakinan dan tekad bersama sehingga perubahan yang diharapkan akan segera terwujud.

22. URUSAN PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Wajib Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kota Dumai, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 4. 69. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappeda Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target Akhir 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian (%)	
Jumlah peraturan tentang penataan ruang daerah	2 dokumen	1 dokumen	100%	
Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain	15%	13,1%	60,4	
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	70%	96,6%	99%	
Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah	30%	17,9%	100%	

Tabel 4.70. Formulasi perhitungan indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Dumai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus dan perhitungan
Terciptanya Ruang Kota yang hijau, humanis, teratur dan merata.	Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah	dokumen yang ditetapkan / target dokumen dalam renstra
Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain	Jumlah usulan masyarakat x 100 / Jumlahan usulan stakeholder lain dalam APBD
	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah program DPA SKPD Dumai x 100 / Jumlah program dalam RKPD
	Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan Daerah	Jumlah laporan kontribusi CSR Perusahaan X100 / Jumlah Perusahaan

1. **Jumlah Peraturan tentang Penataan Ruang Daerah**

Dalam rangka pengukuran indikator kinerja Utama Bappeda Kota Dumai untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan dokumen yang ditetapkan}}{\text{Jumlah target dokumen dalam Renstra}} \times 100\ \%$$

Berdasarkan rumusan sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan yang ditetapkan sebanyak 1 buah, sedangkan Jumlah target dokumen peraturan dalam renstra sebanyak 1 buah, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun 2017 sebesar 100 %, perlu disampaikan bahwa Rancangan Perda Kota Dumai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan RI dikarenakan belum diperolehnya persetujuan perubahan pola ruang kehutanan dari Menteri Kehutanan RI dan belum disahkannya Perda RTRW Propinsi Riau.

Meskipun demikian perencanaan pembangunan wilayah Kota Dumai telah diselaraskan dengan Rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Propinsi Riau dan RTRW Nasional.

Dengan demikian selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah, melalui instrumen ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Kota Dumai sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

1. **Program Perencanaan Tata Ruang**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 425.543.210,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 415.353.350,- atau 98%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. **Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang**

Pada Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang di alokasikan dana sebesar Rp. 285.280.910,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 276.185.550,- (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) atau 97%. Adapun indikator kinerja keluaran : Koordinasi BKPRD; Jumlah Dokumen Perencanaan Pasca Penetapan Perda RTRW Kota Dumai; Peningkatan Muatan Teknis tentang Penataan Ruang oleh Tenaga Ahli Pendamping dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang.

b. Kegiatan Survei dan Pemetaan

Pada Kegiatan Survey dan Pemetaan dialokasikan dana sebesar Rp. 140.262.300,- (seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 139.167.800,- (seratus tiga puluh sembilan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delampan ratus rupiah) atau 99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah: Kebutuhan Peta Landuse Kota Dumai dan Peningkatan Muatan Peta Tata Ruang.

Permasalahan dan Solusi

Rancangan Perda Kota Dumai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri tapi belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dikarenakan belum disahkannya Perda RTRW Propinsi Riau. Meskipun demikian perencanaan pembangunan wilayah Kota Dumai telah diselaraskan dengan Rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Propinsi Riau dan RTRW Nasional.

Dengan demikian selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah, melalui instrumen ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Kota Dumai sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Solusi yang bisa diambil adalah :

1. Komitmen dari Pemerintah Provinsi Riau
2. Komitmen dari kementerian kehutanan dengan diterbitkannya SK. Menhut No. 878 tahun 2014 dan SK. Menhut No. 314 tahun 2016.
3. Pemerintah Kota Dumai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Kota Dumai telah melakukan penyelarasan dengan rancangan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional serta Program-program Nasional.

2. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap total usulan stakeholder lain.

Persentase Usulan masyarakat didalam APBD terhadap Usulan stakeholder lain didalam APBD.dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat x 100\%}}{\text{Jumlah usulan stakeholder lain dalam APBD}}$$

Berdasarkan rumusan sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaika bahwa Jumlah Usulan masyarakat yang telah diakomodir didalam APBD Kota Dumai sebanyak 2827 Usulan, sedangkan Jumlah Usulan Stakeholder lain didalam APBD Kota Dumai sebesar 371 Usulan, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun

2017 sebesar 13,1 %, hal ini menunjukkan hasil yang secara bertahap capaian IKU Bappeda Kota Dumai dari target 5 (lima tahunan) sebesar 20% maka tingkat capaian sebesar 60,4 %.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Pada Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 215.870.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 187.665.000,- atau 86,93%. Adapun indikator kinerja keluaran :

1. Satu KaliJumlah musrenbang RKPD yang dilaksanakan, Jumlah keikutsertaan pada Musrenbang Provinsi Riau; Jumlah keikutsertaan pada Musrenbang tingkat Nasional.
2. Satu Kali Partisipasi Kota Dumai dalam Pra dan Pasca Musrenbang Propinsi Riau Tahun 2017.
3. Satu Kali Partisipasi Kota Dumai dalam Musrenbang Nasional Riau Tahun 2016.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan amanat dari UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri 54 tahun 2010, dimana dijelaskan setelah dilaksanakan Forum SKPD pemerintah daerah wajib melaksanakan Musrenbang RKPD untuk mensinergikan dan mensinkronkan Renja hasil pembahasan Forum SKPD dengan hasil musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD pada tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Maret.

Permasalahan dan Solusi

1. Stakeholder tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam proses perumusan kegiatan dalam anggaran daerah.
2. Penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas.
3. Biasanya masih berupa seremonial dan acara rutin belaka.

Regulasi yang diterbitkan hendaknya:

1. Penerapan prinsip inklusif dan *broad base participation* di semua tahapan dan peringkat proses pengambilan keputusan yang meliputi konsultasi pada peringkat kebijakan, perencanaan, alokasi sumber daya, implementasi, pemantauan, dan evaluasi;
2. Ketersediaan dan kelengkapan analisis teknis, termasuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah antarsektor dan tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa) disertai dengan forum pembahasan yang partisipatif untuk memastikan bahwa program dan kegiatan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
3. Mempertegas peranan, fungsi dan jurisdiksi dari masing-masing stakeholder (organisasi masyarakat sipil dan DPRD) dalam proses perencanaan dan penganggaran, terutama dalam penyiapan dan perumusan anggaran;
4. Memastikan pemenuhan standar konsultasi publik;
5. Mewujudkan kondisi bagi pengembangan penganggaran partisipatif

3. Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Jumlah program Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD Kota Dumai terhadap jumlah program dalam RKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat x 100\%}}{\text{Jumlah usulan stakeholder lain dalam APBD}}$$

Berdasarkan rumusan sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa Jumlah program RKPD SKPD se-kota Dumai yang telah sesuai dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2017 sebenyak 372 program, sedangkan Jumlah program dalam RPJMD Kota Dumai sebanyak 385 Program, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun 2017 sebesar 96,6 %, hal ini menunjukkan bahwa jumlah Program dalam RKPD sama Jumlah Program dalam Renja SKPD dikarenakan menggunakan aplikasi yang saling terintregrasi dengan jumlah kegiatan sebanyak 1.432.

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD

Pada Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD dialokasikan dana sebesar Rp. 200.000.000, dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 165.977.500,- atau 83%.Adapun indikator kinerja keluaran 1 Dokumen rancangan awal RPJMD Kota Duma tahun 2016-2021. dengan capaian realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan salah satu amanat dari UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri 54 tahun 2010, dimana dijelaskan bahwa salah satu proses penyusunan Dokumen RPJMD adalah Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik ini merupakan salah satu proses pengkajian secara ilmiah rancangan RPJMD. Output dari Kegiatan ini adalah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2016-2021.

b. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

Pada Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 247.870.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 244.626.800,- atau 98,69%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

- 75 Buku Jumlah Dokumen RKPD yang disusun
- 75 Buku Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang disusun, dengan realisasi 100%.

Berdasarkan amanat UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri 54 tahun 2010, bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyususn RKPD setiap tahunnya dimana RKPD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota selambat-lambatnya bulan Mei setiap tahunnya. Untuk tahun 2017, RKPD tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Walikota pada dengan Nomor 26 tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017.

c. **Kegiatan Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah**

Pada Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 234.380.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 232.634.072,- atau 99,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

a. Jumlah lakip yang disusun dan disampaikan ke kemendagri dan pemerintah provinsi 1 dokumen
b. Jumlah Aplikasi yang dibangun 1 aplikasi

d. **Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)** untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 146.725.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 115.935.000,- atau 79,02%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu 1 dokumen.

e. **Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Dialokasikan dana sebesar Rp. 311.130.875,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 249.017.498,- atau 80,04%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

a. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD 4 dokumen
b. Jumlah Koordinasi Monev ke Propvinsi Riau 4 kali
c. Jumlah Koordinasi Tim evaluasi pelaksanaan Realisasi Anggaran (TEPRA) 4 kali

f. **Kegiatan Evaluasi rencana aksi daerah pemberatasan korupsi (RAD-PK)**

Dialokasikan dana sebesar Rp. 196.900.600,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 178.049.900,- atau 90,43%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Terlaksananya pelaporan RAD-PK 1 dokumen.

4. **Program Perencanan Pembangunan Ekonomi**

a. **Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi**

dialokasikan dana sebesar Rp. 157.973.700,-, dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 155.662.510,- atau 98,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1 dokumen.

b. **Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan**

dialokasikan dana sebesar Rp. 95.237.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 76.637.000,- atau 80,47%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Jumlah laporan Monev Jumlah laporan Monev 1 dokumen

5. **Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

a. **Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan,kesehatan dan SDM**

Dialokasikan dana sebesar Rp. 206.289.850,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 202.471.200,- atau 98,15%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan, kesehatan dan SDM 1 dokumen.

b. **Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya**

Dialokasikan dana sebesar Rp. 183.842.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 178.776.000,- atau 97,24%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 1 dokumen.

c. **Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan**

Dialokasikan dana sebesar Rp. 90.667.200,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 72.867.200,- atau 80,37%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya 1 dokumen.

d. **Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan**

dialokasikan dana sebesar Rp. 145.534.800,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 141.313.400,- atau 97,10%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang aparatur 1 dokumen.

6. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**

a. **Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)**

dialokasikan dana sebesar Rp. 217.455.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 210.459.300,- atau 96,78%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Jumlah Laporan TKPK 1 dokumen

7. **Program Pengembangan Perumahan**

a. **Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan**

dialokasikan dana sebesar Rp. 274.303.589,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 272.228.389,- atau 99,24%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Pendampingan oleh Tenaga Ahli dalam pelaksanaan RP2KP-KP; Penyusunan dokumen RP2KP-KP bersama tim KOTAKU; Delineasi RT di Kawasan Pemukiman Kumuh 1 dokumen

b. **Kegiatan Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan**

dialokasikan dana sebesar Rp. 29.865.400,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.345.000,- atau 98,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Jumlah Koordinasi Masalah Transportasi Kota Dumai 6 kali

c. **Kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri**

dialokasikan dana sebesar Rp. 196.920.300,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 172.864.300,- atau 87,78%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Jumlah Laporan Perencanaan Pusat - pusat Industri 1 dokumen

d. Kegiatan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

dialokasikan dana sebesar Rp. 244.355.880,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 190.299.008,- atau 77,88%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Monitoring dan evaluasi percepatan program air minum dan sanitasi 12 bulan.

e. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

dialokasikan dana sebesar Rp. 103.122.300,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 102.900.550,- atau 99,78%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Jumlah Dokumen ,dan data-data Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Fisik Sarana dan Prasarana 1 dokumen

8. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

a. Kegiatan koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

dialokasikan dana sebesar Rp. 40.911.801,-dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 40.863.801,- atau 99,88%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Jumlah koordinasi tentang usulan kegiatan kawasan perbatasan 8 kali

9. Program Kerjasama Pembangunan

a. Kegiatan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

dialokasikan dana sebesar Rp. 226.910.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp.163.367.600,- atau 72,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

- Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah 1 tahun
- Jumlah Dokumen TJSP 1 dokumen
- Jumlah Buletin Pemecahan Masalah-masalah Daerah 1 buletin

10. Program Pengembangan Data/Informasi

a. Kegiatan Penyusunan profile daerah

dialokasikan dana sebesar Rp. 114.130.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 83.399.000, atau 73,07%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

- Jumlah dokumen informasi data pembangunan kota dumai 1 dokumen
- Jumlah dokumen SIPD kota dumai 1 dokumen

b. Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Daerah

dialokasikan dana sebesar Rp. 259.775.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 227.124.000 atau 87,43%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

- Jumlah Aplikasi Yang Dibangun 3 aplikasi
- Jumlah penyesuaian aplikasi perencanaan dengan Perubahan SOTK (Upgrade 2 Aplikasi)

c. Proporsi kontribusi CSR dalam Pembangunan Daerah

Untuk mengukur adanya peran partisipasi Perusahaan yang ada di Kota Dumai dalam rangka pelaksanaan program *corporate social responsibility (* CSR) dalam pembangunan Daerah Kota Dumai, Bappeda kota Dumai membuat suatu rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah laporan Perusahaan yang berkontribusi pada CSR}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka perhitungan indikator kinerja Bappeda untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Persentase Jumlah laporan Perusahaan yang berkontribusi pada CSR terhadap jumlah Perusahaan di Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan rumusan sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaika bahwa Jumlah laporan Perusahaan yang berkontribusi pada CSR dengan data dari BPTPM Kota Dumai tahun 2017 sebenyak 10 perusahaan, sedangkan Jumlah Perusahaan di Kota Dumai lebih dari 56 yang menjalankan program CSR, maka berdasarkan rumus sebagaimana tersebut Pengukuran kinerja Utama Bappeda pada Tahun 2017 sebesar 17,9 %. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada sosialisasi tahun depan untuk meningkatkan persentase laporan CSR perusahaan yang belum transparan sehingga amanat UU tentang Tanggung Jawab Perusahaan (TJSP) di Wilayah Kota Dumai dapat ditingkatkan.

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Kebijakan Layanan Publik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 118.092.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 109.380.000,- atau 92,62%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah 1 Kegiatan.

Sesuai dengan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa tahapan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah setelah dilaksanakan Musrenbang Kecamatan adalah Forum Perangkat Daerah. Forum PD merupakan suatu wadah yang mempertemukan antara delegasi Kecamatan dengan OPD se-Kota Dumai untuk mengsinkronisasikan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Renja OPD. Adapun output dari Forum PD ini adalah Berita Acara Pelaksanaan Forum PD dan Rencana Kerja OPD hasil pembahasan Forum OPD.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun yang menjadi permasalahan:

- *CSR* banyak bersifat *charity*, amal, sesuai kebutuhan sesaat, kurang memberi dampak yang berkelanjutan;
- Bantuan yang bersifat sporadis;
- Belum lagi ada masalah tumpang tindih antarprogram CSR yang dilakukan antarperusahaan dengan pemerintah setempat.

REGULASI YANG DITERAPKAN :

Pemerintah terus memperkuat sisi regulasi dan kelembagaan lembaga keuangan, termasuk di dalamnya lembaga perbankan dan non-perbankan;

1. Pemerintah juga berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan investasi baik oleh pihak swasta maupun pemerintah sehingga menjadi lebih terarah seperti yang telah diagendakan di dalam RPJM;
2. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu terus mendapatkan dukungan dari semua pihak, diantaranya melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Jumlah Peraturan tentang Penataan Ruang Daerah

23. URUSAN KEUANGAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.71. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2017

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (dalam %)
Persentase belanja pendidikan	20%	30,38%	151%
Persentase belanja kesehatan	10%	21,78%	217%

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2017 dapat disampaikan adalah, sebagai berikut:

1. Persentase belanja pendidikan (20%)

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.280.663.488.811,46. Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, adapun persentase belanja pendidikan sebesar 20% yaitu Rp. 256.132.697.762,29. Dalam realisasinya alokasi belanja

pendidikan sebesar Rp. 389.037.853.203,00 atau sebesar 30,38%. Dari data di atas, disimpulkan bahwa persentase belanja pendidikan telah melampaui target yang telah ditargetkan sebesar 20%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 151%.

2. **Persentase belanja kesehatan**

Alokasi persentase belanja kesehatan 10% sebesar Rp. 128.066.348.881,15. Dalam realisasinya alokasi belanja kesehatan sebesar Rp. 278.967.303.587,85 atau sebesar 21,78%. Dari data di atas, disimpulkan bahwa persentase belanja kesehatan telah melampaui target yang telah ditargetkan sebesar 10%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 217%.

Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 26.111.311.648,- dengan rincian sebagai berikut, yaitu: Belanja Tidak Langsung Rp. 17.067.758.610,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.043.553.038,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 15.177.404.472,- atau dengan persentase sebesar 88,92% dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp. 7.778.611.668,- atau dengan persentase sebesar 86,01%. Adapun secara keseluruhan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2017 sebesar Rp. 22.956.016.140,- atau sebesar 87,92%.

1. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 6.459.635.261,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.164.526.562,- atau 79,95%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. **Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga**

Kegiatan penyusunan standar satuan harga, dianggarkan sebesar Rp. 179.237.700,- realisasi sebesar Rp. 163.326.100,- atau sebesar 91,12%. Kegiatan penyusunan standar satuan harga tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah buku standar harga barang dan jasa sebanyak 1 buku.

Adapun hasil kegiatan penyusunan standar satuan harga berupa buku standarisasi harga satuan barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah Kota Dumai yang merupakan pedoman penetapan harga barang dalam penyusunan APBD Tahun 2018.

b. **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD**

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dianggarkan sebesar Rp. 1.182.014.850,- realisasi sebesar Rp. 1.113.283.916,- atau 94,19%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian adalah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan produk hukum daerah yang mengatur tentang APBD Tahun 2018 yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp.163.609.325,- realisasi sebesar Rp. 119.287.500,- atau 72,91%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD merupakan penjabaran secara terperinci dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Kegiatan ini menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp. 722.563.075,- realisasi sebesar Rp. 612.574.696,- atau 84,78%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan produk hukum daerah yang mengatur tentang Perubahan APBD Tahun 2017 yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

e. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp.117.475.420,- realisasi sebesar Rp.100.258.000,- atau 85,34%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD merupakan penjabaran secara terperinci dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Kegiatan ini

menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

f. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp. 758.569.250,- realisasi sebesar Rp. 724.492.050,- atau 95,51%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Perda.

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017.

g. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp.123.014.500,- realisasi sebesar Rp. 111.862.315,- atau 90,93%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Perwa. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2017

h. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dianggarkan sebesar Rp.264.186.198,- realisasi sebesar Rp. 229.334.083,- atau 86,81%. Kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah pegawai dalam mengikuti bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan sebanyak 15 orang.

Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang aturan pengelolaan keuangan daerah yang sifatnya sosialisasi aturan baru dibidang keuangan sejumlah 15 orang.

i. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah dianggarkan sebesar Rp. 402.978.000,- realisasi sebesar Rp. 337.056.048,- atau 83,64%. Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah (1) jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah angkatan I sejumlah 60 orang dan angkatan II sejumlah 60 orang (2) Jumlah peserta sosialisasi peraturan menteri dalam negeri sejumlah 120 orang.

Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah yaitu mengikutsertakan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu dalam bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah serta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugasnya.

j. Kegiatan inventarisasi aset

Kegiatan inventarisasi Aset dianggarkan sebesar Rp. 259.763.600,- realisasi sebesar Rp. 131.660.499,- atau 50,68%. Kegiatan inventarisasi aset tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program dokumen penelusuran gedung dan bangunan, penelusuran aset yang berasal dari dana APBN dan APBD Provinsi yang dihibahkan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 3 dokumen. Kegiatan inventarisasi Aset menghasilkan dokumen penelusuran gedung/ bangunan yang pendanaannya bersumber APBD dan APBD Provinsi.

k. Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah

Kegiatan penghapusan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 200.628.000,- realisasi sebesar Rp. 100.009.392,- atau 49,85%. Kegiatan penghapusan barang milik daerah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terlaksananya penghapusan barang milik daerah sebanyak 36 SKPD.

Kegiatan penghapusan barang milik daerah merupakan kegiatan untuk melakukan penghapusan barang milik daerah pada 36 organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Dengan kegiatan ini diharapkan tercapainya efisiensi penggunaan barang milik daerah yang terorganisir.

l. Kegiatan Penertiban Aset

Kegiatan penertiban aset dianggarkan sebesar Rp. 117.457.000,- realisasi sebesar Rp. 60.405.000,- atau 51,43%. Kegiatan penertiban aset tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah penertiban aset berupa barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan OPD Baru sebanyak 1 Laporan.

Kegiatan penertiban aset menghasilkan dokumen pelaporan penertiban aset sejumlah 1 laporan. Adapun kegiatan penertiban aset dengan maksud menertibkan seluruh aset milik Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan peruntukannya.

m. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dianggarkan sebesar Rp. 371.262.480,- realisasi sebesar Rp.343.784.704,- atau 92,60%. Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan sejumlah 1 paket.

Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan Kota Dumai. Pengembangan kegiatan ini sejumlah 1 paket. Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen keuangan Kota Dumai dengan tujuan tertib administrasi keuangan.

n. Kegiatan Penyusunan Daftar RKBU dan RKPBU

Kegiatan penyusunan daftar RKBU dan RKPBU dianggarkan sebesar Rp.118.079.250,- realisasi sebesar Rp. 95.774.546,- atau 81,11%. Kegiatan penyusunan daftar RKBU dan RKPBU tingkat pencapaiannya sebesar 100% dengan capaian program adalah daftar rencana kebutuhan barang unit (RKBU) sebanyak 36 SKPD. Kegiatan penyusunan daftar RKBU dan RKPBU merupakan kegiatan yang setiap tahun dianggarkan. Adapun kegiatan ini menghasilkan 2 dokumen yaitu daftar rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit (RKPBU) SKPD Kota Dumai.

o. Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah

Kegiatan penyusunan data administrasi keuangan daerah dianggarkan sebesar Rp. 135.575.500,- realisasi sebesar Rp. 119.568.536,- atau 88,19%. Kegiatan penyusunan data administrasi keuangan daerah tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah (1) Register SP2D BL dan BTL Perbulan sejumlah 1.500 lembar; (2) Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD sejumlah 36 buku; (3) Register SP2D per SKPD sejumlah 3.500 lembar.

p. Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan

Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah tahunan dianggarkan sebesar Rp. 235.283.300,- realisasi sebesar Rp. 234.557.748,- atau 99,69%. Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah tahunan tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah (1) Tersusunnya laporan barang milik daerah tahunan sejumlah 1 laporan; (2) Rekapitulasi daftar mutasi barang sejumlah 1 laporan. Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah tahunan menghasilkan dokumen barang milik Pemerintah Kota Dumai setiap tahunnya . Adapun dokumen yang dihasilkan sejumlah 2 dokumen yaitu (1) laporan barang milik daerah tahunan; dan (2) rekapitulasi daftar mutasi barang.

q. Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD

Kegiatan rekonsiliasi aset SKPD dianggarkan sebesar Rp.196.284.000,- realisasi sebesar Rp. 194.876.000,- atau 99,28%. Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD tingkat pencapainnya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi sejumlah 36 SKPD.

Kegiatan rekonsiliasi aset merupakan kegiatan rekon barang milik daerah diseluruh SKPD yang ada di Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan pada 36 SKPD yang ada di Kota Dumai, Tujuan dari kegiatan rekonsiliasi aset SKPD yaitu agar pengelolaan daerah tepat waktu, akuntabel dan transparan.

r. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)

Kegiatan pengembangan sistem informasi barang milik daerah (SIMDA-BMD) dianggarkan sebesar Rp.138.199.400,- realisasi sebesar Rp. 43.158.000,- atau 31,23%. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) sebesar 100%, dengan capaian program sistem informasi barang milik daerah (SIM-BMD) dan Entry SIMDA BMD sejumlah 1 paket.

Kegiatan pengembangan sistem informasi barang milik daerah (SIMDA-BMD) merupakan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Kota Dumai. Pengembangan kegiatan ini sejumlah 1 paket. Aplikasi SIMDA-BMD merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen barang milik daerah Kota Dumai dengan tujuan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

s. Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah

Kegiatan penilaian aset/barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 69.614.750,- realisasi sebesar Rp. 40.455.300,- atau 58,11%. Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah sebesar 100%, dengan capaian program terlaksananya penilaian aset/barang daerah sejumlah 36 SKPD.

Kegiatan penilaian aset/barang milik daerah merupakan kegiatan penilaian aset/barang milik daerah yang dilaksanakan pada 36 SKPD yang ada di Kota Dumai. Penilaian aset/barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka penghapusan aset sehingga dilakukan penilaian aset terlebih dahulu.

t. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pejabat pengelola barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 185.166.000,- realisasi sebesar Rp.146.608.499,- atau 79,18%. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan capaian program jumlah pejabat pembantu pengelola barang milik daerah yang dikirim sejumlah 17 orang. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pejabat pengelola

barang milik daerah merupakan kegiatan yang mengirimkan pejabat pembantu pengelola barang milik daerah untuk mengikuti bimtek/sosialisasi terhadap aturan dibidang aset. Adapun kegiatan ini dengan mengirimkan sejumlah 17 orang yang dimaksudkan pejabat pembantu pengelola barang milik daerah memahami semua siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

u. Kegiatan Penyusunan standar biaya

Kegiatan penyusunan standar biaya dianggarkan sebesar Rp.150.210.050,- realisasi sebesar Rp. 138.606.390,- atau 92,28%. Kegiatan Penyusunan standar biaya sebesar 100% dengan capaian program buku standar biaya sejumlah 100 buku.

Kegiatan penyusunan standar biaya menghasilkan buku standar biaya tahun anggaran 2018. Buku standar biaya tahun anggaran 2018 digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018. Buku tersebut dibagikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Dumai.

v. Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp. 304.674.900,- realisasi sebesar Rp. 297.613.896,- atau 97,68%. Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD sebesar 100% dengan capaian program jumlah skpd dalam pertemuan rekonsiliasi yang dilaksanakan sejumlah 36 SKPD.

Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dilaksanakan setiap bulannya kepada 36 SKPD yang ada di Kota Dumai. Kegiatan ini dimaksudkan mensikronkan antara realisasi belanja dan pendapatan baik manual maupun by system sehingga sesuai antara keduanya.

w. Kegiatan Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Barang Milik Daerah

Kegiatan penyusunan ketentuan-ketentuan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 63.788.713,- realisasi sebesar Rp. 63.788.713,- atau 100%. Kegiatan Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan capaian program tersusunnya draf Ranperda.

Kegiatan penyusunan ketentuan-ketentuan barang milik daerah menghasilkan draft rancangan peraturan daerah tentang ketentuan – ketentuan barang milik daerah

Badan Pendapatan Daerah

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Pendapatan Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.72 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian (Dalam %)
1.	Ratio Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi	0,48%	32,20%	
2.	Ratio Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	18,68%	18,68%	100%

Adapun realisasi pelaksanaan program Urusan Wajib dan kegiatan ada tahun 2017 disampaikan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Kegiatan Pemeliharaan SIMPATDA.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 559.223.000,- dan direalisasikan sebesar Rp 556.701.644,- atau 99,55%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya pelaksanaan pelayanan dan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 100% artinya terwujudnya peningkatan pelayanan dan sistem prosedur administrasi pajak dan retribusi yang cepat, tepat dan akurat.

b) Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 375.254.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 322.298.723,- atau 85,89%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya sosialisasi melalui elektronik, media massa dan layanan berupa spanduk dan cetak sebanyak 3 (tiga) media.Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 100% artinya terwujudnya kesadaran wajib pajak daerah.

c) Kegiatan Monitoring penyampaian SPPT PBB.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 526.613.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 426.666.999,- atau 81,02%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya monitoring penyampaian SPPT PBB pada 7 kecamatan. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 100% artinya tercapainya target jumlah SPPT PBB yang dapat disampaikan pada 7 kecamatan.

d) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 108.891.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 104.517.000,- atau 95,98%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksanamya monitoring dan pendapatan daerah sebanyak 4 kali. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 100% artinya tersedianya laporan penerimaan pendapatan daerah Kota Dumai sebanyak 4 laporan.

e) Kegiatan Penagihan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 313.085.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 76.258.650,- atau 24,36%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 126,50% artinya terpenuhinya target terlaksananya Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang ditagih sebanyak 253 surat teguran yang disampaikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi dari target semula sebanyak 200 surat teguran. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 82,50% artinya meningkatnya penagihan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 66% dari target yang hendak dicapai sebesar 80%.

f) Kegiatan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 316.643.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 291.988.067,- atau 92,21%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 611,33 % artinya terpenuhinya target terlaksananya jumlah Wajib Pajak dan Retribusi yang didata sebanyak 18.340 WP/WR dari target awal sebanyak 3.000 WP/WR. Nilai capaian untuk indikator kineja hasil (outcome) sebanyak 611,33% artinya terlaksananya pendataan pajak daerah sebanyak 18.340 WP/WR dari target awal sebanyak 3.000 WP/WR.

g) Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 167.420.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 155.185.931,- atau 92,69%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya rekonsiliasi perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 4 Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2017. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 100% artinya tercapainya kecocokan data dengan unit terkait sebanyak 4 laporan sesuai dengan yang ditargetkan.

h) **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.**

Nilai capaian indikator kinerja keluaran 0,00%. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017, kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp 207.258.600,-. Namu kegiatan ini tidak dilaksanakan karena pendidikan dan pelatihan formal untuk aparatur sudah terdapat pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, sehingga APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah ditiadakan.

i) **Kegiatan Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak / Retribusi Daerah.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 158.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 128.801.210,- atau 81,16%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 103,33% artinya terpenuhinya target peningkatan keberatan pajak/retribusi daerah sebanyak 31 berkas. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 103,33% artinya tewujudnya efektivitas pelayanan pertimbangan keberatan pajak/retribusi daerah sebanyak 31 berkas.

j) **Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan PBB.**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 144.341.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 72.481.300,- atau 50,22%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) kepada masyarakat Kota Dumai pada 7 kecamatan. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 100% artinya meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB P2 pada 7 kecamatan.

k) **Kegiatan Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 515.554.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 507.803.125,- atau 98,50%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terpeliharanya aplikasi SISMIOP dan SIG selama 12 bulan. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 100% artinya meningkatnya pelayanan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

l) **Kegiatan Penyusunan Basis Data OP PBB - P2.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 436.781.113,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 244.545.156,- atau 55,99%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya Database PBB P2 yang valid sebanyak 2 paket yaitu updating basis data PBB P2 pada Kelurahan

Jayamukti dan Kelurahan Tanjung Palas. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar100% artinya terwujudnya basis data PBB P2yang akuntabel pada 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Jayamukti dan Kelurahan Tanjung Palas.

m) Kegiatan Verifikasi Penetapan Pajak.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 206.350.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 202.361.065,- atau 98,07%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya Data Hasil Verifikasi Penetapan Pajak reklame sebanyak 523 WP dari target awal sebanyak 500 WP. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 84,10% artinya meningkatnya penerimaan PAD dari sektor pajak reklame sebesar 8,41% dari target awal 10%.

n) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek PAjak

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 82.335.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 202.361.065,- atau 98,07%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya Data Hasil Verifikasi Penetapan Pajak reklame sebanyak 523 WP dari target awal sebanyak 500 WP. Nilai capaian untuk indikator kinerja hasil (outcome) sebesar 84,10% artinya meningkatnya penerimaan PAD dari sektor pajak reklame sebesar 8,41% dari target awal 10%.

o) Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 455.120.500,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 232.903.314,- atau 51,17%. Adapun nilai nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya Pemeriksaan Wajib Pajak sebanyak 2 kali pemeriksaan.

p) Kegiatan Validasi Data Piutang PBB P2.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 101.700.000,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 85.075.000,- atau 83,65%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya data piutang PBB P2 yang valid pada 7 kecamatan

q) Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 169.990.000,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 125.282.324,- atau 73,70%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebanyak 5 Perda.

r) Kegiatan Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 101.755.400,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 65.101.000,- atau

63,98%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebanyak 5 Perda.

s) **Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar.**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 503.437.000,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 398.545.500,- atau 79,16%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 110% artinya terpenuhinya target terlaksananya penilaian khusus objek pajak non standar sebanyak 22 Objek Pajak.

t) **Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini Rp 110.090.000,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 103.190.000,- atau 93,73%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan target terpenuhinya sarana promosi dan informasi sebanyak 1 paket, yaitu: Cetak Dumai Expo Tahun 2017, Baleho Dumai Expo Tahun 2017, dan Stand Dumai Expo Tahun 2017.

u) **Kegiatan Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 222.349.800,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 152.827.106,- atau 68,73%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 pada 4 kelurahan.

v) **Kegiatan Verifikasi Penetapan Retribusi Daerah**

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 53.300.000,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 25.890.000,- atau 48,57%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 23% artinya tersedianya hasil verifikasi penetapan retribusi izin gangguan sebanyak 115 WR.

w) **Kegiatan Penerapan Sistem Online Pembayaran Pajak Daerah**

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 205.300.700,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 200.430.700,- atau 97,63%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya sistem online pembayaran pajak hotel sebanyak 1 paket

x) **Kegiatan Penyusunan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah**

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 38.655.000,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 36.405.000,- atau 94,18%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target dokumen prediksi pendapatan sebanyak 2 dokumen.

y) **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang PBB P2**

dialokasikan anggaran sebesar Rp 78.521.400,- dari anggaran yang telah dialokasikan dapat

direalisasikan sebesar Rp 77.415.800,- atau 98,59%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 73,85% artinya petugas yang mendapatkan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang PBB P2 sebanyak 48 orang

24. URUSAN KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai atau Revisi RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.73. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran	Target akhir 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian (dalam %)
Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar	85%	97.47%	114.67
Persentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	85%	85%	100
Persentase pelanggaran disiplin	0.3%	0%	0
Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja	360 orang	374 orang	103.89
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	50%	0%	0%
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32 orang	21 orang	65.63

1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar sebesar 97.47%
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi sebesar 85%, diuraikan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur di kegiatan Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengeloaan (LHKPASN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, target tahun 2017 sebanyak 80 orang dan realisasi tahun 2017 berjumlah 92 orang yaitu wajib LHKPN dan LHKASN yang mengumpulkan LHKPN dan LHKASN.
3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase pelanggaran disiplin dengan target sebesar 0.3%. Realisasi kinerja untuk indikator ini 0% dikarenakan tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran dari Pemerintah Kota Dumai sehingga berimbas dengan pengurangan beberapa kegiatan.
4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja sebanyak 374 orang, diuraikan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada kegiatan : Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi, target tahun 2017 sebanyak 400 orang dan realisasi tahun 2017 sebanyak 286 orang yaitu jumlah PNS penerima satya lencana karya satya; Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas target tahun 2017 sebanyak 7 orang dan realisasi tahun 2017 sebanyak 7 orang yaitu jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan bantuan tugas belajar; Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah target tahun 2017 sebanyak 94 orang dan realisasi tahun 2017 sebanyak 81 orang yaitu jumlah CPNS Kota Dumai yang mengikuti diklat prajabatan

5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal tidak ditetapkan target kinerjanya karena untuk kegiatan yang menunjang kinerja ini tidak di rencanakan pada rencana strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai.
6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan target sebesar 50%. Realisasi kinerja untuk indikator ini 0% dikarenakan tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran dari Pemerintah Kota Dumai sehingga berimbas dengan pengurangan beberapa kegiatan.
7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dengan target sebanyak 32 orang. Realisasi kinerja untuk indikator ini sebanyak 21 orang yang telah dilakukan pengukuhan pada tahun 2017. Jabatan yang lowong sebanyak 11 jabatan yang telah dilakukan seleksi secara terbuka untuk jabatan yang lowong tersebut tetapi belum dilakukan pengukuhan. Kegiatan yang menunjang kinerja ini adalah Asessment Center Pemerintah Kota Dumai target tahun 2017 sebesar 100% dan realisasi tahun 2017 sebesar 100% yaitu terpenuhinya jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Dumai dan jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan jumlah sebanyak 21 orang.

Tahun 2017, jumlah anggaran untuk 5 (lima) program yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai adalah sebesar Rp. 5.270.536.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.998.873.770,- atau 94.85%. Program ini direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.677.119.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.445.555.800,- atau 93.70% yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Penempatan PNS

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 119.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 116.780.000,- atau 98.13%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase penempatan PNS sesuai formasi jabatan dan kompetensi sebesar 80% dengan tingkat capaian sebesar 100%;

b. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 251.874.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 250.805.000,- atau 99.58%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS yang naik pangkat sebanyak 700 orang dengan tingkat capaian sebesar 89.86%. Pada periode April 2017 jumlah PNS Kota Dumai yang mengajukan kenaikan pangkat sebanyak 365 orang, proses pemeriksaan berkas terdapat 6 orang PNS yang tidak memenuhi syarat sehingga jumlah PNS yang memperoleh SK Kenaikan Pangkat sebanyak 359 orang. Sedangkan untuk periode Oktober 2017 jumlah PNS yang mengajukan kenaikan pangkat sebanyak 270 orang dan jumlah PNS yang memperoleh SK Kenaikan Pangkat sebanyak 270 orang.

Sehingga jumlah keseluruhan PNS Kota Dumai yang memperoleh SK Kenaikan Pangkat tahun 2017 sebanyak 629 orang. Permasalahan pada saat proses kenaikan pangkat yang mengakibatkan berkas kenaikan pangkat tidak memenuhi syarat seperti pangkat/golongan PNS yang bersangkutan melebihi pangkat/golongan atasan langsung dan penilaian angka kredit yang tidak sesuai dengan peraturan jabatan fungsional yang dimaksud

c. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 316.400.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 314.402.000,- atau 99.37%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah data/informasi kepegawaian daerah sebanyak 29 SKPD dengan tingkat capaian sebesar 100%;

d. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 38.945.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 36.013.000,- atau 92.47%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS penerima satya lencana karya satya sebanyak 400 orang dengan tingkat capaian sebesar 71.50%. Penerima satya lencana karya satya tahun 2017 sebanyak 286 orang dengan rincian masa kerja 10 tahun sebanyak 231 orang, 20 tahun sebanyak 19 orang, 30 tahun sebanyak 36 orang. Permintaa data PNS yang akan menerima satya lencana karya satya dilakukan satu tahun sebelumnya tetapi kendala yang ditemui masih adanya beberapa SKPD yang tidak mengantar atau terlambat mengirimkan berkas sehingga jumlah penerima penghargaan diluar target yang telah ditetapkan;

e. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 369.700.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 357.097.000,- atau 96.59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan bantuan tugas belajar sebanyak 7 orang dengan tingkat capaian sebesar 100%;

f. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dukumen dan Arsip Kepegawaian

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 172.800.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 170.840.000,- atau 98.87%. Adapun adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dan tertatanya arsip data PNS Kota Dumai sebesar 75% dengan tingkat capaian sebesar 100%;

g. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 950.200.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 938.298.000,- atau 98.75%. Adapun adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah CPNS Kota Dumai yang mengikuti Diklat Prajabatan sebanyak 94 orang dengan tingkat capaian sebesar 86.17%. Diklat prajabatan bagi CPNS Kota Dumai diadakan di Provinsi Sumatera Utara sehingga Pemerintah Kota Dumai mengirimkan peserta untuk kegiatan tersebut dengan jumlah sebanyak 81 orang. Hal ini dikarenkan adanya CPNS yang telah beralih status kepegawaiannya ke Provinsi Riau dan baru melahirkan sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti diklat prajabatan;

h. Assessment Center Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 1.420.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.226.920.800,- atau 86.40%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Dumai dan terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah Kota Dumai sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%;

i. Peringatan Hari KORPRI

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 38.200.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 34.400.000 atau 90.05%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS yang mengikuti peringatan hari KORPRI sebanyak 2000 orang dengan tingkat capaian sebesar 100%



BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2017

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN 2017

Sesuai dengan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/ Kota atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/ Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pemberian tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Dumai hanya menerima tugas pembantuan 1 (satu) OPD yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Dumai.

Pada tahun 2017 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Dumai mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lingkup Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Tugas pembantuan dimaksud berasal dari Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Ketahanan Pangan. Adapun rincian Program dan kegiatan tugas pembantuan dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura

Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Propinsi Riau, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Tahun 2017 Nomor SP-DIPA-018.04.4.099315/2017 revisi keempat tanggal 28 Januari 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 050/SK/DIS-TPH-BUN/556 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran APBN Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017. Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabe Merah dan Sayuran Dataran Rendah Tahun Anggaran 2017.Tugas pembantuan ini terdiri dari 1 program yakni ; Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan alokasi anggaran Rp. 951.040.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.923.840.000,- atau 97,14%.

B. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Propinsi Riau, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun 2017 Nomor SP-DIPA-018.04.3.099314/2016 tanggal 07 Desember 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 050/SK/DIS-TPH-BUN/555 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran APBN Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun Anggaran 2017.Tugas pembantuan ini terdiri dari 1 program yakni Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 402.840.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.398.975.713,- atau 99,04%.

C. Tugas Pembantuan Dari Badan Ketahanan Pangan

Tugas pembantuan ini dengan Nomor : SP-DIPA-018.11.3.099426/2016 tanggal 07 Desember 2016, merupakan dana tugas pembantuan yang dititipkan melalui kegiatan dekosentrasi Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau yang kegiatannya dialokasikan untuk Kota Dumai sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau Nomor : OT.210/01/SATKER-BKPR/2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penunjukan/ Penetapan Pelaksana Anggaran/Kegiatan Dekonsentrasi Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau di Kota Dumai. Tugas pembantuan ini terdiri dari 1 program yakni ; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 147.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 135.034.200,- atau 91,86% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 127.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 115.034.200,- Atau 90,58% dari anggaran. Adapun indikaton kinerja keluaran yaitu ; (1) Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dengan target 4 Desa/Kelompok dan realisasi 4 Desa/Kelompok.

b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- Atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikaton kinerja keluaran yaitu ; (1) Dukungan manajemen dan administrasi dengan target 12 bulan layanan dan realisasi 12 bulan layanan.



BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2017

BAB VI
PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2017

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah :

a) SMA Negeri 1 Padang Panjang

b) Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD)

c) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

2. Dasar Hukum

a) Nota Kesepahaman antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang Nomor : 421.3/2011/268 Tanggal 05 April 2011.

b) Nota antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) Nomor : 40/KLH/2014 Tanggal 17 Desember 2014.

c) Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai Nomor : HK.05.01/II/1005/2016 dan Nomor 5/DINKES/2016 Tanggal 05 April 2016

3. Bidang Kerjasama

a) Bidang Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah menjalin kemitraan dalam bentuk Sister School.

b) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi

Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah pelaksanaan program penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+).

c) Bidang Kejrasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah pelaksanaan pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat.

4. Nama Kegiatan

a) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah :

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kreativitas Siswa
- Pengembangan Aktivitas dan Kreativitas Siswa
- Pengembangan Muatan Lokal
- Pertukaran Siswa
- Pertukaran Guru

b) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah :

- Persiapan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi Program REDD+ oleh para pihak di Provinsi Riau.
- Integrasi strategi daerah REDD+ oleh para pihak di Provinsi Riau.
- Pengembangan dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan ditingkat daerah yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau.
- Pengembangan berbagai program dan kegiatan strategis untuk implementasi REDD+ secara penuh termasuk dalam rangka penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau.
- Perubahan paradigma dan budaya kerja diseluruh elemen pemangku kepentingan terkait yang dibutuhkan untuk menyukseskan REDD+ di Provinsi Riau.
- Pelibatan para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan REDD+.
- Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (terutama lahan gambut)

c) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah :

- Memfasilitasi Pihak kedua dalam pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat sampai dengan penyampaian hasil seleksi kepada Pihak Kedua.
- Melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan NIP oleh Kepala Badan kepegawaian Negara dilakukan secara bersama-sama para pihak; dan.
- melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan
- menyampaikan usulan rincian kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat kepada Menpan dan rb dan Kepala BKN
- melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan Nomir Induk Pegawai oleh Kepala BKN dilakukan secara bersama-sama
- menetapkan kelulusan dan mengumumkan kelulusan dengan SK Gubernur/Walikota berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh Pihak Kesatu
- menetapkan keputusan pengangkatan sebagai CPNS di Lingkungan Pemko Dumai
- menempatkan dan mendayagunakan CPNS di Lingkungan Pemko Dumai sesuai dengan penetapan kebutuhan

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

a) Dinas Pendidikan Kota Dumai

b) Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai

c) Dinas Kesehatan Kota Dumai

6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

6.1 Dinas Pendidikan Kota Dumai

Upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Dumai dibantu oleh 62 personel. Dengan kualifikasi pendidikan, S-2 sebanyak 6 orang, S-1 sebanyak 40 orang, D-III sebanyak 2 orang, D-II sebanyak 3 orang , SMA sebanyak 10 orang, dan SMP sebanyak 1 orang. Komposisi PNS menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.1.

Tabel. 6.1. Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	17
4.	Penata Tk.I	III/d	4
5.	Penata	III/c	8
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	10
7.	Penata Muda	III/a	8
8.	Pengatur Tk.I	II/d	3
9.	Pengatur	II/c	8
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
Jumlah			**62**

6.2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebanyak 19 orang. Dari jumlah Pegawai diatas sebanyak 1 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 13 orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 orang berpendidikan D3, dan 3 orang SMU serta 1 orang SD.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.2 Dibawah ini:

Tabel 6.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina	IV/A	1
2.	Penata Tingkat I	III/D	3
3.	Penata	III/C	2
4.	Penata Muda Tingkat I	III/B	4
5.	Penata Muda	III/A	5
6.	Pengatur TK.I	II/D	0
7.	Pengatur	II/C	2
8.	Juru	I/C	2
9.	Juru Muda Tk.I	I/B	0
JUMLAH			19

6.3 Dinas Kesehatan Kota Dumai

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan termasuk puskesmas adalah sebanyak 448 orang. Dari 448 orang pegawai tersebut, sebagian besar pegawai, yaitu 349 orang adalah tenaga fungsional, 58 orang sebagai tenaga umum, dan 41 orang memegang jabatan struktural.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.3 Dibawah ini:

Tabel 6.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Pada Tahun 2017

No.	Uraian unit kerja	Golongan				
		I	II	III	IV	Total
1.	Dinas Kesehatan Kota Dumai	0	15	45	9	69
2.	Puskesmas Dumai Kota	0	5	39	2	46
3.	Puskesmas Dumai Barat	0	18	32	1	51
4.	Puskesmas Bukit Kapur	0	10	32		42
5.	Puskesmas Sungai Sembilan	0	21	25	1	47
6.	Puskesmas Medang Kampai	0	14	24		38
7.	Puskesmas Bukit Timah	0	7	21	1	29
8.	Puskesmas Bumi Ayu	0	11	25		36
9.	Puskesmas Jaya Mukti	0	12	27	2	41
10.	Puskesmas Purnama	0	8	15	1	24
11	Puskesmas Bukit Kayu kapur	0	11	14		25
	TOTAL	**0**	**121**	**285**	**17**	**448**

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

   Tidak terdapat penggunaan dana APBD Tahun 2017 dalam Pelaksanaan Kerjasama dengan Daerah Lain

8. Jangka Waktu kerjasama

   8.1 Jangka Waktu Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan

   8.2 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah 5(lima) Tahun

   8.3 Jangka Waktu Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah 2(dua) Tahun

9. Hasil Kerjasama

   9.1 Hasil Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah untuk kemajuan bersama dalam bidang Pendidikan

   9.2 Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah persiapan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi program REDD+ di Provinsi Riau

   9.3 Hasil Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah pengadan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk kebutuhan Jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat

10. Permasalahan dan Solusi

    Pada umumnya tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Kerjasama yang telah dilaksanakan, sehingga kerjasama yang terjalin dapat berjalan sebagaimana semestinya

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah :

a) Abadi Megah Promosindo
b) PT. Inti Griya Prima Sakti
c) PT. Sari Dumai sejati
d) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai
e) PT. Pelindo (Persero)
f) PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelindo
g) PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera
h) PT. Batam Bahari Sejahtera
i) PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari
j) SMP Darma Yudha Pekanbaru
k) PT. (Persero) PELINDO I Dumai
l) PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero)
m) PT. Pembangunan Dumai
n) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai
o) Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
p) PT. Mayatama Solusindo
q) Kepolisian Resor Dumai
r) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau
s) Badan Informasi Geospasial
t) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau
u) Perum Bulog Divisi Regional Dumai

2. Dasar Hukum

a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo tentang Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur Nomor. 03/Parbudpora/2007 tanggal 30 Maret 2007.
b) File Memorandum of Understanding (MOU) PT. Inti Griya Prima Sakti dengan Pemerintah Kota Dumai tentang Pembangunan Plasa Dumai Nomor 570/Disperindagkopin/2007/253 dan Nomor 12/IGPS-SMG/DM/IV07 tanggal 4 April 2007
c) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai Sejati Nomor 570/Disperindagkopin/2007/786 dan Nomor 035/SDS/VIII/EXT/07 tanggal 3 Agustus 2007

d) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai tentang Pengembangan kurikulum lalu lintas pada satuan pendidikan TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, dan SMA / MA / SMK Nomor 18/Disdik/2008 dan No. Pol B/979/XI/2008/Polresta Dumai tanggal 10 November 2008

e) Nota Kesapahaman (MoU) Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tentang Kerjasama Jasa Kepelabuhanan di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai Nomor US.13/3/7/PI-09 dan Nomor 11/Dishub/2009 Tanggal 20 Agustus 2009

f) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pembagian Jasa Labuh di Terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai Nomor 19/Dishub/2009, Nomor 015/I 10100/2009-SO, Nomor US.12/4/17/PI-09 Tanggal 24 November 2009

g) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera tentang Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional Tanggal 10 Mei 2011

h) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011

i) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011

j) Nota Kesepahaman antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru tentang Kemitraan Antar Sekolah Nomor 421.3/SMPN2/2011/016 dan Nomor 115/SMP-DY/MOU/2011/001 tanggal 19 Januari 2011

k) MoU antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai nomor 379/PEMB/III/2002 dan US.11/1/5/P.I-2002

l) Perjanjian Kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 0267 / DMI / 2014 dan nomor : 29 / Dishub / 2014

m) Perjanjian pengelolaan pantai marina teluk makmur antar Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai Nomor : 281/DISBUDPARPORA/2015 dan Nomor : 117/PDM-DMI/VII/2015-112

n) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai Nomor : 8/Bapenda/2017 dan Nomor : 01.1 PJ/AGA.01.01/ADUM/2017

o) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor : 14/Dishub/2017

p) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo Nomor : 27/DPMPTSP/2017 dan Nomor : MY/PKS/1017001

q) Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resor Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai Nomor : 13/1449/X/17 dan Nomor : 25/HK-HAM/2017

r) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Nomor : 21/Bappeda/2017 dan Nomor : MoU-7/PW04/3/2017

s) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial Nomor : 28/Bappeda/2017 dan Nomor : B-3.4/SESMA/PK/11/2017

t) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Nomor : 2/Inspektorat/2017 dan Nomor : MoU-1/PW04/3/2017

u) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai Nomor : 10/Dinsos/2017 dan Nomor : 002/Bulog/2017

3. Bidang Kerjasama

a) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah dibidang Pariwisata

b) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah dibidang Jasa Kontruksi

c) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah dibidang Infrastruktur

d) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah dibidang tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum di bidang lalu lintas

e) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa Kepelabuhanan Diwilayah Perairan Kota Dumai)

f) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa labuh di terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai)

g) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional)

h) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang)

i) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang)

j) Bidang Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah dibidang Pendidikan

k) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah Pengelolaan Pas Pelabuhan Dumai

l) Bidang kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Penempatan dan penggunaan X-Ray Scanner pada Bandar Udara Pinang Kampai Dumai

m) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembanguan Dumai adalah pengelolaan pantai marina teluk makmur

n) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum (PJU) Pemerintah Kota

o) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah pengalihan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara Pinang Kampai Dumai

p) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah kerjasama pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan tiang tumpu fiber optik di Wilayah Kota Dumai

q) Bidang Kerjasama antara Kepolisian Resor Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai adalah penelusuran dan pembinaan siswa/i yang berprestasi dalam penerimaan calon anggota Polri

r) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah asistensi manajemen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Dumai

s) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Dumai

t) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah pengembangan manajemen Pemerintah Daerah

u) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah penyaluran beras sejahtera (rastra) untuk keluarga penerima manfaat secara gratis Kota Dumai TA. 2017

4. Nama Kegiatan

a) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur

b) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah Pembangunan Gedung Plasa Dumai

c) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah Pembangunan Peningkatan ruas jalan Purnama-Lubuk Gaung sepanjang lebih Kurang 10,2 km, lebar 6 meter, bahu kiri kanan jalan 0,5 meter dengan muatan sumbu terbesar 8 ton kelas jalan III A serta melakukan perawatan dan perbaikan jalan tersebut diatas

d) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah :

- Pelatihan/Sosialisasi terhadap para tenaga pendidik yang ditunjuk di seluruh Wilayah Kota Dumai
- Sosialisasi pembinaan materi pendidikan tertib lalu lintas pada satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
- Penganggaran pengadaan kebutuhan/bahan ajar dan sarana fasilitas pada tiap-tiap Sekolah berkaitan dalam pemberian materi tertib lalu lintas

e) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Penunjang lainnya di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai antara lain : Jasa Pergudangan, Bisnis Logistik, Distribution Centre dan lainnya serta pengembangan Pelayanan Jasa Terminal Penumpang dan Ro-Ro di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai

f) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Pembagian dari hasil Jasa Labuh

g) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan

h) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang

i) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang

j) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah :

- Pertukaran informasi tentang kurikulum, kebijakan dan kegiatan Sekolah
- Guru saling bertukar sumber dan strategi pengajaran
- Siswa dibawah pengawasan guru, saling bertukar tugas sekolah, surat, email, foto, informasi tentang kegiatan Sekolah, olah raga dan kegiatan ekstra
- Pertukaran bahan dan materi pelajaran oleh Guru dan Siswa
- Mempromosikan hubungan kerjasama ini di Media Lokal

k) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalahPengelolaan Pas Pelabuhan Dumai

l) Kegiatan yang dilaksanakan antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah pemasangan dan penempatan X-Ray Scanner di Bandar Udara

m) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembanguan Dumai adalah bahwa pihak pertama yakni Pemerintah Kota Dumai memiliki aset berupa Pantai Marina Teluk Makmur yang terletak di Kecamatan medang Kampai Kelurahan Teluk Makmur, dalam melaksanakan dan mendukung program pariwisata Kota Dumai, Pihak pertama membutuhkan bantuan Pihak kedua yakni PT. Pembanguan Dumai berupa pengelolaan Pantai marina berdasarkan sura no. 102.01/PDM-DMI/V/2015-073 periha permohonan izin untuk mengelola Pantai Puak Marina Bahari

n) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah mekanisme pembayaran rekening listrik pihak Pemerintah Kota dan PPJ, Penertiban PJU-Swadaya, Meterisasi PJU dan pembangunan dan pemeliharaan PJU

o) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu : 1. bidang teknis dan operasi, 2. bidang SDM dan 3. bidang aset dan keuangan

p) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki, mengunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif untuk menyelesaikan setiap hambatan serta

membentuk tim kerja untuk mempersiapkan data dan informasi serta mengusulkan langkah dalam rangka percepatan pengembangan infrastruktur dan pemanffatan tiang tumpu fiber optik di Wilayah Kota Dumai

q) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Kepolisian Resor Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai adalah tukar menukar informasi tentang penerimaan anggota Polri baik Taruna/i, Brigadir maupun Tantama Polri, melakukan penelusuran dan penyediaan putra/i yang memenuhi kriteria sebagai putra/putri Dumai yang berprestasi bagi calon anggota Polri

r) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah Asistensi manajemen perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemko Dumai dan penggunaan aplikasi Simda perencanaan

s) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Dumai

t) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah pemberian asistensi atas pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah

u) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah penyaluran beras untuk keluarga penerima manfaat beras sejahtera secara gratis tahun 2017

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

5.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

5.2 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

5.3 Dinas Perhubungan Kota Dumai

5.4 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

5.5 Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai

5.6 Dinas Sosial Kota Dumai

5.7 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

5.8 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Dumai

5.9 Bappeda Kota Dumai

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

6.1 Dinas Pendidikan Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Dumai dibantu oleh 62 personel. Dengan kualifikasi pendidikan, S-2 sebanyak 6 orang, S-1 sebanyak 40 orang, D-III sebanyak 2 orang, D-II sebanyak 3 orang , SMA sebanyak 10 orang, dan SMP sebanyak 1 orang. Komposisi PNS menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.4.

Tabel. 6.4
Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	17
4.	Penata Tk.I	III/d	4
5.	Penata	III/c	8
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	10
7.	Penata Muda	III/a	8
8.	Pengatur Tk.I	II/d	3
9.	Pengatur	II/c	8
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
Jumlah			62

6.2 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai dibantu oleh 38 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 1 orang (S2), 17 orang (S1), DIII 8 orang, dan SMA sebanyak 8 orang.

Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 68 dibawah ini :

Tabel 6.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan
Pada Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	3
2.	Pembina	IV/A	1
3.	Penata Tingkat I	III/D	2
4.	Penata	III/C	8
5.	Penata Muda Tingkat I	III/B	6
6.	Penata Muda	III/A	5
7.	Pengatur Tk.I	II/D	5
8.	Pengatur	II/C	3
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	0
10.	Pengatur Muda	II/A	1
JUMLAH			38

6.3 Dinas Perhubungan Kota Dumai

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah sebanyak 112 orang. Dari jumlah pegawai tersebut diatas sebanyak 8 orang berpendidikan S2/pasca sarjana, S1/sarjana sebanyak 30 orang, D3 sebanyak 12 orang, D2 sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 59 orang, SLTP 1 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.6 Dibawah ini:

Tabel. 6.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	10
4.	Penata	III/c	12
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	18
6.	Penata Muda	III/a	12
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	14
8.	Pengatur	II/c	11
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	27
10.	Pengatur Muda	II/a	3
11.	Juru Muda Tingkat I	I/d	1
JUMLAH		-	112

6.4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai dibantu oleh 8 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 1 (satu) orang (S3), 1 (satu) orang S2 dan 6 (lima) orang (S1).

Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.7 dibawah ini:

Tabel 6.7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Penata Tingkat I	III/D	2
2.	Penata	III/C	2
3.	Penata Muda Tingkat I	III/B	3
4.	Penata Muda	III/A	1
JUMLAH		-	8

6.5 Bagian Adm. Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai

Jumlah Pegawai pada Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 8 orang. Dari jumlah Pegawai diatas sebanyak 3 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 3 orang berpendidikan Sarjana (S1), 2 orang berpendidikan SMU.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 71 dibawah ini:

Tabel 6.8. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Bagian Adm. Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2.	Pembina	IV/A	1
3.	Penata Tingkat I	III/D	1
4.	Penata	III/C	1
5.	Penata Muda Tingkat I	III/B	1
6.	Penata Muda	III/A	1
7.	Pengatur	II/C	1
8.	Pengatur Muda	II/A	1
JUMLAH		-	8

6.6 Dinas Sosial Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Dumai dibantu oleh 18 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 1 orang (S2), 9 orang (S1), DIII 1 orang, dan SMA sebanyak 7 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.9 Dibawah ini:

Tabel 6.9. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Sosial Kota Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jlh (orang)
1.	Pembina Tk.I	IV/B	2
2.	Pembina	IV/A	2
3.	Penata Tingkat I	III/D	5
4.	Penata	III/C	2
5.	Penata Muda Tk.I	III/B	3
6.	Pengatur Tk.I	II/D	1
7.	Pengatur	II/C	2
8.	Pengatur Muda	II/A	1
JUMLAH		-	18

6.7 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Jumlah Karyawan/Pegawai pada Badan Pendapatan Kota Dumai adalah sebanyak 85 orang yang terdiri dari PNS. dengan 8 orang berpendidikan S(2), S1 sebanyak 27 orang, D3 sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 42 orang dan SLTP sebanyak 2 orang serta 1 orang SD.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.10. Dibawah ini:

Tabel 6.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Badan Pendapatan Kota Dumai

No	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)	Ket
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	PNS
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1	PNS
3.	Pembina	IV/a	4	PNS
4.	Penata Tingkat I	III/d	7	PNS
5.	Penata	III/c	10	PNS
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	12	PNS
7.	Penata Muda	III/a	10	PNS
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	7	PNS
9.	Pengatur	II/c	19	PNS

No	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)	Ket
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	11	PNS
11.	Pengatur Muda	II/a	4	PNS
12.	Juru Tk. I	I/d	0	PNS
13	Juru Muda Tk.I	I/c	2	PNS
14..	Juru Muda	I/a	0	PNS
JUMLAH			88	PNS

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tidak terdapat penggunaan dana APBD Tahun 2017 dalam Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

8. Jangka Waktu kerjasama

a. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah selama 20 (dua puluh) tahun.

b. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pembangunan Plasa Dumai selesai dan diresmikan.

c. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah terhitung sejak tanggal penandatangan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak serta mengacu pada aturan hukum yang berlaku

e. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak

f. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak

g. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak

h. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak

i. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak

j. Jangka Waktu Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah tidak terbatas

k. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah berlaku sampai adanya kesepakatan lain yang disetujui oleh kedua pihak

l. Jangka Waktu Kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah selama 3 (tiga) Tahun

m. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembanguan Dumai adalah selama 5(lima) Tahun

n. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah selama 5(lima) Tahun

o. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah berlaku sepanjang pelayanan navigasi penerbangan masih dilaksanakan

p. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah selama 5(lima) Tahun

q. Jangka Waktu Kerjasama antara Kepolisian Resor Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai adalah selama 1(satu) Tahun

r. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah selama 3(tiga) Tahun

s. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah selama 5(lima) Tahun

t. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah selama 3(tiga) Tahun

u. Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah selama 1(satu) Tahun

9. Hasil (Output) dari Kerjasama

a. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah Sarana dan Prasarana Objek Wisata Bunga Tujuh

b. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah : Tersedianya pusat perbelanjaan yang representatif bagi masyarakat Kota Dumai Diperolehnya kompensasi/royalti sebagai Pendapatan Daerah Kota Dumai sebesar US$ 6.000,- (enam ribu dolar Amerika) per Tahun selama jangka waktu kejasama. Pada akhir masa kerjasama seluruh bangunan Plasa Dumai beserta fasilitas pendukung lainnya menjadi milik Pemerintah Kota Dumai

c. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Sari Dumai sejati adalah Tersedianya jalan dengan kondisi yang baik yang dapat dimanfaatkan/dipergunakan oleg masyarakat

d. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah adanya pemahaman dan pengetahuan Perundang-undangan lalu lintas dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada Siswa/siswi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
e. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Meningkatkan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Wilayah Kota Dumai
f. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Wilayah Perairan
g. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Peningkatan PAD dari Jasa Pelabuhan (Dermaga)
h. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Peningkatan PAD dari Jasa Kepelabuhanan (Dermaga)
i. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Peningkatan PAD dari Jasa Kepelabuhanan (Dermaga)
j. Hasil Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah Memberikan Kesempatan kepada Guru untuk saling bertukar materi informasi tentang metode dan prakteknya dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan secara umum, memperluas kesempatan untuk saling berhubungan dengan berinteraksi dengan warga Sekolah, Pertukaran Guru dan Siswa.
k. Hasil kerjasama antara PT. (Persero) PELINDO I Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Kontribusi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pelabuhan PT. Pelindo
l. Hasil kerjasama antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kota Dumai adalah pemasangan X-Ray Scanner di bandar Udara Pinang Kampai Dumai
m. Hasil Kerjasama antara Pemerintah kota Dumai dengan PT. Pembanguan Dumai adalah pinjam pakai aset dan pengelolaan Pantai Marina
n. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah Kelancaran penerimaan PAD berasal dari PPJ dan pelunasan pembayaran rekening listrik serta pengawasan dan penertiban PJU-Swadaya
o. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah Pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang sbb: 1. bidang teknis dan operasi, 2. bidang SDM, 3. Bidang Aset dan Keuangan

p. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah 1. Pengembangan, penataan, penyediaan infrastruktur, dan pemanfaatan untuk distribusi penyiaran TV kabel dan internet di wilayah Kota Dumai, 2. Konsultasi teknik, keuangan dan administrasi, penyusunan studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, perizinan terkait, sosialisasi dan hal-hal lain

q. Hasil Kerjasama antara Kepolisian Resor Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Tukar menukar informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelusuran, pembinaan dan pelatihan jalur putra/putri berprestasi dalam rekruitmen calon anggota Polri, Penelusuran dan penyediaan SDM yang memenuhi kriteria putra/putri berprestasi bagi calon anggota Polri

r. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah Asistensi Manajemen perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemko Dumai dan penggunaan Aplikasi Simda perencanaan apabila diperlukan

s. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah Penyelenggaraan data dan informasi geospasial, Pengembangan data dan informasi geospasial, Pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di Kota Dumai

t. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah Pemberian asistensi atas pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah

u. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perum Bulog Divisi Regional Dumai adalah Tersalurnya Raskin untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima manfaat Nasional gratis Kota dumai tahun Anggaran 2017

10. Permasalahan dan Solusi

Pada umumnya tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Kerjasama yang telah dilaksanakan, hanya saja terdapat beberapa MoU Kerjasama yang perlu ditinjau ulang kembali terutama pada Bidang Kerjasama Perhubungan Udara (Pinjam Pakai Bandar Udara Pinang Kampai). Dimana terdapat beberapa pasal/ayat pada perjanjian dimaksud sangan membebani Pemerintah Kota Dumai (seperti pembayaran PBB Bandara dibebani ke Pemerintah Kota Dumai) dan panjang Runway hanya 1.800 m x 30 m hanya bisa didarati pesawat F-100 dan sejenisnya secara terbatas. Selanjutnya Perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai tentang kegiatan sertifikasi tanah asset Pemerintah Kota Dumai dimana kurangnya persyaratan kelengkapan administrasi dikarenakan asal perolehan dari hibah masyarakat.

C. Kerjasama Dengan Luar Negeri

Untuk Tahun 2017 tidak terdapat pelaksanaan Kerjasama dengan Luar Negeri

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Komunikasi

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah maka Pemerintah Kota Dumai menjalin hubungan dan komunikasi melalui koordinasi yang dilakukan dengan Instansi-Instansi Vertikal yang ada maupun dengan aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah.

Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan secara rutin baik yang bersifat berkala maupun yang bersifat insidentil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dimana permasalahan tersebut membutuhkan penanganan secara integratif dari berbagai komponen yang ada. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan melalui Wadah atau Forum Komunikasi yang mana keberadaan Forum Komunikasi atau Wadah dimaksud diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan Unit Kerja atau Instansi yang tergabung atau harus diikutsertakan di dalam Forum Komunikasi tersebut.

Disamping melakukan koordinasi melalui Forum Komunikasi tersebut, melakukan koordinasi dan komunikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui kerjasama dari semua pihak kepada Instansi atau Aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah.

Adapun Forum Komunikasi yang keberadaannya diatur menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas antara lain meliputi ;

a. Forum MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah)
b. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

2. Materi Koordinasi

a. Forum MUSPIDA

Adapun materi yang dibahas didalam rapat Muspida antara lain menyangkut masalah pertahanan dan keamanan (meliputi pertahanan dan keamanan didarat, laut dan Udara), Kamtibmas, masalah tindak pidana, masalah ketertiban umum, penyakit masyarakat serta masalah sosial kemasyarakatan lainya yang dipandang dapat menimbulkan dampak negatif yang berskala luas yang pada gilirannya akan mengganggu ketenangan ditengah masyarakat serta menghambat dan mengganggu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah.

Disamping itu pada setiap pertemuan atau Rapat Muspida juga membahas tentang permasalahan-permasalahan yang bersifat aktual yang menjadi perhatian baik Pemerintah

Pusat, Propinsi ataupun Pemerintah Daerah sendiri, seperti kesiapan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan dalam rangka menyambut perayaan hari-hari besar agama, penyambutan tahun baru masehi, persiapan kunjungan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah Pusat lainnya, serta permasalahan sosial lainnya yang bersifat aktual dan mendesak.

b. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Komunitas Intelijen Daerah merupakan Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Dalam setiap pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh Kominda Kota Dumai memiliki agenda pertemuan antara lain ; menerima informasi (Informasi inteligen) dari seluruh anggota Kominda tentang setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya permasalahan yang dapat menimbulkan dampak negatif maupun keresahan ditengah masyarakat seperti masalah narkoba, penjualan minuman keras, kegiatan prostitusi terselubung, pelanggaran peraturan perundang-undangan serta berbagai masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, kemungkinan timbulnya gejolak sosial serta dampak sosial lainnya yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keamanan di Daerah yang dapat menghambat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, informasi yang diterima sebagaimana disebutkan diatas akan ditindaklanjuti melalui Unit Kerja terkait guna penyelesaian lebih lanjut. Pada prinsipnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominda Kota Dumai adalah bersifat preventif dalam arti berupaya mendeteksi secara dini timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas Daerah.

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

a. Forum MUSPIDA

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah diatur tentang instansi yang tergabung didalam unsur Muspida yaitu

- Pemerintah Daerah (dalam hal ini Walikota Dumai);
- Komando Distrik Militer (Kodim 0303 BKLS);
- Kepolisian Resort Kota ;
- Pengadilan Negeri; dan
- Kejaksaan Negeri.

Namun demikian, mengingat masih terdapatnya Instansi atau Unit Kerja lain yang dipandang memiliki kapasitas setingkat dengan unsur Muspida, maka Forum Komunikasi Muspida di Kota Dumai juga dengan mengikutsertakan Instansi atau Unit Kerja dimaksud. Adapun Instansi atau Unit Kerja setingkat Muspida tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan Muspida Plus Kota Dumai yaitu :

- Pimpinan DPRD Kota Dumai (dalam hal ini Ketua DPRD Kota Dumai);
- Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal Kota Dumai),
- Satuan Radar 232 Dumai (Dansatradar 232 Dumai);
- Detasemen Rudal 004 (Dan Den Rudal 004); dan
- Komandan Kompi Senapan A 132 Bagan Besar (Dan Kipan A 132)
- Sub Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat (Dan sub Den POM AD)

b. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah bahwa yang tergabung dalam unsur Kominda Kota Dumai adalah :

- Walikota Dumai beserta Unsur Muspida Kota Dumai (bertindak selaku Dewan Pembina Kominda) ;
- Wakil Walikota Dumai (Selaku Ketua Kominda) ;
- Unsur Kodim 0303 BKLS (Pasi Intel Kodim selaku Wakil Ketua I Kominda) ;
- Unsur Polresta Dumai (Kasat Intelkam Polresta selaku Wakil Ketua II Kominda) ;
- Pos Daerah/Posda Badan Intelijen Daerah ;
- Unsur Kejaksaan Negeri Dumai (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dumai) ;
- Unsur Imigrasi Kota Dumai ;
- Unsur Bea dan Cukai Kota Dumai ;
- Unsur Satuan Radar 232 (Kasi Intel Satradar 232 Dumai) ; dan
- Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut (Kasi Intel Lanal Dumai).

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka koordinasi melalui Forum Kominda telah dianggarkan dana yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun 2017 sebesar Rp. 537.950.000,-- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atau sebesar 97,51%

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai berjumlah sebanyak 10 orang dengan Kualifikasi pendidikan yang terdiri dari 2 orang S2, 3 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan D-III dan 4 orang berpendidikan SLTA Sederajat.

Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 6.11 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2.	Pembina	IV/A	1
3.	Penata Tingkat I	III/D	3
4.	Penata Muda Tk.I	III/B	1
5.	Pengatur Tingkat I	II/D	1
6.	Pengatur	II/C	3
JUMLAH		-	10

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui Forum Kominda selama Tahun 2017 sebanyak 10 kali pertemuan, dari jumlah pertemuan tersebut belum termasuk dengan koordinasi yang dilakukan melalui pertemuan non formal dan bersifat insidentil.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Jalinan Kerjasama yang dibina oleh Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal di Daerah yang dilakukan melalui Forum Muspida dan Kominda maupun melalui forum lainnya jelas sangat memberikan hasil yang bersifat positif bagi Pemerintah Kota Dumai khususnya dan untuk kemajuan Kota Dumai pada umumnya.

Koordinasi tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk saling berbagi (sharing) informasi tentang kondisi aktual yang ada, sebagai wadah untuk mencari solusi guna penyelesaian permasalahan yang terjadi sehingga penyelesaian permasalahan yang ada dapat lebih cepat dan efektif, sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama, menyamakan cara pandang dan persepsi serta saling bersinergi antara pemerintah Daerah dengan aparatur pemerintah pusat di Daerah.

Disamping itu dengan dilakukannya koordinasi maka dapat ditempuh upaya-upaya yang bersifat preventif dalam upaya untuk mencegah timbulnya permasalahan yang diperkirakan akan terjadi. Terciptanya suasana Kota Dumai yang kondusif serta berhasilnya pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan lainya adalah merupakan salah satu hasil dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal yang ada di Daerah.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Keputusan yang dihasilkan dalam setiap koordinasi yang dilakukan akan ditindaklanjuti secara bersama sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban masing-masing Instansi/Unit kerja.

10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pemerintah Kota Dumai menjalin kerjasama dengan semua instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat yang ada di Daerah, baik instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat tersebut tergabung ke dalam Forum Komunikasi yang telah diatur keberadaannya menurut peraturan perundangan maupun yang tidak tergabung kedalam Forum Komunikasi dimaksud. Diantaranya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama atau koordinasi yang baik dengan aparatur Departemen Agama yang ada di Daerah melalui Kantor Departemen Agama Kota Dumai, pihak Imigrasi Kota Dumai, Bea dan cukai, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta berbagai instansi lainnya yang ada di Daerah. Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui rapat-rapat koordinasi dan pertemuan lainnya baik yang bersifat formal maupun informal.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, mendapatkan dukungan dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai.

E. Pembinaan Batas Wilayah

Penegasan Batas wilayah, baik batas antar kecamatan dan antar kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai maupun batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten lainnya (khususnya Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir) tetap menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Dumai, karena penegasan batas wilayah akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai saat terbentuknya Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, belum diikuti dengan adanya penegasan batas wilayah yang jelas dan pasti dilapangan antara Kota Dumai sebagai Daerah Otonom yang baru dengan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Induk. Begitu juga halnya dengan penegasan batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir yang juga merupakan Daerah Otonom pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Disamping itu mengenai penegasan Batas baik antar kelurahan maupun antar kecamatan dilingkungan Pemerintah kota Dumai belum ditetapkan secara pasti dilapangan dalam arti belum dilakukan pemasangan Pilar Batas, namun demikian mulai sejak tahun 2005-2010 upaya penegasan batas tersebut sudah mulai dilaksanakan, yaitu ;

1. **Batas Wilayah Kabupaten/Kota**

   - Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis

     Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melakukan kesepakatan pelaksanaan kegiatan Pelacakan dan Pengukuran, Penegasan dan Pemasangan Pilar batas antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.

   - Batas wilayah kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir

     Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melakukan kesepakatan pelaksanaan kegiatan Pelacakan dan Pengukuran, Penegasan dan Pemasangan Pilar batas antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun perangkat batas daerah di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan aspek kewenangan dalam mengelolaan suatu daerah berbasis keruangan meliputi penataan dan penegasan batas, dalam rangka tertib administrasi kewilayahan.

Tujuan dan sasarannya adalah dengan adanya perangkat batas wilayah yang tegas dalam hal ini adalah melengkapi keberadaan pilar batas Kabupaten/Kota dan pilar batas Kecamatan/Kelurahan dengan melakukan pengukuran posisi, maupun perangkat batas yang lainnya (seperti koordinat batas, berita acara penetapan batas, peta batas dll), dengan harapan dapat dijadikan dasar bagi daerah untuk mengelola dan menata daerahnya dalam frame wilayah batas yang jelas.

a. Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Tahun 2005 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat dan Lurah melakukan kegiatan Pelacakan dan Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan antara Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai

Tahun 2007 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Barat dan Bukit Kapur beserta kelurahan yang ada diwilayah kecamatan tersebut melakukan kegiatan Pelacakan dan Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan antara Kecamatan Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Barat dan Bukit Kapur

Tahun 2008 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Sugai Sembilan beserta Kelurahan melakukan kegiatan Pelacakan Batas Kelurahan Batu Teritib, Basilam Baru dan Kelurahan Tanjung Penyembal Koata Dumai.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pelacakan batas-batas kelurahan dan kecamatan di Kota Dumai, membuat deskripsi batas dan peta administrasi kelurahan dan kecamatan, melakukan koreksi terhadap peta administrasi yang selama ini dipakai serta mengadakan musyawarah kesepakatan batas kelurahan dan kecamatan di Kota Dumai

Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah mendapatkan batas kelurahan dan kecamatan yang definitif, dan akomodatif, menyelesaikan permasalahan batas administrasi baik pada tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan serta menyiapkan dokumen batas yang dapat dipergunakan untuk rencana pemekaran wilayah maupun pembuatan Perda batas antar kelurahan dan kecamatan.

Dari tahun 2011-2017 upaya peneyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai khususnya pada penyelesaian batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis serta Kabupaten Rokan Hilir.

1. Penyelesaian Batas Daerah

   Dalam pembinaan batas wilayah tersebut Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan upaya dalam penyelesaian Batas Daerah sebagai berikut :

   1.1 Batas Wilayah Kabupaten/Kota

   Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011

   Kesepakatan yang telah ditetapkan pada tahun 2006 menimbulkan permasalahan dilapangan, sehingga Pemerintah Kota Dumai meminta peninjauan ulang kembali atas kesepakatan dimaksud dan untuk penyelesaian batas wilayah tersebut kembali pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai. Dan oleh Gubernur sebagai fasilitator dalam penyelesaian batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk dapat menetapkan batas wilayah defeniti antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.

   Tahun 2017

   1. Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Rapat Fasilitasi percepatan penyelesaian Batas Antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Batas Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis sebanyak 3 (tiga) Kali
   2. Pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi kewilayahan melaksanakan Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan

Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau yang bertempat di Ruang Rapat Hotel Ayola, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

a. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah memberikan draft Permendagri dan Peta Batas Daerah Koreksi 1 Tanggal 11-13 April 2017 kepada Pemerintah Kota Dumai dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar dibahas dengan Tim PBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk meminta koreksi Kabupaten/Kota yang berbatasan terhadap :
   - Dasar hukum/peraturan perundang-undangan yang masuk dalam rancangan Permendagri;
   - Koordinat batas (PBU/PABU, TK) dan garis batas antar titik koordinat batas
   - Perubahan-perubahan/koreksi (nama desa/kelurahan, kecamatan, toponimi rupabumi)
b. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengusulkan titik simpul batas sementara antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis yaitu pada P.13 koordinat 01° 28' 27.852" LU dan 101° 19' 1.869" BT dengan pertimbangan :
   - Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengusulkan titik simpul batas berada pada titik P.14 dengan koordinat 01° 29' 45.549" LU dan 101° 20' 7.674" BT.
   - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengusulkan titik simpul batas berada pada titik P.12 dengan koordinat 01° 28' 2.79" LU dan 101° 20' 25.93" BT
c. Terhadap usulan tersebut pada nomor 2 (dua) diatas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai akan menyiapkan data-data pendukung dan dokumen batas untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten yang berbatasan serta melakukan verifikasi terhadap titik simpul tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah provinsi Riau paling lambat 2 (dua) minggu dari rapat hari ini
d. Jika sampai pada waktu yang telah disepakati tersebut tidak ada laporan melalui Pemerintah provinsi Riau, maka Pemerintah Kabupaten bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dianggap sepakat terhadap koordinat titik simpul batas sementara usulan Ditjen Bina Administrasi kewilayahan tersebut pada angka 2 (dua) diatas.
e. Pada rapat ini belum membahas segmen batas antara Kabupaten bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir

f. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai akan menyiapkan data-data pendukung dan dokumen batas untuk saling dipertukarkan dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau paling lambat 2 (dua) minggu dari rapat hari ini. Data-data pendukung dan dokumen batas yang diserahkan bersifat final

g. Waktu verifikasi batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis akan ditentukan oleh Pemerintah provinsi Riau setelah berkoordinasi dengan Dijen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri

3. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangani bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor : 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlakuUntuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangani bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku
4. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tata Batas Antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditanda tangani bersama (Berita Acara Terlampir) Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tata Batas Antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditanda tangani bersama

1.2 Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Dari tahun 2009-2016 kegiatan pelacakan dan penetapan batas Kecamatan dan Kelurahan belum ada ditindak-lanjuti dan terfokus pada kegiatan Batas antar Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017

1. Lokasi kegiatan Survey tapal batas wilayah antar Kecamatan Medang Kampai – Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan – Bukit Kapur yang terletak pada :
   a. Kecamatan Dumai Timur, yang terletak di Kelurahan Tanjung Palas
   b. Kecamatan Medang Kampai, yang terletak di Kelurahan Mundam
   c. Kecamatan Bukit Kapur, yang terletak di Kelurahan Bagan Besar
   d. Kecamatan Dumai Selatan, yang terletak di Kelurahan Bukit Timah dan Kelurahan Mekar Sari
2. Survey Tapal Batas Wilayah Antar Kecamatan Medang Kampai – Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan – Bukit Kapur melibatkan Tim Survey dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Bagian Administrasi pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai serta pihak Kecamatan, Kelurahan dan RT di wilayah perbatasan antar Kecamatan
3. Survey Tapal Batas Wilayah Antar Kecamatan Dumai Selatan dengan Kecamatan Bukit Kapur, lokasi Kelurahan Bagan Besar dengan Kelurahan Bukit Timah, terdapat 8 (delapan) Tugu Batas yang diawali dari Jalan Mekar Sari Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dan berakhir pada Jalan Perwira/Tuanku Tambusai, dapat disampaikan perihal sebagai berikut :
   a. Dari 8 (delapan) tugu batas yang berada di Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dan Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan masih utuh keberadaannya sesuai dengan titik koordinat yang telah disepakati sesuai dengan hasil laporan pelacakan tahun 2007
   b. Terdapat perbedaan peta lampiran berita acara kesepakatan batas daerah antara Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan) dengan Kecamatan Bukit Kapur yang ditanda-tangani oleh camat dan lurah, dengan peta yang ditanda tangani oleh camat dan Kepala Daerah, yaitu pada letak posisi tugu batas 4 (empat).
   c. Dari titik lokasi tugu batas 5 (lima) menuju lokasi titik tugu batas 6 (enam) dengan garis batas zik-zak dalam peta, batas alam dilapangan tidak ditemukan (maya).
   d. Survey Tapal Batas Pada batas daerah antara Kelurahan Mekar sari Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan) dengan Kelurahan Bagan

Besar Kecamatan Bukit Kapur terdapat 4 (empat) Tugu Batas di lokasi Kelurahan Bagan Besar dengan Kelurahan Mekar Sari, yang diawali dari Jalan Muhammad Toha dan berakhir pada parit Hawa menuju anak sungai Masjid, dapat disampaikan bahwa keberadaan dari ke 4 (empat) tugu batas tersebut masih utuh dilapangan sesuai dengan titik koordinat hasil pelacakan 2007 dan batas alam seperti sungai dan parit yang disepakati sebagai batas daerah cukup jelas dilapangan, terkecuali batas jalan yang ditetapkan dari Jalan Muhammad Toha menuju Jalan PT. Gudang Garam dimana jalan tersebut merupakan Jalan Masyarakat untuk mengeluarkan hasil pertanian nya dan jalan tersebut keberadaannya diatas lahan masyarakat serta kondisi di lapangan tidak ditemukan.

e. Survey Tapal Batas antar Kecamatan Dumai Timur dengan Kecamatan Medang Kampai di lokasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai dan Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur terdapat 6 (enam) Tugu Batas, dapat disampaikan sebagai berikut ;

- Tugu Batas 1, 2, 3, 5 dan 6 masih utuh keberadaannya dan sesuai dengan titik koordinat hasil laporan pelacakan tahun 2007,
- Antara tugu batas 3 (tiga) menuju tugu batas 4 (empat) ditemukan tugu batas yang tidak terdapat titik koordinat pada hasil laporan pelacakan 2007, dimana posisi tugu batas tersebut pada titik koordinat 1'39'19'2 N dan 101'28'49'3 E
- Tugu batas 4 (empat) tidak ditemukan dilapangan sesuai dengan titik koordinat hasil pelacakan 2007

1.3 Sengketa Batas Wilayah Kelurahan, Kecamatan, dan Kota

1. Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah Lain

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, bahwa Daerah yang secara administratif dan secara geografis berbatasan secara langsung dengan Wilayah Kota Dumai adalah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum tidak ditemukan adanya permasalahan yang menonjol sebagai akibat belum ditegaskannya batas antara Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir tersebut. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan tidak dipengaruhi oleh permasalahan batas tersebut. Namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan batas ini dikemudian hari

maka Pemerintah Kota Dumai sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka penyelesaian dan penegasan batas wilayah dimaksud.

Adapun Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km) dimana wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242, 098 meter (100, 242 Km) dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan.

1.4 Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Dalam hal masalah batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, sampai saat ini memang belum dilaksanakan penegasan batas dilapangan secara keseluruhan. Selain itu juga belum ditemukan adanya permasalahan yang menonjol yang terjadi sebagai akibat belum adanya penegasan batas dimaksud.

Namun demikian, untuk tertibnya administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan harus dan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai dengan selesai.

1.5. Solusi Yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

1.6. Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah lain

Untuk mewujudkan batas Daerah yang jelas dan pasti baik secara Yuridis maupun fisik dilapangan maka penegasan batas daerah harus dilakukan. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan peruandangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah bahwa Penegasan Batas Daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah. Berkaitan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melalui Keputusan Walikota Dumai. Tim ini akan bekerjasama dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Mekanisme kerja dan tahapan yang dilakukan dalam penegasan Batas Daerah tentunya sesuai dengan yang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas antara lain ; penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta batas.

Dalam hal batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan/ditegaskan melalui pemasangan pilar batas pada tahun 2006 yang lalu. Dari jumlah 100.242,098 meter (100,242 Km) wilayah yang berbatasan telah dapat disepakati penyelesaiannya secara keseluruhan

Mengenai tata batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis juga sudah dilakukan upaya-upaya dalam rangka penegasan batas secara pasti dilapangan bersama pihak Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Sampai pada tahun 2009, sebagian besar wilayah yang berbatasan sudah dapat dilakukan penegasan batas dilapangan. Dari jumlah yang sudah ditetapkan yaitu sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km), telah dapat ditegaskan dilapangan sepanjang lebih kurang 45 km. Sedangkan sebagian kecil lainnya saat ini sedang dalam proses penyelesaian antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau, dan telah direkomendasikan oleh Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk dapat menetapkan batas wilayah defeniti antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis

1.7 Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penegasan batas wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Disamping itu penegasan batas tersebut diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan.

Pada Tahun 2007 sudah dapat diselesaikan atau dilakukan penegasan batas secara pasti dilapangan sebagai berikut :

- Batas Antara Kecamatan Bukit Kapur dengan Kecamatan Dumai Barat sepanjang 12, 20 Km (telah selesai secara keseluruhana/100 %)
- Batas antara Kecamatan Dumai timur dengan Kecamatan Medang Kampai sepanjang 13, 30 Km (telah selesai secara keseluruhana/ 100 %)
- Batas antara Kecamatan Dumai Barat dengan Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 4,50 Km (masih terdapat yang belum diselesaikan sepanjang 12 Km)

Pada Tahun 2008 sudah dilakukan pelacakan batas dilapangan sebagai berikut :

- Batas Antara Kelurahan Batu Teritib dengan Basilam Baru dan Kelurahan Basilam Baru dengan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 40 Km (telah selesai secara keseluruhana/100 %)

Pada Tahun 2017 sudah dilaksanakan survey kembali batas antara Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Timur serta Batas Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur dan menghasilkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 46 Tahun 2017 tentang batas antara Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Timur serta Batas Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

   Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan batas wilayah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

   Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai dibantu oleh 11 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 2 orang (S2), 5 orang (S1), dan SMA sebanyak 4 orang.

   Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 75 dibawah ini:

Tabel 6.12. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Bag. Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2.	Penata Tingkat I	III/D	3
3.	Penata Muda Tingkat I	III/B	1
4.	Penata Muda	III/A	2
5.	Pengatur Tk.I	II/D	1
6.	Pengatur Muda Tk.I	II/B	2
7.	Pengatur Muda	II/A	1
JUMLAH		-	11

F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

   Adapun bencana yang terjadi disepanjang tahun 2016 adalah kejadian kebakaran pada hutan dan lahan.

   Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemadaman secara cepat pada saat terjadinya musibah kebakaran oleh petugas bersama-sama dengan dukungan dari warga masyarakat dimana lokasi kebakaran itu terjadi.

2. Status Bencana

   Kejadian kebakaran yang terjadi pada Hutan dan lahan status kebakarannya bersifat Regional bahkan bersifat nasional.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

   Anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBD Kota Dumai Tahun 2017 dengan rincian ;

4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Jumlah anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 483.063.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 452.641.500,- (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 93,70%
5. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

   Upaya-upaya yang dilakukan oleh Daerah sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain adalah :
6. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi khususnya melakukan upaya antisipasi antara lain; tidak melakukan pembakaran lahan didalam membuka/mengerjakan lahan yang dimiliki, menjaga keamanan dalam melaksanakan aktivitas dilingkungan perumahan seperti mematikan kompor dan peralatan dapur/listrik pada saat tidak dibutuhkan dan lain sebagainya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

   Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara operasional pencegahan dan penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kota Dumai

10. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

    Jumlah karyawan/pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai terdiri dari PNS sebanyak 38 orang, dari jumlah karyawan/pegawai diatas antara lain : Berpendidikan (S2) 2 Orang, Sarjana (S1) 11 orang, DII sebanyak 1 orang dan SLTA 24 orang. Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan pada tabel 76 berikut ini :

Tabel 6.13 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

No	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina	IV.a	1
2	Penata Tingkat I	III.d	4
3	Penata	III.c	2
4	Penata Muda Tk.I	III.b	4
5	Penata Muda	III.a	3
6	Pengatur Tk.I	II.d	2
7	Pengatur	II.c	17
8	Pengatur Muda Tk.I	II.b	4
9	Pengatur Muda	II.a	1
JUMLAH			38

11. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

    Pada Tahun 2011 Pemerintah Kota Dumai membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang mana didalam struktur Organisasinya terdapat UPT Pemadam Kebakaran yang sebelumnya merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Dengan ditetapkannya PERDA tersebut, maka resmilah Seksi Pemadam Kebakaran berpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

12. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirkan terjadi setiap tahunnya adalah Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran Hutan dan Lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan.

G. Pengelolaan Kawasan Khusus

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 butir 19, bahwa yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Propinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional. Fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus dimaksud antara lain untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan Undang-Undang.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yangmenjadi kewenangan Daerah.

Bertolak dari pengertian Kawasan Khusus diatas, untuk Kota Dumai sampai saat ini belum terdapat wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Khusus. Namun demikian upaya untuk menjadikan salah satu wilayah Kota Dumai menjadi Kawasan Khusus saat ini sedang dilakukan, yaitu menjadikan Kawasan Industri Dumai yang bertempat di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI), dimana keinginan Pemerintah Kota Dumai tersebut sudah disampaikan kepada Pihak Propinsi dan Pemerintah Pusat.

H. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Gangguan Yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya).

Pada tahun 2017 tidak terdapat kejadian yang dapat menyebabkan gangguan keamanan ditengah-tengah masyarakat.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara operasional adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dibantu oleh 56 Orang PNS dan 42 orang tenaga kerja sukarela. Dengan kualifikasi pendidikan,3 Orang Magister (S2) 18 orang Sarjana (S1), 1 orang D3, 29 orang SMA , 2 orang SMP, dan 2 orang SD

Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 6.14. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tk. I	IV/B	1
2.	Pembina	IV/A	3
3.	Penata Tingkat I	III/D	8
4.	Penata	III/C	3
5.	Penata Muda Tingkat I	III/B	2
6.	Penata Muda	III/A	5
7.	Pengatur Tingkat I	II/D	3
8.	Pengatur	II/C	17
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	3
10.	Pengatur Muda	II/A	6
11.	Juru Tingkat I	I/D	2
12.	Juru	I/C	2
13.	Juru Muda Tingkat I	I/B	-
14.	Juru Muda	I/A	-
JUMLAH		-	**56**

d. Penanggulangan dan Kendalanya

Kendala yang dialami yaitu berupa terbatasnya dana dan perlengkapan yang dimiliki.

e. Keikutsertaan Aparat Keamanaan Dalam Penanggulangan

Apabila ditemukannya adanya gangguan keamaman biasanyanya aparat keamanan tetap diikutsertakan.

f. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum bersumber dari dana APBD Kota Dumai Tahun 2017 dengan rincian ;

g. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan dialokasikan dana sebesar Rp. 135.700.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 135.700.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau sebesar 100%.



BAB VII PENUTUP

BAB VII
PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2017 disampaikan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan amanah pembangunan dalam upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Akhirnya disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai untuk dapat memberikan masukan atau rekomendasi dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017 ini untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.